LAPORAN KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020

Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat

balitbanghub.dephub.go.id balitbanghub151 @balitbanghub151 @balitbanghub151

LAPORAN KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan ”Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020” dapat diselesaikan.

Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menjabarkan berbagai strategi untuk mencapai fokus peningkatan konektivitas, pelayanan transportasi serta keselamatan dan keamanan transportasi di samping agenda prioritas berupa dukungan pengembangan destinasi pariwisata, penguatan rantai dan kinerja logistik, penguatan SDM, peningkatan fasilitas transportasi pada Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK), serta rencana pemindahan Ibukota Negara baru.

Pada tahun 2020, berbagai isu strategis muncul sebagai dinamika dalam pencapaian tujuan tersebut. Salah satu diantaranya adalah dinamika yang berdampak pada semua bidang akibat adanya pandemi COVID-19, sehingga Badan Litbang Perhubungan bertugas untuk memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Perhubungan.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan atas kinerja pencapaian sasaran strategis guna mewujudkan *good governance and clean government* dan mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang penelitian dan pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyusun Laporan Kinerja tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan tahun awal periode pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 131,75%.

Kami mengapresiasi seluruh pihak baik internal maupun eksternal yang telah berkontribusi dan bekerja sama dalam pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. Kami berharap agar ke depannya kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan layanan agar lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang.

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Dr. Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.S.c
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610323 198811 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Litbang Perhubungan merupakan unit kerja penunjang Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi. Keberhasilan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan didukung oleh unit kerja Eselon II di lingkup Badan Litbang Perhubungan, mitra kerja sama, *stakeholder* terkait dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri dari Sekretariat Badan Litbang Perhubungan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan,serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan atas kinerja pencapaian sasaran strategis dan pengelolaan angggaran guna mewujudkan *good governance and clean government* dan mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang penelitian dan pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyusun Laporan Kinerja tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan tahun awal periode pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Selain itu, mengacu pula pada Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 – 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Tahun 2020 diwarnai dengan berbagai dinamika, diantaranya dinamika yang ditimbulkan akibat adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada semua bidang. Pandemi COVID-19 dapat dihadapi dengan menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru yang memunculkan inovasi dan pembelajaran baru dalam organisasi. Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang penelitian dan

pengembangan perhubungan dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan secara daring seperti pembahasan penelitian dengan Tenaga Ahli dan *Stakeholder*, *workshop*, dan seminar skala nasional maupun internasional. Selain itu, dalam rangka efisiensi dan efektifitas di masa pandemi, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menghimpun data penelitian melalui aplikasi pengembangan *e-survey* yang melibatkan masyarakat sebagai salah satu respondennya. Penelitian disusun dengan melibatkan Tenaga Ahli dari berbagai bidang keilmuan dan *stakeholder* terkait mulai dari perencanaan hingga desiminasi sehingga hasil penelitian terjaga kualitasnya dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pada Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) Sasaran Program dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP) yang berorientasi *outcome*. IKP tersebut yang menjadi dasar analisis capaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020.

A. Pencapaian Kinerja

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MENINGKAT

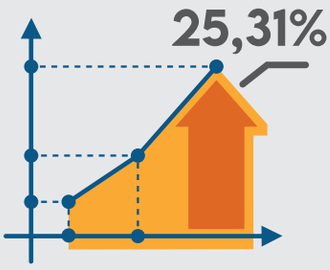

Pengukuran capaian kinerja capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Program (IKP). Dari lima Indikator Kinerja Program (IKP), sebanyak empat IKP telah mencapai target, sedangkan satu IKP masih menunggu hasil penilaian dari KemenpanRB. Rata-rata capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 untuk 4 (empat) IKP sebesar 131,75%. Bila dibandingkan dengan dua IKP yang sama pada tahun 2019 dan 2020, rata-rata capaian kinerja tahun 2020 meningkat sebesar 25,31%.

IKP 1

Initial Outcome:

133,33%

Capaian kinerja pada Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan atau sebanyak 44 rekomendasi pada tahun 2020melebihi target semula yaitu 33 rekomendasi (75%) yang diterima Menteri Perhubungan, Sub Sektor dan *Stakeholder*.

Intermediate Outcome:

142,86%

Capaian kinerja Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2), sebanyak 11 Rekomendasi terealisasi dari total 22 penelitian melebihi target semula yaitu 8 rekomendasi (35%) yang dimanfaatkan Menteri Perhubungan, Sub Sektor dan *Stakeholders*.

IKP 2

Initial Outcome:

133,33%

Capaian pada Target Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan (75%) yang diterima Menteri Perhubungan, Sub Sektor dan *Stakeholder*. Terealisasi 100%.

Intermediate Outcome:

108, 53%

Capaian pada Target Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan (30%) yang dimanfaatkan Menteri Perhubungan, Sub Sektor dan *Stakeholders* dengan terealisasi sebesar 32,56%.

IKP 3

Initial Outcome:

133,33%

Capaian pada Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya yang diterima Menteri Perhubungan, Sub Sektor, dan *Stakeholders* . Sebanyak 33 kajian terealisasi.

Intermediate Outcome:

145,83%

Capaian pada Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya sebanyak 7 kajian terealisasi dari total 16 kajian yang dimanfaatkan Menteri Perhubungan, Sub Sektor dan *Stakeholders*.

IKP 4

125%

Capaian pada Target Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi sebesar 80% dapat terealisasi 100% (sejumlah 373 kegiatan).

IKP 5

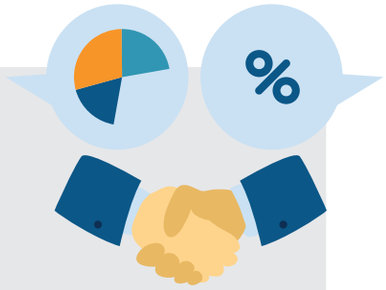

MENUNGGU HASIL PENILAIAN KEMENPANRB

Target Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan sebesar 78. Penilaian Mandiri telah dilakukan di Lingkungan Kemneterian Perhubungan dan Indeks RB masih menunggu penilaian.

Capaian kinerja pada *Costumer Perspective* menunjukkan capaian kinerja baik, dengan nilai sebesar **131,75%**

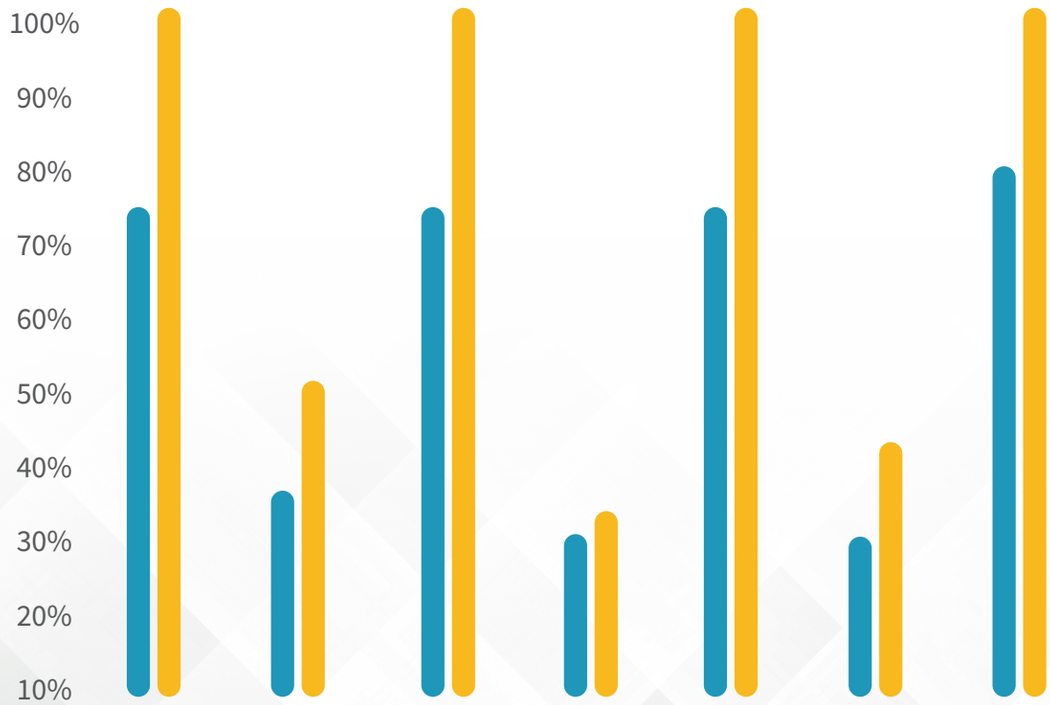

	IKP1 (Initial Outcome)	IKP1 (Intermediate Outcome)	IKP2 (Initial Outcome)	IKP2 (Intermediate Outcome)	IKP3 (Initial Outcome)	IKP3 (Intermediate Outcome)	IKP4
TARGET	75%	35%	75%	30%	75%	30%	80%
REALISASI	100%	50%	100%	32,56%	100%	43,75%	100%

Gambar 1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020

B. Kinerja Anggaran

PAGU AWAL

99,43%

RENCANA DAYA SERAP AKHIR TAHUN

Anggaran Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2020 berdasarkan pagu awal adalah sebesar Rp 206.644.647.000.
Selain berdampak pada proses pencapaian kinerja program, pandemi COVID-19 berdampak pula pada perubahan komposisi anggaran tahun 2020 di lingkungan Badan Litbang Perhubungan sebanyak dua kali.

SEPTEMBER 2020

REVISI KE II
RP 157.347.077.000

Pada bulan September 2020 dilakukan Revisi Anggaran sebesar Rp 6.313.667.000 dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sehingga Anggaran Tahun 2020 berdasarkan pagu revisi kedua sebesa Rp 157.347.077.000.

april 2020

REVISI KE I
RP 163.660.744.000

Pada bulan April 2020, terdapat efisiensi sebesar Rp 42.963.903.000 untuk Belanja Barang dan Belanja Modal sehingga Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 berdasarkan pagu revisi sebesar Rp 163.660.744.000.

REalisasi 2020

Dari pagu anggaran terakhir Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 155.490.975.066,00.

98,82%

DAYA SERAP TAHUN ANGGARAN 2020

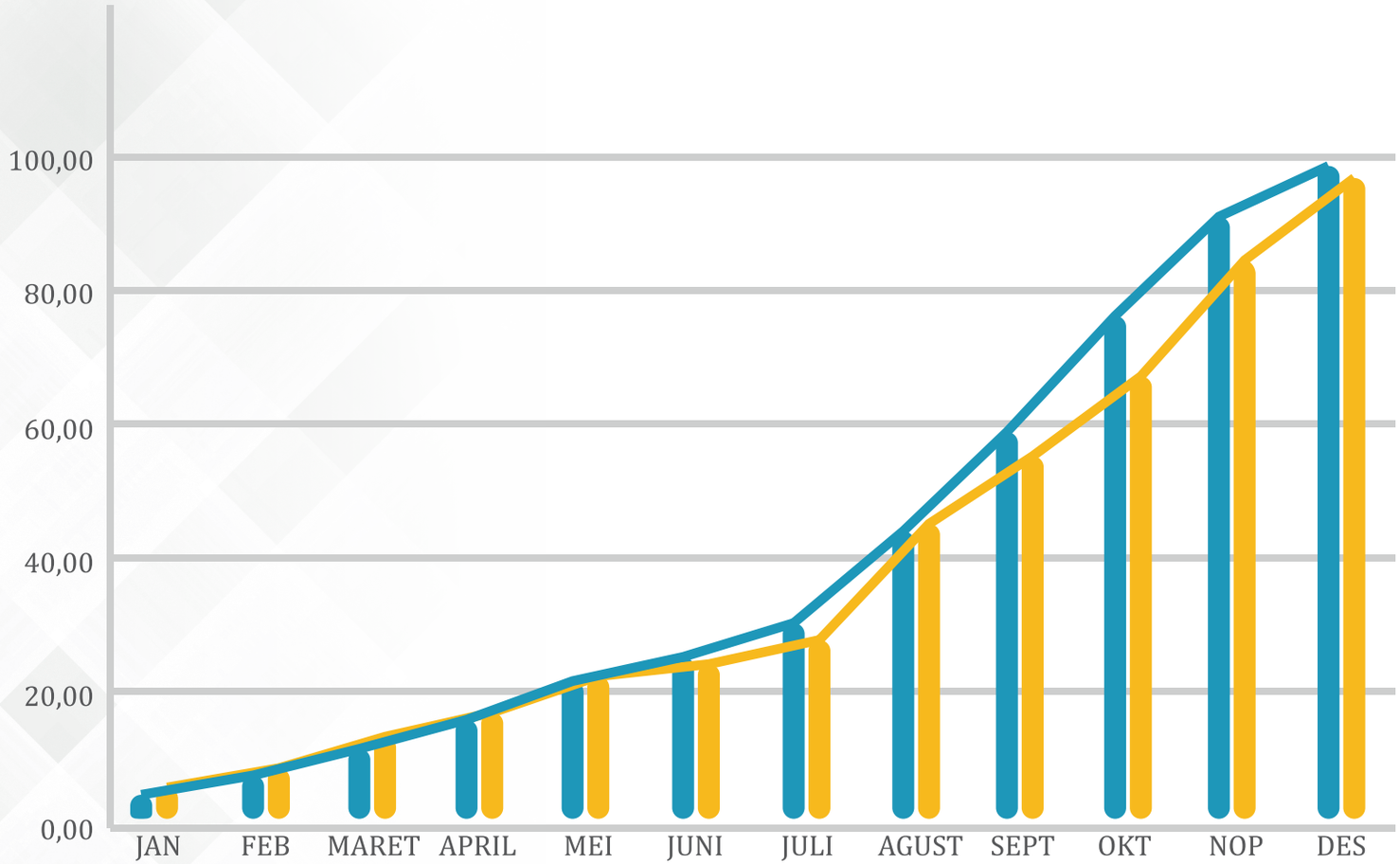

	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES
PROGNOSA 2020	1, 95	6,63	10,66	15,94	20,54	24,48	34,58	44,35	59,67	75,36	90,49	99,43
REALISASI 2020	2,37	7,49	12,59	16,59	20,86	24,37	30,70	44,62	55,11	67,74	83,29	98,82

Gambar 2 Grafik Daya Serap Badan Litbang Tahun 2020

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Badan Litbang Perhubungan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKSASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	2
TUGAS DAN FUNGSI	3
SUMBER DAYA MANUSIA	4
POTENSI DAN PERMASALAHAN	10
POTENSI	10
PERMASALAHAN	13
ISU DAN LINGKUNGAN STRATEGIS	14
ISU STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	14
ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	16
SISTEMATIKA LAPORAN	20
BAB II PERENCANAAN KERJA	23
RENCANA STRATEGIS BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2020-2024	24
VISI DAN MISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	25
VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	26
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	27
VISI DAN MISI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	30
TUJUAN DAN SASARAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024	31
PERJANJIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	42
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	42
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 TERHADAP TARGET KINERJA TAHUN 2020	47
ANALISIS KETERCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2020	49
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020 TERHADAP CAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2019	71
PERBANDINGAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2020 TERHADAP SASARAN PROGRAM TAHUN 2015-2020	74
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 TERHADAP TARGET KINERJA TAHUN 2020	87
ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	89
ANALISIS CAPAIAN KELUARAN	89
ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN	92
ANALISIS EFISIENSI	93
ANALISIS KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI	94
PENILAIAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN TINGKAT UNIT ESELON I	95
CAPAIAN KEBERHASILAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN LAINNYA	97
CAPAIAN DARI EKTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	97
CAPAIAN DARI INTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	99
CAPAIAN KEGIATAN LINGKUP INTERNASIONAL	100

CAPAIAN KEGIATAN LINGKUP NASIONAL	110
PENANDATANGANAN KERJA SAMA PENELITIAN	114
CAPAIAN INTERNAL BADAN LITBANG PERHUBUNGAN	117
PENELITIAN ISU STRATEGIS	117
DAFTAR PENELITIAN YANG BERSERTIFIKASI HAKI	120
FORUM ILMIAH	125
LOMBA INTERNAL BALITBANGHUB	126
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM	128
TALENT PROFILLING	129
ASSESMENT JABATAN	129
LOMBA KEBERSIHAN RUANG KERJA	129
LOMBA *COVER* LAGU "INDONESIA PUSAKA"	130
KEGIATAN BERSAMA PERAWATAN DAN PERAPIHAN GEDUNG KANTOR	131
SOSIALISASI BAHAYA COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU	132
SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DAN *RAPID TEST*	132
PENYEMPROTAN DISINFEKTAN	133
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK TRANSFORMASI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN MENJADI BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI (BKT)	134
PENYUSUNAN *MASTERPLAN* SISTEM TRANSPORTASI IBU KOTA NEGARA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024	137
PENYUSUNAN *ROADMAP* KERJA SAMA PENELITIAN DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024	139
EVALUASI KEMANFAATAN USULAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN TRANSPORTASI	143
ANALISIS DAN EVALUASI PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA IDUL FITRI TAHUN 2020 (1441 H) DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19	146
ANALISA DAN EVALUASI PENGENDALIAN ANGKUTAN NATARU TAHUN 2020/2021	151
ACARA SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN	154
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	155
ALOKASI TOTAL ANGGARAN TAHUN 2020	156
ANALISIS DANA YANG TIDAK TERSERAP TAHUN 2020	158
CAPAIAN KINERJA ANGGARAN BERDASARKAN IKP TAHUN 2020	160
BAB IV PENUTUP	**165**
KESIMPULAN	166
PENCAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020	166
PENCAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2019	168
PENCAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2015–2020	168
PRESTASI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020	168
SARAN DAN TINDAK LANJUT	169
PERENCANAAN KINERJA	169
PENGUKURAN KINERJA	170
PELAPORAN KINERJA	170
EVALUASI KINERJA	170
CAPAIAN KINERJA	170
LAMPIRAN 1	172
LAMPIRAN 2	176
LAMPIRAN 3	181
LAMPIRAN 4	194
LAMPIRAN 5	236
LAMPIRAN 6	241

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Pegawai Tahun 2015-2020 4
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 5
Tabel 1. 3 Perkembangan Jumlah Peneliti Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2015-2020 6
Tabel 1. 4 Komposisi Peneliti Berdasarkan Jabatan dan Bidang Penelitian Tahun 2020 7
Tabel 1. 5 Catatan Pemberian *Reward* kepada Pegawai di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 9
Tabel 1. 6 Catatan Pemberian *Punishment* kepada Pegawai di lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 10
Tabel 1. 7 Identifikasi Ancaman Lingkungan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 19
Tabel 2. 1 Target dan Indikator Kinerja dalam Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 35
Tabel 3. 1 Penelitian berdasarkan Tema Fokus dan Agenda Utama Kementerian Perhubungan 45
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 47
Tabel 3. 3 Rekapitulasi Rekomendasi Kebijakan Menurut Bidang Penelitian 50
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 1 (*Initial Outcome*) Tahun 2020 51
Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 1 (*Intermediate Outcome*) Tahun 2020 53
Tabel 3. 6 Rekapitulasi Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Menurut Bidang Penelitian 55
Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 2 (*Initial Outcome*) Tahun 2020 56
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 2 (*Intermediate Outcome*) Tahun 2020 58
Tabel 3. 9 Rekapitulasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya Menurut Bidang Penelitian 59
Tabel 3. 10 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 3 (*Initial Outcome*) Tahun 2020 61
Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 3 (*Intermediate Outcome*) Tahun 2020 63
Tabel 3. 12 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 4 Tahun 2020 65
Tabel 3. 13 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 4 Tahun 2020 66
Tabel 3. 14 Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dan 2019 69
Tabel 3. 15 Penilaian Mandiri RB Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 70
Tabel 3. 16 Perbandingan Komponen Pengungkit Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019 dan Tahun 2020 . 70

Tabel 3. 17 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 5 Tahun 2020 71
Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 73
Tabel 3. 19 Perbandingan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 75
Tabel 3. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015-2020 Berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2015-2019 dan Renstra Tahun 2020-2024 84
Tabel 3. 21 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2020 Berdasarkan Dokumen Reviu Renstra Tahun 2015-2019 Yang Direviu Tahun 2019 dan Renstra 2020 86
Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 90
Tabel 3. 23 Tingkat Penyerapan Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 per Bulan 92
Tabel 3. 24 Perhitungan Analisis Efisiensi 93
Tabel 3. 25 Rencana Penarikan Dana Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 per Bulan 94
Tabel 3. 26 Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran per Bulan Tahun 2020 95
Tabel 3. 27 Narasumber Webinar 102
Tabel 3. 28 Narasumber Webinar 107
Tabel 3. 29 Tema Webinar 112
Tabel 3. 30 Daftar Penelitian Bersertifikasi HAKI Tahun 2020 122
Tabel 3. 31 Daftar Pemenang Temu Karya Penelitian Tahun 2020 125
Tabel 3. 32 Rincian Peserta Lomba Kreatifitas Pegawai Badan Litbang Perhubungan 126
Tabel 3. 33 Daftar Pemenang Lomba Kreatifitas Pegawai Badan Litbang Perhubungan 126
Tabel 3. 34 Daftar Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 128
Tabel 3. 35 Pememang Kebersihan Ruang Kerja di Lingkungan Badan litbang Perhubungan 130
Tabel 3. 36 Kerangka Kerja Logis Badan Kebijakan Transportasi 137
Tabel 3. 37 Rencana Identifikasi Kerjasama Penelitian di Lingkungan Balitbanghub 140
Tabel 3. 38 Rencana Topik Kerja Sama Penelitan di Lingkungan Balitbanghub 141
Tabel 3. 39 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Selama Masa Idul Fitri Tahun 2020 (1441 H) 148
Tabel 3. 40 Perkembangan Pagu Anggaran Badan Litbang Perhubungan 2015-2020 155
Tabel 3. 41 Pagu Anggaran Perjenis Belanja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 157
Tabel 3. 42 Pagu Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 158
Tabel 3. 43 Capaian Daya Serap Per-Jenis Belanja Tahun 2020 158
Tabel 3. 44 Capaian Daya Serap Per-Program Kegiatan Tahun 2020 159
Tabel 3. 45 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP Tahun 2020 160
Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 166
Tabel 4. 2 Pencapaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2020 168

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Litbang Perhubungan 3
Gambar 1. 2 Komposisi Jumlah Pegawai Tahun 2020 4
Gambar 1. 3 Perkembangan Jumlah Peneliti Badan Litbang Tahun 2015-2020 5
Gambar 1. 4 Komposisi Peneliti Berdasarkan Bidang Kepakaran Tahun 2020 7
Gambar 1. 5 Perkembangan Peneliti Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2015-2020 8
Gambar 2. 1 Peta Strategis Kementerian Perhubungan 29
Gambar 2. 2 Peta Strategis Badan Litbang Perhubungan 2020 – 2024 33
Gambar 2. 3 Cascading Lintas Unit Eselon 1 sebagai Proses Mirroring dengan Sub Sektor Kementerian Perhubungan 34
Gambar 3. 1 Penelitian Tahun 2020 yang Mendukung IKN 43
Gambar 3. 2 Pembagian *Cluster* Penelitian Terkait Isu COVID-19 Pada Sektor Transportasi 44
Gambar 3. 3 Persentase Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Tahun 2020 45
Gambar 3. 4 Mitra Kerja Sama Penelitian Yang Terjalin Pada Tahun 2020 45
Gambar 3. 5 Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Bidang Penelitian 49
Gambar 3. 6 Komposisi *Stakeholder* Penerima Rekomendasi Kebijakan 50
Gambar 3. 7 Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Berdasarkan Bidang Penelitian 54
Gambar 3. 8 Komposisi *Stakeholder* Penerima Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis 55
Gambar 3. 9 Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya Berdasarkan Bidang Penelitian 59
Gambar 3. 10 Komposisi *Stakeholder* Penerima Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi 60
Gambar 3. 11 Area Perubahan RB 69
Gambar 3. 12 Perbandingan Capaian Kinerja IKP 1,2,3 (*Initital Outcome*) Terhadap Target Kinerja Tahun 2019-2020 71
Gambar 3. 13 Perbandingan Capaian Kinerja IKP 2 Terhadap Target Kinerja Tahun 2019 – 2020 72
Gambar 3. 14 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 dengan Tahun 2019 72
Gambar 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 1, 2, 3 (*Initial Outcome*) Terhadap Target Kinerja Tahun 2017-2020 86
Gambar 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 1 dan IKP 3 (*Intermediate Outcome*) Terhadap Target Kinerja Tahun 2017-2020 87
Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 88
Gambar 3. 18 Penganugerahan Penghargaan dari Kemenpan-RB kepada Sekretariat Badan Litbang Perhubungan 97
Gambar 3. 19 Penyerahan Sertifikat ISO, Jakarta, 29 Desember 2020 99
Gambar 3. 20 Penganugerahan Penghargaan dari Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan kepada Badan Litbang Perhubungan 100

Gambar 3. 21 Ibu Kepala Badan Litbang Perhubungan sebagai Pembicara dalam Rangkaian Acara IETD 2020 101
Gambar 3. 22 Pelaksanaan Seminar Internasional I Tahun 2020 106
Gambar 3. 23 Pelaksanaan Seminar Internasional II Tahun 2020 109
Gambar 3. 24 Pelaksanaan Rakornis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 110
Gambar 3. 25 Hasil Karya Peringkat 1 Lomba Digital Poster dari Tiap Sub Tema 113
Gambar 3. 26 Webinar Milenial I Tahun 2020 114
Gambar 3. 27 Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan *Implementing Arrangement* 115
Gambar 3. 28 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Merespon Dampak Pandemi COVID-19 115
Gambar 3. 29 Penandatanganan Nota Kesepahaman Badan Litbang Perhubungan 116
Gambar 3. 30 Sertifikat HAKI Penelitian di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan 121
Gambar 3. 31 Para Pemenang Peringkat I per Kategori Temu Karya Tahun 2020 125
Gambar 3. 32 Penilaian Lomba Kebersihan di Ruang Kerja dan Ruang Rapat Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan 130
Gambar 3. 33 Pemenang *Cover* Lagu “Indonesia Pusaka” 131
Gambar 3. 34 Kegiatan Bersama Perawatan dan Perapihan Gedung kantor 131
Gambar 3. 35 Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Masa Pandemi COVID-19 132
Gambar 3. 36 Pelaksanaan Sosialisasi dan *Rapid Test* di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, 5 November 2020 133
Gambar 3. 37 Penyemprotan Disinfektan Bagian Perencanaan dan Kerjasama Setbadan 134
Gambar 3. 38 Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Transformasi Badan Litbang Perhubungan Menjadi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) 135
Gambar 3. 39 Konsep Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi 136
Gambar 3. 40 Konsep Urban Transport pada Kawasan IKN 138
Gambar 3. 41 Laporan Akhir Penyusunan *Roadmap* Kerja Sama di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 139
Gambar 3. 42 Buku Panduan Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi TA. 2021 di Lingkungan Kemhub 144
Gambar 3. 43 Perpanjangan Masa berlaku PM 25/2020 melalui KM 116/2020 dan Pengendalian Transportasi dengan kriteria Khusus SE Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 No. SE 04 Tahun 2020 147
Gambar 3. 44 *Monitoring* Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19 152
Gambar 3. 45 Laporan Anev Pengendalian Angkutan Nataru Tahun 2020/2021 152
Gambar 3. 46 Penyerahan Hasil Penelitian di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 154
Gambar 3. 47 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2015 – 2020 155
Gambar 3. 48 Perkembangan Daya Serap Tahun 2015 – 2020 156
Gambar 3. 49 Perubahan Komposisi Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 157

BAB 1
PENDAHULUAN

PELARANGAN MUDIK

Sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawau BUMN, dilarang mudik. Untuk masyarakat, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Transportasi umum dan kendaraan pribadi akan dibatasi dengan pembatasan kapasitas angkutan mobil dan motor.

Bapak Presiden RI Joko Widodo

Berdasarkan Survei *Online* Potensi Pemudik Angkutan Idul Fitri 1441 H
Badan Litbang Perhubungan

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kerberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun awal periode pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Selain itu, mengacu pula pada Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 – 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menjabarkan berbagai strategi untuk mencapai fokus peningkatan konektivitas, pelayanan transportasi serta keselamatan dan keamanan transportasi di samping agenda prioritas berupa dukungan pengembangan destinasi pariwisata, penguatan rantai dan kinerja logistik, penguatan SDM, peningkatan fasilitas transportasi pada Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK), serta rencana pemindahan Ibukota Negara baru.

Tentunya berbagai isu strategis muncul sebagai dinamika dalam pencapaian tujuan tersebut, sehingga Badan Litbang Perhubungan bertugas untuk memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Perhubungan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka semua satuan kerja di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, pimpinan dan staf harus melaksanakan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perhubungan secara profesional, akuntabel, integritas, dan inovatif serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja (*performance improvement*).

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya maka akan dilakukan evaluasi terhadap capaian target dan pelaksanaan anggaran dalam Renstra setiap tahunnya dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis internal mencakup: kebutuhan penguatan peran Badan Litbang Perhubungan, tuntutan penguatan sumber daya internal, dan peningkatan dukungan manajemen tata kelola Badan Litbang Perhubungan.

TUGAS DAN FUNGSI

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Badan Litbang Perhubungan memiliki tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Perhubungan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan trasnportasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Apabila digambarkan maka struktur organisasi Badan Litbang Perhubungan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Litbang Perhubungan

Pada masing-masing Pusat Litbang, terdapat kelompok jabatan fungsional peneliti sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, yaitu peneliti bidang transportasi antarmoda, transportasi jalan, transportasi perkeretaapian, transportasi laut, transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta transportasi udara.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Badan Litbang Perhubungan. Jumlah SDM Badan Litbang Perhubungan sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2020 tercatat sebanyak 169 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

A. Komposisi Pegawai

Jumlah pegawai Badan Litbang Perhubungan mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rinci, perkembangan jumlah pegawai lima tahun terakhir dan komposisi pegawai dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini:

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Pegawai Tahun 2015-2020

NO	UNIT KERJA	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	83	58	54	52	49	52
2.	Puslitbang Transportasi Antarmoda	33	25	26	27	26	25
3.	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	54	42	43	39	37	38
4.	Puslitbang Transportasi Laut Sungai, Danau dan Penyeberangan	33	30	32	30	31	29
5.	Puslitbang Transportasi Udara	43	35	35	28	25	25
	JUMLAH	**246**	**190**	**190**	**176**	**168**	**169**

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Badan Litbang Perhubungan

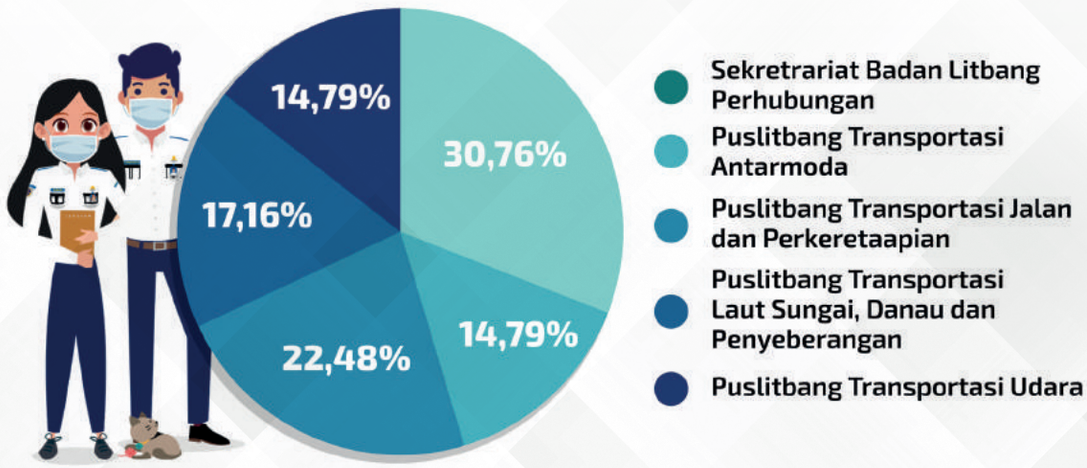

Gambar 1. 2 Komposisi Jumlah Pegawai Tahun 2020

Berdasarkan data grafik di atas, terlihat jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai pada Sekretariat Badan Litbang Perhubungan sebesar 30,76% atau sebanyak 52 pegawai sedangkan jumlah pegawai paling sedikit pada Puslitbang Transportasi Udara dan Puslitbang Transportasi Antarmoda, yaitu sebanyak 25 pegawai atau sekitar 14,79% dari total jumlah pegawai Badan Litbang Perhubungan. Sementara untuk unit kerja lainnya, Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian berada di posisi kedua terbanyak dengan jumlah pegawai, yaitu 38 atau 22,48%, selanjutnya posisi ketiga terbanyak adalah Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebanyak 29 pegawai atau 17,16%.

B. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, yaitu S3 sebanyak 6 orang, S2 sebanyak 82 orang, D IV/S1 sebanyak 49 orang, D III sebanyak 13 orang, D1 sebanyak 6 orang, dan SLTA sebanyak 13 orang. Secara rinci komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menurut unit kerja masing-masing dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	DIV/ S1	D III	D I	SLTA	
1.	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	1	17	18	6	2	8	52
2.	Puslitbang Transportasi Antarmoda	0	15	6	2	1	1	25
3	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	0	22	12	1	1	2	38
4.	Puslitbang Transportasi Laut Sungai, Danau dan Penyeberangan	3	17	4	2	1	2	29
5.	Puslitbang Transportasi Udara	2	11	9	2	1	0	25
	JUMLAH	**6**	**82**	**49**	**13**	**6**	**13**	**169**

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Badan Litbang Perhubungan, 2019

C. Perkembangan Jumlah Tenaga Fungsional Peneliti

Dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan kegiatan penelitian maka sebagian besar pegawai Badan Litbang Perhubungan memiliki jabatan fungsional peneliti. Pertumbuhan jumlah peneliti Badan Litbang Perhubungan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

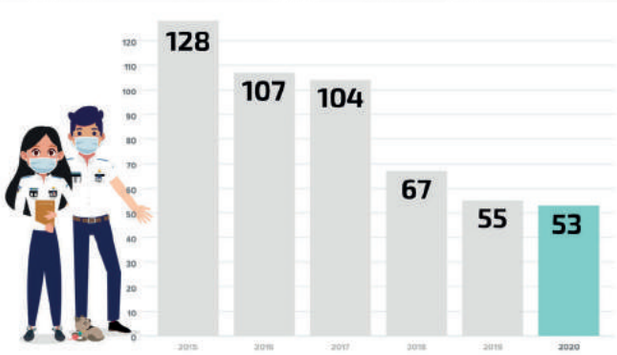

Gambar 1. 3 Perkembangan Jumlah Peneliti Badan Litbang Tahun 2015-2020

Berdasarkan Gambar diatas terlihat tren perkembangan jumlah peneliti cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Penurunan jumlah peneliti tertinggi terjadi di Tahun 2018, yaitu sebanyak 37 orang dari semula berjumlah 104 orang berkurang menjadi 67 orang. Selanjutnya jumlah peneliti kembali berkurang dari 67 orang menjadi 55 pada tahun 2019 dan 53 orang pada tahun 2020. Penurunan jumlah peneliti ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1) Sebagian peneliti Badan Litbang Perhubungan mutasi ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai Unit Kerja Eselon I yang baru terbentuk pada tahun 2015 di Kementerian Perhubungan;
2) Adanya aturan bahwa peneliti tidak dapat lagi merangkap pada waktu yang sama antara jabatan struktural dengan fungsional, dimana sebagian peneliti telah ditugaskan untuk duduk dalam jabatan struktural;
3) Adanya moratorium ASN/ Penerimaan ASN yang tertunda;
4) Adanya mutasi dan rotasi/ *tour off duty* lintas Eselon I, dimana sebagian peneliti ditugaskan di unit Eselon I lainnya sebagai struktural atau dosen;
5) Adanya jumlah peneliti yang memasuki usia pensiun.

Peneliti Badan Litbang Perhubungan terdistribusi ke dalam empat jenjang peneliti, yaitu Peneliti Utama, Peneliti Madya, Peneliti Muda dan Peneliti Pertama. Pada Tahun 2019 hingga 2020 Badan Litbang Perhubungan memiliki tiga Ahli Peneliti Utama (APU). Perkembangan jumlah peneliti Badan Litbang Perhubungan berdasarkan jenjang jabatan selama kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. 3 Perkembangan Jumlah Peneliti Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2015-2020

NO	JENJANG JABATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peneliti Utama	1	1	0	3	3	3
2.	Peneliti Madya	41	37	35	23	16	16
3.	Peneliti Muda	31	28	29	16	17	18
4.	Peneliti Pertama	55	41	40	25	19	16
	JUMLAH	**128**	**107**	**104**	**67**	**55**	**53**

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Badan Litbang Perhubungan, 2020

D. Berdasarkan Bidang Penelitian

Para peneliti Badan Litbang Perhubungan terbagi ke dalam lima bidang penelitian, yaitu penelitian transportasi antarmoda, transportasi jalan, transportasi rel, transportasi air, dan transportasi udara. Secara rinci komposisi peneliti berdasarkan jabatan dan bidang penelitian pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. 4 Komposisi Peneliti Berdasarkan Jabatan dan Bidang Penelitian Tahun 2020

NO	JABATAN	BIDANG PENELITIAN					JUMLAH
		TRANSP. ANTARMODA	TRANSP. JALAN	TRANSP. REL	TRANSP. AIR	TRANSP. UDARA	
1.	Peneliti Utama	0	0	0	3	0	3
2.	Peneliti Madya	6	5	1	2	2	16
3.	Peneliti Muda	3	9	0	1	5	18
4.	Peneliti Pertama	2	6	1	5	2	16
	JUMLAH	**11**	**20**	**2**	**11**	**9**	**53**

Sumber: Bagian Kepegawaian dan tata Usaha Badan Litbang Perhubungan, 2020

Berdasarkan kepakaran para peneliti Badan Litbang Perhubungan juga terbagi ke dalam lima bidang kepakaran sebagaimana telah ditetapkan oleh LIPI, yaitu transportasi antarmoda, transportasi jalan, transportasi rel, transportasi air dan transportasi udara. Komposisi peneliti berdasarkan bidang kepakaran dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

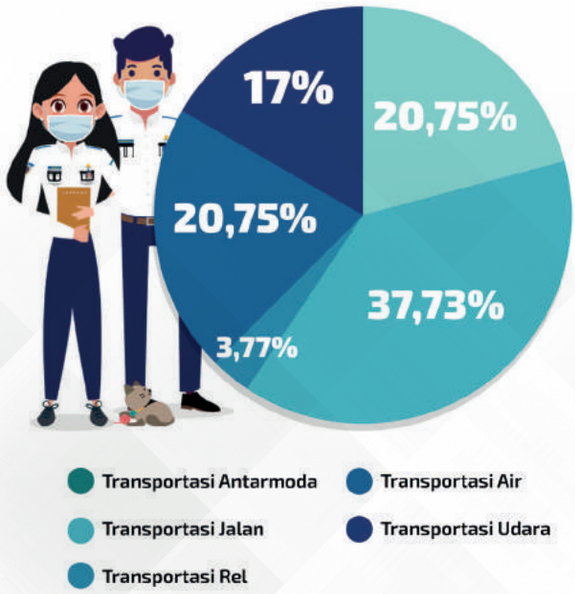

Gambar 1. 4 Komposisi Peneliti Berdasarkan Bidang Kepakaran Tahun 2020

Peneliti di lingkungan Badan Litbang Perhubungan didominasi dengan bidang kepakaran transportasi jalan sebesar 37,73%, transportasi air dan transportasi antarmoda sebanyak 20,75%, transportasi udara 17%, dan transportasi rel sebanyak 3,77%.

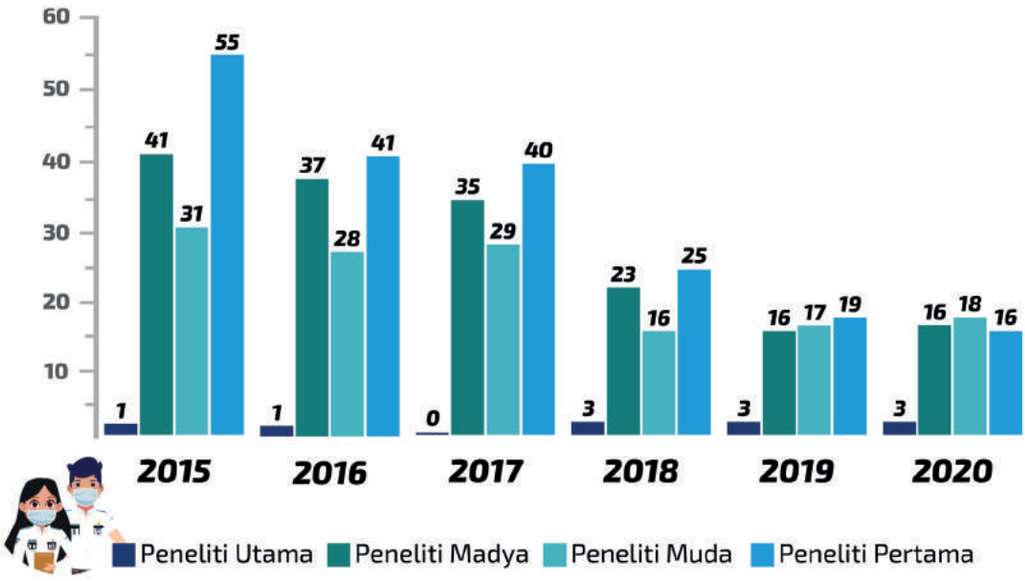

Gambar 1. 5 Perkembangan Peneliti Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2015-2020

E. Penghargaan dan Hukuman

Surat Keputusan Kepala badan Litbang Perhubungan Nomor 59 tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Pedoman ini disusun dalam rangka meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia guna mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, selain proses rekruitmen yang baik dan benar dan program pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk pengembangan kapasitas pegawai, juga diperlukan sistem pemberian *reward and punishment* yang tepat dan efektif atas kinerja pegawai. Selama tahun 2020 *reward and punishment* yang telah dilaksanakan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha adalah sebagai berikut:

1. Pemberian *reward* di lingkungan Badan Litbang Perhubungan tahun 2020 berupa pemberian *reward* dalam bentuk sertifikat penghargaan dari Kepala Badan Litbang Perhubungan dengan beberapa kriteria sebagai berikut:
   a. Pegawai Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka memperingati Hari Perhubngan Nasional ke-49 dengan kriteria mendapatkan penilaian tertinggi dari tim penilai/juri yang terbagi dalam Juara I, II dan III;
   b. Peneliti Terbaik di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan dengan kriteria mendapatkan penilaian tertinggi dari tim penilai/juri yang terbagi dalam Juara I, II dan III;
   c. Lomba Kreatifitas Pegawai dengan Tema "Peningkatan Kinerja Badan Litbang Perhubungan Selama WFH pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Menyongsong Tatanan Kebiasaan Baru yang Sehat, Produktif, dan Aman" dari Tim Penilai/ Juri yang terbagi dalam Juara I s.d. V;
   d. Lomba *Cover* Lagu Kebangsaan dan Lomba Kebersihan di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 5 Catatan Pemberian *Reward* kepada Pegawai di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020

NO	JENIS PENGHARGAAN	PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	KETERANGAN
1.	Pegawai Terbaik	Pegawai Terbaik Peringkat ke-3 di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Sertifikat Penghargaan Menteri Perhubungan	Peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-
2.	Peneliti Terbaik	Peneliti Terbaik Juara I, II dan III untuk kategori Peneliti Pertama, Peneliti Muda, dan Peneliti Madya	Sertifikat Penghargaan Kepala Badan Litbang Perhubungan	Temu Karya Peneliti Tahun 2020 (02 Desember 2020 – Secara Virtual)
3.	Lomba Kreatifitas Pegawai Badan Litbang Perhubungan	Pegawai dengan Karya Tulis Terbaik Peringkat I s.d. V untuk kategori Struktural Eselon IV, Peneliti Madya, Penelti Muda, Peneliti Pertama, Pelaksana dan PPNPN	Sertifikat Penghargaan Kepala Badan Litbang Perhubungan	Lima nominasi terbaik dilaporkan ke Menhub
4.	Lomba *Cover* Lagu Kebangsaaan di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan	Juara I: Setbadan Litbang Perhubungan	Sertifikat Penghargaan Kepala Badan Litbang Perhubungan	Peringatan HUT RI ke-75
5.	Lomba Kebersihan di Lingkungan Badan Litbang Perhubngan	Juara 1: Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Sertifikat Penghargaan Kepala Badan Litbang Perhubungan	Peringatan HUT RI ke-75

Sumber: Laporan Unit Kepatuhan Internal Tahun 2020

2. Pemberian *punishment* dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Melakukan pelanggaran disiplin jam kerja terkait ketidakhadiran dan keterlambatan/ pulang cepat;
   b. Tidak hadir pada kegiatan kesiapan Apel Pagi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali tanpa keterangan yang jelas (alpa/mangkir);
   c. Melakukan tindakan/pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2020 dan PM Nomor 90 Tahun 2014.
   d. Pemotongan tunjangan kinerja kepada pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berdasarkan kriteria penilaian unsur kinerja meliputi prosentase absensi pegawai dan penilaian laporan bulanan terhadap kinerja pegawai sesuai dengan aplikasi AP2KP sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2018 atas perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 1. 6 Catatan Pemberian *Punishment* kepada Pegawai di lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020

NO	JENIS *PUNISHMENT*	BENTUK PELANGGARAN	DASAR	KETERANGAN
1.	Surat Peringatan oleh Atasan Langsung	Pelanggaran disiplin jam kerja dikarenakan tidak hadir tanpa alasan jelas (alpa/mangkir).	PP 53/2020 PM 90/2014	-

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur dan pelayanan transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan berbagai sumber daya, termasuk hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan aplikatif. Badan Litbang Perhubungan sebagai unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan tentunya memiliki potensi dan permasalahan yang harus dipetakan guna optimasi peran Badan Litbang Perhubungan ke kurun waktu 5 tahun mendatang.

POTENSI

Penekanan pentingnya rekomendasi kebijakan transportasi berbasis pada hasil penelitian merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan pencapaian sasaran strategis dari meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan dan regulasi pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang telah menjadi salah satu pilar kebijakan Kementerian Perhubungan. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi perlu didukung oleh hasil-hasil penelitian yang prosesnya dilakukan pada tahap sebelumnya oleh para Peneliti Badan Litbang Perhubungan beserta segenap mitra strategisnya baik internal maupun eksternal.

Informasi hasil penelitian yang diolah melalui proses analisis data dan informasi akurat akan membantu memberikan rumusan kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak pengambil kebijakan sektor transportasi. Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui hubungan tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon 1 Badan Litbang Perhubungan dengan para penggunanya, mulai dari Menteri Perhubungan, Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama pada jajaran Ditjen Teknis, dan para Kepala Daerah yang memerlukan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan di daerah, yang secara akumulatif akan memberikan hasil optimal capaian kinerja Kementerian Perhubungan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai unit kerja yang bertugas untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi memiliki potensi untuk dapat menjadi pusat unggulan penelitian kebijakan transportasi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya secara efektif dan efisien. Termasuk didalamnya adalah merumuskan langkah-langkah secara terarah

membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran program yang menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam setiap perencanaannya.

Terdapat beberapa potensi yang dapat menjadi *tools* (alat bantu) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Litbang Perhubungan Kementerian Perhubungan. Potensi tersebut mencerminkan peluang-peluang pemanfaatan hasil penelitian dan kerjasama yang dapat dilakukan untuk mendukung pemenuhan target kinerja layanan transportasi secara keseluruhan. Catatan potensi yang terdapat pada setiap unit kerja Badan Litbang Perhubungan dapat dikelompokkan sebagaimana berikut:

A. Koordinator atau pusat penelitian dan pengembangan kebijakan transportasi yang kemanfaatannya memiliki nilai strategis

Melalui posisi penugasan pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, maka Badan Litbang Perhubungan dalam menjalankan program dan kegiatannya dapat berperan untuk memenuhi:

1. Kebutuhan organisasi Kementerian Perhubungan terhadap unit kerja yang melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang transportasi, mulai dari kerangka perencanaan hingga evaluasi atas kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan.
2. Kebutuhan terhadap kajian sebagai *base evidence* untuk mendukung rekomendasi kebijakan bidang perhubungan yang dimanfaatkan oleh Menteri Perhubungan dan Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Peluang Badan Litbang Perhubungan sebagai acuan atau koordinator penyelenggaraan penelitian kebijakan transportasi sekaligus *Agent of Change* dalam formulasi kebijakan bidang perhubungan.

B. Kecukupan dukungan potensi sumber daya untuk menjalankan kegiatan penelitian yang bernilai strategis

Pada pemetaan kekuatan internal, Badan Litbang Perhubungan memiliki kecukupan dukungan potensi sumber daya baik itu berupa jumlah peneliti, fasilitas penunjang kegiatan penelitian, ataupun ketersediaan alokasi anggaran untuk menjalankan program-program dan kegiatan penelitian yang bernilai strategis.

1. Mempunyai jumlah SDM Peneliti sebanyak 56 orang terdiri dari Peneliti Utama (3 orang), Peneliti Madya (18 orang), Peneliti Muda (19 orang), dan Peneliti Pertama (16 orang) yang terdistribusi pada pusat penelitian transportasi moda jalan dan KA, pusat penelitian transportasi antar moda, pusat penelitian transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan, serta pusat penelitian transportasi moda udara.
2. Terdapat fasilitas penunjang berupa perpustakaan, jurnal ilmiah, sistem *database*, *software* perangkat lunak berlisensi untuk mendukung analisis lanjut data-data penelitian, serta peralatan-peralatan laboratorium lapangan untuk menunjang pelaksanaan survei lapangan dan beberapa instrumen pendukung operasional lainnya.
3. Memiliki kecukupan lokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja barang dan modal, tunjangan kinerja peneliti, dan dana operasional untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan, selain itu masih adanya peluang untuk mendapatkan sumber pendanaan selain APBN seperti:

kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga tingkat daerah, lembaga swasta, lembaga nasional, ataupun lembaga internasional untuk melaksanakan penelitian-penelitian bernilai strategis yang melibatkan mitra terkait tersebut.

C. Kekuatan potensi jejaring kerja sama mitra untuk menghasilkan kualitas penelitian yang baik dan dapat dipercaya

Sebagai upaya revitalisasi Badan Litbang Perhubungan sebagai lembaga penyusun rekomendasi kebijakan transportasi di era Revolusi Industri 4.0, diperlukan dukungan kerjasama dengan mitra strategis untuk menghasilkan rekomendasi berbasis hasil penelitian yang baik dan dapat dipercaya. Umpan balik dari mitra strategis selama proses penelitian, tidak hanya memperkaya metode penelitiannya saja, namun interaksi antar peneliti akan memberikan budaya positif dalam proses pengelolaan penelitian secara komprehensif.

1. Kerja sama Badan Litbang Perhubungan dengan beberapa instansi penelitian di dalam negeri maupun luar negeri ataupun dengan jejaring *stakeholder* terkait termasuk perguruan tinggi dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan kompetensi SDM peneliti, pengembangan sarana dan prasarana penelitian, peningkatan kolaborasi manajemen pengelolaan sumber daya penelitian, serta keaktifan peneliti dalam forum kerjasama nasional dan internasional baik secara bilateral maupun multilateral
2. Adanya dukungan dalam bentuk regulasi perundangan yakni UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional, yang menyiratkan adanya peluang untuk melakukan pengajuan akreditasi lembaga penelitian.

D. Mitra dalam pengembangan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung penyediaan layanan transportasi

Kemudahan mobilitas transportasi akan makin meningkat ketika konektivitas antara dua lokasi telah terbangun dengan baik. Konektivitas ini dapat terbangun melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*) yang dewasa ini sudah diterapkan oleh industri transportasi. Secara khusus penggunaan teknologi yang mampu menciptakan konektivitas antara kendaraan dan kondisi riil jalan (sarana dan prasarana jalan) disebut juga sistem transportasi cerdas (*intelligent transportation system*, ITS). Sistem transportasi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi ketertiban dan kelancaran berlalulintas yang bertujuan untuk menghindari pemborosan energi di sektor transportasi. Sinergi perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi dan perencanaan sistem transportasi nasional yang tepat merupakan salah satu faktor pendukung industri dalam memenangkan kompetisi di tingkat global.

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terutama pada era revolusi industri 4.0, perlu diantisipasi dengan cepat dan bijaksana, sehingga Badan Litbang Perhubungan sebagai lembaga penyusun rekomendasi kebijakan transportasi dapat menjadi mitra utama dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyediaan layanan transportasi.
2. Perkembangan mendorong adanya perubahan topik riset di bidang transportasi.
3. Potensi hilirisasi hasil pengkajian aplikasi teknologi informasi dan komunikasi bidang transportasi kepada mitra strategis sektor industri.

PERMASALAHAN

Badan Litbang Perhubungan senantiasa berupaya mengadakan penelitian untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi ditinjau dari aspek konektivitas antar wilayah, keselamatan dan keamanan, serta pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini masih beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi tantangan ke depan. Permasalahan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Belum adanya legalitas kuat sebagai dasar transformasi kelembagaan

1. Legalisasi peran Badan Litbang Perhubungan dalam *Roadmap* dan SOP pengkajian kebijakan di bidang transportasi;
2. Kurang optimalnya pengambilan kebijakan transportasi berdasarkan pemanfaatan rekomendasi hasil penelitian/pengkajian.

B. Keterbatasan sumber daya untuk menjalankan kegiatan penelitian strategis

1. Terbatasnya kuantitas dan kompetensi SDM peneliti dan operator penunjang penelitian untuk dapat mencapai tujuan sebagai pusat kajian kebijakan transportasi.
2. Belum adanya peta komposisi peneliti di Badan litbang Perhubungan sebagai bentuk tanggungjawab penelitian per bidang yang dikhususkan.
3. Kurangnya dukungan fasilitas sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan penelitian dalam skala masif dan batasan waktu yang ditentukan.
4. Ketidakseimbangan proporsi alokasi dana penelitian dan dana manajerial sehingga perlu adanya dukungan alternatif pembiayaan penelitian dengan mitra strategis.

C. Belum optimalnya dukungan manajemen tata kelola Badan Litbang Perhubungan

1. Adanya tumpang tindih pelaksanaan penelitian dengan subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Kurangnya manajemen sistem informasi pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis bidang perhubungan.
3. Masih rendahnya publikasi dan desiminasi hasil penelitian yang menjadi tolok ukur kinerja penelitian.
4. Belum optimalnya dukungan kebijakan serta komitmen pimpinan K/L terhadap eksistensi dan peran Badan Litbang Perhubungan.

D. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung pelaksanaan penelitian

1. Pelaksanaan penelitian kajian transportasi belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Masih rendahnya alih teknologi dari hasil penelitian.

ISU DAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Dari hasil kajian terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh, isu strategis yang akan dihadapi pada periode Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan pada uraian berikut ini:

ISU STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Selain penekanan pada aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, Kementerian Perhubungan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas transportasi secara berkelanjutan pada aspek keselamatan dan keamanan, serta pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Ketiga aspek diatas akan menjadi perhatian penting pada rencana kerja Kementerian Perhubungan untuk memberikan dukungan kelancaran proses distribusi orang dan barang. Sementara itu, proses transformasi ekonomi perlu segera dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju. Dalam arahan RPJMN 2020-2024 telah tercatat tantangan yang akan dihadapi meliputi: Produktivitas Tenaga Kerja Rendah, Produktivitas Kapital Rendah (ICOR tinggi 6,7), dan Total *Factor Productivity* Rendah.

Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi 2020-2024 berada pada kisaran 5,2%-5,5% (rendah) hingga pada kisaran 5,4% - 6,5% (tinggi) agar dapat keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) menuju Negara Sejahtera Berpendapatan Tinggi di Tahun 2036. Target pertumbuhan 5,4% - 6,0 % memerlukan dukungan aspek transportasi baik dari sisi permintaan ataupun sisi produksi.

Isu strategis transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada, diantaranya yaitu:

1. Konektivitas
   a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan;
   b. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi;
   c. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai;
   d. Terdapat beberapa PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi belum terhubung dengan jalur darat baik jalan ataupun kereta api;
   e. Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan layanan transportasi pada Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK).
2. Kinerja Pelayanan
   a. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi *online*;
   b. Belum adanya penyuluhan/perbaikan pelayanan untuk pelaksanaan angkutan pemadu yang diharapkan melalui subsektor, dimana standar pelayanan maksimal dirasakan masih perlu ditingkatkan;

c. Belum optimalnya peran angkutan laut, yakni karena adanya ketimpangan muatan dari kawasan barat dan kawasan timur;
d. Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda jalan;
e. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi;
f. Adanya keterbatasan infrastruktur bandar udara terutama dalam menyediakan *slot time* yang mengakibatkan sulitnya melakukan penambahan kapasitas angkutan udara;
g. Sebagian bandar udara mengalami *overcapacity* sementara upaya pembangunan bandar udara tidak mungkin dapat terselesaikan dalam satu tahun anggaran;

3. Keselamatan dan Keamanan
   a. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
   b. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
   c. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi;
   d. Belum optimalnya penanganan perlintasan tidak sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dukungan Kebutuhan Percepatan Pariwisata
   a. Kemudahan akses dari simpul utama terdekat menuju sepuluh destinasi baru tujuan wisata;
   b. Penyediaan layanan moda transportasi hingga ke pusat tujuan wisata prioritas untuk mengakomodasi 400 juta perjalanan wisatawan nusantara dan 22,3 juta wisatawan mancanegara;
   c. Kurangnya tenaga profesional operator transportasi yang dapat memenuhi standar SDM untuk mendukung layanan bagi wisatawan mancanegara.
5. Dukungan Kebutuhan Percepatan Logistik
   a. Masih tingginya biaya logistik terhadap PDB dan masih rendahnya skor *Logistic Performance Index* (LPI);
   b. Permasalahan kelembagaan pada operator transportasi multimoda;
   c. Tenaga profesional operator transportasi multimoda yang belum memenuhi standar kompetensi SDM untuk mendukung layanan logistik nasional.
6. Perkembangan Teknologi dan Kebutuhan SDM
   a. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi;
   b. Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal serta penggunaan aspek pengaruh teknologi informasi secara optimal;
   c. Kurangnya Peneliti adalah modal utama yang cukup menentukan kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan transportasi;

d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan;
e. Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.

7. Pemindahan Ibu Kota Negara

   Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa dirasakan perlu disebabkan serangkaian permasalahan yang terjadi. Beberapa permasalahannya adalah sekitar 57 % penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu adanya pendistribusian penduduk ke daerah yang masih memiliki jumlah penduduk yang rendah, kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB Nasional yang belum merata dimana saat ini 58,49 % dari PDB Nasional dikontribusikan oleh Pulau Jawa, mulai terjadinya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dimana konsentrasi terbesar terdapat di Jakarta dan Bodetabekpunjur, serta meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi yang dihadapi. Untuk mendukung suksesnya proses transformasi pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan perlu adanya perencanaan Hub Transportasi Antarmoda dan mendorong adopsi investasi penyediaan moda transportasi ramah lingkungan.

ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Berbagai isu dalam menghadapi megatrend dunia pada Tahun 2045 menjadi salah satu aspek dalam mengkaji isu strategis pengembangan Badan Litbang Perhubungan 2020-2024. Selain terkait dengan demografi, geopolitik, ekonomi, serta persaingan sumber daya alam, isu teknologi dan perubahan iklim harus menjadi perhatian khusus di sektor transportasi. Kedepan, tren perubahan teknologi akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang akan membawa perubahan signifikan pada penyediaan moda transportasi, inovasi layanan jasa transportasi, serta perilaku dalam bertransportasi.

Selain itu, tantangan pemanasan global akan semakin besar dengan terjadinya kejadian ekstrim dan perubahan iklim jangka panjang yang diindikasikan adanya peningkatan suhu global sebesar 3-3,5% apabila tidak diimbangi dengan adanya usaha menurunkan emisi. Dari hasil telaahan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh, isu strategis yang akan dihadapi Badan Litbang Perhubungan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dapat dikompilasikan pada kelompok isu sebagai berikut.

A. Kebutuhan Penguatan Peran Badan Litbang Perhubungan

Badan Litbang Perhubungan sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bertugas melakukan kegiatan penelitian di bidang transportasi senantiasa dituntut untuk selalu melakukan perubahan dan mengembangkan langkah-langkah strategis dan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas

dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Adanya perubahan dan perkembangan lingkungan baik pada skala dalam negeri, global yang dinamis maupun tuntutan Reformasi Birokrasi harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan penguatan peran ke depan.

Pada **Aspek Kelembagaan**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
2. Transformasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai program reformasi birokrasi mengarah pada Badan Kebijakan Transportasi (BKT);
3. Penyiapan kelembagaan kelitbangan di era digitalisasi sebagai bagian dari era revolusi industri 4.0;
4. Peningkatan peran dan kerjasama dengan lembaga penelitian non pemerintah baik skala nasional ataupun global dalam bidang transportasi.

Pada **Aspek Regulasi dan Kebijakan**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Perlunya penguatan struktur dan relevansi regulasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
2. Kebutuhan terhadap standarisasi teknis terhadap pengaplikasian teknologi terbaru di bidang transportasi;
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terbaru di bidang transportasi yang perlu diantisipasi;
4. Belum adanya konvergensi kebijakan antar K/L dan *stakeholder* tehadap pelaksanaan penelitian nasional;
5. Peningkatan *monitoring* dan evaluasi serta efektifitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan hasil penelitian transportasi.

B. Tuntutan Penguatan Sumber Daya Internal

Pada **Aspek Sumber Daya Manusia**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Masih belum terpenuhinya kebutuhan baik kuantitas ataupun kualitas SDM aparatur di lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Penambahan sebanyak 72 CPNS yang direncanakan pada pertengahan tahun 2020 tetapi mengalami kemunduran akibat adanya pandemi COVID-19. Pada Januari 2021, CPNS mulai aktif bekerja di Badan Litbang Perhubungan.
2. Perlunya pemetaan komposisi peneliti di Badan litbang Perhubungan sebagai bentuk tanggungjawab penelitian per bidang yang dikhususkan untuk mendukung kualitas hasil rekomendasi kebijakan transportasi;
3. Belum optimalnya sistem diklat dan sertifikasi SDM Penelitian yang dapat memperkuat kompetensi keahlian bidang penelitian;
4. Penguasaan SDM terhadap teknologi terkini di era revolusi industri 4.0.

Pada **Aspek Pendanaan**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Porsi alokasi APBN Badan Litbang Perhubungan yang masih kecil (termasuk untuk membiayai penelitian berbagai usulan Daerah);
2. Skema pendanaan penelitian masih terbatas, sementara sesuai RPJMN/RIPNas sumber pembiayaan diharapkan lebih kreatif/*creatif financing* melalui pembiayaan alternatif penelitian dengan mitra strategis.

Pada **Aspek Sarana dan Prasarana**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan dan penunjang penelitian dalam skala masif dan batasan waktu yang ditentukan;

2. Semakin mendesaknya pengembangan dan tuntutan terhadap rekomendasi kebijakan hasil penelitian yang dapat diaplikasikan baik jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang;
3. Belum sepenuhnya hasil penelitian dipublikasikan sebagai bagian dari penilaian kinerja;
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong adanya perubahan topik riset di bidang transportasi, sehingga perlu antisipasi terhadap penerapan teknologi transportasi terbaru;
5. Perlu adanya penguasaan pembaruan teknologi bidang transportasi untuk mengikuti perkembangan dan pemintaan;
6. Kebutuhan pengaplikasian sistem informasi dalam penyusunan *database* hasil-hasil penelitian transportasi.

C. Peningkatan Dukungan Manajemen Tata Kelola Badan Litbang

Pada **Manajemen Implementasi**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Penyelesaian permasalahan kelembagaan dan organisasi sesuai arahan rencana penguatan kelembagaan dan organisasi Badan Litbang Perhubungan;
2. Peningkatan koordinasi antar institusi dalam penyelenggaraan penelitian untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan penelitian dengan subsektor atau para pihak terkait lainnya;
3. Sinkronisasi perencanaan penelitian antar K/L dengan mitra Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian;
4. Sosialisasi secara intens terkait dengan pemanfaatan hasil penelitian.

Pada **Tata Kelola Kinerja Pelayanan**, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. Optimalisasi utilisasi hasil penelitian baik publikasi ataupun desiminasi yang menjadi tolok ukur kinerja penelitian;
2. Penyediaan manajemen sistem informasi pemanfaatan hasil penelitian;
3. Peningkatan kinerja pelayanan berupa peningkatan kualitas hasil penelitian dan pemanfaatannya;
4. Optimasi pemanfaatan hasil penelitian untuk rekomendasi kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis bidang perhubungan.

Identifikasi lingkungan strategis penyusunan Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 didasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Fokus Riset Transportasi pada Prioritas Riset Nasional Tahun 2017-2045, Penugasan dari Naskah RPJMN 2020-2024, serta Arah Kebijakan Kementerian Perhubungan pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Dari berbagai referensi tersebut, didapatkan beberapa perkembangan ancaman lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 7 Identifikasi Ancaman Lingkungan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Faktor	Identifikasi Ancaman Lingkungan Strategis
1	Sosial - Ekonomi	• Masih kurangnya data hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan atau diakses luas oleh masyarakat. • Masih kurangnya informasi Pemerintah terkait dengan hasil penelitian strategis bidang transportasi. • Peran lembaga penelitian dalam mengantisipasi globalisasi ekonomi dunia dan mendukung daya saing ekonomi nasional.
2	Lingkungan Global	• Isu perubahan iklim dan kerawanan bencana alam yang mempengaruhi layanan transportasi. • Permasalahan penghematan energi dan pengurangan emisi dari sektor transportasi. • Pertimbangan dampak lingkungan yang sering menghambat upaya pengembangan jaringan layanan transportasi.
3	Politik-Legal	• Tuntutan daerah atau publik bagi perluasan jaringan transportasi pada kawasan strategis nasional. • Transformasi regulasi di Badan Litbang Perhubungan menuju sistem yang modern, bermanfaat dan terbuka. • Dukungan regulasi dan peraturan terkait dalam penguatan fungsi dan peran Badan Litbang.
4	Etika-Akuntabilitas	• Peningkatan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan penelitian dan penyediaan data transportasi hasil pengkajian. • Responsivitas terhadap isu transportasi yang memerlukan peran Badan Litbang.

Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menjabarkan berbagai strategi untuk mencapai fokus peningkatan konektivitas, pelayanan transportasi serta keselamatan dan keamanan transportasi di samping agenda prioritas berupa dukungan pengembangan destinasi pariwisata, penguatan rantai dan kinerja logistik, penguatan SDM, peningkatan fasilitas transportasi pada Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK), serta rencana pemindahan Ibukota Negara baru.

Tentunya berbagai isu strategis muncul sebagai dinamika dalam pencapaian tujuan tersebut, sehingga Badan Litbang Perhubungan bertugas untuk memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang Perhubungan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka semua satuan kerja di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, pimpinan dan staf harus melaksanakan program yang telah ditetapkan

tersebut secara profesional, akuntabel, integritas, dan inovatif serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja (*performance improvement*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya maka akan dilakukan evaluasi terhadap capaian target dan pelaksanaan anggaran dalam Renstra setiap tahunnya dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis internal mencakup: kebutuhan penguatan peran Badan Litbang Perhubungan, tuntutan penguatan sumber daya internal, dan peningkatan dukungan manajemen tata kelola Badan Litbang Perhubungan.

SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi Badan Litbang Perhubungan dengan penekanan kepada potensi, sumber daya manusia, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*).

BAB II – Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ringkasan/ ikhtisar rencana strategis, dan perjanjian kinerja tahun 2020.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Litbang Perhubungan tahun 2020, yaitu terdiri dari:

a. Analisis Capaian Kinerja

   Menguraikan secara sistematis pencapaian kinerja pada tahun 2020, pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan target dalam rentang waktu beberapa tahun, perbandingan antara realisasi dan target dalam dokumen renstra, analisis keberhasilan/kegagalan dan hambatan/ kendala capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja.

b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

c. Capaian Keberhasilan Kinerja Badan Litbang Perhubungan Lainnya;

d. Realisasi Anggaran

   Menguraikan pemanfaatan dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi beserta analisis anggaran tidak terserap.

BAB IV – Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Litbang Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB V – Lampiran

Bab ini menyajikan lampiran yang mendukung Laporan Kinerja Badan Litbang Perhubungan seperti Perjanjian Kinerja dan data-data lainnya yang dianggap perlu.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

PANDU
PIAGAM PENGHARGAAN
HAKORDIA 2020
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan Penghargaan Kepada:
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI WBK
Jakarta, 21 Desember 2020
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Tjahjo Kumolo

RENCANA STRATEGIS BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 2020-2024

Dokumen Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan menjadi pedoman dan komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan strategis serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Litbang Perhubungan dalam kurun waktu 2020–2024. Rencana strategis dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan.

Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor 145 Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Litbang Perhubungan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dokumen tersebut disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (RPJM Nasional 2020–2024) sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tahap Keempat Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 adalah:

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang juga merupakan RPJMN ke IV dalam RPJPN 2005 – 2025, terdapat 4 (empat) pilar pembangunan yakni:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Ke-empat pilar tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional untuk mempermudah dalam pelaksanaan implementasinya. Ke-7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

VISI DAN MISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 adalah:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Visi Presiden ini selaras dengan sasaran pembangunan nasional pada tahun 2020-2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan menjadi landasan dalam Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024, yakni:

Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Tahun 2020- 2024 tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2020 – 2025, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Di dalam Arahan Presiden, terkait dengan pelaksanaan 9 Misi yang telah disampaikan, sektor perhubungan mempunyai fokus kegiatan yang harus Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 ditangani untuk menunjang capaian misi, terutama pada misi 2, misi 3, dan misi 4 sebagai berikut:

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

1. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
2. Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah;
3. Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital;

4. Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi *online*, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

1. Pembenahan Infrastruktur (Tol Laut) terutama di Indonesia bagian Timur;
2. Meningkatkan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dan tol laut;
3. Membangun infrastruktur jalan tol, jalan kereta rel ganda, dan bandara di Sukabumi.

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.

Kata kunci dalam Arahan Presiden untuk pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan pada Tahun 2020-2024 adalah: penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistik, dukungan IPTEK, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sehubungan dengan penyesuaian kebijakan sebagaimana tercantum dalam dokumen *Review* Renstra Kementerian Perhubungan 2020–2024, visi dan misi Badan Litbang Perhubungan mengalami penyesuaian. Secara ringkas isi dokumen *Review* Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan 2020–2024 disajikan sebagai berikut:

Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2020-2024 ditetapkan dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan sebagai penjabaran lanjut untuk mewujudkan tema dan agenda pembangunan nasional pada tahun 2020-2024.

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 – 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

"Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut di atas, sudah selaras dan sejalan dengan Arahan Presiden untuk melaksanakan pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Presiden yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatian visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian

Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output* sebagai fokus utama Kementerian Perhubungan. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
   a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
   b. Capaian *On Time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. Meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2020 – 2024.

Pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 telah dicantumkan target Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/ transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah: a). Konektivitas Poros Maritim; b). Konektivitas Multimoda; c). Keselamatan Transportasi; dan d). Transportasi Perkotaan. Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut:

a. Peningkatan aksesabilitas antarwilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
b. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
c. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
d. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan menggunakan pendekatan metode *balanced score card* (BSC) yang dibagi empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagaimana terlihat pada Gambar berikut ini:

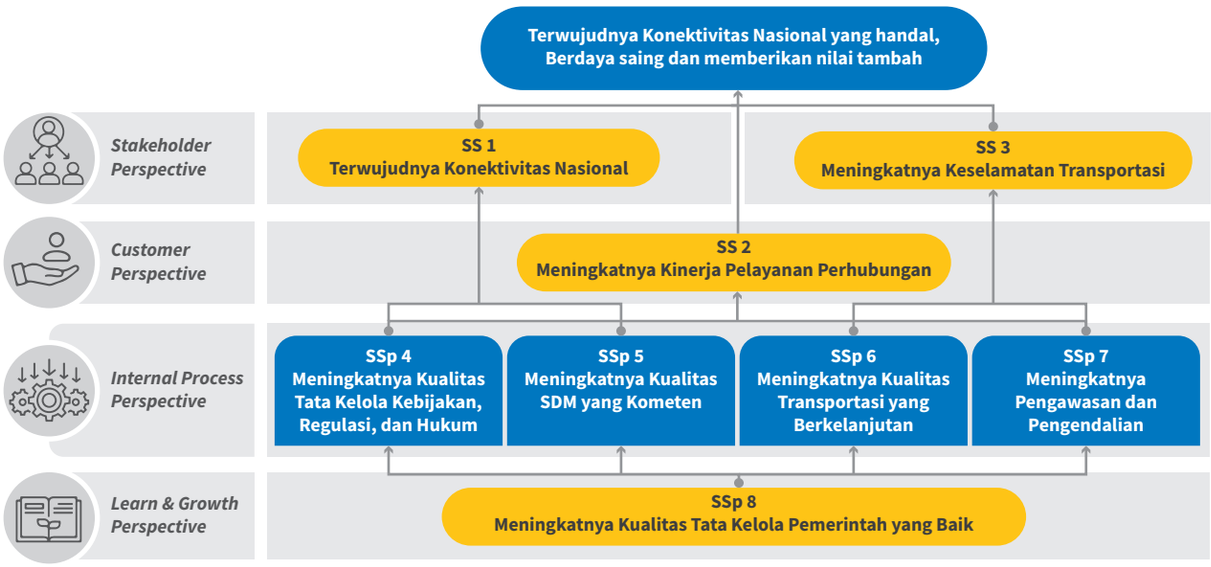

Gambar 2. 1 Peta Strategis Kementerian Perhubungan

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional**

   Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

b. **SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan**

   Untuk mewujudkan tujuan:

   (1) Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian *on time performance* dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;

   (2) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;

   (3) Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

c. **SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi**

   Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2020 – 2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran penunjang menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Stakeholders Perspective*

Mencakup SS-1 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 1 Rasio Konektivitas Nasional

Dan mencakup SS-3 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan

b. *Customer Perspective*

Mencakup SS-2 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
- IKSS 2.2 On *Time Performance* Layanan Transportasi

c. *Internal Process Perspective*

(1) Mencakup SSp-4 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
- IKSp 4 Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

(2) Mencakup SSp-5 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
- IKSp 5 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten

(3) Mencakup SSp-6 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
- IKSp 6 Presentase penurunan emisi GRK sektor transportasi

(4) Mencakup SSp-7 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
- IKSp 7 Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian".

(5) Mencakup SSp-8 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
- IKSp 8 Indeks RB Kementerian Perhubungan

VISI DAN MISI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2020-2024 ditetapkan dengan menyelaraskan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan serta memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis, perkembangan IPTEK, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2020-2024. Didasarkan pada hal tersebut, maka ditetapkan Visi Badan Litbang Perhubungan sebagai berikut:

> **"Badan Litbang Perhubungan sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah**

Penyelenggaraan serangkaian proses penelitian kebijakan bidang perhubungan yang berkualitas, antisipatif, dan responsif merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan yang kemanfaatannya memiliki nilai strategis untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Badan Litbang Perhubungan sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif, ditetapkan Misi Badan Litbang Perhubungan, sebagai berikut:

1. Menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang kemanfaatannya memiliki nilai yang strategis

untuk mendukung pencapaian fokus utama dan agenda prioritas Kementerian Perhubungan;

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi dengan para pihak terkait sebagai mitra kerja strategis;
3. Membangun sistem manajemen penelitian di bidang transportasi melalui peningkatan kualitas tata kelola yang efektif dan efisien;
4. Penguatan sarana, prasarana, SDM, pendanaan, *database* penelitian dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran yang suportif serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang andal.

TUJUAN DAN SASARAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Badan Litbang Perhubungan yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran Program Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari Misi Badan Litbang Perhubungan dengan memperhatian Visi. Untuk mewujudkan Misi Badan Litbang Perhubungan, maka **Tujuan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024** adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan Badan Litbang Perhubungan dalam pemberian rekomendasi kebijakan strategis perhubungan;
2. Terwujudnya dukungan tata kelola Badan Litbang Perhubungan untuk peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Litbang Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output* Badan Litbang Perhubungan. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya persentase tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan termasuk isu strategis di bidang perhubungan menjadi 39% pada tahun 2024;
2. Meningkatnya persentase tingkat ketersediaan dukungan tata kelola Badan Litbang Perhubungan melalui penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi menjadi 100% pada tahun 2024.

Sasaran Program Badan Litbang Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* dari beberapa program/ kegiatan yang dilaksanakan. Meski demikian, sesuai dengan Misi pertama dari Badan Litbang Perhubungan terkait dengan pelaksanaan penelitian, *output* kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Badan Litbang Perhubungan dapat dikembangkan menjadi *initial* atau *intermediate outcome* berupa rekomendasi kebijakan. Bentuk rekomendasi kebijakan disesuaikan dengan tema penelitian dan kelompok sasaran yang tepat. *Initial* atau *intermediate outcome* digunakan sebagai salah satu Indikator Kinerja Program.

Dalam penyusunannya, Sasaran Program ini dirumuskan dari Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, Visi, Misi, dan Tujuan Badan

Litbang Perhubungan serta memperhatikan permasalahan dan rencana capaian pada tahun 2020-2024. Penjabaran menggunakan pendekatan metode *balanced score card* (BSC) dan cascading yang menyelaraskan hubungan antara target kinerja Kementerian Perhubungan dengan Eselon 1 Unit Badan Litbang Perhubungan beserta unit-unit organisasi di dalamnya. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai unit kerja yang bertugas untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi memiliki potensi untuk dapat menjadi pusat unggulan penelitian kebijakan transportasi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya secara efektif dan efisien. Termasuk didalamnya adalah merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran program yang menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam setiap perencanaannya.

Permasalahan yang dihadapi selama ini dengan adanya tumpang tindih pelaksanaan penelitian dengan subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan Peningkatan dapat diantisipasi dengan baik melalui koordinasi antar institusi dalam penyelenggaraan penelitian. Atmosfir transformasi kelembagaan Badan Litbang Perhubungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai program reformasi birokrasi yang mengarah pada Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memberikan dampak positif dengan konsep mirroring dimana informasi hasil penelitian yang diolah melalui proses analisis data dan informasi akurat akan membantu memberikan rumusan kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak pengambil kebijakan sektor transportasi. Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui hubungan tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon 1 Badan Litbang Perhubungan dengan para penggunanya, mulai dari Menteri Perhubungan, Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama pada jajaran Ditjen Teknis, dan para Kepala Daerah yang memerlukan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan di daerah, yang secara akumulatif akan memberikan hasil optimal capaian kinerja Kementerian Perhubungan.

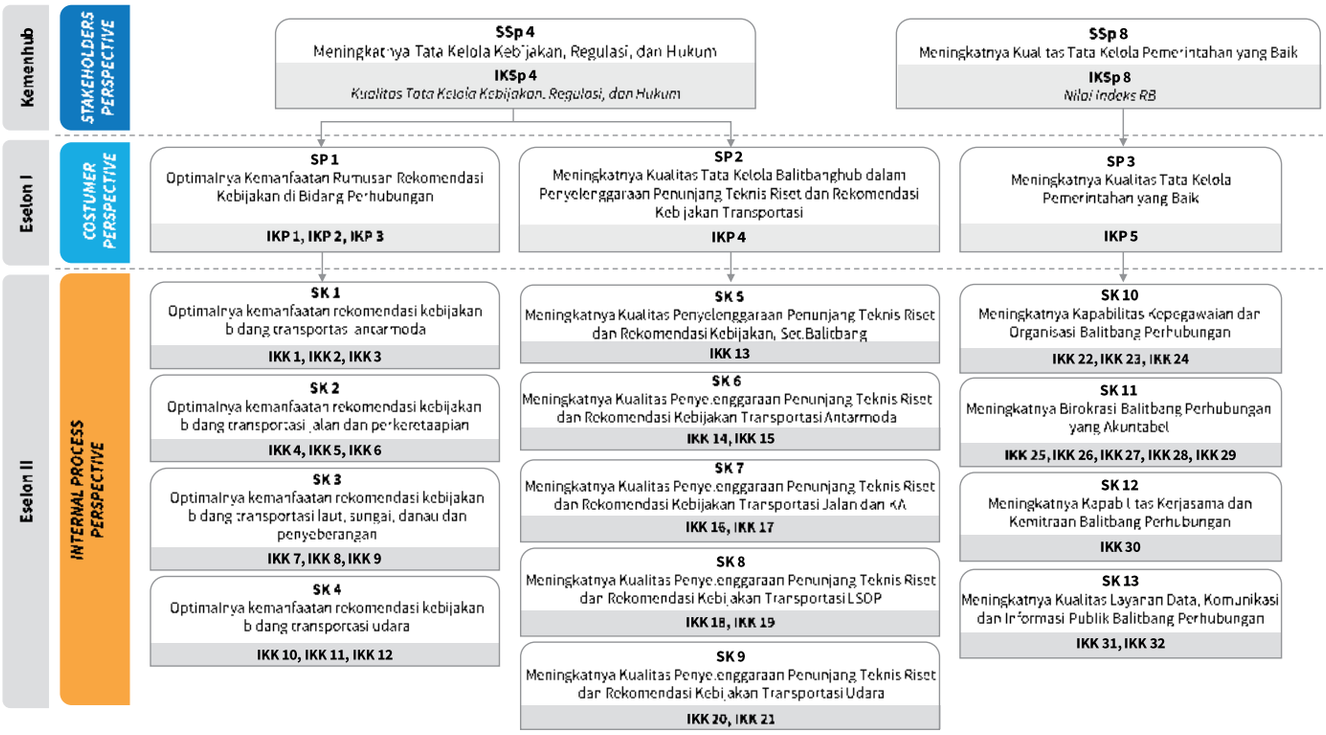

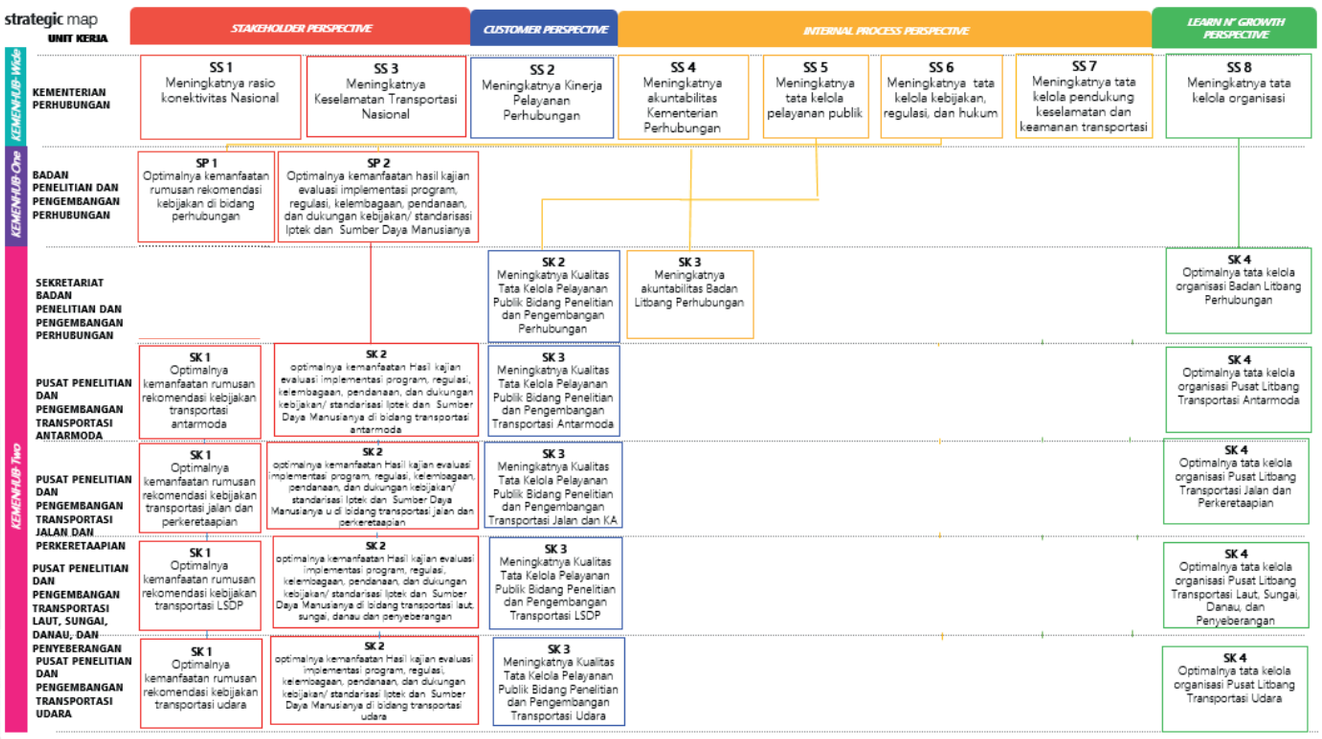

Sumber: Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Badan Litbang Perhubungan

Gambar 2. 2 Peta Strategis Badan Litbang Perhubungan 2020 – 2024

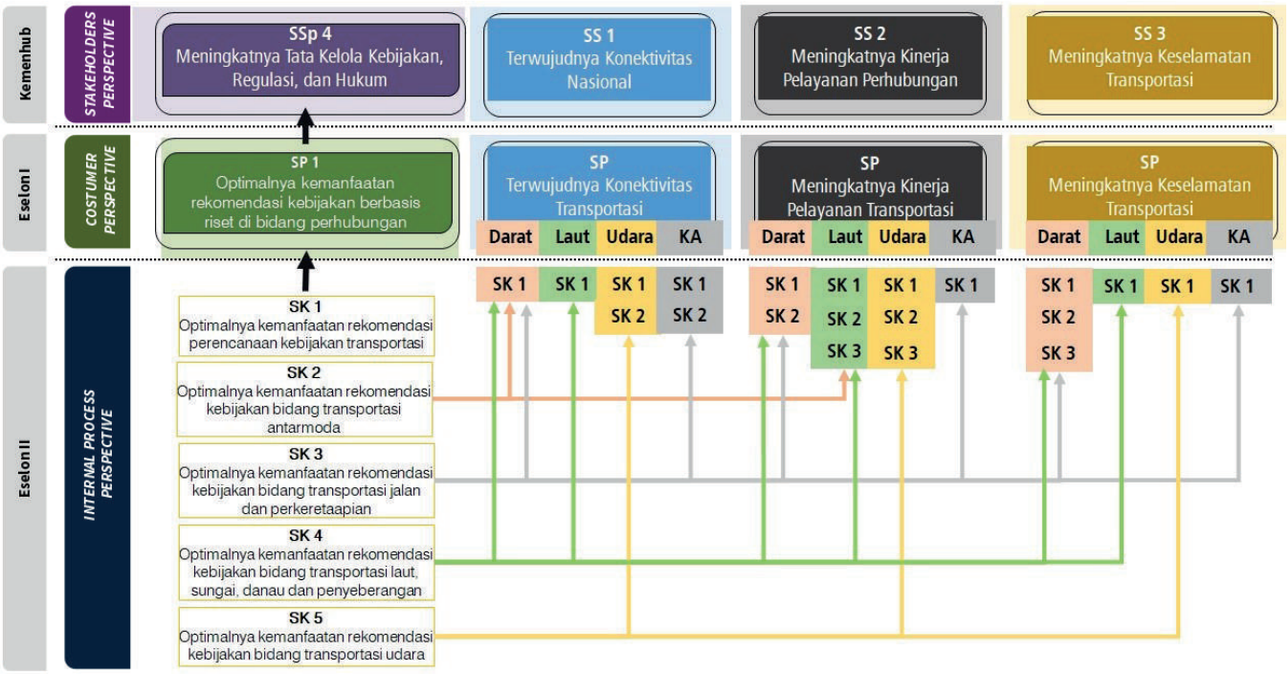

Gambar 2. 3 Cascading Lintas Unit Eselon 1 sebagai Proses Mirroring dengan Sub Sektor Kementerian Perhubungan

Hubungan antara Sasaran Strategis (SSp), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK) adalah berupa garis koordinasi dan dukungan dalam bentuk vertikal dimana SK mendukung tercapainya SP, kemudian SP menentukan tercapainya target SSp. Program pada Eselon I Badan Litbang Perhubungan akan mendukung tercapainya *outcome* pada Sasaran Strategis di tingkat Kementerian Perhubungan, yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum (SSp 4) serta Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (SSp 8). Sedangkan Sasaran Strategis tersebut akan mendukung tercapainya sasaran utama strategis Kementerian Perhubungan yaitu Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS 1), Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubugan (SS 2), dan Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3). Dengan demikian program-program dan kegiatan-kegiatan dari Eselon I dan Eselon II Badan Litbang Perhubungan selain untuk mendukung SSp4 dan SSp 8, juga direncanakan untuk mendukung SS1, SS2, dan SS3.

Secara rinci penjabaran sasaran strategi, indikator kinerja, dan target kinerja Badan Litbang Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Target dan Indikator Kinerja dalam Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
CUSTOMER PERSPECTIVE									
SP 1	Optimalnya Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset di Bidang Perhubungan	IKP 1	*Initial Outcome*						
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	75	75	80	85	90
			Intermediate Outcome						
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	%	35	36	37	38	39
		IKP 2	*Initial Outcome*						
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	%	75	75	80	85	90
			Intermediate Outcome						
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan pada (t-2)	%	30	30	30	32	32
		IKP 3	*Initial Outcome*						
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	75	75	80	85	90
			Intermediate Outcome						
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	%	30	31	32	33	34

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
CUSTOMER PERSPECTIVE									
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKP 4	Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	80	80	85	85	90
SP 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKP 5	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks	78	79	79,5	80	80,5

Selanjutnya target kinerja di atas dituangkan dalam **Rencana Kinerja Tahunan (RKT)** yang merupakan dokumen perencanaan awal sebagai dasar penentuan target untuk penyusunan perjanjian kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu. Penyusunan target perjanjian kinerja dalam hal ini mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan selama satu tahun tersebut. Berikut ini Rencana Perjanjian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 :

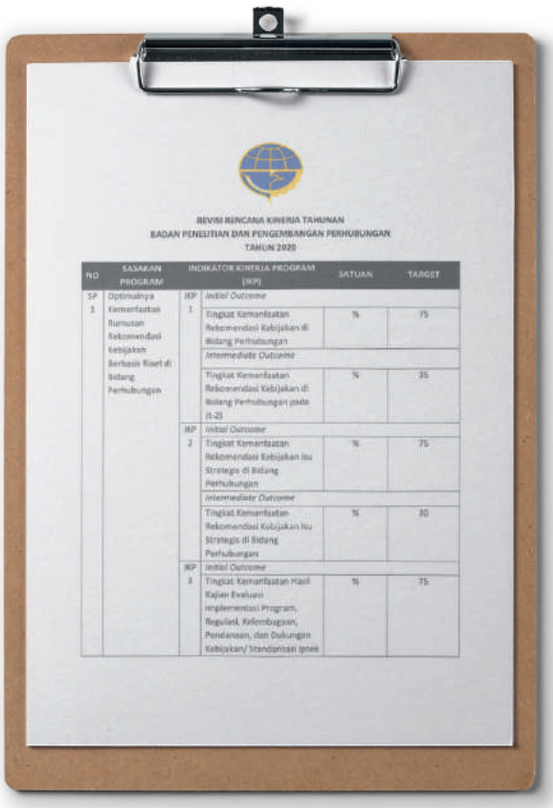

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	TARGET
SP 1	Optimalnya Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset di Bidang Perhubungan	IKP 1	*Initial Outcome*		
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	75
			Intermediate Outcome		
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	%	35
		IKP 2	*Initial Outcome*		
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	%	75
			Intermediate Outcome		
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	%	30
		IKP 3	*Initial Outcome*		
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	75
			Intermediate Outcome		
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	%	30
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKP 4	Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	80
SP 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKP 5	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78

Jakarta, Desember 2020
KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610323 198811 2 001

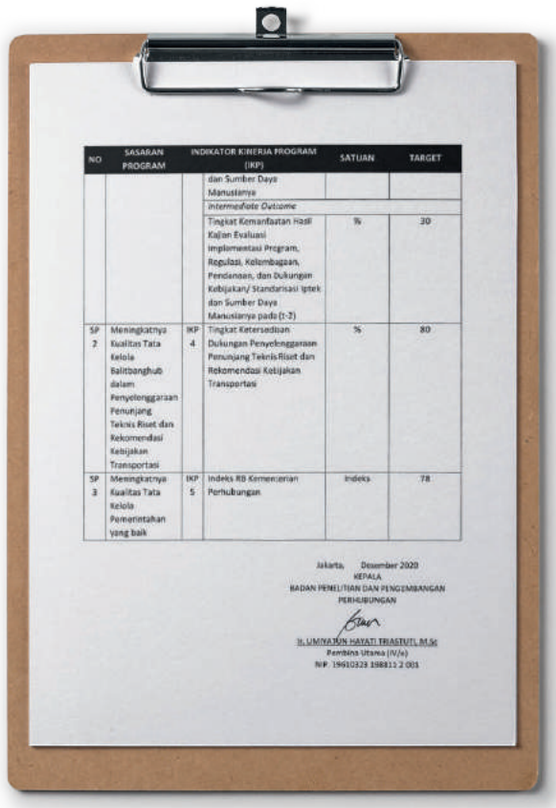

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	TARGET
			dan Sumber Daya Manusianya		
			Intermediate Outcome		
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	%	30
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKP 4	Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	80
SP 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKP 5	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78

Jakarta, Desember 2020
KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610323 198811 2 001

PERJANJIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) berisikan ikhtisar rencana kerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 dan merupakan dokumen kontrak kerja antara Kepala Badan Litbang Perhubungan dengan Menteri Perhubungan.

Pada tahun 2020, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 terkait kebutuhan revisi dokumen PK, Badan Litbang Perhubungan telah menyusun sebanyak dua dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu:

(1) Dokumen PK awal yang disusun pada bulan Januari 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp 206.644.647.000,00;
(2) Dokumen PK revisi I yang disusun pada bulan Juni 2020 dikarenakan adanya revisi anggaran sehingga pagu menjadi Rp 163.660.744.000,00;
(3) Dokumen PK revisi II yang disusun pada bulan September 2020 dikarenakan adanya revisi anggaran sehingga pagu menjadi Rp 157.347.077.000,00;
(4) Dokumen PK revisi III yang disusun pada bulan Desember 2020 dikarenakan adanya perubahan Indikator Kinerja Program (IKP).

Adapun target kinerja Badan Litbang Perhubungan dalam Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

1. Perjanjian Kinerja Januari 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET
1	Optimalnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	1	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	80
2	Optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pengembangan Inovasi Terapan di Bidang Perhubungan	2	Tingkat Pengembangan Inovasi terapan di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti	%	82

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	206.644.647.000
1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	57.604.911.000
2. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	25.847.942.000
3. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	23.257.544.000
4. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Air, Sungai, Danau dan Penyeberangan	75.028.014.000
5. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	24.906.236.000

Disetujui,
Menteri Perhubungan
BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Januari 2020
Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
SUGIHARDJO

2. Perjanjian Kinerja Revisi I Tahun 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET
1	Optimalnya Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	1	Tingkat pemanfaatan rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (R-2)	%	35
		2	Tingkat Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Kegiatan Strategis yang Membutuhkan Penyelesaian secara Cepat di Bidang Perhubungan	%	30
2	Optimalnya Pemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	3	Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	30

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan	Rp. 57.604.911.000
2. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	Rp. 25.847.942.000
3. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Rp. 23.257.544.000
4. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Air, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp. 75.028.014.000
5. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	Rp. 24.906.236.000

Disetujui,
Menteri Perhubungan
BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Februari 2020
Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI

3. Perjanjian Kinerja Revisi II Tahun 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET
1	Optimalnya Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	1	Tingkat pemanfaatan rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (R-2)	%	35
		2	Tingkat Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Kegiatan Strategis yang Membutuhkan Penyelesaian secara Cepat di Bidang Perhubungan	%	30
2	Optimalnya Pemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	3	Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	30

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan	Rp. 57.604.911.000
2. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	Rp. 25.847.942.000
3. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Rp. 23.257.544.000
4. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Air, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp. 33.044.111.000
5. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	Rp. 24.906.236.000

Disetujui,
Menteri Perhubungan
BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Mei 2020
Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI

4. Perjanjian Kinerja Revisi III September 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET
1	Optimalnya Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	1	Tingkat pemanfaatan rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (R-2)	%	35
		2	Tingkat Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Kegiatan Strategis yang Membutuhkan Penyelesaian secara Cepat di Bidang Perhubungan	%	30
2	Optimalnya Pemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	3	Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	30

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan	Rp. 57.604.911.000
2. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	Rp. 25.847.942.000
3. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Rp. 23.257.544.000
4. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Air, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp. 75.028.014.000
5. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	Rp. 24.906.236.000

Disetujui,
Menteri Perhubungan
BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Februari 2020
Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI

5. Perjanjian Kinerja Revisi IV Desember 2020

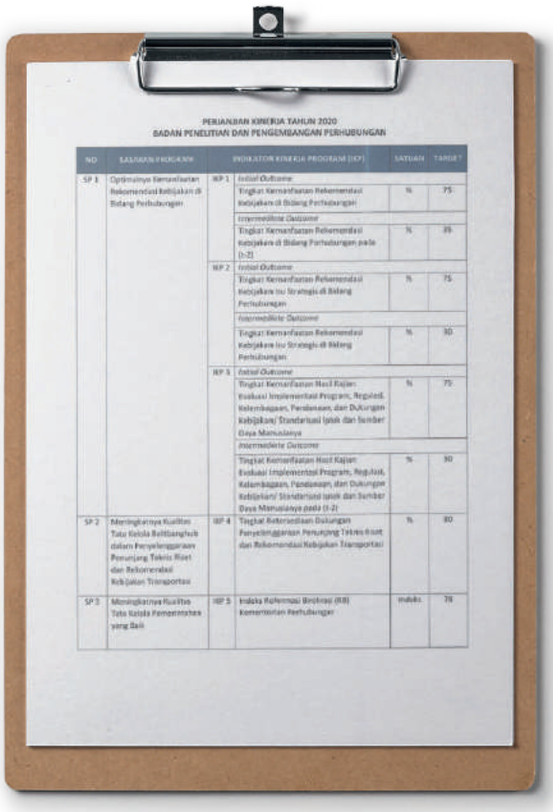

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET
SP 1	Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	IKP 1	*Initial Outcome*		
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	75
			Intermediate Outcome		
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	%	85
		IKP 2	*Initial Outcome*		
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan bu Strategis di Bidang Perhubungan	%	75
			Intermediate Outcome		
			Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan bu Strategis di Bidang Perhubungan	%	90
		IKP 3	*Initial Outcome*		
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan DuKungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	75
			Intermediate Outcome		
			Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	%	90
SP 2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	IKP 4	Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	%	80
SP 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 5	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	Indeks	78

	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.-)
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan	54.858.322.000
2.	Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	25.168.423.000
3.	Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	22.212.525.000
4.	Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	31.015.013.000
5.	Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	24.095.758.000

Disetujui,
Menteri Perhubungan

BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, Desember 2020
Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

UMIYATUL HAYATI TRIASTUTI

Operasional pencapaian sasaran strategis dan program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dijabarkan ke dalam lima kegiatan yang terdiri dari:

1. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda;
2. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
3. Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
4. Penelitian dan Pengembangan TransportasiUdara;
5. Dukungan Manajemen dan Manajemen Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang Kementerian Perhubungan.

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

cityvisio

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Tahapan pengukuran kinerja Badan Litbang Perhubungan dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis *web*, yaitu *e-performance* dengan alamat *http://eperformance.dephub.go.id*. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk *monitoring* capaian kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, II, dan III mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya.

Metode pengukuran kinerja lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember yang disusun dalam laporan *monitoring* capaian kinerja setiap triwulan. Selain itu, sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan *monitoring* capaian realisasi target *output* kegiatan, Badan Litbang Perhubungan menyusun laporan Rencana Aksi Kinerja Bulanan. Laporan Rencana Aksi Kinerja disusun dalam bentuk kertas kerja yang berisikan format tabel target dan realisasi kinerja dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut yang disusun setiap Bulan. Selain Laporan Rencana Aksi Kinerja, Badan Litbang Perhubungan menyusun Laporan Evaluasi Program secara periodik setiap triwulan sebagai bentuk *monitoring* kinerja target dan realisasi anggaran.

Monitoring capaian kinerja *output* kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara, Kemenkeu melakukan *monitoring* capaian target dan proses *output*/kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (*SMART*) dengan alamat *http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id*. Sedangkan, Bappenas sendiri melalui pemanfaatan aplikasi *e-monev* penerapan PP 39 Tahun 2006 dengan alamat *http://e-monev.bappenas.go.id*/emon3 dalam bentuk *monitoring* realisasi target anggaran dan *output* kegiatan.

PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan dilihat berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan menggunakan indikator masing-masing sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target rencana dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif.

Penghitungan persentase capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Penetapan cara perhitungan persentase kinerja untuk Badan Litbang Perhubungan adalah apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun tahapan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020 dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja pada Tahun 2020 dalam Renstra Badan Litbang Perhubungan 2020-2024.

Dukungan Badan Litbang Perhubungan terhadap pembangunan sektor transportasi tahun 2020 diwujudkan melalui kegiatan penelitian terkait Program Prioritas Nasional Ibu Kota Negara. Penugasan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Transportasi IKN. Terdapat 12 penelitian tahun 2020 yang disusun dalam rangka mendukung perencanaan sistem transportasi Ibu Kota Negara, yaitu:

Terdapat **12 Penelitian** tahun 2020 dalam rangka mendukung perencanaan sistem transportasi IKN

Bidang Transportasi Antarmoda:

1. Pola Pergerakan Orang dan Barang di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan Daerah Penyangga Dalam Mendukung Integrasi Transportasi
2. Preferensi Masyarakt terhadap pembangunan fasilitas transportasi di wilayah IKN
3. Perbandingan teknis dan ekonomi pemilihan moda transportasi di IKN
4. Kesiapan angkutan feeder dalam mendukung transportasi di IKN

Bidang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian:
Perencanaan implementasi teknologi Ankutan umum **Autonom Berbasisi Energi Listrik** di wilayah IKN (Kajian Kebijakan dan Regulasi)

Bidang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan:

1. Pengembangan pelabuhan umum untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan ibu kota negara dengan konsep *Smart city*, *smart mobility*
2. Kebutuhan transportasi laut dari Sulawesi Selatan untuk mendukung IKN
3. Kebutuhan dan aksesibilitas pada pusat pemukiman ibu kota negara
4. Pengembangan dermaga apung(*floating berth*) di ibu kota negara

Bidang Transportasi Udara

1. Perencanaan *smart airport* untuk pengoptimalan operasional bandar udara di ibu kota negara
2. Manajemen Angkutan udara di ibu kota negara baru
3. Manajemen ruang udara diatas ibu kota negara baru

Gambar 3. 1 Penelitian Tahun 2020 yang Mendukung IKN

Menteri Perhubungan memberikan penugasan kepada Badan Litbang Perhubungan untuk dapat meningkatkan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi. Dukungan Badan Litbang Perhubungan terhadap Kinerja Layanan Transportasi Tahun 2020 berupa penelitian terkait pandemi COVID-19, yaitu:

a. Penelitian Terkait Dampak Pandemi dan Strategi *Recovery* Sektor Transportasi Pasca Pandemi.

Terdapat 25 penelitian kolaborasi dengan perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk merespon dampak pandemi COVID–19 dan strategi *recovery* pada tatanan kehidupan normal baru di sektor transportasi, yang terbagi menjadi 4 *cluster* yaitu:

Gambar 3. 2 Pembagian *Cluster* Penelitian Terkait Isu COVID-19 Pada Sektor Transportasi

b. Survei dan Penelitian Cepat Untuk Mendukung Analisis Kebijakan PSBB

Beberapa survei yang dilaksanakan terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu:

- Survei Potensi Mudik;
- Survei kebijakan PSBB selama masa pandemi;
- Survei kebijakan larangan mudik;
- Survei pengguna KRL di Jabodetabek;
- Survei kebijakan *shifting* jam kerja.

Pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2020, terdapat 163 penelitian (daftar judul penelitian tahun 2020 ditunjukkan pada lampiran 3). Berdasarkan mekanisme pelaksanaan, penelitian tahun 2020 terbagi atas 112 penelitian yang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola Tipe I (perorangan), 42 penelitian dengan mekanisme swakelola Tipe II (kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga), dan 9 penelitian dengan mekanisme kontraktual ditunjukkan secara persentase sebagaimana diagram berikut:

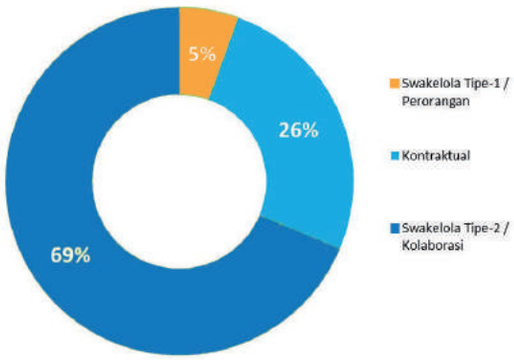

Gambar 3. 3 Persentase Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Tahun 2020

Pemetaan hasil penelitian tahun 2020 berdasarkan 3 fokus (Konektivitas dan Aksesibilitas; Pelayanan Transportasi; Keselamatan dan Keamanan Transportasi) dan 5 agenda utama Kementerian Perhubungan (Pengembangan Transportasi KSPN, Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik, Pengembangan Transportasi di 3TP, Sistem Transportasi IKN, Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi) yaitu:

Tabel 3. 1 Penelitian berdasarkan Tema Fokus dan Agenda Utama Kementerian Perhubungan

NO.	TEMA	JUMLAH PENELITIAN
1	Konektivitas dan Aksesbilitas	27
2	Pelayanan Transportasi	58
3	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	29
4	Pengembangan Transportasi di KSPN	8
5	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	13
6	Pengembangan Transportasi di 3TP	1
7	Sistem Transportasi IKN	12
8	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	15
	TOTAL	**163**

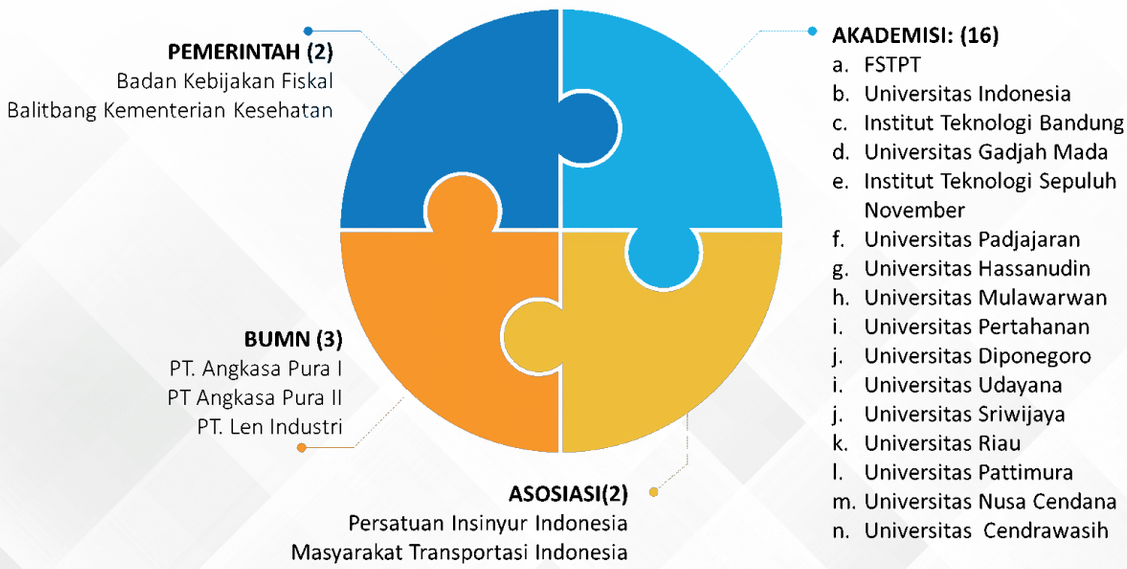

Gambar 3. 4 Mitra Kerja Sama Penelitian Yang Terjalin Pada Tahun 2020

Sesuai dengan tupoksi, maka program untuk tingkat Eselon I Badan Litbang Perhubungan periode 2020-2024 adalah **"Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Inovasi"**. Dalam hal ini program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut untuk pencapaian sasaran program yang akan sangat tergantung dari kinerja program/ kegiatan yang mendukung IKP Badan Litbang Perhubungan, yaitu IKK pada tingkat Eselon II sebagai indikator keluaran (*output*) yang merupakan target capaian dari masing-masing kegiatan unit Eselon II.

Pada restrukturisasi program dan kegiatan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 tidak dikelompokkan berdasarkan kegiatan per-unit kerja tetapi dibagi dalam 2 kelompok kegiatan besar, yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan serta Kegiatan Dukungan Manajemen Litbang Kementerian Perhubungan. Pencapaian kinerja program penelitian dan pengembangan perhubungan selanjutnya dijabarkan dalam tiga sasaran strategis yang diwujudkan dalam lima Indikator Kinerja Program (IKP) berdasarkan *Customer Perspective*.

CUSTOMER PERSPECTIVE

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, peran Badan Litbang Perhubungan berada dalam kelompok *Stakeholders Perspective* pada Sasaran Strategis Penunjang ke-4 (SSp 4), meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum yang diwujudkan melalui Indikator Kinerja Strategis Penunjang 4 (IKSp 4) yaitu Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum. Pencapaian indikator kinerja tersebut dimaksudkan bahwa kegiatan penelitian yang dihasilkan oleh Badan Litbang Perhubungan menjadi usulan bahan rekomendasi kebijakan untuk pembangunan transportasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan. Selain itu, peran Badan litbang Perhubungan berada pada SSp 8: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan diwujudkan melalui IKSp 8: Nilai Indeks RB.

Sebagai turunan sasaran strategis dari tingkat kementerian, maka dalam Peta Strategis Badan Litbang Perhubungan 2020-2024, SSp 4 dan SSp 8 menjadi indikator *outcome/impact* Badan Litbang Perhubungan dari sisi perspektif pelanggan atau *customer perspective*. Capaian kinerja pada perspektif pelanggan (*customer perspective*) Badan Litbang Perhubungan berasal dari tiga sasaran program yaitu:

Sasaran Program 1: Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Badan Litbang Perhubungan diarahkan untuk memfasilitasi kebutuhan naskah akademis, menjawab permasalahan transportasi, dan menanggapi isu-isu strategis dan aktual di bidang transportasi. Seluruh penelitian yang dilaksanakan sejak perencanaan hingga produk akhir diorientasikan pada kebutuhan *customer*. *Customer* Badan Litbang Perhubungan secara tugas dan fungsi adalah internal dan eksternal Kementerian Perhubungan.

Demikian pula dengan pemanfaatan hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan tidak hanya tertutup untuk lingkup internal Kementerian Perhubungan tetapi juga eksternal kementerian seperti, BUMN, pemerintah daerah, industry, atau masyarakat.

Pencapaian sasaran strategis Badan Litbang Perhubungan diukur dengan tiga IKP, yaitu:

1) IKP 1 :

   Initial Outcome

   Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

   Intermediate Outcome

   Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)

2) IKP 2 :

   Initial Outcome

   Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di bidang Perhubungan.

   Intermediate Outcome

   Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di bidang Perhubungan

3) IKP 3 :

   Initial Outcome

   Tingkat Kemanfaatan kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya.

   Intermediate Outcome

   Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)

Sasaran Program 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub Dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi

Pencapaian sasaran strategis Badan Litbang Perhubungan diukur dengan satu IKP, yaitu:

4) IKP 4:

   Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi

Sasaran Program 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pencapaian sasaran strategis Badan Litbang Perhubungan diukur dengan satu IKP, yaitu:
IKP 5: Indeks RB Kementerian Perhubungan

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 TERHADAP TARGET KINERJA TAHUN 2020

Perbandingan target kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 beserta realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020

KODE IKP	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
IKP 1	*Initial Outcome*	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	75	100	133,33
	Intermediate Outcome	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	%	35	50	142,86

KODE IKP	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
IKP 2	*Initial Outcome*	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	%	75	100	133,33
	Intermediate Outcome	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	%	30	32,56	108,53
IKP 3	*Initial Outcome*	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	75	100	133,33
	Intermediate Outcome	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	%	30	43,75	145,83
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 1: Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan						**132,87**
IKP 4	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi		%	80	100	125
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub Dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi						**125**
IKP 5	Indeks RB Kementerian Perhubungan		Indeks	78	Menunggu Penilaian dari Kemen-pan-RB	Menunggu Penilaian dari Kemen-pan-RB
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						Menunggu Penilaian dari Kemen-pan-RB
Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020						**131,75**

ANALISIS KETERCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2020

Sasaran Program 1: Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Pencapaian sasaran strategis Badan Litbang Perhubungan diukur dengan tiga IKP, yaitu:

IKP 1:

***INITIAL OUTCOME*: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan**

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Badan Litbang Perhubungan terbagi dalam empat bidang moda transportasi, yaitu rekomendasi kebijakan di bidang transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan, dan transportasi udara. Komposisi kontribusi realisasi kinerja rekomendasi kebijakan dari masing-masing bidang penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Berdasarkan data pada gambar di atas terlihat kontribusi terbesar pertama, yaitu 43,18% berasal dari penelitian bidng transportasi Jalan dan Perkeretaapian. Selanjutnya kontribusi terbesar kedua, yaitu 22,73% berasal dari penelitian bidang transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan berikutnya berturut - turut penelitian bidang transportasi udara (18,18%), dan penelitian bidang transportasi antarmoda (15,91%). Secara rinci jumlah penelitian dan usulan rekomendasi kebijakan dari masing-masing moda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

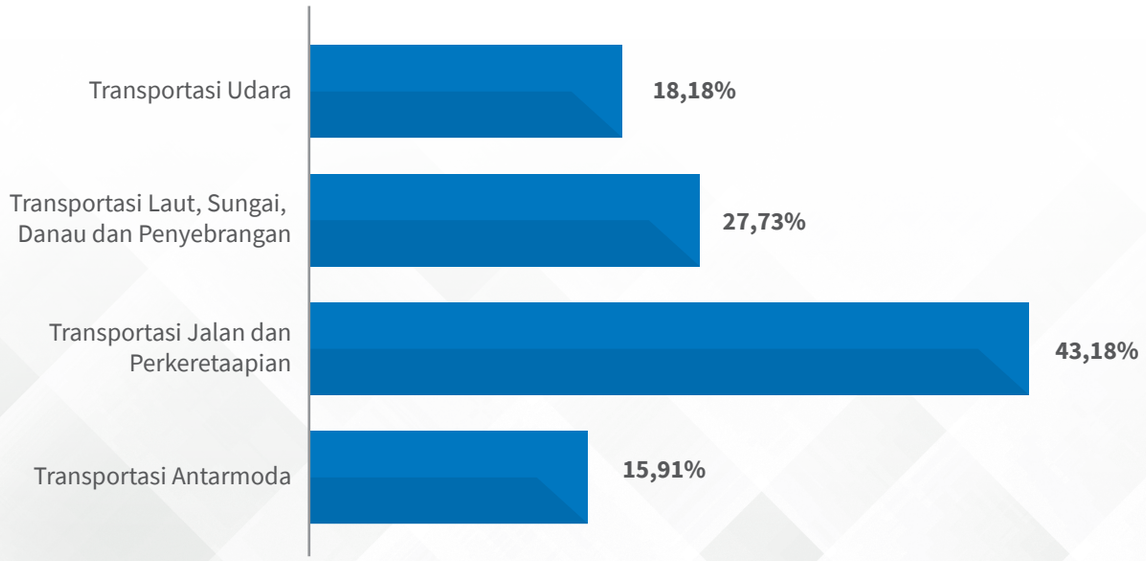

Gambar 3. 5 Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Bidang Penelitian

Berdasarkan data penerima manfaat (*user/ stakeholder*) pada Gambar 3.2 di bawah ini, internal Kementerian Perhubungan menerima rekomendasi kebijakan hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan sebanyak 93% (41 rekomendasi kebijakan), eksternal Kementerian Perhubungan sebanyak 2% (1 Rekomendasi kebijakan), serta internal dan eksternal Kementerian Perhubungan menerima sebanyak 5% (2rekomendasi kebijakan). Hal ini berarti bahwa layanan pelaksanaan penelitian Badan Litbang Perhubungan telah diprioritaskan untuk kepentingan internal Kementerian Perhubungan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Rekomendasi Kebijakan Menurut Bidang Penelitian

NO	BIDANG PENELITIAN	JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN TEMA KEBIJAKAN SESUAI FOKUS DAN AGENDA PRIORITAS KEMENTERIAN YANG DIAJUKAN	JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DITERIMA OLEH MENTERI SUB SEKTOR PERHUBUNGAN, DAN *STAKEHOLDERS*
1.	Transportasi Antarmoda	7	7
2.	Transportasi Jalan Dan Perkeretaapian	19	19
3.	Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	10	10
4.	Transportasi Udara	8	8
TOTAL		**44**	**44**

Berdasarkan data penerima manfaat (*user/ stakeholder*) pada Gambar 3.2 di bawah ini, internal Kementerian Perhubungan menerima rekomendasi kebijakan hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan sebanyak 93% (41 rekomendasi kebijakan), eksternal Kementerian Perhubungan sebanyak 2% (1 Rekomendasi kebijakan), serta internal dan eksternal Kementerian Perhubungan menerima sebanyak 5% (2rekomendasi kebijakan). Hal ini berarti bahwa layanan pelaksanaan penelitian Badan Litbang Perhubungan telah diprioritaskan untuk kepentingan internal Kementerian Perhubungan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

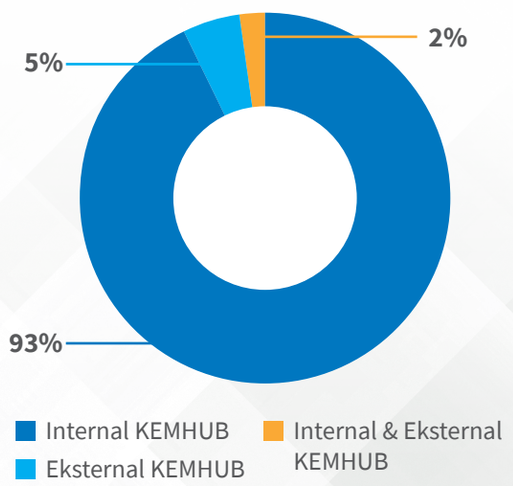

Gambar 3. 6 Komposisi *Stakeholder* Penerima Rekomendasi Kebijakan

Pada tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan telah menyelesaikan sebanyak 163 judul penelitian dan telah menyerahterimakan hasil penelitian tersebut kepada pengguna. Dari total penelitian tersebut, tercatat 44 hasil penelitian diajukan sebagai rekomendasi kebijakan atau terealisasi sebesar 100%. Realisasi tersebut melebihi dari target rencana semula, yaitu 75% sebagaimana target yang diperjanjikan dalam dokumen PK Revisi Tahun 2020. Maka capaian kinerja pemanfaatan hasil penelitian dalam bentuk rekomendasi kebijakan transportasi adalah sebesar 133,33%. Hal ini diperoleh dari data jumlah penelitian yang dijadikan kebijakan oleh Menteri/ Sub Sektor Perhubungan/ *Stakeholder*:

IKP 1 (*Initial Outcome*) diperoleh melalui rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah } \textbf{Rekomendasi Kebijakan} \text{ yang } \textbf{diterima} \text{ oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan } \textit{Stakeholder}}{\text{Jumlah } \textbf{Rekomendasi Kebijakan} \text{ sesuai Fokus dan Agenda Prioritas Kementerian yang Diajukan}} \times 100\%$$

Secara rinci capaian target untuk IKP 1 (*Initial Outcome*) dibandingkan dengan target Revisi PK disajikan beserta anggaran yang digunakan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 1 (*Initial Outcome*) Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA PROGRAM			TARGET REVISI PK 2020		REALISASI KINERJA 2020 (%)	CAPAIAN KINERJA 2020 (%)	ANGGARAN		
			SATUAN	JML			PAGU	REALISASI	%
1	*Initial Out-come*	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Per-hubungan	%	75	100	133,33	25.614.135.000	25.541.124.245	99,71

Dalam proses mencapai target kinerja, terdapat beberapa **kendala** yang dialami yaitu:

1) Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penyesuaian dalam pemenuhan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Kondisi ini signifikan mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian;
2) Kualitas dan Kuantitas SDM Peneliti yang terbatas.

Kendala tersebut dapat ditangani sehingga kinerja IKP 1 (*Initial Outcome*) dapat tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa **faktor keberhasilan** sebagai berikut:

1) **Aspek SDM**:
   Kecepatan dan ketepatan dalam merespon permintaan dukungan penelitian sesuai arahan Pimpinan, Kebutuhan Sub Sektor Perhubungan, dan *Stakeholders* baik penelitian dengan mekanisme Kontraktual maupun Swakelola Tipe II.
   a) Komitmen bersama Pimpinan dan Seluruh Pegawai Badan Litbang Perhubungan untuk menyelesaikan penugasan dalam mencapai target kinerja;

b) Adanya Tim *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja yaitu:

(a) *Project Management Unit* (PMU) sebagai salah satu upaya meningkatkan Sistem Pengendalian Intern untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program kegiatan Badan Litbang Perhubungan melalui prinsip pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.76 Tahun 2020 tanggal 08 Juli 2020; dan

(b) *Tim Quality Assurance* (QA) dalam rangka untuk menambah nilai manfaat kegiatan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.68 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020.

c) Peningkatan kompetensi SDM peneliti melalui pelatihan teknis sangat membantu pelaksanaan kegiatan penelitian.

2) **Aspek Kerja Sama:**

a) Kolaborasi Badan Litbang Perhubungan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga;

b) *Sharing Knowledge* dari Tenaga Ahli dari berbagai bidang keahlian sejak perencanaan, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyusunan naskah rekomendasi.

3) Aspek Diseminasi:

Sosialisasi hasil penelitian telah dilakukan melalui laman situs jejaring Badan Litbang Perhubungan. Upaya penyebaran informasi hasil penelitian pun telah dilakukan melalui media cetak, jurnal melalui aplikasi *open journal system* (ojs), dan kegiatan forum ilmiah seperti *workshop*/ simposium/ seminar.

4) Aspek Pemanfaatan Teknologi:

Untuk menyikapi dampak pandemi terhadap kegiatan penelitian, Badan Litbang Perhubungan memanfaatkan teknologi yang tersedia sehingga Rapat Pembahasan (FGD) setiap pelaporan dilakukan secara virtual, sedangakan kegiatan konsultansi dilakukan baik secara langsung maupun secara virtual.

Secara rinci, rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan oleh Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2020 beserta data *stakeholder* selaku penerima disajikan pada data dukung per IKP pada (**Lampiran 4**).

IKP 1:

***INTERMEDIATE OUTCOME*: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)**

Rekomendasi kebijakan hasil penelitian yang telah diserahterimakan kepada *stakeholder* Badan Litbang Perhubungan beberapa di antaranya ada yang bersifat pemanfaatan langsung pada tahun berjalan (aplikatif), namun beberapa bersifat tidak langsung termanfaatkan. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja pemanfaatan penelitian yang bersifat tidak langsung dimanfaatkan diwujudkan melalui indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian pada (t-2), t adalah tahun IKP.

Untuk mengetahui tindak lanjut hasil penelitian yang telah diserahterimakan kepada pengguna, Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2020 telah melakukan identifikasi melalui *monitoring* pemanfaatan atau tindak lanjut hasil penelitian. Tujuan indikator ini adalah sebagai *quality control* sekaligus sebagai bahan evaluasi Badan Litbang Perhubungan terhadap tindak lanjut pemanfaatan hasil penelitian pada tahun 2018.

Pelaksanaan *monitoring* pemanfaatan atau tindak lanjut hasil penelitian dalam hal ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja Eselon II berdasarkan bidang transportasi. *Monitoring* ini dilaksanakan dalam interval dua tahunan terhadap penelitian yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Pemanfaatan tindak lanjut hasil penelitian tersebut dapat berupa acuan dalam pengembangan sektor transportasi.

Tingkat kemanfaatan rekomendasi kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2) diperoleh dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah } \textbf{Rekomendasi Kebijakan} \text{ yang } \textbf{dimanfaatkan} \text{ oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan } \textit{Stakeholder} \text{ pada (t-2)}}{\text{Jumlah } \textbf{Rekomendasi Kebijakan} \text{ sesuai Fokus dan Agenda Prioritas Kementerian yang Diajukan pada (t-2)}} \text{ x100\%}$$

Target persentase pemanfaatan hasil *monitoring* (t-2), t adalah tahun IKP yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I Revisi 3 Tahun 2020 sebesar 35% dapat terealisasi sebesar 50% dengan capaian kinerja sebesar 142,86%. Pada tahun 2020 Badan Litbang Perhubungan telah melakukan *monitoring* terhadap 22 judul penelitian tahun 2018 dan didapatkan 11 hasil penelitian yang ditindaklanjuti oleh pengguna. Angka ini beserta anggaran yang digunakan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 1 (*Intermediate Outcome*) Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA PROGRAM			TARGET REVISI PK 2020		REALISASI KINERJA 2020 (%)	CAPAIAN KINERJA 2020 (%)	ANGGARAN		
			SATUAN	JML			PAGU	REALISASI	%
1	*Inter-mediate Outcome*	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	%	35	50	142,86	992.833.000	991.727.256	99,89

Faktor keberhasilan tercapainya IKP 1 (*Intermediate Outcome*) yaitu dilaksanakannya *monitoring* tindak lanjut hasil penelitian oleh Badan Litbang Perhubungan secara rutin, untuk mengetahui pemanfaatan dari rekomendasi kebijakan yang telah diserahterimakan kepada para pengguna jasa penelitian dan pengembangan.

Secara rinci, hasil *monitoring* tindak lanjut pemanfaatan hasil penelitian (t-2) disajikan pada data dukung IKP 1 (**Lampiran 4**).

IKP 2:

***INITIAL OUTCOME*: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan**

Penelitian kebijakan isu strategis merupakan penelitian yang belum masuk dalam perencanaan awal dan berasal dari penugasan Pimpinan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis transportasi yang berkembang di masyarakat dan dikerjakan secara cepat selama dua sampai tiga bulan.

Selain itu penelitian yang termasuk dalam isu strategis adalah yang mencakup 3 fokus Kementerian Perhubungan (Konektivitas dan Aksesibilitas, Tingkat Layanan, dan Keselamatan dan Keamanan) dan lima agenda baru Kementerian Perhubungan yaitu Pengembangan Transportasi di KSPN, Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik, Pengembangan Transportasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Sistem Transportasi IKN, dan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi.

Rekomendasi kebijakan isu strategis yang disampaikan oleh Badan Litbang Perhubungan dikelompokkan dalam empat bidang moda transportasi, yaitu rekomendasi kebijakan di bidang bidang transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan, dan transportasi udara. Komposisi kontribusi realisasi kinerja rekomendasi kebijakan dari masing-masing bidang penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3. 7 Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Berdasarkan Bidang Penelitian

Berdasarkan data pada Gambar di atas terlihat kontribusi terbesar pertama, sebesar 27,91% berasal dari penelitian bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan.

Selanjutnya kontribusi terbesar kedua, yaitu 26,74% berasal dari penelitian bidang transportasi antarmoda berikutnya berturut - turut penelitian bidang transportasi udara (23,26%) dan penelitian bidang transportasi Jalan dan Perkeretaapian (22,09%).

Secara rinci jumlah penelitian dan usulan rekomendasi kebijakan dari masing-masing moda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6 Rekapitulasi Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Menurut Bidang Penelitian

NO	BIDANG PENELITIAN	JUMLAH REKOMENDASI KEBIJAKAN DARI HASIL PENELITIAN KEBIJAKAN ISU STRATEGIS YANG DITERIMA OLEH MENTERI, SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DAN *STAKEHOLDERS*	JUMLAH HASIL REKOMENDASI KEBIJAKAN ISU STRATEGIS
1.	Transportasi Antarmoda	23	23
2.	Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	19	19
3.	Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	24	24
4.	Transportasi Udara	20	20
	TOTAL	**86**	**86**

Berdasarkan data penerima manfaat (*user/stakeholder*) pada gambar di bawah ini, internal Kementerian Perhubungan menerima rekomendasi kebijakan hasil penelitian kebijakan isu strategis Badan Litbang Perhubungan sebanyak 59% (51 rekomendasi kebijakan), eksternal Kementerian Perhubungan sebanyak 28% (24 Rekomendasi Kebijakan), serta internal dan eksternal Kementerian Perhubungan menerima sebanyak 13% (11 rekomendasi kebijakan). Hal ini berarti bahwa layanan pelaksanaan penelitian Badan Litbang Perhubungan telah diprioritaskan untuk kepentingan internal Kementerian Perhubungan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Pada tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan telah menyelesaikan sebanyak 163 judul penelitian dan telah menyerahterimakan hasil penelitian tersebut kepada pengguna. Dari total penelitian tersebut, tercatat 86 hasil penelitian diajukan sebagai rekomendasi kebijakan isu strategis atau terealisasi sebesar 100%.

Realisasi tersebut melebihi dari target rencana semula, yaitu 75% sebagaimana target yang diperjanjikan dalam dokumen PK Revisi Tahun 2020. Maka capaian kinerja pemanfaatan hasil penelitian dalam bentuk rekomendasi kebijakan isu kebijakan adalah sebesar 133,33%.

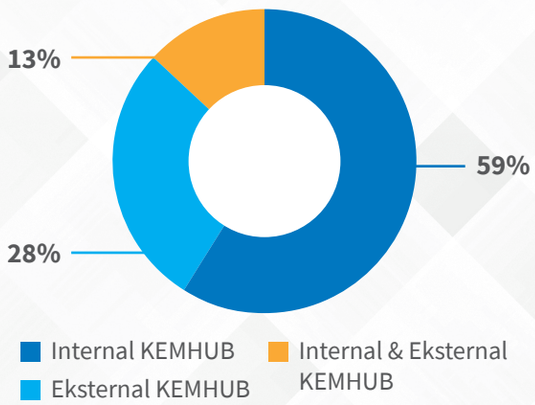

Gambar 3. 8 Komposisi *Stakeholder* Penerima Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis

IKP 2 (*Initial Outcome*) diperoleh melalui rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah } \textbf{Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis} \text{ yang } \textbf{diterima} \text{ Oleh Menteri Sub Sektor Perhubungan Dan Stakeholder}}{\text{Jumlah } \textbf{Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis} \text{ Sesuai Fokus dan Agenda Prioritas Kementerian Yang Diajukan}} \times 100\ \%$$

Secara rinci capaian target untuk IKP 2 (*Initial Outcome*) dibandingkan dengan target Revisi PK disajikan beserta anggaran yang digunakan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 2 (*Initial Outcome*) Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA PROGRAM			TARGET REVISI PK 2020		REALISASI KINERJA 2020 (%)	CAPAIAN KINERJA 2020 (%)	ANGGARAN		
			SATUAN	JML			PAGU	REALISASI	%
1	*Initial Outcome*	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Per-hubungan	%	75	100,00	133,33	9.223.335.600	9.173.379.880	99,46

Dalam proses mencapai target kinerja, terdapat beberapa **kendala** yang dialami yaitu:

1) Pemberlakuan pembatasan interaksi sosial akibat Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penyesuaian dalam pemenuhan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Kondisi ini signifikan mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan pengumpulan data penelitian yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian penelitian perorangan dan keterlambatan diseminasi/ penyerahan hasil penelitian;
2) Kualitas dan Kuantitas SDM Peneliti yang terbatas.

Kendala tersebut dapat ditangani sehingga kinerja IKP 2 (*Initial Outcome*) dapat tercapai. Beberapa **faktor keberhasilan** pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1) Aspek SDM:

a) Kecepatan dan ketepatan dalam merespon permintaan dukungan penelitian sesuai arahan Pimpinan, Kebutuhan Sub Sektor Perhubungan, dan *Stakeholders* terhadap isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Penugasan Menteri Perhubungan disampaikan melalui disposisi dan arahan langsung pada saat rapat pimpinan. Sementara, permintaan dari unit kerja eselon 1 lainnya berangkat dari hasil pembahasan isu strategis dan kebutuhan kajian ilmiah sesuai arahan kebijakan Menteri Perhubungan;

b) Meningkatnya permintaan kajian berbasis ilmiah dari *stakeholder* sebagai dasar pengambilan kebijakan dan proses perencanaan baik di lingkungan internal maupun eksternal kementerian;

c) Komitmen bersama Pimpinan dan Seluruh Pegawai Badan Litbang Perhubungan untuk menyelesaikan penugasan dalam mencapai target kinerja;

d) Adanya Tim *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja yaitu:

(1) *Project Management Unit* (PMU) sebagai salah satu upaya meningkatkan Sistem Pengendalian Intern untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program kegiatan Badan Litbang Perhubungan melalui prinsip pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.76 Tahun 2020 tanggal 08 Juli 2020; dan

(2) *Tim Quality Assurance* (QA) dalam rangka untuk menambah nilai manfaat kegiatan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.68 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020.

e) Peningkatan kompetensi SDM peneliti melalui pelatihan teknis sangat membantu pelaksanaan kegiatan penelitian.

2) Aspek Kerja Sama:

Sharing Knowledge dari Tenaga Ahli dari berbagai bidang keahlian sejak perencanaan, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyusunan naskah rekomendasi.

3) Aspek Diseminasi:

Sosialisasi hasil penelitian telah dilakukan melalui laman situs jejaring Badan Litbang Perhubungan. Upaya penyebaran informasi hasil penelitian pun telah dilakukan melalui media cetak, jurnal melalui aplikasi *open journal system* (ojs), dan kegiatan forum ilmiah seperti *workshop*/ simposium/ seminar;

4) **Aspek Pemanfaatan Teknologi**:

Untuk menyikapi dampak pandemi terhadap kegiatan penelitian, Badan Litbang Perhubungan memanfaatkan teknologi yang tersedia sehingga Rapat Pembahasan (FGD) setiap pelaporan dilakukan secara virtual, sedangkan kegiatan pengumpulan data/ *survey* dilakukan baik secara langsung maupun secara virtual menggunakan aplikasi *e-survey*.

Secara rinci, rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan oleh Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2020 beserta data *stakeholder* selaku penerima disajikan pada data dukung per IKP pada **Lampiran 4**.

IKP2

***INTERMEDIATE OUTCOME*: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan**

Rekomendasi kebijakan isu strategis hasil penelitian yang telah diserahterimakan kepada *stakeholder* Badan Litbang Perhubungan yang bersifat pemanfaatan langsung pada tahun berjalan (aplikatif) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah } \textbf{Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis} \text{ yang } \textbf{diterima} \text{ oleh Menteri, Sub sektor Perhubungan, dan } \textit{Stakeholder}}{\text{Jumlah } \textbf{Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis} \text{ sesuai Fokus dan Agenda Prioritas Kementerian yang Diajukan}} \times 100\%$$

Secara rinci capaian target untuk IKP 2 (*Intermediate Outcome*) dibandingkan dengan target Revisi PK disajikan beserta anggaran yang digunakan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 2 (*Intermediate Outcome*) Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA PROGRAM			TARGET REVISI PK 2020		REALISASI KINERJA 2020 (%)	CAPAIAN KINERJA 2020 (%)	ANGGARAN		
			SATUAN	JML			PAGU	REALISASI	%
1	*Inter-mediate Outcome*	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Per-hubungan	%	30	32,56	108,53	-	-	-

Pada tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan telah menyelesaikan sebanyak 163 judul penelitian dan telah dilaksanakan serah terima hasil penelitian tersebut kepada pengguna. Dari total penelitian tersebut, tercatat 86 hasil penelitian diajukan sebagai rekomendasi kebijakan isu strategis atau terealisasi sebesar 100%. Dari 86 penelitian yang diserahkan tersebut dilakukan *monitoring* kemanfaatan rekomendasi kebijakan isu strategis dan didapatkan sejumlah 28 penelitian yang termanfaatkan (32,56%). Realisasi tersebut melebihi dari target rencana semula, yaitu 30% sebagaimana target yang diperjanjikan dalam dokumen PK Revisi Tahun 2020. Maka capaian kinerja pemanfaatan hasil penelitian dalam bentuk rekomendasi kebijakan isu kebijakan adalah sebesar 108,53%.

Faktor keberhasilan tercapainya IKP 2 (*Intermediate Outcome*) yaitu dilaksanakannya *monitoring* tindak lanjut hasil penelitian oleh Badan Litbang Perhubungan, untuk mengetahui pemanfaatan dari rekomendasi kebijakan yang telah diserahterimakan kepada para pengguna jasa penelitian dan pengembangan.Secara rinci, rekomendasi kebijakan isu strategis hasil penelitian yang telah diserahterimakan kepada *stakeholder* Badan Litbang Perhubungan yang bersifat pemanfaatan langsung disajikan pada data dukung IKP 2 (**Lampiran 4**).

IKP 3:

***INITIAL OUTCOME*: Tingkat Kemanfaatan Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya**

Beberapa penelitian yang dilaksanakan di Badan Litbang Perhubungan pada Tahun 2020 merupakan penelitian bertema evaluasi dan menghasilkan rekomendasi berupa masukan, usulan, atau pendapat berdasarkan kajian mengenai implementasi program, regulasi, kelembagaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan sumber daya manusianya.

Rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya yang disampaikan oleh Badan Litbang Perhubungan dikelompokkan dalam empat bidang moda transportasi, yaitu rekomendasi kebijakan di bidang transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan, dan transportasi udara. Komposisi kontribusi realisasi kinerja rekomendasi kebijakan dari masing-masing bidang penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini:

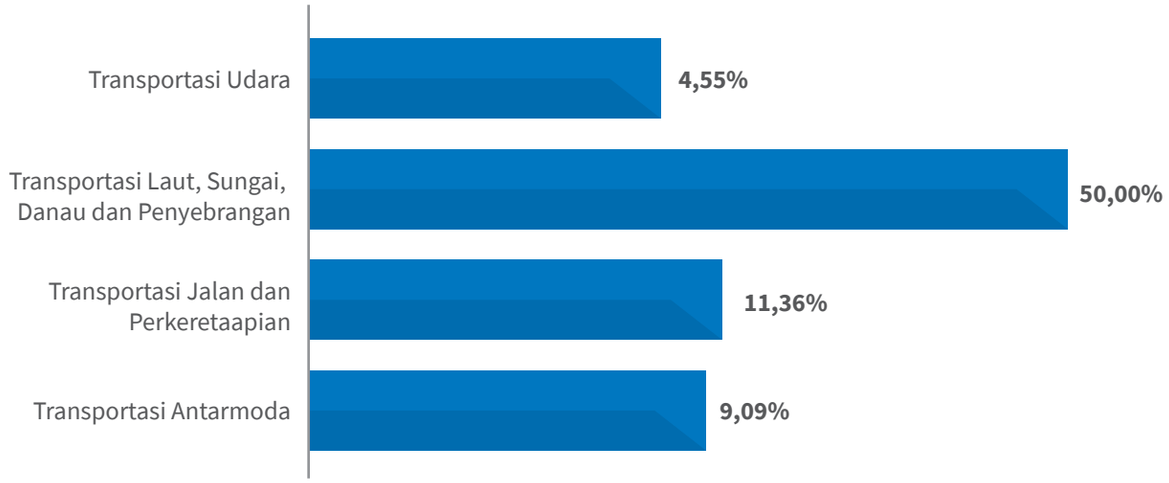

Gambar 3. 9 Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya Berdasarkan Bidang Penelitian

Berdasarkan data pada Gambar di atas terlihat kontribusi terbesar pertama, sebesar 50% berasal dari penelitian bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan diikuti berturut-turut oleh peneitian transportasi jalan dan perkeretaapian 11,36%, transportasi antarmoda (9,09%) dan bidang transportasi udara 4,55%.

Secara rinci jumlah penelitian dan usulan rekomendasi kebijakan dari masing-masing moda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9 Rekapitulasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya Menurut Bidang Penelitian

NO	BIDANG PENELITIAN	JUMLAH REKOMENDASI HASIL KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM, REGULASI, KELEMBAGAAN, PENDANAAN, DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN/ STANDARISASI IPTEK DAN SUMBER DAYA MANUSIANYA YANG DITERIMA OLEH MENTERI PERHUBUNGAN, SUB SEKTOR PERHUBUNGAN, DAN *STAKEHOLDER*	JUMLAH HASIL PENELITIAN TEMA KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI YANG DIAJUKAN
1.	Transportasi Antarmoda	4	4
2.	Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	5	5

NO	BIDANG PENELITIAN	JUMLAH REKOMENDASI HASIL KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM, REGULASI, KELEMBAGAAN, PENDANAAN, DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN/ STANDARISASI IPTEK DAN SUMBER DAYA MANUSIANYA YANG DITERIMA OLEH MENTERI PERHUBUNGAN, SUB SEKTOR PERHUBUNGAN, DAN *STAKEHOLDER*	JUMLAH HASIL PENELITIAN TEMA KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI YANG DIAJUKAN
3.	Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	22	22
4.	Transportasi Udara	2	2
	TOTAL	**33**	**33**

Berdasarkan data penerima manfaat (*user/ stakeholder*) pada gambar di bawah ini, internal Kementerian Perhubungan menerima Rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya sebanyak 67% (22 rekomendasi kebijakan), eksternal Kementerian Perhubungan sebanyak 30% (10 Rekomendasi Kebijakan), serta internal dan eksternal Kementerian Perhubungan menerima sebanyak 3% (1 rekomendasi kebijakan). Hal ini berarti bahwa layanan pelaksanaan penelitian Badan Litbang Perhubungan telah diprioritaskan untuk kepentingan internal Kementerian Perhubungan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

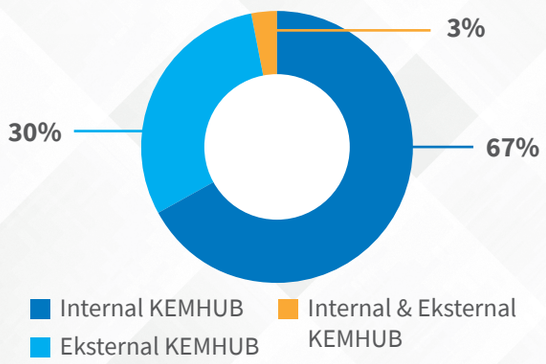

Gambar 3. 10 Komposisi *Stakeholder* Penerima Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi

Pada tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan telah menyelesaikan sebanyak 163 judul penelitian dan telah menyerahterimakan hasil penelitian tersebut kepada pengguna. Dari total penelitian tersebut, tercatat 33 hasil penelitian diajukan sebagai rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya atau terealisasi sebesar 100%. Realisasi tersebut melebihi dari target rencana semula, yaitu 75% sebagaimana target yang diperjanjikan dalam dokumen PK Revisi Tahun 2020. Maka capaian kinerja pemanfaatan hasil penelitian dalam bentuk rekomendasi hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya adalah sebesar 133,33%. IKP 3 (*Initial Outcome*) diperoleh melalui rumusan:

Jumlah **Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi** Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi Iptek dan SDM yang **diterima** oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan *Stakeholder*

Jumlah **Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi** yang Diajukan

Berikut data target, realisasi, capaian, dan anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja IKP 3 (*initial outcome*):

Tabel 3. 10 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 3 (*Initial Outcome*) Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA PROGRAM			TARGET REVISI PK 2020		REALISASI KINERJA 2020 (%)	CAPAIAN KINERJA 2020 (%)	ANGGARAN		
			SATUAN	JML			PAGU	REALISASI	%
1	*Initial Outcome*	Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	75	100	133,33	4.696.226.400	4.644.632.793	98,90

Dalam proses mencapai target kinerja, terdapat beberapa **kendala** yang dialami yaitu:

1) Pemberlakuan pembatasan interaksi sosial akibat Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penyesuaian dalam pemenuhan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Kondisi ini signifikan mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan pengumpulan data penelitian yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian penelitian dan keterlambatan diseminasi/ penyerahan hasil penelitian;
2) Kualitas dan Kuantitas SDM Peneliti yang terbatas.

Keberhasilan pencapaian kinerja IKP 3 (*Initial Outcome*) disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1) **Aspek SDM:**
   a) Kecepatan dan ketepatan dalam merespon permintaan dukungan penelitian sesuai arahan Pimpinan, Kebutuhan Sub Sektor Perhubungan, dan *Stakeholders* terhadap isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Penugasan Menteri Perhubungan disampaikan melalui disposisi dan arahan langsung pada saat rapat pimpinan. Sementara, permintaan dari unit kerja eselon 1 lainnya berangkat dari hasil pembahasan isu strategis dan kebutuhan kajian ilmiah sesuai arahan kebijakan Menteri Perhubungan;
   b) Meningkatnya permintaan kajian berbasis ilmiah dari *stakeholder* sebagai dasar

pengambilan kebijakan dan proses perencanaan baik di lingkungan internal maupun eksternal kementerian;

c) Komitmen bersama Pimpinan dan Seluruh Pegawai Badan Litbang Perhubungan untuk menyelesaikan penugasan dalam mencapai target kinerja;

d) Adanya Tim *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja yaitu:

(1) *Project Management Unit* (PMU) sebagai salah satu upaya meningkatkan Sistem Pengendalian Intern untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program kegiatan Badan Litbang Perhubungan melalui prinsip pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.76 Tahun 2020 tanggal 08 Juli 2020; dan

(2) Tim *Quality Assurance* (QA) dalam rangka untuk menambah nilai manfaat kegiatan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.68 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020.

e) Peningkatan kompetensi SDM peneliti melalui pelatihan teknis sangat membantu pelaksanaan kegiatan penelitian.

2) Aspek Kerja Sama:

a) Kolaborasi Badan Litbang Perhubungan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga;

b) *Sharing Knowledge* dari Tenaga Ahli dari berbagai bidang keahlian sejak perencanaan, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyusunan naskah rekomendasi.

3) Aspek Diseminasi:

a) *Sosialisasi* hasil penelitian telah dilakukan melalui laman situs jejaring Badan Litbang Perhubungan. Upaya penyebaran informasi hasil penelitian pun telah dilakukan melalui media cetak, jurnal melalui aplikasi *open journal system* (ojs), dan kegiatan forum ilmiah seperti *workshop*/ simposium/ seminar;

4) Aspek Pemanfaatan Teknologi:

Untuk menyikapi dampak pandemi terhadap kegiatan penelitian, Badan Litbang Perhubungan memanfaatkan teknologi yang tersedia sehingga Rapat Pembahasan (FGD) setiap pelaporan dilakukan secara virtual, sedangkan kegiatan pengumpulan data/ *survey* dan konsultansi dilakukan baik secara langsung maupun secara virtual menggunakan aplikasi *e-survey*.

Secara rinci, rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan oleh Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2020 beserta data *stakeholder* selaku penerima disajikan pada data dukung per (**Lampiran 4**).

IKP 3:

***INTERMEDIATE OUTCOME*: Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)**

Beberapa penelitian yang dilaksanakan di Badan Litbang Perhubungan pada Tahun 2018 merupakan penelitian bertema Evaluasi dan menghasilkan rekomendasi berupa masukan, usulan, atau pendapat berdasarkan kajian mengenai implementasi program, regulasi, kelembagaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi IPTEK dan sumber daya manusianya.

Rekomendasi kebijakan hasil penelitian yang telah diserahterimakan kepada *stakeholder* Badan Litbang Perhubungan beberapa di antaranya ada yang bersifat pemanfaatan langsung pada tahun berjalan (aplikatif), namun beberapa bersifat tidak langsung termanfaatkan. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja pemanfaatan penelitian

yang bersifat tidak langsung dimanfaatkan diwujudkan melalui indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian pada (t-2), t adalah tahun IKP.

Untuk mengetahui tindak lanjut hasil penelitian yang telah diserahterimakan kepada pengguna, Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2020 telah melakukan identifikasi melalui *monitoring* pemanfaatan atau tindak lanjut hasil penelitian. Tujuan indikator ini adalah sebagai *quality control* sekaligus sebagai bahan evaluasi Badan Litbang Perhubungan terhadap tindak lanjut pemanfaatan hasil penelitian pada tahun 2018.

Pelaksanaan *monitoring* pemanfaatan atau tindak lanjut hasil penelitian dalam hal ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja Eselon II berdasarkan bidang transportasi. *Monitoring* ini dilaksanakan dalam interval dua tahunan terhadap penelitian yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Pemanfaatan tindak lanjut hasil penelitian tersebut dapat berupa acuan dalam pengembangan sektor transportasi.

Tingkat kemanfaatan kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2) diperoleh dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah } \textbf{Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi} \text{ Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/Standarisasi Iptek dan SDM yang } \textbf{dimanfaatkan} \text{ oleh Menteri, Sub Sektor Perhubungan, dan } \textit{Stakeholder} \text{ pada (t-2)}}{\text{Jumlah } \textbf{Rekomendasi Hasil Kajian Evaluasi Implementasi} \text{ yang Diajukan}} \times 100\%$$

Secara rinci capaian target per-triwulan untuk IKP 3 (*Intermediate Outcome*) dibandingkan dengan target Revisi PK disajikan pada tabel berikut INI :

Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 3 (*Intermediate Outcome*) Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA PROGRAM			TARGET REVISI PK 2020		REALISASI KINERJA 2020 (%)	CAPAIAN KINERJA 2020 (%)	ANGGARAN		
			SATUAN	JML			PAGU	REALISASI	%
1	*Intermediate Outcome*	Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	%	30	43,75	145,83	724.723.000	723.603.344	99,85

Pada tahun 2018, terdapat 16 penelitian yang bersifat hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya. Setelah dilakukan *monitoring* kemanfaatannya, terdapat 7 penelitian yang telah ditindaklanjuti oleh penerima hasil penelitian sehingga terealisasi sebesar 43,75%. Dengan target 30% diperoleh capaian kinerja sebesar 145,83%.

Faktor keberhasilan tercapainya IKP 3 (*Intermediate Outcome*) yaitu dilaksanakannya *monitoring* tindak lanjut hasil penelitian oleh Badan Litbang Perhubungan, untuk mengetahui pemanfaatan dari rekomendasi kebijakan yang telah diserahterimakan kepada para pengguna jasa penelitian dan pengembangan. Secara rinci, rekomendasi kebijakan isu strategis hasil penelitian yang telah diserahterimakan kepada *stakeholder* Badan Litbang Perhubungan yang bersifat pemanfaatan langsung disajikan pada data dukung IKP 3 (**Lampiran 4**).

Selain koordinasi secara langsung, kegiatan *monitoring* juga dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dalam pembuatan konsep video/dokumenter dengan melibatkan para peneliti dan *stakeholder* terkait di daerah. Sebagai contoh, pelaksanaan kegiatan *monitoring* kemanfaatan dilakukan di dua lokasi penelitian yaitu Raja Ampat, Papua dan Danau Toba, Medan, Sumatera Utara. Kegiatan dokumenter ini menyajikan informasi terkait latar belakang dan hasil penelitian, tindak lanjut hasil penelitian/ rekomendasi penelitian, permasalahan implementasi/penerapan rekomendasi penelitian, saran penelitian Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Sasaran Program 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub Dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi

Pencapaian sasaran strategis Badan Litbang Perhubungan diukur dengan satu IKP, yaitu:

IKP 4:

Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi

Indikator kinerja ini menunjukkan persentase penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi untuk peningkatan kualitas penelitian diperoleh dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi yang Terselenggara}}{\text{Jumlah Rencana Kegiatan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi yang Terselenggara}} \times 100\%$$

Penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi terdiri dari *Workshop*/ FGD/ *Roundtable*/Seminar dalam negeri, Sidang, konferensi, dan studi banding internasional, Jurnal Transportasi, KSP, Bimbingan Teknis, Penyusunan *Database* Penelitian, Publikasi hasil penelitian, Pembinaan jabatan fungsional, Penyusunan SOP, Penyusunan formasi pegawai, Analisis evaluasi dan jabatan, Penyusunan HaKI, dan *Service Delivery Unit*.

Berikut jumlah *output* ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi di lingkungan Badan Litbang Perhubungan:

Tabel 3. 12 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 4 Tahun 2020

KODE *OUTPUT*	URAIAN	SET-BADAN	PUSLITBANG TRANSPOR-TASI ANTAR-MODA	PUSLITBANG TRANSPOR-TASI JAKA	PUSLITBANG TRANSPOR-TASI LSDP	PUSLITBANG TRANSPOR-TASI UDARA
950	Layanan Dukungan Manajemen Es.1					
	Penyusunan Program dan Evaluasi	-	13	13	13	13
	Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan TU	-	6	6	6	6
	Penyusunan Rencana, Kerjasama, Program, Monev	30	-	-	-	-
	Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan	31	-	-	-	-
	Pelaksanaan Administrasi dan Pengembangan SDM	37	-	-	-	-
	Penyediaan Layanan Tata Usaha Pimpinan	3	-	-	-	-
	Pelaksanaan Layanan Data dan Informasi	17	-	-	-	-
	Pelaksanaan Layanan Publikasi dan Kehumasan	23	-	-	-	-
967	**Layanan Penelitian dan Pengembangan**					
	Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan:					
	- FGD	-	5	3	3	3
	-Webinar	-	2	2	8	3
951	**Layanan Sarana dan Prasarana**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Pelaksanaan Penunjang Penelitian					
	-Jurnal	-	2	2	2	2
	-KSP	-	4	2	2	8

KODE *OUTPUT*	URAIAN	SET-BADAN	PUSLITBANG TRANSPOR-TASI ANTAR-MODA	PUSLITBANG TRANSPOR-TASI JAKA	PUSLITBANG TRANSPOR-TASI LSDP	PUSLITBANG TRANSPOR-TASI UDARA
4662	-Bimtek	-	1	2	2	4
	-PUI	-	1	1	1	0
	-*Database*	-	1	0	2	1
	-Publikasi hasil Penelitian	-	1	1	1	1
	-Urusan kepegawaian	-	1	1	1	1
	-Kelompok Kerja IKN	-	1	0	0	0
	-HaKI	-	1	1	1	1
994	**Layanan Perkantoran**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
	TOTAL	**154**	**52**	**47**	**55**	**57**

Secara rinci capaian target per-triwulan untuk IKP 4 dibandingkan dengan target Revisi PK disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 13 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 4 Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET REVISI PK 2020		REALISASI KINERJA 2020 (%)	CAPAIAN KINERJA 2020 (%)	ANGGARAN		
		SATUAN	JML			PAGU	REALISASI	%
1	Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyeleng-garaan Penunjang Teknis Riset dan Re-komendasi Kebijakan Transportasi	%	80	100	125	115.995.578.000	114.316.261.878	98,55

Dalam proses mencapai target kinerja, terdapat beberapa **kendala** yang dialami yaitu:

1) Pada awal terjadinya Pandemi COVID-19 (Maret 2020), beberapa kegiatan termasuk Penyusunan Laporan dan Forum Ilmiah terhambat sehingga mengalami perlambatan. Akan tetapi demi percepatan pelaksanaan kegiatan, Badan Litbang Perhubungan memanfaatkan teknologi yang tersedia sehingga kegiatan dapat dilakukan secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting*.
2) Kualitas hasil penelitian belum memenuhi kriteria kaidah penulisan ilmiah yang menyebabkan jumlah hasil penelitian tidak sesuai dengan jumlah hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal;
3) Permohonan data dan proses input kegiatan Penyusunan *Database* Angkutan Perintis dan Kinerja Pelabuhan di Indonesia masih dilaksanakan secara manual. Kegiatan rutin ini membutuhkan dukungan sumber daya yang tinggi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dana/anggaran.
4) Kegiatan *Konowledge Sharing* Program pada Tahun 2020 menghasilkan dua terbitan buku dengan tema yang cukup menarik, namun masih terdapat banyak judul KSP yang belum memiliki ISBN karena belum bekerjasama dengan phak ketiga (penerbit). Selain itu kualitas konten buku bahasan masih terlalu luas berupa tulisan ilmiah;
5) Kualitas dan Kuantitas SDM Penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi yang terbatas.
6) Kegiatan Alihmedia Hasil Penelitian Transportasi Laut berupa digitalisasi koleksi penelitian bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian LSDP bagi masyarakat umum. Namun dalam pelaksanaannya, Bidang PTPP mengalami kendala keterbatasan sumber daya manusia bidang dokumentasi di Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Sebagai tindak lanjut untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa upaya dilakukan sebagai **faktor keberhasilan pencapaian kinerja** IKP 4 yaitu:

1) Demi percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan, Badan Litbang Perhubungan memanfaatkan teknologi yang tersedia sehingga kegiatan dapat dilakukan secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting*.
2) Komitmen bersama Pimpinan dan Seluruh Pegawai Badan Litbang Perhubungan untuk menyelesaikan penugasan dalam mencapai target kinerja;
3) Adanya Tim *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja yaitu:
   a) Project Management Unit (PMU) sebagai salah satu upaya meningkatkan Sistem Pengendalian Intern untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program kegiatan Badan Litbang Perhubungan melalui prinsip pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.76 Tahun 2020 tanggal 08 Juli 2020; dan
   b) Tim *Quality Assurance* (QA) dalam rangka untuk menambah nilai manfaat kegiatan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.68 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020.
4) Sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan Penyusunan *Database* Angkutan Perintis dan Kinerja Pelabuhan di Indonesia, akan dilakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data operasional antara Puslitbang LSDP dengan Setditjen Perhubungan Laut, karena *database* merupakan suatu kebutuhan

untuk bahan penelitian dan penyusunan rekomendasi;

5) Untuk mengantisipasinya keterbatasan sumber daya manusia bidang dokumentasi Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan bekerjasama dengan tenaga ahli pustakawan eksternal untuk membantu mengelola manajemen hasil penelitian yang telah selesai maupun tahun berjalan.

Sasaran Program 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pencapaian sasaran strategis Badan Litbang Perhubungan diukur dengan satu IKP, yaitu:

IKP 5:

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan

Reformasi Birokrasi adalah upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem peyelenggaraan pemerintah yaitu meliputi reformasi birokrasi kelembagaan, Reformasi Birokrasi Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Sumber Daya Manusia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan, menuntut birokrasi pemerintah untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Terdapat beberapa dasar hukum pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; dan Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) 2020-2024.

Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Government*), sehingga berbagai permasalahan/ hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan atau terhambat harus ditata ulang atau diperbaiki dan reformasi merupakan langkah stategi untuk membangun aparatur negara yang berdayaguna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, diantaranya mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/ program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Terdapat delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

Gambar 3. 11 Area Perubahan RB

Indeks RB Kementerian Perhubungan terdiri dari dua komponen penilaian yaitu Pengungkit dan Hasil sebagaimana matriks berikut yang merupakan hasil Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dan 2019. Sembilan Sub Sektor Perhubungan termasuk Badan Litbang Perhubungan berkontribusi dalam komponen pengungkit terhadap delapan area perubahan RB.

Tabel 3. 14 Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dan 2019

No	Komponen Penilaian	Nilai Max	Nilai 2018	Nilai 2019
A	**Pengungkit**			
1	Manajemen Perubahan	5	3,77	3,83
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,7	2,99
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,83	4,84
4	Penataan Tatalaksana	5	3,81	3,81
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	13,17	13,17
6	Penguatan Akuntabilitas	6	4,35	4,37
7	Penguatan Pengawasan	12	7,49	7,52
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	4,09	4,09
B	**Hasil**			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	9,85	9,96
2	Nilai Kapasitas Organisasi (*Survey* Internal)	6	4,86	5,05
3	Nilai Persepsi Korupsi (*Survey* Eksternal)	7	5,62	6,49
4	Opini BPK	3	3,00	3,00
5	Niali Persepsi Kualitas Pelayanan (*Survey* Eksternal	10	7,95	8,85
		40	31,28	33,08
	Indeks RB	**100**	**75,50**	**77,70**

Pada Tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Penilaian Mandiri RB Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020

Pemenuhan (Data Dukung Administrasi)			Reform (Data Dukung Berupa Kegoatam Riil)	
Bobot	**Usulan Nilai Litbang**		**Bobot**	**Usulan Nilai Litbang**
2.00	**1.80**	**Manajemen Perubahan**	**3.00**	**2.75**
1.00	0.50	Deregulasi Kebijakan	2.00	1.00
2.00	2.00	Penataan dan Penguatan Organisasi	1.50	1.50
1.40	1.32	Penataan Sistem Manajemen SDM	2.00	2.00
2.50	2.50	Penguatan Akuntabilitas	3.75	2.61
2.20	1.96	Penguatan Pengawasan	1.95	1.95
2.50	2.32	Pengingkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.75	3.63
14.60	**13.36**	**TOTAL**	**21.70**	**18.85**
TOTAL PENGUNGKIT		**Bobot**	**Nilai**	
		36.30	32.21	

Pada Tahun 2020, terdapat dua aspek penilaian Pengungkit, yaitu Aspek Pemenuhan data dukung berupa dokumen administrasi) dan Aspek Reform (data dukung berupa kegiatan riil) sedangkan pada tahun 2019 hanya ada Aspek pemenuhan. Berikut perbandingan Komponen Pengungkit Badan Litbang Perhubungan tahun 2019 dan tahun 2020 :

Tabel 3. 16 Perbandingan Komponen Pengungkit Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Komponen	2019			2020	
	Bobot Nilai	Nilai Usulan	Nilai 2019	Bobot Nilai	Nilai Usulan
A. Pengungkit					
Aspek Pe-menuhan	23,50	23,50	14,97	14,60	13,36
Aspek Reform	0	0	0	21,70	18,85
Total	**23,50**	**23,50**	**14,97**	**36,30**	**32,231**

Secara rinci, pelaksanaan penilaian mandiri pada delapan area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Litbang Perhubungan tahun 2020 disajikan pada data dukung IKP 5 (**Lampiran 5**).

Dengan Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, nilai indeks RB Badan Litbang Perhubungan didasarkan nilai RB Kementerian Perhubungan yang penilaiannya dilakukan oleh Kemenpan-RB. Proses penilaian dilakukan pada Tahun 2020 dan nilai akan disampaikan oleh Kemenpan-RB di Tahun 2021. Indikator ini didukung oleh Sumber Daya berupa anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 100.246.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 100.245.670,00 (100%).

Tabel 3. 17 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Revisi PK Badan Litbang Perhubungan Berdasarkan IKP 5 Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET REVISI PK 2020		REALISASI KINERJA 2020 (%)	KINERJA (%)	ANGGARAN		
		SATUAN	JML			PAGU (ribu)	REALISASI (ribu)	%
1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	menunggu hasil penilaian Kemenpan-RB		100.246	100.246,67	100

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020 TERHADAP CAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2019

IKP 1,2,3 (*Initial Outcome*): Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Capaian kinerja Indikator Kinerja Program (IKP) 1,2,3 (*Initial Outcome*) yaitu Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2019, dengan target indikator kinerja pada tahun 2019 yaitu sebesar 80% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 75%. Capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 101,94% sedangkan pada tahun 2020 capaian kinerja naik menjadi 133,33%. Rata-rata capaian kinerja sejak tahun 2019-2020 sebesar 117,64%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

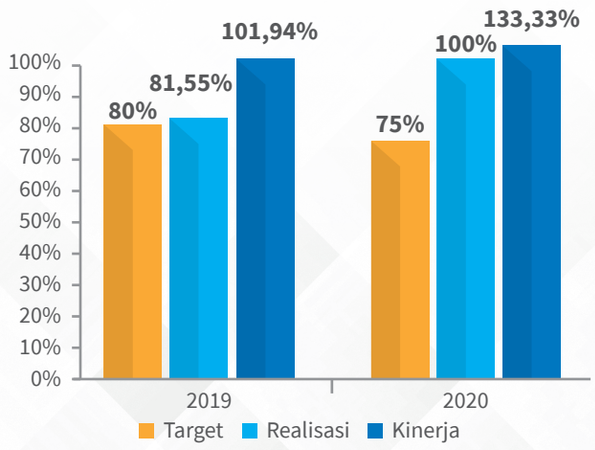

Gambar 3. 12 Perbandingan Capaian Kinerja IKP 1,2,3 (*Initital Outcome*) Terhadap Target Kinerja Tahun 2019-2020

IKP 1 dan IKP 3 (*Intermediate Outcome*): Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2), t adalah tahun IKP

Realisasi kinerja Indikator Kinerja Program 1 dan 3 (*Intermediate Outcome*) yaitu Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2), t adalah tahun IKP. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, target indikator kinerja ini pada tahun 2020 mengalami perubahan yaitu sebesar 35% dan 30%. Capaian Kinerja pada tahun 2019 sebesar 119,66% pada tahun 2020 capaian kinerja menjadi 144,35%, dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2019 dan 2020 sebesar 132,005%.

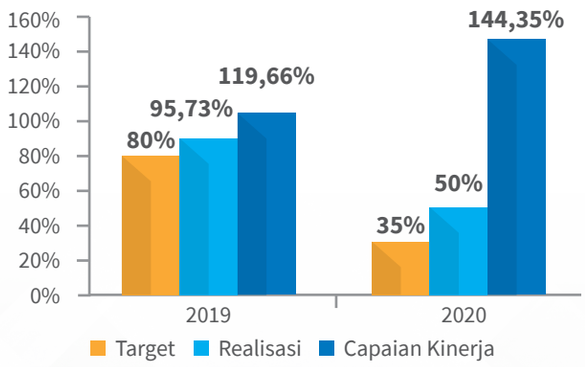

Gambar 3. 13 Perbandingan Capaian Kinerja IKP 2 Terhadap Target Kinerja Tahun 2019 – 2020

Berdasarkan data di atas didapatkan perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 yang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

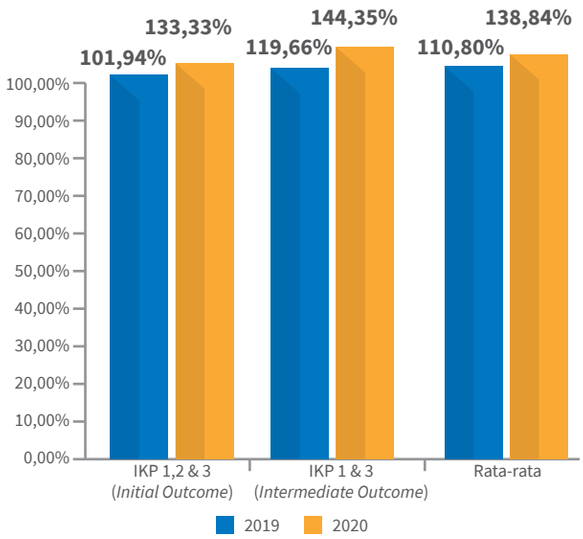

Gambar 3. 14 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Pada grafik di atas dapat dilihat jika capaian kinerja pada IKP 1 (*Initial Outcome*) dari tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 133,33% pada tahun 2020, demikian juga dengan capaian kinerja pada IKP 1 dan IKP 3 (*Intermediate Outcome*) mengalami kenaikan dari 119,66% pada tahun 2019 naik menjadi 144,35% pada tahun 2020 Dari angka capaian kinerja tiap IKP tersebut didapatkan nilai rata-rata capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan. Rata-rata capaian kinerja Tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Badan Litbang Tahun 2019, yaitu pada tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sebesar 110,80% sedangkan pada tahun 2020 meningkat sebesar 25,31%.

Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019

NO	REALISASI CAPAIAN KINERJA 2019 – 2020										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2020	KENAIKAN RATA-RATA CAPAIAN KINERJA
	2019					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2019	2020					
	IKP	SATUAN	TARGET	REAL	KINERJA		IKP	TARGET	REAL	KINERJA		
1	Prosentase hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomen-dasi kebijakan	%	80	81,55	101,94%	110,80	IKP1 (*Initial Outcome*) Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	75	100	133,33	138,84	25,31
							IKP2 (*Initial Outcome*) Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	75	100	133,33		
							IKP (*Initial Outcome*) Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	75	100	133,33		
2	Prosentase pemanfaatan hasil penelitian (t-2),t adalah tahun IKU	%	80	95,73	119,66%		Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	35	50	142,86		
							Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	30	43,75	145,83		

PERBANDINGAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2020 TERHADAP SASARAN PROGRAM TAHUN 2015-2020

Pencapaian realisasi kinerja tahun 2015-2019 Badan Litbang Perhubungan untuk beberapa indikator kinerja tidak dapat disandingkan karena adanya penambahan indikator kinerja baru dan perubahan satuan target kinerja di tahun 2017 dan 2018. Sasaran Strategis (SS) dan IKU tahun 2015-2016 masih mengacu pada dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan 2015-2019 sedangkan sasaran dan indikator kinerja tahun 2017 mengacu pada penetapan revisi IKU oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor SK 97 Tahun 2017. Pada tahun 2018, sasaran dan indikator kinerja mengacu pada penetapan revisi IKU oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor SK 142 Tahun 2018. Pada Tahun 2019 sasaran dan indikator kinerja mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor SK 98 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan.

Apabila dibandingkan antara IKU tahun 2015-2016 dengan IKU revisi tahun 2017 terdapat perubahan yang cukup signifikan. Jumlah sasaran strategis (SS) tahun 2015-2016 hanya sebanyak tiga buah yang diwujudkan dalam enam IKU. Sedangkan pada IKU revisi tahun 2017 jumlah sasaran strategis (SS) berkembang menjadi sembilan buah dengan sembilan belas IKU. Pada tahun 2018 berdasarkan rekomendasi atas evaluasi implementasi SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2017 oleh Kemenpan-RB, direkomendasikan agar IKU berorientasi *outcome* sehingga Badan Litbang Perhubungan melakukan penyesuaian dengan merevisi IKU dan dihasilkan enam SS dengan sepuluh IKU. Pada tahun 2019 indikator mengalami perubahan dari sepuluh Indikator Kinerja Utama (IKU) di awal tahun 2019 berubah menjadi hanya dua Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Area Akuntabilitas oleh Kemenpan RB yang mengamanatkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) harus berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* dari Badan Litbang Perhubungan. Demikian pula pada tahun 2020, telah ditetapkan lima Indikator Kinerja Program (IKP) dengan tiga Sasaran program yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor SK 144 Tahun 2020. Perubahan dan perbandingan sasaran strategis serta indikator kinerja Badan Litbang Perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 19 Perbandingan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

NO	TAHUN 2015-2016		NO	TAHUN 2017		NO	TAHUN 2018		NO	TAHUN 2019		NO	TAHUN 2020		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Stakeholder Perspective															
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan	1. Penelitian yang dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan	1.	Meningkatnya kualitas penelitian sesuai kebutuhan melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi	1. Pemanfaatan hasil penelitian dalam bentuk bahan rekomendasi kebijakan transportasi	1.	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi	1. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	1.	Meningkatnya kualitas dan kinerja penelitian melalui tersedianya bahan rekomendasi kebijakan transportasi	1. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan		N/A		N/A
									2	Persentase pemanfaatan hasil penelitian (t-2), t adalah tahun IKU			N/A		N/A
Customer Perspective															
		2. Penelitian naskah akademis/ kebijakan (NSPK) yang diajukan kepada Kemenhub	2	Meningkatnya kualitas kinerja penelitian dan pengembangan bidang transportasi	2. Tersusunnya naskah urgensi bidang transportasi	2	Meningkatnya pelaksanaan penelitian sesuai dengan kebutuhan	2. Persentase pemenuhan permintaan penelitian dari *stakeholder*	2			1.	Optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan	1.	*Initial Outcome:* Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang

NO	TAHUN 2015-2016		NO	TAHUN 2017		NO	TAHUN 2018		NO	TAHUN 2019		NO	TAHUN 2020		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		3. Rekomendasi atas kebutuhan perbaikan transportasi melalui klinik transportasi			3. Tersedianya rekomendasi penelitian dalam bentuk aplikasi, model, design/ prototype									2.	*Intermediate Outcome*: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)
		4. Jumlah aplikasi, model, design/ prototype			4. Tersedianya hasil rekomendasi penelitian berdasarkan usulan daerah/ instansi terkait									2	*Initial Outcome:* Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan
															Intermediate Outcome: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Kebijakn di Bidang Perhubungan pada (t-2)

NO	TAHUN 2015-2016		NO	TAHUN 2017		NO	TAHUN 2018		NO	TAHUN 2019		NO	TAHUN 2020		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
															3. *Initial Outcome:* Tingkat Kemanfaatan kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya
															Intermediate Outcome: Tingkat Kemanfaatan kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/ standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)

NO	TAHUN 2015-2016		NO	TAHUN 2017		NO	TAHUN 2018		NO	TAHUN 2019		NO	TAHUN 2020		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
												2.	Meningkatnya kualitas tata kelola Balitbanghub dalam penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi	4.	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi
												3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	5	Indeks RB Kementerian Perhubungan
Internal Process Perspective															
2.	Meningkatnya akses ke sumber informasi IPTEK perhubungan	5. Jumlah penelitian per peneliti	3.	Meningkatnya jejaring/ kerja sama penelitian dan pengembangan	5. Tersusunnya naskah kerja sama dengan lembaga penelitian/ instansi terkait	3	Meningkatnya harmonisasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi	3 Persentase pemanfaatan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan							

NO	TAHUN 2015-2016		NO	TAHUN 2017		NO	TAHUN 2018		NO	TAHUN 2019		NO	TAHUN 2020		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		6. Penelitian yang dikerja samakan			6. Terselenggaranya kerja sama penelitian transportasi			4 Persentase hasil forum ilmiah yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan							
			4.	Meningkatnya hasil identifikasi pemanfaatan penelitian melalui kegiatan *monitoring*	7. Terselenggaranya pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut hasil penelitian	4	Meningkatnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian	5 Persentase pemanfaatan hasil *monitoring* (t-2), t adalah tahun IKU							
						5	Meningkatnya publikasi dan diseminasi hasil penelitian	6 Persentase hasil penelitian yang terdiseminasi dan terpublikasi							
Learning and Growth Perspective															
3.	Meningkatnya informasi dan publikasi hasil litbang	7. Penelitian yang dipublikasikan	5.	Meningkatnya produktivitas kinerja SDM Badan Litbang Perhubungan	8. Proporsi tenaga fungsional peneliti Badan Litbang terhadap total pegawai	6	Meningkatnya kapasitas dukungan manajemen penelitian dan pengembangan di bidang transportasi	7 Tingkat Produktivitas Peneliti							

NO	TAHUN 2015-2016		NO	TAHUN 2017		NO	TAHUN 2018		NO	TAHUN 2019		NO	TAHUN 2020		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		8. Penelitian yang mendapat HKI			9 Proporsi anggaran penelitian terhadap anggaran total Badan Litbang Perhubungan			8 Peningkatan kompetensi SDM Badan Litbang melalui bimbingan teknis							
		9. *Database* Transportasi			10 Pelaksanaan penelitian per peneliti			9 Nilai AKIP Badan Litbang Perhubungan							
			6	Meningkatnya kualitas SDM Balitbang yang kompeten dan professional	11 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Litbang			10 Tingkat Maturitas SPIP							
			7	Meningkatnya kegiatan publikasi kelitbangan dan diseminasi hasil penelitian	12 Terwujudnya kegiatan publikasi kelitbangan dan diseminasi hasil penelitian										
					13 Tersusunnya publikasi nasional terakreditasi dibidang transportasi melalui *open journal system*										

NO	TAHUN 2015-2016		NO	TAHUN 2017		NO	TAHUN 2018		NO	TAHUN 2019		NO	TAHUN 2020		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
					14 Tersedianya hasil kelitbangan yang diajukan untuk memperoleh sertifikat terdaftar HKI										
					15 Tersusunnya buku Knowledge Sharing Program										
			8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja administrasi dan tata kelola pemerintahan	16 Terselenggaranya manajemen administrasi perkantoran yang akuntabel										
					17 Nilai AKIP Badan Litbang Perhubungan										
			9	Meningkatnya optimalisasi pengelolaan anggaran, BMN dan layanan perkantoran	18 Rata-rata rasio jumlah pemanfaatan BMN dari jumlah BMN total										
					19 Tingkat penyerapan anggaran Badan Litbang Perhubungan										

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Litbang Perhubungan tahun 2015-2016 tidak selengkap indikator kinerja revisi tahun 2017 dan 2018. Hal ini dikarenakan revisi IKU 2017 dan 2018 disusun dengan menggunakan pendekatan *business process* organisasi Badan Litbang Perhubungan sehingga memudahkan untuk menjabarkan ke dalam kegiatan di tingkat Eselon II sampai dengan Eselon IV.

Dari sembilan IKU lama yang digunakan pada tahun 2015-2016 sebanyak tujuh IKU masih digunakan, sementara indikator lainnya baru diwujudkan pada IKU revisi 2017. Pada tahun 2018, semua IKU pada IKU Revisi 2017 masih digunakan hanya saja beberapa sudah digabungkan dalam satu IKU, serta pada tahun 2019 IKU kembali direvisi menjadi hanya 2 IKU hal ini sebagai tindak lanjut sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Area Akuntabilitas oleh Kemenpan RB yang mengamanatkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) harus berorientasi *Outcome* dan yang hanya merupakan *core business* dari Badan Litbang Perhubungan sehingga hanya dua IKU yang dapat disandingkan dengan IKU revisi yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja revisi 2019. Demikian pula pada tahun 2020, berdasarkan Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020, terdapat lima IKP yang berorientasi *outcome* yaitu:

1. Indikator Kinerja Program 1 terbagi atas:
   Initial Outcome: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan.
   Intermediate Outcome: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)
2. Indikator Kinerja Program 2 yaitu:
   Initial Outcome: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan.
   Intermediate Outcome: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan.
3. Indikator Kinerja Program 3 terdiri atas:
   Initial Outcome: Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya.
   Intermediate Outcome: Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2).
4. Indikator Kinerja Program 4 yaitu Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi.
5. Indikator Kinerja Program 5 yaitu Indeks RB Badan Kementerian Perhubungan.

Secara rinci realisasi kinerja Badan Litbang Perhubungan tahun 2015-2018 terhadap target kinerja tahun 2015-2018 untuk seluruh indikator kinerja berdasarkan dokumen Reviu Renstra Tahun 2015-2019 yang telah dilakukan reviu pada tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah ini. Untuk delapan IKU tidak tercantum di dalam dokumen Reviu Renstra Tahun 2015-2019 yang direviu tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2019 IKU Badan Litbang Perhubungan telah dilakukan perubahan terhadap IKU yang bersifat *outcome* dan merupakan *core business* Badan Litbang

Perhubungan. Demikian pula pada tahun 2020, Indikator Kinerja Program bersifat *outcome* dan merupakan *core business* Badan Litbang Perhubungan.

Rata-rata capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2015 sebesar 114,76% dengan 9 IKU kemudian pada tahun 2016 rata-rata capaian kinerja turun menjadi 113,20% dengan jumlah IKU yang sama. Pada tahun 2017 rata-rata capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan menjadi 112,36% dengan 19 IKU kemudian di tahun 2018 dengan 10 IKU rata-rata capaian kinerja naik menjadi 118,11%. Tahun 2019 IKU Badan Litbang Perhubungan telah dilakukan perubahan menjadi dua IKU yang bersifat *outcome* dan merupakan core busines Badan Litbang Perhubungan sehingga rata-rata capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan di tahun 2019 menjadi 110,80%. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat lima Indikator Kinerja Program Badan Litbang Perhubungan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 131,75% atau naik 18,91% dari rata-rata capaian tahun 2019.

Tabel di bawah menampilkan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2015-2020 berdasarkan dokumen Reviu Renstra Tahun 2015-2019 yang telah dilakukan reviu pada tahun 2019 dan berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2020-2024.

Tabel 3. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015-2020 Berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2015-2019 dan Renstra Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 – 2020																	
			2015			2016			2017			2018			2019			2020		
			TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA
1	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	%	70	70,95	101,4	75	77	102,67	75	79,3	105,73	80	81,17	101,46	80	81,55	101,93	75	100	133,33
2	Persentase pemenuhan permintaan penelitian dari *stakeholder*	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51	38	74	60	67,93	113,22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase pemanfaatan kerja sama untuk kegiatan penelitian dan pengembangan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	100	142,86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase hasil forum ilmiah yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Terselenggaranya pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut hasil penelitian	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41	42	102,4	80	81,67	102,09	80	95,73	119,66	35	50	144,35
6	Persentase hasil penelitian yang terdiseminasi dan terpublikasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	97,26	121,58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Tingkat Produktivitas Peneliti	Rata-rata indeks	2	1,65	82,5	2	1,75	87,5	1,5	1,55	103	1,5	1,85	123,33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Peningkatan kompetensi SDM Badan Litbang melalui bimbingan teknis	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	86,76	108,45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Nilai AKIP Badan Litbang Perhubungan	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A (80)	A (80)	100	A (80)	A (80)	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Tingkat Maturitas SPIP	Level	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	3	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	*Initial Outcome*: Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	100	133,33

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 – 2020																	
			2015			2016			2017			2018			2019			2020		
			TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA
12	*Initermediate Outcome:* Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	32,56	108,53
13	*Initial Outcome:* Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	100	133,33
14	*Initermediate Outcome:* Tingkat Kemanfaatan Hasil Kajian Evaluasi Implementasi Program, Regulasi, Kelembagaan, Pendanaan, dan Dukungan Kebijakan/ Standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	43,75	145,83
15	Tingkat Ketersediaan Dukungan Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	100	125
16	Indeks RB Kementerian Perhubungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78	Menunggu penilaian Kemenpan-RB	Menunggu penilaian Kemenpan-RB

Tabel 3. 21 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2020 Berdasarkan Dokumen Reviu Renstra Tahun 2015-2019 Yang Direviu Tahun 2019 dan Renstra 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 – 2020																					
			2015			2016			2017			2018			2019			2020		
			TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA	TARGET	REAL	KINERJA
1	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan	%	70	70,95	101,4	75	77	102,67	75	79,3	105,73	80	81,17	101,46	80	81,55	101,93	75	100	133,33
2	Persentase pemanfaatan hasil penelitian (t-2), t adalah tahun IKU	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41	45,45	110,85	80	81,67	102,09	80	95,73	119,66	35	50	144,35

1. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2020 terhadap Target Kinerja Tahun 2015- 2020 Pada Indikator Kinerja Program Pertama, Kedua, Ketiga (*Initial Outcome*)**

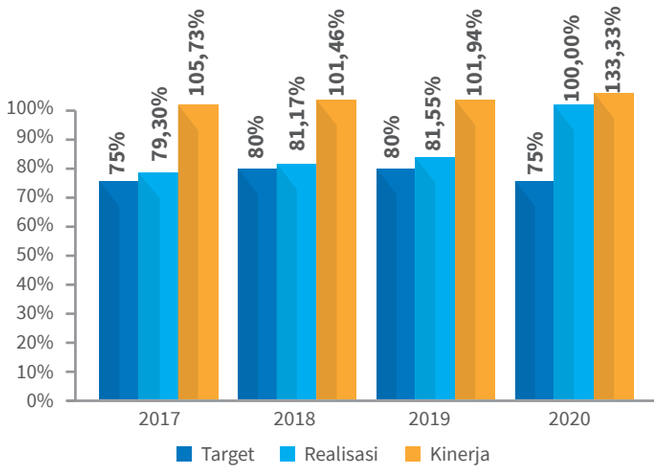

Gambar 3. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 1, 2, 3 (*Initial Outcome*) Terhadap Target Kinerja Tahun 2017-2020

IKP 1 ini merupakan indikator *outcome* Badan Litbang Perhubungan sebagai turunan dari indikator kinerja pada pencapaian kinerja di tingkat Kementerian Perhubungan, Oleh karena itu, indikator ini tidak mengalami revisi secara nomenklatur tetapi mengalami revisi target dari 75% menjadi 80% di tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020, indikator ini mengalami revisi baik nomenklatur maupun target dari 80% di tahun 2019 menjadi 75% di tahun 2020. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2017-2020, terlihat kinerja pemanfaatan rekomendasi kebijakan mengalami peningkatan. Pencapaian kinerja rata-rata IKP 1 selama kurun waktu 2017-2020 rata rata adalah sebesar 110,62%. Tercatat capaian kinerja pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 105,73% dengan target 75%. Tahun 2018 capaian kinerja sebesar 101,46%. Kemudian di Tahun 2019, capaian kinerja sebesar 101,94% dengan target 80% dan di tahun 2020 dengan target 75%, capaian kinerja sebesar 133,33%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017-2020 terhadap Target Kinerja Tahun 2017-2020 Pada Indikator Kinerja Program Kedua

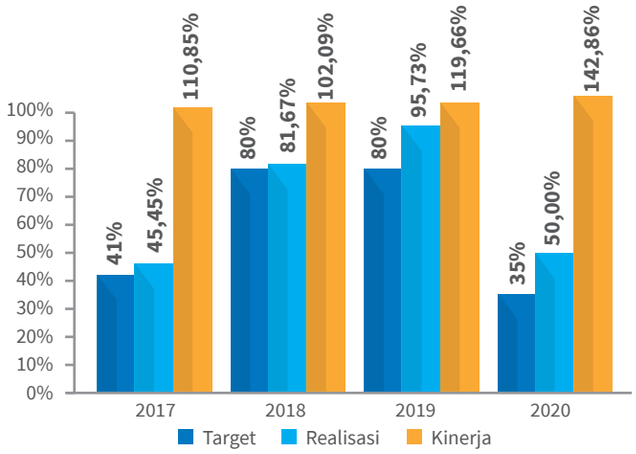

Gambar 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja IKP 1 dan IKP 3 (*Intermediate Outcome*) Terhadap Target Kinerja Tahun 2017-2020

Realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Persentase pemanfaatan hasil penelitian (t-2), t adalah tahun IKP Tahun 2019 dapat dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2017, 2018, dan 2020. Apabila dibandingkan sejak tahun 2017-2020, target indikator kinerja ini mengalami perubahan yaitu pada tahun 2017 target indikator ini sebesar 41% dan berubah pada tahun 2018-2019 menjadi sebesar 80% dan mengalami perubahan pula pada tahun 2020. Capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 110,85% turun menjadi 102,09% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 capaian kinerja kembali naik menjadi 119,66% demikian pula pada tahun 2020 naik menjadi 142,86% dengan rata-rata capaian kinerja sejak tahun 2017-2019 sebesar 118,87%. Pada Tahun 2020, target pada kemanfaatan rekomendasi kebijakan dan hasil kajian evaluasi mengalami penurunan yaitu 35 % dan 30 % dengan rata-rata capaian meningkat sebesar 144,35 %.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 TERHADAP TARGET KINERJA TAHUN 2020

Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024 ditujukan sebagai kerangka kerja yang berisikan rencana dan capaian target kinerja dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan perhubungan selama periode lima tahun. Selanjutnya dokumen Renstra menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. dokumen renstra yang digunakan sebagai pembanding adalah dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan 2020-2024.

Dasar penetapan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja salah satunya adalah dengan mempertimbangkan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun yang akan berjalan serta hasil evaluasi capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, dokumen Perjanjian Kinerja Badan Litbang Perhubungan mengalami revisi di bulan April, September, dan Desember 2020 sebagai tindak lanjut atas perubahan DIPA Badan Litbang Perhubungan pada bulan April dan September serta perubahan indikator kinerja program (IKP) pada Desember 2020.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Badan Litbang Perhubungan 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

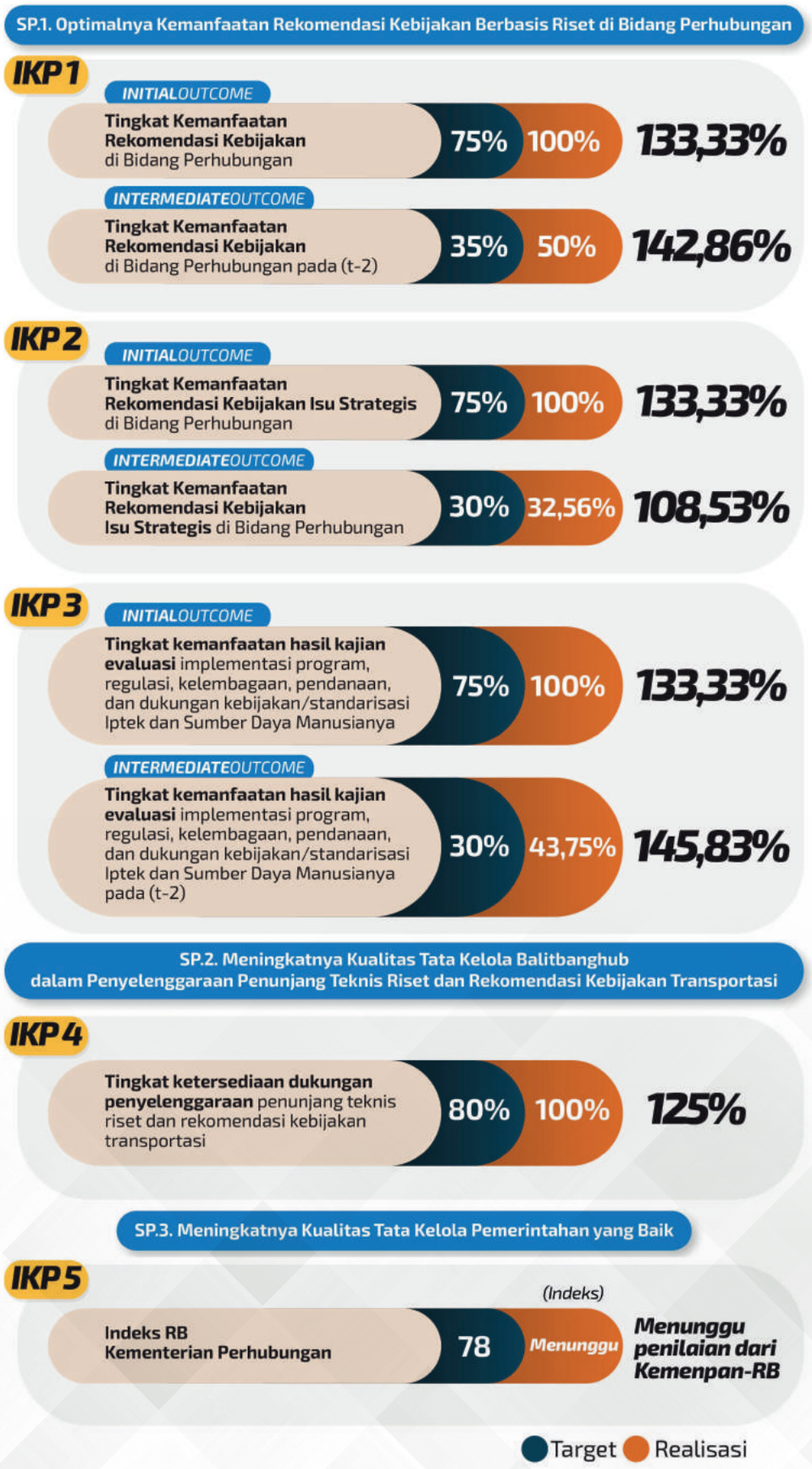

Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024

Berdasarkan data perbandingan di atas, tidak terlihat adanya perbedaan antara target *Review* Renstra dengan target Perjanjian Kinerja revisi tahun 2020. Hal ini dikarenakan penyusunan *Review* Renstra Badan Litbang Perhubungan 2020-2024 menggunakan IKP dan target revisi tahun 2020.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pada masa pandemi COVID-19, terdapat beberapa efisiensi yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan yaitu penggunaan sarana digitalisasi dan pemberlakuan kombinasi pola kerja secara *Working from Home* (WFH). Kegiatan Apel Pagi, Rapat, dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang pada masa sebelum pandemi dilakukan secara bertatap muka langsung, diganti dengan pertemuan secara daring, webinar memanfaatkan aplikasi *zoom meeting*. Selain itu, *survey* penelitian yang sebelumnya dilaksanakan langsung pada lokasi, diganti dengan memanfaatkan aplikasi *e-survey*.

Dalam tahapan ini dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat efisiensi/penghematan penggunaan sumber daya, khususnya sumber daya keuangan yang dialokasikan dalam DIPA Kementerian Perhubungan TA.2020 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dinyatakan dalam ketercapaian/ketidaktercapaian pelaksanaan Indikator Kinerja Program (IKP).

Pada Tahun 2017 telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 214 tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga untuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 249 tahun 2011 dicabut. Pada peraturan terbaru mengatur tata cara pengukuran pada proses evaluasi kinerja, yang terdiri 5 (lima) indikator, dengan pengelompokan kategori Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut:

a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Baik;
b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik;
c. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup;
d. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dikategorikan dengan Kurang; dan
e. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Kurang.

ANALISIS CAPAIAN KELUARAN

Capaian Keluaran (*Output*) Program Badan Litbang Perhubungan diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (*Output*) Program dengan target indikator Keluaran (*Output*) Program.

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Renstra Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	TARGET RENSTRA 2020	TARGET PK REVISI	REALISASI
CUSTOMER PERSPECTIVE							
Sp1	Optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan	1	***INITIAL OUTCOME***				
			Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	75	75	100
			INTERMEDIATE OUTCOME				
		2	Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	%	35	35	50
			INITIAL OUTCOME				
			Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis Yang Membutuhkan Penyelesaian Secara Cepat di Bidang Perhubungan	%	75	75	100
			INTERMEDIATE OUTCOME				
			Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis Yang Membutuhkan Penyelesaian Secara Cepat di Bidang Perhubungan	%	30	30	32,56
		3	***INITIAL OUTCOME***				
			Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	75	75	100
			INTERMEDIATE OUTCOME				
			Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	%	30	30	43,75

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	TARGET RENSTRA 2020	TARGET PK REVISI	REALISASI
SP2	Optimalnya kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	4	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi	%	80	80	100
SP3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	5	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	78	menunggu Penilaian dari Kemenpan-RB

$$CKP = \prod_{i=1}^{m}\left(\left(\left(\prod_{m}^{n}\frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i}\right)^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}}\right) \times 100\%$$

dimana :
CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program
m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program
n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Program

$$= \left(\left(\left(\frac{100}{75}\right)^{\frac{1}{1}}\right) \times \left(\left(\frac{50}{35}\right)^{\frac{1}{1}}\right) \times \left(\left(\frac{100}{75}\right)^{\frac{1}{1}}\right) \times \left(\left(\frac{32.56}{30}\right)^{\frac{1}{1}}\right) \times \left(\left(\frac{100}{75}\right)^{\frac{1}{1}}\right) \times \left(\left(\frac{43.75}{30}\right)^{\frac{1}{1}}\right) \times \left(\left(\frac{100}{80}\right)^{\frac{1}{1}}\right)\right)^{\frac{1}{7}} \text{x } 100\%$$

$$= 131{,}22\%$$

Analisis Pencapaian Keluaran (*Output*) Program Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 sebesar 131,22% yang diperoleh dari perkalian seperti di atas.

ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN

Persentase penyerapan anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun Anggaran 2020 didapatkan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

dimana :
P : Penyerapan Anggaran
RA : Akumulasi Realisasi Anggaran
PA : Akumulasi Pagu Anggaran

Tabel 3. 23 Tingkat Penyerapan Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 per Bulan

NO	BULAN	RPD	RPD Kumulatif	REALISASI ANGGARAN	TK (TINGKAT PENYERAPAN)
1	Januari	3.324.654.139	3.324.654.139	2.882.932.960	86,71%
2	Februari	7.557.481.447	10.882.135.586	7.778.621.913	102,93%
3	Maret	6.559.564.575	17.441.700.161	6.506.757.664	99,19%
4	April	7.691.939.950	25.133.640.111	7.973.187.580	103,66%
5	Mei	6.588.234.484	31.721.874.595	6.500.513.941	98,67%
6	Juni	4.665.642.787	36.387.517.382	4.321.860.958	92,63%
7	Juli	11.816.594.331	48.204.111.713	11.139.025.119	94,27%
8	Agustus	17.255.188.153	65.459.299.866	16.980.283.834	98,41%
9	September	15.686.824.235	81.146.124.101	14.353.960.850	91,50%
10	Oktober	22.222.333.271	103.368.457.372	20.027.145.396	90,12%
11	November	28.910.104.965	132.278.562.337	24.607.672.548	85,12%
12	Desember	25.068.514.663	157.347.077.000	32.419.012.303	129,32%
TOTAL		157.347.077.000	157.347.077.000	155.490.975.066	98,82%

*Sumber: Aplikasi *SMART* (http://monev.anggaran.depkeu.go.id)

$$P = \frac{155.490.975.066}{157.347.077.000} \times 100\%$$

$$P = 98{,}82\%$$

Analisis Penyerapan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Tahun 2020 mencapai 98,82% yang diperoleh dari pembagian Akumulasi Realisasi Anggaran dibagi dengan Akumulasi Pagu Anggaran dan dikalikan 100%.

ANALISIS EFISIENSI

Formula penghitungan efisisensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

dimana :
E : Efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
CKi : Capaian Keluaran I berdasarkan aplikasi *smart* sebesar 100%

$$E = \frac{((157.347.077.000 \text{ x } 100\%) - 155.490.975.066)}{(157.347.077.000 \text{ x } 100\%)} \text{ x } 100\%$$

$$E = 1{,}18\%$$

Tabel 3. 24 Perhitungan Analisis Efisiensi

NO	SASARAN PROGRAM	TARGET (%)	REALISASI (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI
1	Optimalnya Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset di Bidang Perhubungan	100	99,57	41.251.253.000	41.074.467.518	1,18%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	100	98,55	115.995.578.000	114.316.261.878	
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	100	100	100.246.000	100.245.670	
	TOTAL			**157.347.077.000**	**155.490.975.066**	**1,18%**

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Badan Litbang Perhubungan dalam rumus efisiensi 1,18%.

ANALISIS KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\%\right)}{n}$$

dimana :

K : Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

RAK : Realisasi Anggaran Kumulatif dengan Bulan i

RPDK : Rencana Penarikan dana Kumulatif sampai dengan Bulan ke n

n : Jumlah Bulan

Tabel 3. 25 Rencana Penarikan Dana Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 per Bulan

NO	BULAN	RPD	RPD KUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	RA KUMULATIF
1	Januari	3.324.654.139	3.324.654.139	2.882.932.960	2.882.932.960
2	Februari	7.557.481.447	10.882.135.586	7.778.621.913	10.661.554.873
3	Maret	6.559.564.575	17.441.700.161	6.506.757.664	17.168.312.537
4	April	7.691.939.950	25.133.640.111	7.973.187.580	25.141.500.117
5	Mei	6.588.234.484	31.721.874.595	6.500.513.941	31.642.014.058
6	Juni	4.665.642.787	36.387.517.382	4.321.860.958	35.963.875.016
7	Juli	11.816.594.331	48.204.111.713	11.139.025.119	47.102.900.135
8	Agustus	17.255.188.153	65.459.299.866	16.980.283.834	64.083.183.969
9	September	15.686.824.235	81.146.124.101	14.353.960.850	78.437.144.819
10	Oktober	22.222.333.271	103.368.457.372	20.027.145.396	98.464.290.215
11	November	28.910.104.965	132.278.562.337	24.607.672.548	123.071.962.763
12	Desember	25.068.514.663	157.347.077.000	32.419.012.303	155.490.975.066

Sumber: Aplikasi *SMART* (http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id)

Dari tabel di atas. sebagai contoh pada Bulan Januari diperoleh nilai konsistensi adalah sebagai berikut:

$$K = \left(\frac{RPDKn - |RPDKn - RAKn|}{RPDKn}\right) \times 100\%$$

$$K\,(\text{Januari}) = \frac{3.323.654.139 - (3.323.654.139 - 2.882.932.960)}{3.323.654.139} \times 100\%$$

$$K\,(\text{Januari}) = 86{,}74\%$$

Dengan cara yang sama, diperoleh nilai konsistensi untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 26 Nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran per Bulan Tahun 2020

NO	BULAN	TINGKAT KONSISTENSI PER BULAN
1	Januari	86,71%
2	Februari	97,97%
3	Maret	98,43%
4	April	100,03%
5	Mei	99,75%
6	Juni	98,84%
7	Juli	97,72%
8	Agustus	97,90%
9	September	96,66%
10	Oktober	95,26%
11	November	93,04%
12	Desember	96,57%

Sumber: Hasil Analisis 2020

Dari tabel di samping. untuk pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\%\right)}{n}$$

$$K = \frac{86{,}71 + 97{,}97 + 98{,}43 + 100{,}03 + 99{,}75 + 98{,}84 + 97{,}72 + 97{,}90 + 96{,}66 + 95{,}26 + 93{,}04 + 96{,}57}{12}$$

$$K = 96{,}57\%$$

Nilai Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi selama Tahun 2020 sebesar 96,57% yang berarti implementasi kinerja telah selaras dengan proses penganggaran pada penyusunan perjanjian kinerja revisi di Tahun 2020.

PENILAIAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN TINGKAT UNIT ESELON I

Dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Implemetasi Badan Litbang Perhubungan dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat unit Eselon II di lingkungan Badan Litbang Perhubungan

$$NKP = \frac{\text{Nilai Kinerja Implementasi dan Manfaat} + \text{rata} - \text{rata nilai satker}}{2}$$

Dimana:
NKP = Nilai Kinerja Tingkat Eselon I/program

Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%- 100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-

100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Badan Litbang Perhubungan dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%.

Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$$

dimana :
NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%). Mengacu pada hasil pengukuran efisensi Badan Litbang Pengukuran sebesar 0,58% maka nilai efisiensi dari Badan Litbang Perhubungan yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja sebagai berikut:

$$NE = 50\% + (\frac{1{,}18\%}{20} \text{ x } 50)$$
$$NE = 52{,}95\%$$

dimana :
NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Selanjutnya, nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada Badan Litbang Perhubungan.

Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NKI = (P \text{ x } W_P) + (K \text{ x } W_K) + (CKP \text{ atau } CKK \text{ x } W_{CK}) + (NE \text{ x } W_E)$$

dimana :
NKI : Nilai Kinerja dan Aspek Implementasi
P : Penyerapan Anggaran
K : Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan
CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program
N_E : Nilai Efisiensi
W_P : Bobot Penyerapan Anggaran
W_k : Bobot Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan
W_{CK} : Bobot Capaian Keluaran
W_E : Bobot Efisiensi

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
WP = 9,7%
WK = 18,2%
WCK = 43,5%
WE = 28,6%

$$NKI = (98{,}82 * 9{,}7\%) + (96{,}57 * 18{,}2\%) + (131{,}22 * 43{,}5\%) + (52{,}95 * 28{,}6\%)$$
$$= 99{,}39\%$$

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari Badan Litbang Perhubungan sebesar 99,39% dikategorikan Sangat Baik.

Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat

Dimana :
NKI : Nilai Kinerja Atas Aspek Implementasi
CSP : Capaian Sasaran Program berdasarkan aplikasi *SMART* (Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu) sebesar 100
Wi : Bobot Aspek Implementasi (33,33%)
Wm : Bobot Aspek Manfaat (66,7%)

$$NKI = (99{,}39 * 33{,}33\%) + (100 * 66{,}7\%)$$
$$= 99{,}83\%$$

Nilai Kinerja Atas Aspek Manfaat dan Implementasi Badan Litbang Perhubungan sebesar 99,83% termasuk kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil hitungan di atas maka didapatkan hasil perhitungan Nilai Kinerja Badan Litbang Perhubungan berdasarkan rumus di bawah ini:

Dimana:
NKP = Nilai Kinerja Tingkat Eselon I/program
Rata-rata Nilai Kinerja Satker berdasarkan aplikasi *SMART* (Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu) sebesar 86.

$$= \frac{99{,}83 + 86}{2}$$
$$= 92{,}92\%$$

Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Eselon I Badan Litbang Perhubungan sebesar 92,92%. termasuk kategori Sangat Baik.

CAPAIAN KEBERHASILAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN LAINNYA

Beberapa pengelompokan capaian keberhasilan lainnya serta kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Badan Litbang Perhubungan di Tahun 2020 antara lain:

CAPAIAN DARI EKTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Kelembagaan:

1. Pada tanggal 21 Desember 2020, terdapat 14 (empat belas) unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meraih predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi" dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemepan-RB), salah satunya adalah Sekretariat Badan Litbang Perhubungan;

Gambar 3. 18 Penganugerahan Penghargaan dari Kemenpan-Rb kepada Sekretariat Badan Litbang Perhubungan

2. Setelah mengikuti serangkaian audit untuk menetapkan kepatuhan Sistem Manajemen Mutu organisasi dengan persyaratan standar ISO 9001:2015 dan dinyatakan lulus. maka pada Tahun 2019, Badan Litbang Perhubungan dianugerahi sertifikasi manajemen ISO 9001:2015 yang diserahkan oleh Badan Sertifikasi TÜV NORD Indonesia dan NQA Indonesia. Perolehan sertifikasi ini adalah bukti nyata atas penerapan sistem manajemen yang baik di lingkungan Badan Litbang Perhubungan.

   TÜV NORD Indonesia memberikan 4 (empat) sertifikasi ISO 9001:2015 kepada:

   a. Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan Warta Penelitian Perhubungan yang telah menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar dengan ruang lingkup Pengelolaan Perpustakaan dan Warta Penelitian Perhubungan;

b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda yang telah menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar untuk ruang lingkup Penyedia Penelitian dan Pengembangan untuk Transportasi Antarmoda;

c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian yang telah menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar untuk ruang lingkup Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian.

d. Selain itu, NQA Indonesia memberikan sertifikasi ISO 9001:2015 kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut. Sungai. Danau. dan Penyeberangan yang telah menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar.

Pada Tahun 2020 dilakukan Reviu oleh kedua Badan sertifikasi tersebut dan menghasilkan rekomendasi ISO 9001:2015 dapat dipertahankan.

To whom it may concern

To whom it may concern

To whom it may concern

Gambar 3. 19 Penyerahan Sertifikat ISO, Jakarta, 29 Desember 2020

3. Jurnal Penelitian Transportasi Laut (JPTL) adalah salah satu majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku akreditasi 5 tahun. Hasil evaluasi dari tim Asesor Akreditasi yang terdiri dari penilai konten dan penilai manajemen untuk menilai jurnal yang masuk ke Arjuna. Total Akumulasi tim Asesor, JPTL masuk kategori Peringkat 4 (empat) dengan nilai (59), 50 (lima puluh) ≤ n < 60 (enam puluh). Peringkat 4 dikenali juga sebagai Sinta-4 (S4).

CAPAIAN DARI INTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Kelembagaan:

1. Badan Litbang Perhubungan berhasil dalam mengimplementasikan SAKIP tahun 2019 dengan total nilai sebesar 81,85 (Kategori A) berdasarkan penilaian Tim Evaluator Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan yang disampaikan melalui Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor UM. 006/ 28/ 6/ ITJEN-2020.
2. Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Nomor KP. 904/ 9/ 13/ ITJEN-2020 tentang Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan berhasil mempertahankan posisi pada peringkat PERTAMA dengan skor 3,177 (Tingkat Maturitas Level 3 “Terdefinisi”);
3. Dalam rangka Pemantauan Pelaporan Kinerja Melalui Aplikasi *e-performance* Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan kepada Unit Kerja Eselon 1 dan Eselon 2 di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berpartisipasi aktif dalam pengisian data kinerja melalui aplikasi *e-performance* pada Semester I dan II Tahun 2020. dengan perolehan penghargaan sebagai berikut:

a. Pada Semester I Tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan memperoleh penghargaan peringkat ke-1 tingkat Eselon 1. Selain itu, Sekretariat Badan Litbang Perhubungan memperoleh penghargaan perigkat ke-2 diikuti Pusat Litbang Transportasi Antarmoda pada peringkat ke-2, dan Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan pada peringkat ke-3 di tingkat Eselon 2 dalam Kepatuhan Pelaporan Kinerja melalui Aplikasi *e-performance* di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. Pada Semester II Tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan memperoleh penghargaan peringkat ke-3 tingkat Eselon 1. Di tingkat Eselon II, Puslitbang Transportasi Antarmoda peringkat ke-2 dan Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian pada peringkat ke-3 dalam Kepatuhan Pelaporan Kinerja melalui Aplikasi *e-performance* di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Semester I Tahun 2020

Semester II Tahun 2020

Gambar 3. 20 Penganugerahan Penghargaan dari Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan kepada Badan Litbang Perhubungan

Sumber Daya Manusia:

Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional yang ke-49 pada Tahun 2020, telah terpilih Sdri. Herawati, S.T., M.Sc., M.Eng., Peneliti Madya, Puslitbang Transportasi Antarmoda sebagai salah satu Pegawai Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

CAPAIAN KEGIATAN LINGKUP INTERNASIONAL

Sumber Daya Manusia:

1. Beberapa Pegawai Badan Litbang Perhubungan sepanjang Tahun 2020 telah ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan seminar Internasional. antara lain:
   a. Kepala Badan Litbang Perhubungan sebagai salah satu Pembicara pada *Webinar "Towards a Low Carbon Transport in Indonesia: A Technological Perspective"* pada tanggal 10 Desember 2020. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara Indonesia *Energy Transition Dialogue* (IETD) 2020.

Gambar 3. 21 Ibu Kepala Badan Litbang Perhubungan sebagai Pembicara dalam Rangkaian Acara IETD 2020

b. Pada tanggal 06 s.d. 10 Juli 2020, Peneliti Puslitbang Transportasi Udara, Sdri. Siti Subekti dan Sdri. Nurcholifah mengikuti *online course* "Aviation Fundamental" yang diselenggarakan oleh ICAO dan *Global Aviation Training*;
c. Selain itu, pada tanggal 13 s.d. 17 Juli 2020, Peneliti Puslitbang Transportasi Udara, Sdri. Dina Yuliana dan Sdri. Zulaichah mengikuti *online course 'Safety Management"* yang diselenggarakan oleh ICAO dan *Global Aviation Training*.

Penerbitan Internasional

1. Penerbitan makalah "*Predicting the impact of Trans java Toll Roads on Demand for Intercity Air Travel in Indonesia"* pada *Journal of Air Transport Management* (Vol 87, *August* 2020)
1. Penerbitan makalah *"Traditional Ship Stability Evaluation in Toba Lake" oleh Sdr. Abdy Kurniawan pada proceeding Excellent Human Resource for the Sustainable Safety of Inland Water and Ferries Transport in New Normal Era – International Webinar* (IWPOSPA 2020).
2. Penerbitan makalah "Kajian Optimalisasi PNBP Pada TUKS dan Tersus" pada *International Journal of Scientific dan Technology Research*, Vol 10, Issue 1, January 2021.

Forum Ilmiah:

Pada Tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan berhasil menyelenggarakan forum ilmiah dalam bentuk *International Seminar* yang dibuka oleh Menteri Perhubungan dengan melibatkan Narasumber dari Dalam dan Luar Negeri, yaitu:

1. Pada tanggal 17 Desember 2020 dengan tema "*Regulations and Challenges in Drone Operation*", diselenggarakan oleh Puslitbang Transportasi Udara.

   Penyelenggaraan webinar ini bertujuan untuk bertukar informasi dengan pakar internasional mengenai pengembangan operasi *drone* dan bagaimana praktiknya.

   Melalui webinar ini diharapkan dapat terkumpul gagasan dari berbagai pihak. Webinar dibuka oleh Bapak Menteri Perhubungan. Moderator dalam webinar ini adalah Hananto Prakoso, Ph.D. Webinar menghadirkan Para Pembicara dan Penanggap yaitu:

Tabel 3. 27 Narasumber Webinar

NO.	PEMBICARA	JABATAN	INSTANSI	TOPIK
1	Novie Riyanto	Direktur Jenderal Perhubungan Udara Indonesia	Kementerian Perhubungan	*Indonesian Drone Regulations: Safety and Security*
2	Mr. Riley Downing	*Senior Representative*	FAA	*United States (US) Drone Regulations: Safety and Security*
3	Professor Wouter Dewulf	*Director of C-MAT University of Antwerp Belgium* dan *VP Air Transport Research Society*	*University of Antwerp, Belgium*	*Best Practices of Drone Operations in European and How to Optimize the Drone Operations for Urban Area and Remote Islands in Indonesia*
4	Prof. Dr. Indroyono Soesilo	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia 2014-2015, Founder dan First Chairman dari Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia	Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia	*Prospects and Challenges on Drone Applications in Indonesia*
5	Professor Hikmahanto Juwana	Rektor Universitas Achmad Yani Bandung	Universitas Indonesia	*The Legal Liability of Comercial Drone Operations*
6	Colonel Agung Sasongkojati, MA.Sc., M.SS.	Paban II Puan Spotdirga	TNI AU	*Drone Operations and National Defense*
7	Prof. Dr. H. K. Martono, SH., LL.M., McSc., CLA.	Ahli Hukum Penerbangan	Universitas Tarumanegara	Pembahas

Butir Kesimpulan Seminar Internasional, yaitu:

a. Saat ini *drone* telah digunakan di berbagai bidang terutama dalam kegiatan non-pertahanan/sipil. Beberapa contoh penggunaan *drone* dalam kegiatan sipil seperti pemetaan udara, *search* and *rescue*, pemeriksaan berbagai infrastruktur, distribusi bantuan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Layanan pengiriman *drone* lebih murah dan lebih cepat daripada opsi berbasis jalan raya lainnya. Teknologi *Unmanned Aircraft System* (UAS) ini diperkirakan akan merevolusi dunia penerbangan. Alasan *Unmanned Aircraft System* (UAS) merevolusi dunia penerbangan:
   1) Menghilangkan kemungkinan melukai/mencederai manusia.
   2) Menggantikan pesawat konvensional dengan UAS dapat menurunkan biaya secara signifikan terutama tugas-tugas industri
   3) UAS terkadang terbang di ruang udara yang tidak digunakan dan kurang digunakan dan tidak membutuhkan tempat pendaratan yang khusus.
   4) Dapat mentransformasi kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan dari *local communities*.

5) Menggunakan sistem propulsi elektrikal, kendali terbang berbasis perangkat lunak, sudah termasuk sistem stabilisasi otomatis, dan kapabilitas baterai yang maju.

b. Pasar untuk *drone* komersil di dunia diproyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2020, *drone* komersil di pasar dunia diproyeksikan mendapatkan keuntungan 2,4 miliar dollar Amerika dari 634 unit *drone* yang terjual. Pada tahun 2025, *drone* komersil ini diproyeksikan akan terjual sebanyak 2.679 unit dengan keuntungan yang didapatkan sekitar 12,6 miliar dollar Amerika. Artinya dalam kurun waktu 2020-2025, diprediksi akan terjadi peningkatan pendapatan yang diperoleh dari *drone* komersil sebesar 425%.

c. Di Indonesia, teknologi *drone* sudah dimanfaatkan dalam berbagai kesempatan. Tahun 2013 dilakukan pemotretan lahan sekala kecil dengan menggunakan *Aeromodelcraft* oleh Deni Suwardhi, PhD. Tahun 2014 *drone* digunakan untuk kegiatan evaluasi reklamasi area pertambangan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang terbaru pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, *drone* juga dimanfaatkan untuk membantu menyemprotkan disinfektan di beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga prospek untuk memanfaatkan teknologi *drone* sangat terbuka sekali di Indonesia.

d. Dalam bidang militer, *drone* akan merevolusi peperangan, memimpin jalan menuju transformasi militer. Sebagian besar *drone* bersenjata jauh lebih besar dari *drone* komersial biasa dan dapat memiliki berat lebih dari 600 kg. *Drone* kecil juga dapat dirancang atau diadaptasi untuk membawa senjata atau digunakan dalam peran ISR dan *drone* nano atau mikro sering digunakan untuk pengumpulan intelijen. *Drone* besar yang dapat digunakan untuk tujuan taktis ISR tetapi juga untuk operasi dukungan medan perang dan serangan yang ditargetkan. *Drone* dapat memberi informasi langsung yang tepat dan tepat waktu pada operator, berpotensi mengurangi risiko bagi pilot dan personel militer di darat, mengurangi risiko kerusakan tambahan pada penduduk sipil dan infrastruktur lokal.

e. Selain membawa manfaat, *drone* juga dapat membawa masalah dan ancaman apabila tidak diawasi dan diatur dengan baik. Pada bulan Desember 2017, tim penyelamat sandera FBI kehilangan kesadaran situasional tentang target karena dengungan *drone* kecil terbang di sekitar mereka. Para penjahat menggunakan *drone* tidak hanya mengganggu tim penyelamat sandera, tetapi juga terus mengawasi agen, memberikan video kepada anggota lain melalui YouTube. *Drone* juga memainkan peran lebih besar dalam perampokan, penyelundupan. Profil ancaman tertinggi dari *drone* adalah *drone* yang membawa bahan peledak seperti yang terjadi dalam konflik Irak, Ukraina, Suriah, Libya dan Nagorno-Karabakh, bahkan terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro. *Drone* kecil juga menimbulkan masalah keamanan yang serius di bandara, dimana pesawat komersial yang menabrak *drone* atau menghisapnya ke mesin jet dapat menimbulkan bencana. Selama dua hari pada tahun 2018, serangkaian penampakan *drone* di Bandara Gatwick menyebabkan ditutupnya bandara tersebut,

membuat 140.000 orang terdampak. Namun tidak ada *drone* yang pernah ditemukan.

f. Perlunya memeriksa 3 (tiga) jenis tanggung jawab yang berbeda atas penyalahgunaan operasi UAS/UAV sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan regulasi UAV kepada Jenderal Perhubungan Udara. Tanggung jawab pidana diatur bagi orang yang mengemudikan atau pilot UAS baik pilot jarak jauh maupun operator yang terdaftar. Regulasi tanggung jawab sipil diatur apabila ada kerusakan yang dialami pihak kedua maupun pihak ketiga seperti ganti rugi kerusakan atau kompensasi. Selain itu perlu juga diatur tanggung jawab administrasinya, bisa berupa pencabutan atau penangguhan lisensi pilot UAS/izin operasinya, membuat *blacklist* akibat adanya tindak pidana. Tanggung jawab sipil kurang berkembang di sebagian besar negara, karena pertanggung jawaban kepada pihak kedua masih menjadi fokus. Ada juga kebutuhan untuk mengembangkan rezim tanggung jawab pihak ketiga yang mencakup kerusakan permukaan (orang atau barang) dan UAS/UAV atau pesawat sipil lainnya yang sedang beroperasi.

g. Di Amerika, saat ini aturan dari FAA untuk *drone* yang lengkap adalah sampai level *commercial line-of-sight* saja. Untuk level *Commercial beyond line-of-sight*, *commercial cargo and package delivery*, dan *Passenger on Board*, masih membutuhkan aturan yang jelas. Kebijakan FAA menyebutkan bahwa pilot dan operator UAS menjadi pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah hukum. Hukuman yang diberikan dapat berupa kurungan penjara atau denda. Pencabutan lisensi, *blacklist*, klaim gugatan hukum juga bisa dilakukan. Saat ini koordinasi sudah dilakukan antara FAA, U.S. *Department of Homeland Security*, U.S. *Department of Justice, U.S. Department of Energy*, dan juga *U.S. Department of Defence*.

h. Di Uni Eropa, berlaku peraturan UE 2019/947 (sebagaimana telah diubah dengan peraturan 2020/639 dan 2020/746) yang mengatur tentang UAS/UAV termasuk sertifikasi dan lisensi pilot jarak jauh UAS.

i. Di Indonesia, peraturan mengenai *drone* beberapa sudah diatur dalam UU No.1 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan No. 180 Tahun 2015, PM. No. 47 Tahun 2016, dan PM. No. 37 Tahun 2020. Beberapa contoh peraturan tersebut yaitu larangan untuk menerbangkan *drone* melebihi 150m diatas permukaan tanah tanpa izin, larangan untuk menerbangkan *drone* di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) atau membahayakan penerbangan. Jika melanggar dapat dikenai sanksi, denda, hingga hukuman pidana. Dibutuhkan sinkronisasi antara FAA/regulator dan Industri, serta promosi dari inovasi yang ada. FAA melakukan berbagai program edukasi dan *public outreach* mengenai UAS seperti: *B4UFLY, KNOW BEFORE YOU FLY*, *Drone Webinar Series*, *Buzzy The Drone*. Termasuk didalamnya adalah beberapa poster/rambu yang dikeluarkan FAA seperti "*No Drone Zone*" dan "*Where Do I Register My Drone*", dan juga buku panduan mengenai keselamatan publik untuk penggunaan *small drone*.

j. Dengan menyelenggarakan Integration Pilot Program (IPP) maka FAA dapat melakukan pengumpulan data secara terintegrasi terkait pengoperasian *drone* di berbagai kondisi dari 10 kota terpilih. Nantinya data ini akan digunakan oleh FAA untuk menyusun regulasi yang lebih terintegrasi dan kompleks

mengenai UAS. Namun terdapat tantangan yang masih ada yaitu: mengenai penerbangan diluar sudut pandang visual, dan masalah keuntungan sosial dan ekonomi.

k. Untuk mengatur operasi UAS, dapat digunakan remote identification/identifikasi jarak jauh. Tujuan dari identifikasi jarak jauh yaitu:
   1) Untuk menjawab masalah keselamatan dan keamanan penerbangan terkait operasi UAS di sistem ruang udara nasional, dan merupakan komponen penting dari manajemen lalu lintas dari UAS dimasa depan.
   2) Lembaga berwenang, baik nasional, daerah atupun lokal harus mengetahui lokasi dan identitas dari pesawat nirawak dan harus mampu mengetahui dan menentukan lokasi dari stasiun kendali.
   3) Persyaratan transmisi memberikan kemampuan untuk penyimpanan data untuk keperluan investigasi.

l. Sementara regulasi untuk teknologi penangkal *drone* masih belum jelas, militer memiliki peralatan kontra *drone* (*counter-drone*) yang efektif, dapat melacak, mengidentifikasi dan menonaktifkan *drone* yang beroperasi. Namun sistem militer tidak sesuai atau belum diuji untuk digunakan di kota-kota karena dapat mengganggu sinyal ponsel dan mungkin avionik pesawat lain. Sebagian besar sistem kontra-*drone* fokus pada *drone* penghobi ukuran kecil dan menengah, atau *drone* komersial (hingga 55 *pound*) karena tidak terdaftar pada sistem pertahanan udara konvensional. Radar juga kesulitan dengan pesawat terbang dengan kecepatan lambat dan ketinggian rendah, termasuk *drone*. Untuk ancaman *drone* besar, teknologi kontra-*drone* sebagian besar sama dengan teknologi anti-pesawat, dengan rudal dan sistem lain yang dibuat untuk menembak jatuh pesawat. Harus ada pengaturan *drone* sipil untuk membantu memastikan kerangka peraturan yang selaras untuk standar keselamatan tertinggi untuk operasi *drone*.

m. Pelajaran utama dari peperangan *drone* adalah pentingnya pertahanan udara spektrum penuh. Kekuatan besar seperti AS, China, dan Rusia sedang mengembangkan dan menerapkan sistem kontra-*drone*, termasuk *kinetic interceptors*, *electronic jammers*, dan *drone* kontra-*drone*.

n. Perlu adanya pertimbangan untuk mengembangkan standar teknologi *drone* dan standar pabriknya. Setiap *drone* harus terdaftar sebagai *drone* komersial, publik atau rekreasi, dan setiap pilot jarak jauh harus disertifikasi sebagai pilot jarak jauh komersial, publik atau rekreasi. *Drone* komersial dan pilot jarak jauh harus terdaftar dan disertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sedangkan untuk olahraga, dan *drone* rekreasi harus disertifikasi oleh organisasi berbasis komunitas nasional di bawah kendali Angkatan Udara Indonesia. Untuk memastikan pengembangan sistem kendali UAV, direktorat khusus untuk UAV harus dibentuk di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Untuk memberikan izin penerbangan untuk kegiatan seperti survei dan pemetaan, diperlukan Sistem Izin Satu Pintu termasuk pemberian izin keamanan, dengan pengawasan bersama oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Angkatan Udara Indonesia. Perlu dipersiapkan *droneports*

untuk menunjang operasi *drone* di perkotaan. Berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan:

1) Infrastruktur: *paved runway*, ATM (*Air Traffic Management*)/UTM (*Unmanned Traffic Management*), fasilitas pengujian.
2) Operasional: *Dedicated air space*, kombinasi awak dan tanpa awak, biaya struktur.
3) Pelayanan (*services*): ekosistem, *service* dan *support* pesawat tanpa awak, pelatihan pesawat tanpa awak.

o. Di masa mendatang, *drone* jenis *fixed wings* diprediksi akan menjadi jenis *drone* yang berperan sangat penting. Walaupun daya tampung *cargo drone* jenis *fixed wings* lebih sedikit dari moda transportasi yang lain, namun waktu pengiriman bisa lebih cepat dan dapat menuju daerah yang tidak bisa dijangkau oleh transportasi yang lain. *Drone* jenis *fixed wings* ini sangat berpotensi untuk beroperasi di daerah terpencil.

p. Operasi *Drone*/UAS harus dapat diulang, dapat diukur, dan mungkin dilakukan secara ekonomis.

Gambar 3. 22 Pelaksanaan Seminar Internasional I Tahun 2020

2. Pada tanggal 21 Desember 2020 dengan tema "*Integrated City Plannning and Sustainable Transport Development in the New Capital City Indonesia: Planning for Technology Impelementation of Autonomous Electric Vehicle for the New Capital City*"

   Penyelenggaraan webinar ini bertujuan untuk membahas isu-isu yang berkaitan arah pembangunan transportasi dan tata guna lahan di IKN, beserta solusi apa yang dapat diterapkan untuk mendukung keterintegrasian kedua aspek tersebut. Melalui webinar ini diharapkan dapat terkumpul gagasan dari berbagai pihak. Webinar dibuka oleh Bapak Menteri Perhubungan. Moderator dalam webinar ini adalah Prof. Haryo Winarso dan Dr. Ir. Sigit P. Santosa MSME IPU. Webinar menghadirkan Para Pembicara yaitu:

Tabel 3. 28 Narasumber Webinar

NO.	PEMBICARA	JABATAN	INSTANSI	TOPIK
1	Dr. Ir. Djoko Sasono, M.Sc.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Perhubungan	*The Ministry of Transportation's Strategic Planning to Support the New Capital City of Indonesia*
2	Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D.	Deputi Pengembangan Regional	Bappenas	*The New Capital City of Indonesia's Masterplan*
3	Prof. Jinhua Zhao	*Associate Professor of City and Transportation Planning, Director of JTL Urban Mobility Lab*	*Massachusetts Institute of Technology*	*Design of Multimodal Mobility System to Integrate Autonomous Vehicles, Shared Mobility, and Public Transport for New Capital City*
4	Prof. Tommy Firman/Dr. Ibnu Syabri/Dr. Delik Hudalah	*Associate Professor, The School of Architecture, Planning and Policy Development*	Institut Teknologi Bandung	*Research Agenda Related to New Capital City Development: Transportation and Spatial Planning*
5	Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT	Ketua Umum Masyarakat Indonesia/Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik – PUSTRAL	Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI); Univeristas Gadjah Mada.	*The Challange of Transportation Planning at the New Capital City of Indonesia*
6	Prof. Daniela Rus	*US President Council of Advisors for Science and Technology, Professor anda Director of the Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL)*	*Massachusetts Institute of Technology*	*Risk and Social Behavior for Decision Making for Autonomous Vehicles*
7	Prof. Jessika Trancik	*Associate Professor, Institute for Data, Systems and Society*	*Massachusetts Institute of Technology*	*Electric Based Sustainable Transportation Concept*
8	Prof. Bambang Riyanto Trilaksono	*Professor, School of Electrical Engineering and Informatics*	Institut Teknologi Bandung	*Autonomous Electric Vehicle Roadmap for The New Capital City of Indonesia*

Butir Kesimpulan Seminar Internasional dimaksud, sebagai berikut:

a. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ibu Kota Negara baru harus menjadi identitas bangsa Indonesia, berkonsep *smart city*, *green city* dan *sustainable city*. Kementerian Perhubungan bersama dengan kementerian lain bersama-sama untuk menyediakan perencanaan strategis dalam pembangunan ibukota baru. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan menyusun konsep perencanaan jaringan jalan konsep perencanaan sistem perkeretaapian di ibukota baru (IKN). Jaringan jalan tersebut akan memfasilitasi mobilitas dan pergerakan dalam maupun antar wilayah, serta menghubungkan jaringan lokal maupun antar kota.
b. Selain menyusun konsep perencanaan untuk transportasi jalan dan perkeretaapian, Kementerian Perhubungan juga menyusun konsep perencanaan untuk transportasi udara dan laut, baik konsep perencanaan untuk jaringan prasarana maupun konsep perencanaan untuk jaringan pelayanannya. Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memiliki 2 (dua) tujuan yaitu i) IKN diharapkan menjadi kota ramah lingkungan kelas dunia dan ii) penggerak perekonomian Indonesia dengan tetap berpegang pada simbol identitas nasional. Untuk memiliki kota bertaraf dunia maka harus harmonis dengan alam, sedangkan sebagai penggerak perekonomian Indonesia, IKN perlu dirancang bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan tapi juga mendorong perekonomian bagi Indonesia Timur.
c. Transportasi memiliki paradok yang unik, ketika angka *Gross Domestic Product* (GDP) meningkat maka hal tersebut juga akan meningkatkan beberapa aspek seperti pakaian, makanan, tempat tinggal namun transportasi tidak dapat dipastikan apakah meningkat atau turun. Transportasi merupakan satu-satunya sektor yang bisa mengalami kemunduran ketika pendapatan naik. Fenomena ini sering terjadi di negara-negara seperti Cina, Indonesia dan lainnya.
d. Dalam skala ekonomi, transportasi publik membantu dalam mengurangi kemacetan, mengurangi emisi CO^2 dan meningkatkan kesetaraan. Penggunaan Transportasi massal disarankan karena walaupun setiap perjalanan berbeda namun beberapa perjalanan memiliki pola perjalanan yang mirip sehingga bisa disatukan dalam media yang lebih efisien.
e. Permasalahan dari transportasi publik adalah belum dapat merespon permintaan orang yang dinamis dan bervariasi. Hal ini menjadi tantangan utama adalah bagaimana memformulasikan regulasi integrasi dan integrasi budaya.
f. Konsep pengembangan IKN sebagai kota metropolitan baru dilakukan dengan konsep struktur perkotaan dengan 1 pusat kota yang dikelilingi oleh kota pendukung. Sasamba (Samarinda-IKN-Balikpapan) sebagai Wilayah Mega Perkotaan, secara struktur perkotaan terdiri dari 1 atau 2 wilayah kota metropolitan dan desa kota.
g. Isu penting dalam pengembangan IKN adalah skala wilayah lahan perkotaan, teknologi informasi dan komunikasi, gaya hidup, pola perjalanan, regulasi dan biaya, kelembagaan dan keseriusan pemerintah untuk memikirkan IKN dan kota-kota sekitarnya secara keseluruhan melalui penelitian dan kebijakan yang tepat. Selain itu, pengembangan IKN harus menerapkan konsep *"trade follow the ship"* juga *"ship follow the trade"*
h. Pembangunan IKN harus didukung dengan Sistem logistik yang efektif dan efisien, terutama sistem logistik untuk penyediaan material pembanguan konstruksi IKN.

i. *Autonomus system* membutuhkan kemampuan untuk menghadapi skenario dengan komplek persepsi sensor seperti dalam mengemudi di malam hari, tanpa marka dan kondisi cuaca hujan. Berdasarkan data tersebut, kendaraan akan beroperasi seperti pengemudi berkendara dengan kondisi yang sama.

   Terdapat *social* dilemma yang perlu diantisipasi yaitu membiasakan pengemudi dengan sensor di mobil *autonomous*. Hal ini perlu sosialisasi dan menurunkan ego pengemudi ketika mengendarai *Autonomous Vehicle* (AV) untuk mengurangi resiko kecelakaan.

j. Dalam perencanaan untuk keberlanjutan transportasi listrik, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

   1) Mempertimbangkan kebutuhan perjalanan dan preferensi masyarakat;
   2) Memperhitungkan kemampuan teknologi, evolusi trend dan batas teknologi;
   3) Memastikan strategi peluasan charging infrastruktur dan insentif perilaku perjalanan dan kemampuan teknologi;
   4) Mengembangkan rencana transisi melalui pendalaman dekarbonisasi dan system transportasi cerdas;
   5) Insentif inovasi bisnis model dan *software* transisi.

k. *Roadmap* implementasi kendaraan otonomous untuk IKN dilakukan dalam beberapa tahap di setiap tahunnya mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2025, dimulai dari penguatan regulasi dan rencana infrastruktur sampai dengan pengujian AV level 4.

Gambar 3. 23 Pelaksanaan Seminar Internasional II Tahun 2020

CAPAIAN KEGIATAN LINGKUP NASIONAL

Rapat Koordinasi Teknis

Dalam rangka mewujudkan sinergitas perencanaan. Pelaksanaan dan pemanfaatan hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan antara pemerintah pusat. regulator. dan operator transportasi. Badan Litbang Perhubungan secara rutin menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penelitian dan Pengembangan bidang Transportasi. Rakornis yang dikemas dalam bentuk Dialog Indonesia: Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara diselenggarakan pada tanggal 26 – 27 Februari 2020 di Jakarta dibuka oleh Menteri Perhubungan dan dihadiri oleh peserta yang berasal dari unsur Kementerian/ Lembaga, Perguruan Tinggi, Dinas Perhubungan, Subsektor Perhubungan, BUMN, dan Asosiasi dengan tema "Pembangunan Infrastruktur untuk Konektivitas Ibu Kota Negara Baru".

Gambar 3. 24 Pelaksanaan Rakornis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020

Dialog bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana dan usulan penelitian dari sub sektor dan pemerintah daerah, dengan berlandaskan pada isu-isu strategis dan rencana induk penelitian. Selain itu, bertujuan pula untuk menghimpun berbagai data dan informasi dari *Stkeholders* terkait guna memperkaya kajian pengembangan transportasi Ibu Kota Negara dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam rangka pembangunan Kawasan di Ibu Kota Negara baru. *Output* yang dihasilkan dapat menjadi acuan untuk dilakukannya pembangunan serta dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk selanjutnya dirumuskan langkah-langkah strategis yang perlu diambil.

Butir Kesimpulan Rakornis:

1. Pembangunan Ibu Kota Negara mencontoh kesuksesan Ibu Kota di Negara-negara maju di dunia termasuk dalam hal transportasi. Konektivitas yang *smart*, terintigerasi, dan berkelanjutan adalah poin penting dalam mengembangkan Ibu Kota Negara;
2. Dalam proses penyusunan sistem transportasi di Ibu Kota Negara melibatkan dunia pendidikan/akademisi baik di Perguruan Tinggi maupun Universitas diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep transportasi yang inovatif dan *out of the box*;
3. *Masterplan* Ibu Kota Negara sedang dalam proses penyusunan dan selanjutnya akan dibentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara (BOI) setelah RUU ditetapkan oleh DPR;
4. Terkait dengan skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara, disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi bahwa saat ini terdapat 30 investor yang berminat terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara, dan tidak ada jaminan pemerintah atas investasi swasta. Desain sistem transportasi perkotaan mengedepankan *autonomous* dan *electric vehicle* baik untuk transportasi publik maupun transportasi pribadi, sedangkan untuk kendaraan konvensional dibatasi tidak bisa masuk wilayah inti Ibu Kota Negara;
5. Dalam kesempatan yang sama Duta Besar Inggris menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara menjadi perbincangan para tokoh dunia dan pemerintah Inggris bersedia untuk membantu dan *sharing* pengalaman. Demikian pula dengan Jepang melalui perwakilannya di Indonesia menyampaikan minat untuk dapat membantu secara finansial dalam pembangunan Ibu Kota Negara;
6. Perwakilan dari Bappenas menyampaikan bahwa *masterplan* Ibu Kota Negara sudah menyesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ibu Kota Negara yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa KLHS Ibu Kota Negara telah merekomendasikan 10 prinsip *smart and forest city*, 5 peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan, 4 usulan kebijakan untuk dukungan berkelanjutan, dan 4 kebutuhan studi kelayakan lanjutan. KLHS yang saat ini tengah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya;
8. Pemimpin Redaksi Kompas dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pembangunan Ibu Kota Negara tidak hanya mengedepankan teknologi tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Sebagai salah satu media nasional, Kompas berharap pembangunan Ibu Kota Negara selalu bersinergi dan sejalan dengan seluruh peraturan yang telah dan akan ditetapkan.

Webinar Series

Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan telah menyelenggarakan beberapa *Webinar Series* sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Tema Webinar

NO.	TEMA WEBINAR	WAKTU PELAKSANAAN
1	Transportasi Sehat, Indonesia Maju	15 September 2020
2	Efektivitas Peraturan, Standar Kesehatan Sarana Prasarana Transportasi Udara	16 September 2020
3	Kebijakan Pengendalian dan Ketahanan Bisnis Angkutan Jalan dan Perkeretaapian Saat Pandemi	18 September 2020
4	Strategi Pemulihan Bisnis Angkutan Jalan dan Perkeretaapian	21 September 2020
5	Resiliensi Kinerja dan Strategi Pemulihan Bisnis Sektor Transportasi Udara Pada Saat dan Pasca Pandemi COVID-19	23 September 2020
6	Ketahanan Angkutan Logistik Pada Masa Pandemi COVID-19	24 September 2020
7	Strategi Adaptasi dan Pemulihan/*Recovery* Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Pada Saat dan Pasca Pandemi COVID-19	29 September 2020
8	Strategi Pemulihan Angkutan Logistik Pada Masa Pandemi COVID-19	01 Oktober 2020
9	Efektivitas PSBB dan Dukungan Logistik Kemanusiaan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Pada Masa Pandemi COVID-19	08 Desember 2020

Lomba Digital Poster

Masih dalam rangkaian memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan mengajak kalangan masyarakat untuk mengkampanyekan agar tetap produktif dalam bekerja, namun tetap memprioritaskan protokol kesehatan dan keselamatan masyarakat, melalui ide-idenya dalam Lomba *Digital Poster* dengan tema "Wujudkan Transportasi Sehat, Aman, dan Produktif Menuju Indonesia Maju" yang dibagi dalam 5 (lima) Sub Tema, yaitu:

1. Transportasi Jalan :
   Paradigma Baru Mewujudkan Transportasi Jalan yang Sehat, Aman, dan Produktif Menuju Indonesia Maju
2. Transportasi Perkeretaapian :
   Paradigma Baru Mewujudkan Transportasi Perkeretaapian yang Sehat, Aman, dan Produktif Menuju Indonesia Maju
3. Transportasi LSDP :
   Paradigma Baru Mewujudkan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Sehat, Aman, dan Produktif Menuju Indonesia Maju
4. Transportasi Udara :
   Paradigma Baru Mewujudkan Transportasi Udara yang Sehat, Aman, dan Produktif Menuju Indonesia Maju
5. Transportasi Antarmoda :
   Paradigma Baru Mewujudkan Transportasi Antar Moda yang Sehat, Aman, dan Produktif Menuju Indonesia Maju

Lomba *Digital Poster* diselenggarakan dari tanggal 7 s.d. 28 September 2020. Karya Desain yang diterima oleh Badan Litbang dinilai oleh Juri profesional dan diambil juara 1,2 dan 3 terbaik pada setiap kelompok Lomba Moda Transportasi. Desain digital poster yang terpilih menjadi pemenang menjadi Hak Milik Badan Litbang Kementerian Perhubungan dan dipergunakan untuk kepentingan institusi.

Berikut hasil karya desain yang memperoleh peringkat pertama dari tiap sub tema dalam Lomba Digital Poster Tahun 2020:

Transportasi Antarmoda

Transportasi Jalan

Transportasi Perkeretaapian

Transportasi Laut SDP

Transportasi Udara

Gambar 3. 25 Hasil Karya Peringkat 1 Lomba Digital Poster dari Tiap Sub Tema

Webinar Milenial

Pada tahun 2020 diselenggarakan pula Webinar Milenial sebagai berikut:

a. **Harapan Generasi Milenial Terhadap Transportasi Masa Depan di Ibu Kota Negara diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2020**

   Generasi muda sebagai agent of change diharapkan dapat membuat perubahan dalam pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Generasi muda yang saat ini tumbuh bersama perkembangan teknologi tentunya memiliki karakter yang mandiri dan inovatif untuk memberikan perubahan termasuk di sektor transportasi. Generasi milenial mengharapkan kondisi transportasi publik yang nyaman, dapat diandalkan, murah, tepat waktu, memiliki cakupan yang luas, ramah lingkungan serta adanya integrasi antar moda. Selain itu perlu juga adanya pemanfaatan teknologi dan sumber energi yang terbarukan. Dalam membangun sistem transportasi diperlukan perencanaan yang baik, saat ini pemerintah akan membangun IKN dengan transportasi yang terintegrasi yaitu terhubung aktif dan mudah diakses. Dengan adanya inovasi yang disampaikan hari ini diharapkan nantinya dapat menjadi masukan dalam pengembangan Ibu Kota Negara.

Gambar 3. 26 Webinar Milenial I Tahun 2020

b. Peran Generasi Muda Dalam Mendukung Kreatifitas Transportasi Laut Dalam Merajut Nusantara (NKRI) Melalui Kajian Potensi Pengoperasian *Wing in Ground* (WIG) *Craft* Untuk Menunjang Pariwisata diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2020.

Indonesia pernah melaksanakan proyek pembangunan WIG Craft melalui kerja sama antara BPPT dan PT. Dirgantara Indonesia antara tahun 2005-2008, dari kerja sama tersebut dihasilkan desain prototipe WIGE8 dengan skala tingkat kesiapan teknologi 6 (dari skala 1-9). Secara teknis, WIG dapat dioperasikan di Indonesia karena dasar hukum yang ada dapat diarahkan mengikuti regulasi IMO, dan WIG yang dibangun di luar negeri telah menyesuaikan dengan peraturan badan klasifikasi negaranya yang merupakan aturan turunan dari IMO. Secara ekonomi/ finansial, WIG craft dapat dioperasikan di wilayah destinasi prioritas, dapat diidentifikasi bahwa biaya inestasi, operasional dan perawatan membutuhkan biaya yang tinggi sehingga kemungkinan tarif per penumpang juga akan tinggi (sistem carter harian), meskipun demikian WIG memiliki keunggulan dari aspek kecepatan sehingga dalam 1 hari perjalanan dapat menjelajahi hampir seluruh titik wisata favorit di kawasan Taman Nasional Komodo.

PENANDATANGANAN KERJA SAMA PENELITIAN

I. Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan *Implementing Arrangement*

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan *Implementing Arrangement* antara Badan Litbang Perhubungan dengan ITB, UGM, UI, ITS, Universitas Pertahanan, Unhas, Universitas Mulawarman, dan Angkasa Pura II (Persero) diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2020 sebagai salah satu rangkaian acara dari Rakornis Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020.

Gambar 3. 27 Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan *Implementing Arrangement*

II. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Merespon Dampak Pandemi COVID-19 dan Strategi *Recovery* Pada Tatanan Normal baru di Sektor Transportasi

Penandatanganan kolaborasi kerja sama penelitian antara Badan Litbang Perhubungan dengan Perguruan Tinggi (ITB, UGM, UI, dan ITS) ini diselenggarakan secara virtual pada tanggal 02 Juni 2020 dan dihadiri oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kolaborasi ini diperlukan untuk dapat meningkatkan efektivitas, kualitas, dan kecepatan dalam memperkuat perumusan kebijakan di Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan koordinator serta pembina teknis di sektor transportasi, khususnya dalam merespon dampak pandemi COVID-19 dan strategi *recovery* pada tatanan normal baru di sektor transportasi.

Gambar 3. 28 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Merespon Dampak Pandemi COVID-19

III. Pada Selasa, 08 Desember 2020, Badan Litbang Perhubungan menyelenggarakan **Penandatangaan Nota Kesepahaman Kegiatan Penelitian untuk tahun 2021 dengan 4 Lembaga dan 15 Perguruan Tinggi** yaitu BPPT, Balitbang Kementerian Kesehatan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Persatuan Insinyur Indonesia (1 penelitian), UGM (10 penelitian), ITB (14 penelitian), UI (15 penelitian), STP (1 penelitian), Univ. Sriwijaya (1 penelitian), Univ. Cenderawasih (2 penelitian), Undip (2 penelitian), Unpad (1 penelitian), STTD (1 penelitian), ITS (2 penelitian), Univ. Mulawarman (2 penelitian), Univ. Nusa Cendana (1 penelitian), Udayana (1 penelitian), Unpati (1 penelitian), dan Unhas (3 penelitian).

Gambar 3. 29 Penandatanganan Nota Kesepahaman Badan Litbang Perhubungan

CAPAIAN INTERNAL BADAN LITBANG PERHUBUNGAN

Terdapat beberapa Penelitian Isu Strategis yang dapat diselesaikan oleh Peneliti di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan selama tahun 2020, yaitu:

PENELITIAN ISU STRATEGIS

Penelitian strategis yang dihasilkan oleh Badan Litbang Perhubungan pada Tahun 2020, yaitu:

Penelitian Bidang **Transportasi Antarmoda**

- Integrasi Transportasi Dalam Mendukung Pelayanan Penumpang di Propinsi Bali (Studi Kadus Terminal Mengwi Kabupaten Badung).
- Peningkatan Konektivitas Antarmoda di Wakatobi.
- Evaluasi Integrasi Fasilitas Alih Moda Pada Simpul Transportasi di Perkotaan Yogyakarta.
- Integrasi Informasi Angkutan Barang (StudiKasus: Jalan dan Pelabuhan).
- Preferensi Masyarakat terhadap Pembangunan Fasilitas Transportasi di Wilayah IKN.
- Keterpaduan Pelayanan Transportasi Antarmoda di Kota Palembang.
- Peningkatan Efektivitas di Simpul Transportasi Dalam Mendukung Integrasi Transportasi Antarmoda di Kota Medan.
- Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra terhadap Efisiensi Biaya Logistik.
- Perbandingan Teknis dan Ekonomi Pemilihan Moda Transportasi di IKN.
- Analisis Biaya Transportasi terhadap Biaya Logistik Perikanan di Kota Kupang.
- Kesiapan Angkutan Feeder dalam Mendukung Transportasi di IKN.
- Sistem Informasi Transportasi di Kawasan Destinasi Wisata Morotai.
- Supply Chain Sektor Perikanan di NTT.
- Efektivitas Pengaturan Shift Jam Kerja Terhadap Pola Perjalanan Transportasi di Jabodetabek.
- Pengembangan Alert Healthy System di Simpul Transportasi (studi kasus Transjakarta).
- Pemanfaatan Big Data Dalam Melakukan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas di JalanTol.
- PeranT ransportasi Dalam Pola Distribusi Sektor Perikanan di Kota Kupang.
- Evaluasi Integrasi Transportasi Perkotaan Bandung.
- Evaluasi Integrasi Transportasi Perkotaan Medan.
- Pola Perjalanan Masyarakat di Wilayah Jabodetabek Sebelum Pandemi, Periode PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- Kesiapan Konektivitas Antarmoda Dalam Menghadapi Adaptasi Baru yang Efektif dan Aman.
- Efektivitas SIKM, Rapid Test, dan PCR Test untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 terhadap Perusahaan Operator Transportasi Logistik.
- Prosedur dan Persyaratan Teknis Distribusi Logistik untuk Vaksin COVID-19 dari Bandara Menuju Rumah Sakit atau Puskesmas.
- Pola Perjalanan Masyarakat di Wilayah Jabodetabek Sebelum Pandemi, Periode PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- Kesiapan Konektivitas Antarmoda Dalam Menghadapi Adaptasi Baru yang Efektif dan Aman.

Penelitian Bidang **Transportasi Jalan dan Perkeretaapian**

- Kajian Biaya Jasa dan Kuota Ojek Online.
- Kajian Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- Kajian Kelayakan Pengoperasian Bus AKAP Kelas Pelayaran Eksekutif Untuk Mendukung Pariwisata di Provinsi NTT.
- Kajian Efektivitas Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Buy the Service.
- Kajian Efektivitas Penyelenggaraan UPPKB.
- Kajian Penentuan Potensi Lokal Pusat Distribusi dan Pola Distribusi Depo/ Garasi di Kawasan Industri.
- Evaluasi Perilaku Pengemudi Bus dan Truk Untuk Mengurangi Kecelakaan dalam Rem Blong.
- Efektivitas Pemasangan Marka Pengurangan Kecepatan di Ruas Jalan Tol (Studi Kasus: Tol Cipali).
- Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Jembatan Ngujang Jl. Raya Ngantru Nomor Ruas 089.
- Kajian Pengembangan Aksesbilitas Bali Utara-Selatan.
- Kajian Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Jalan Nasional Denpasar-Gilimanuk.
- Kajian Efektivitas Penyelenggaraan Terminal Tipe A.
- Kajian Kesiapan Operator Angkutan Barang Terhadap Penerapan Kebijakan Larangan Over Dimension Over Load (ODOL) Dalam Rangka Ketertiban Angkutan Barang di Jalan.
- Kajian Pengembangan Transportasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Borobudur.
- Evaluasi Penyelenggaraan Layanan LRT Perkotaan di Palembang dan Jakarta.
- Kajian Kebutuhan Tempat Parkir di Kawasan Industri Cikarang.
- Kajian Potensi Pemudik Angkutan Lebaran Th.2020 Berbasiskan Online Survei(SOL1).
- Survei Phone Interview (Recall) Terhadap Pemudik Jabodetabek.
- Kajian Pergerakan Orang pada Libur Panjang Maulid Nabi Th. 2020.
- Kajian Potensi Pergerakan Perjalanan Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
- Survei Phone Interview (Re-Call) Terhadap Pemudik Jabodetabek.
- Kajian Penggunaan KRL Jabodetabek Pada SaatKondisi PSBB.
- Shifting Penggunaan Angkutan Umum ke Kendaraan Pribadi pada Masa Pandemi COVID-19.
- Persepsi Masyarakat Terhadap Angkutan Lebaran Tahun 2020 Saat Pandemi COVID-19.
- Pengaruh Penerapan PSBB Terhadap Keinginan Mudik 2020.
- Kajian Efektivitas Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Jalan dalam Rangka

- Pencegahan Virus COVID-19.
- Kajian Efektivitas Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19.
- Kajian Pemodelan Pergerakan Orang di Bidang Transportasi Jalan Selama Pandemi COVID-19.
- Kajian Permodelan Pergerakan orang di Bidang Perkeretaapian selama Pandemi COVID-19.
- Kajian Dampak Ekonomi Selama Pandemi COVID-19 Terhadap Bisnis Angkutan Jalan. dd. Kajian Dampak Ekonomi selama Pandemi COVID-19 Terhadap Bisnis Angkutan Perkeretaapian.
- Kajian Model dan Strategi Pemulihan Bisnis Angkutan Jalan Pasca Pandemi COVID-19. ff. Kajian
- Model dan Strategi Pemulihan Bisnis Angkutan Perkeretaapian Pasca Pandemi COVID-19.
- Kajian Peran Transportasi Perkeretaapian mempercepat Distribusi Logistik Kemanusiaan Selama Pandemi COVID-19.
- Kajian Antisipasi Terhadap paradigma Baru di Bidang Perkeretaapian selama dan Pasca Pandemi COVID-19.

Penelitian Bidang **Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan**

- Kajian Angkutan Penyeberangan untuk Feeder Tol Laut di NTT.
- Kajian Rerouting Kapal Penyeberangan Milik Gapasdap Ke Lintasan Penyeberangan Indonesia Timur.
- Kajian Demand Pull dan Supply Push Untuk Pelabuhan Pangkal Balam.
- Kajian Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Laut.
- Kajian Dukungan Distribusi Vaksin pada Sektor Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- Kajian Mitigasi Bencana Hidrometeorologi dan Tsunami Sektor Transportasi Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan.
- Kajian Kriteria Cluster Wilayah Pelayanan Tol Laut.
- Kajian Pengembangan Rute Pelayaran Penyeberangan Ketapang (Banyuwangi)–Lembar (Lombok).
- Kajian Angkutan Penyeberangan untuk Feeder Tol Laut di Maluku.
- Kajian Antisipasi Penanggulangan Pembuangan Limbah Kapal di Laut.
- Kajian Kriteria Kawasan Pendukung Hinterland Pelabuhan.
- Kajian Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TUKS dan Tersus.
- Kajian Pengembangan Pelabuhan Sokoi dalam Mendukung Peningkatan Potensi Kawasan.
- Kajian Profil Sungai Membramo dan Potensi Pengembangannya.
- Analisis dan Evaluasi Dampak Pandemi COVID-19 pada Subsektor Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
- Logistik Kemanusiaan pada Moda Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
- Efektivitas PM Nomor 18 Tahun 2020 dan PM Nomor 25 Tahun 2020 Guna Menekan Penyebaran COVID-19.
- Resiliensi Operator Moda Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Akibat Pandemi COVID-19.
- Dampak Kebijakan PSBB Wilayah Jawa Pada Wilayah Diluar Jawa Melalui Moda Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
- Kebijakan Stimulus Ekonomi Untuk Pemulihan Subsektor Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan untuk Menyongsong The New Normal.

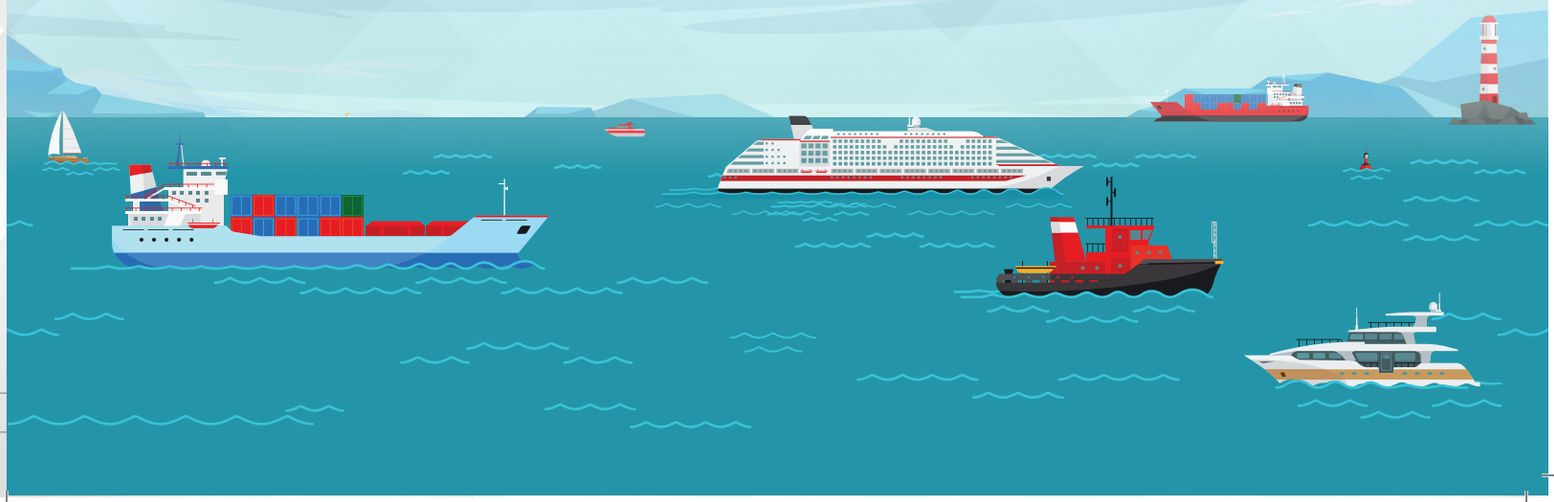

Penelitian Bidang **Transportasi Udara**

- Pengembangan Rute Baru Penerbangan Perintis.
- Mitigasi Dampak Lingkungan Akibat Operasi Bandar Udara dan Pengaruh Lingkungan Terhadap Operasi Bandar Udara Baru di Provinsi Bali.
- Studi Kelayakan Pembuatan Aerospace Park di Indonesia.
- Studi Penyusunan Mekanisme Dan Metode Perhitungan Emisi Gas.
- Harmonisasi ATFM dengan A-CDM guna Kelancaran Layanan Penerbangan di Ruang Udara dan Bandar Udara.
- Perancangan Smart Airport untuk Pengoptimalan Operasional Bandar Udara di Ibu Kota Negara Baru.
- Pengembangan Anti Bird Strike yang Efektif untuk Bandar Udara di Indonesia.
- COVID-19 Outbreak dan Dampaknya di Sektor Penerbangan.
- Pemodelan Pergerakan Transportasi Penumpang dan Barang dalam Merespon Pandemi COVID-19 di Indonesia.
- Pemodelan Potensi Dampak Ekonomi dari Pandemi COVID-19 pada Bisnis Penerbangan di Indonesia.
- Analisis Skenario Kebijakan Pemulihan Operator Industri Penerbangan dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 di Indonesia.
- Standar Kesehatan di Sarana dan Prasarana Transportasi Udara dalam Antisipasi Penyebaran Pandemi COVID-19.
- Perubahan Perilaku Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Udara sebagai Respon terhadap Pandemi COVID-19.
- Analisis Efektivitas Peraturan Sektor Penerbangan terhadap Kebijakan PSBB dan Mitigasi Resiko Penyebaran COVID-19.
- Dampak COVID-19 terhadap Resiliensi Kinerja Sektor Penerbangan dan Sektor Lainnya.
- Model Strategi Pemulihan Bisnis Penerbangan Pasca Pandemi COVID-19.
- Kesiapan Sarana Prasarana Transportasi dalam Mendukung Distribusi Vaksin COVID-19.
- Pelayanan Transportasi dalam Distribusi Logistik Vaksin COVID-19.

DAFTAR PENELITIAN YANG BERSERTIFIKASI HAKI

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. HAKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*Property*) terhadap karya-karya intelektual. Peraturan yang menjadi acuan adalah UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202047855, 10 November 2020
Pencipta
Nama : Herawati, Redyana Dwitasari, Atik S Kuswati, M. Yuqiftirmen
Alamat : Titan Asri Blok D2/12A, Bekasi, JAWA BARAT, 17132
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 , Jakarta Pusat, DKI JAKARTA, 10110
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : Penerapan Electronic Toll Collection Di Indonesia
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 31 Desember 2019, di Jakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000216570

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201936937, 4 April 2019
Pencipta
Nama : Melania Suweni Muntini, M. Arif Munandar, Apih KWW, Prayogi Tri Achmadi, Dicky Anggoro, Ferdinent, Gusti Kano Fahlevi, S, M. Syaifuddin, Armen Maruduto, Evy Lindawati, Yani Nurhayati, Zulaichah, Sri. P, Fendita Veberiani, Ali Murtadho, M. Herry Purnama, S
Alamat : Jl. Pengkolan Jati RT.003/012 Cipinang Melayu , Jakarta Timur, Dki Jakarta, 13620
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 , Jakarta Pusat, Dki Jakarta, 10110
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : Penelitian Pengembangan Prototype Perslatan Untuk Mengukur Ketinggian Genangan Air (Standing Water) Di Landai Pura
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 31 Desember 2018, di DKI Jakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000139346

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202058159, 2 Desember 2020
Pencipta
Nama : Abdy Kurniawan, Erna Mei Lestari, Devit Effedo Panggabean
Alamat : Jl. Damai No. 5A, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI JAKARTA, 13790
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 , Jakarta Pusat, DKI JAKARTA, 10110
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : Kajian Perhitungan Biaya Pembuatan Kapal Feeder Tol Laut Landing Craft CArgo (LCC) 500 DWT Dalam Rangka Mendukung Optimalisasi Pelayanan Logistik Barang Dan Konektivitas Di Wilayah Timur
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 31 Desember 2019, di Jakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000222612

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202047878, 10 November 2020
Pencipta
Nama : I Ketut Mudana, Mutharuddin, Suberyata, Budi Dwi Hartanto, Tanggoh Wicaksono
Alamat : Jl. Setia Warga II No. 98 RT.02/02 Jatiranggon, Bekasi, JAWA BARAT, 17432
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat, DKI JAKARTA, 10110
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : Identifikasi Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Tol Cipali
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 31 Desember 2019, di Jakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000216740

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Gambar 3. 30 Sertifikat HAKI Penelitian di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan

Manfaat utama yang diberikan sistem HAKI bagi peneliti yaitu:

a. Dapat mengetahui informasi dan melihat perkembangan sebagian besar pengetahuan dan teknologi terbaru;
b. Perlindungan pada karya intelektual terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga.

Daftar judul penelitian Badan Litbang Perhubungan yang telah mendapatkan sertifikat HAKI dari Kementerian Hukum dan Hask Asasi Manusia Republik Indoensia pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Daftar Penelitian Bersertifikasi HAKI Tahun 2020

NO.	JUDUL PENELITIAN	PUSLITBANG TRANSPORTASI	TAHUN STUDI
1	Preferensi Pemilihan Rute Angkutan Barang Di Jawa (Jalan Tol Dan Non Tol)	Antarmoda	2019
2	Evaluasi Cetak Biru Transportasi Antarmoda/ Multimoda	Antarmoda	2019
3	Integrasi Transportasi Antarmoda Di Pelabuhan Dumai Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Transportasi	Antarmoda	2019
4	Keterpaduan Antarmoda Transportasi Untuk Mendukung Operasional LRT Kota Palembang	Antarmoda	2019
5	Sensitivitas Perpindahan Penumpang Moda Transportasi Udara Ke Moda Transportasi Lainnya (Studi Kasus Pulau Jawa)	Antarmoda	2019
6	Peningkatan Keselamatan Jalan Untuk Anak-Anak	Jalan dan Perkeretaapian	2019
7	Kajian Formulasi *Track Access Charge* (TAC) Atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	Jalan dan Perkeretaapian	2019
8	Perencanaan Transporasi Oriented Development (TOD) Angkutan Perkeretaapian	Jalan dan Perkeretaapian	2019
9	Penerapan Teknologi Pintu Dengan Pagar Otomatis dan *Yellow Box* di Perlintasan Sebidang	Jalan dan Perkeretaapian	2019
10	Analisis Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Perpindahan Penggunaan Moda (Moda Shifthing Angkutan Jalan Ke Moda Raya Terpadu (MRT))	Jalan dan Perkeretaapian	2019
11	Studi Potensi Jasa Transportasi Laut Pada ALKI Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim	LSDP	2019
12	Studi Pengukuran Daya Beli Jasa Transportasi Laut Pada Wilayah Tertinggal di Indonesia	LSDP	2019
13	Studi Pengukuran Emisi Gas Buang Dari Operasional Kapal Laut Niaga Domestik	LSDP	2019
14	Studi Penataan Pelabuhan Laut Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri Dalam Rangka Mendukung Pelabuhan Hub Internasional	LSDP	2019
15	Studi Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi Laut Dalam Rangka Antisipasi Kesiapan Indonesia Menghadapi Mandatory IMO Member State Audit Scheme (MIMSAS)	LSDP	2019

NO.	JUDUL PENELITIAN	PUSLITBANG TRANSPORTASI	TAHUN STUDI
16	Penelitian Penyusunan Air Cargo Transhipment *Master Plan* di Bandar Udara Internasional, I Gusti Ngurah Rai Denpasar	Udara	2019
17	Penelitian Percepatan Implementasi Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Untuk Pengembangan Inftrastruktur Bandar Udara di Indonesia Dalam Mendukung Transportasi Udara yang Berkelanjutan	Udara	2019
18	Penelitian Pembentukan Layanan Penyelenggaraan Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan Di Wilayah Indonesia	Udara	2019
19	Pengembangan Purwarupa Peralatan Detektor Genangan Air (Standing Water Detector/SWD) Di Landas Pacu Untuk Proses Sertifikasi	Udara	2019
20	Pengembangan Purwarupa Detektor Angin Geser Lapisan Rendah (Low Level Wind Shear Detector/ LLSWD) DI Bandara Untuk Proses Sertifikasi	Udara	2019
21	Potensi Angkutan Lintas Penyeberangan Ro-Ro Dumai-Malaka	Antarmoda	2019
22	Pemanfaatan Big Data Di Sektor Transportasi	Antarmoda	2018
23	Sistem Informasi Transportasi DI Kawasan Destinasi Wisata Labuan Bajo	Antarmoda	2018
24	Sistem Informasi Transportasi Dalam Mendukung Kawasan Wisata Mandeh	Antarmoda	2018
25	Integrasi Transportasi Antarmoda di Kota Pekanbaru	Antarmoda	2018
26	Wajah Transportasi Antarmoda Pelabuhan Bali dan NTB	Antarmoda	2018
27	Pemetaan Kebijakan Transportasi Barang di Indonesia Yang Mendukung Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	Antarmoda	2019
28	Mengenal Sistem Transportasi Nasional	Antarmoda	2019
29	Penerapan Electronic Toll Collection Di Indonesia	Antarmoda	2019
30	Penentuan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Domestik Dan Internasional DI Kota Dumai	Antarmoda	2019
31	Aksesibilitas Yogyakarta International *Airport* Dalam Mendukung Transportasi Antarmoda	Antarmoda	2019
32	Konsep Sistem Transportasi Perkotaan Di Ibukota Negara Baru	Antarmoda	2019
33	Kepuasan Penumpang dan Fasilitas DI Stasiun MRT Jakarta Dengan Analisis Multivariate	Antarmoda	2019
34	Pemodelan Logistik Perkotaan Untuk Produk Segar (Perishable Foods) DI Bandung Raya Jawa Barat	Antarmoda	2019
35	Identifikasi Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Tol Cipali	Jalan dan Perkeretaapian	2019
36	Evaluasi Kereta Bandara Manggarai-Soekarno Hatta	Jalan dan Perkeretaapian	2019

NO.	JUDUL PENELITIAN	PUSLITBANG TRANSPORTASI	TAHUN STUDI
37	Kajian Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Enrekang	Jalan dan Perkeretaapian	2019
38	Pengembangan Angkutan Perintis Jalan di Provinsi Bengkulu	Jalan dan Perkeretaapian	2019
39	Standar Keselamatan Ojek *Online*	Jalan dan Perkeretaapian	2019
40	Kebutuhan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian Pada Daerah Operasi 8 Surabaya	Jalan dan Perkeretaapian	2019
41	Efektifitas Pelican Crossing Di Jakarta	Jalan dan Perkeretaapian	2019
42	Evaluasi Penerapan Green Zone Di Kawasan Wisata Ubud Kabupaten Gianyar Bali	Jalan dan Perkeretaapian	2018
43	Penataan Lalu Lintas Di Parakan Kebupaten Temanggung	Jalan dan Perkeretaapian	2018
44	Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pada Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara	Jalan dan Perkeretaapian	2018
45	Kajian Perhitungan Biaya Pembuatan Kapal *Feeder* Tol Laut Landing Craft Cargo (LCC) 500 DWT Dalam Rangka Mendukung Optimalisasi Pelayanan Logistik Barang dan Konektivitas di Wilayah Timur	LSDP	2019
46	Kajian Potensi Penerapan Peralatan dan Perlengkapan Pengelolaan Limbah Sampah Terapung di Pelabuhan	LSDP	2019
47	Kesiapan Pengoperasian Kapal 5000 DWT DI Penyeberangan Merak-Bakauheni Dalam Rangka Penerapan PM 88 Tahun 2014	LSDP	2019
48	Bentuk Kerjasama Pengelolaan dan Pengusahaan Angkutan di Perairan Kepulauan Seribu	LSDP	2019
49	Kajian FInansial Pembangunan dan Pengoperasian Kapal Landing Craft Cargo (LCC)	LSDP	2019
50	Penelitian Pengkajian Pengoperasian Small *Unmanned Aircraft System* (Small UAS) Untuk Tujuan Hobby dan Rekreasi Di Indonesia	Udara	2020
51	Kajian Pengaturan Tempat Menginap Pesawat Di Bandar Udara (Home Base) Untuk Pengaturan Rute Penerbangan	Udara	2020
52	Kajian Pemberdayaan Lulusan Program Studi Penerangan Aeronautika (Aeronautical Information *Service*/AIS) Di Indonesia	Udara	2020

FORUM ILMIAH

1. Temu Karya Peneliti merupakan ajang untuk mengembangkan kreativitas para peneliti dan saling tukar menukar informasi serta sebagai forum peneliti untuk latihan mengembangkan potensi diri dan mempublikasikan karya ilmiahnya. Temu Karya Tahun 2020 dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi zoom meeting untuk menghindari paparan Pandemi COVID-19. Hal ini tidak menjadi penghalang terlihat dengan adanya antusias tinggi dari Para Peneliti untuk ikut berpartisipasi. Pemenang dalam Temu Karya pada tanggal 02 Desember 2020 yaitu:

Tabel 3. 31 Daftar Pemenang Temu Karya Penelitian Tahun 2020

NO.	NAMA PESERTA	JUDUL MAKALAH
Kategori Peneliti Pertama:		
1.	Abdy Kurniawan. S.T., M.M.	Sebuah Era Disrupsi dalam *Survey* Inspeksi Kapal.
2.	Arbie Sianipar. S.T.	Studi Kebutuhan Terminal Tipe A Tanjung Selor.
3.	Budi Dwi Hartanto, S.T., M.Sc.	Analisis Perilaku Pengemudi Truk serta Kontribusinya pada Kecelakaan.
Kategori Peneliti Muda:		
1.	Irawati Andriani, S.E., M.T.	Penentuan Pusat Distribusi Logistik di TOL Transjawa.
2.	Minda Mora, S.T., M.T.	Hazark Risk Assessment (HRA) Keberadaan Burung di Lingkungan Bandar Udara (Studi Kasus Bandara Soekarno Hatta).
3.	Siti Nur Fadlilah Almunawaroh, S.T., M.T.	Efektifitas Penerapan Green Zone di Kawasan Wisata Ubud Bali.
Kategori Peneliti Madya:		
1.	Nunuj Nurdjanah. S.Si. M.T.	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca CO2 Dari Perpindahan Penggunaan Kendaraan Bermotor ke Moda Raya Terpadu (MRT).
2.	Dina Yuliana, S.Si., M.T.	Pengaruh Meteorologi Bagi Perencanaan Jalur Penerbangan.
3.	Elviana R. Simbolon. S.Kom., M.MTr.	Kajian Pengembangan Konektivitas Kereta Api Pangandaran.

Gambar 3. 31 Para Pemenang Peringkat I per Kategori Temu Karya Tahun 2020

LOMBA INTERNAL BALITBANGHUB

Pada triwulan II tahun 2020 Badan Litbang Perhubungan mengadakan Lomba Kreatifitas Pegawai Badan Litbang Perhubungan dalam rangka kegiatan *Work from Home* (WFH) pada masa Pandemi COVID-19 dan memasuki penataan Normal Baru, yang diikuti oleh pegawai Badan Litbang Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Rincian Peserta Lomba Kreatifitas Pegawai Badan Litbang Perhubungan

No	Kategori	Total Pegawai	Yang Sudah Mengirimkan Bahan	Persentase
1	Pejabat Pengawas	32	32	100%
2	Pejabat Fungsional Peneliti Madya	18	18	100%
3	Pejabat Fungsional Peneliti Muda dan Pertama	35	33	94%
4	Staf dan PPNPN	125	113	90%
	TOTAL	**210**	**196**	**93%**

Hasil lomba ini akan disampaikan kepada Bapak Menteri Perhubungan. Penilaian naskah lomba dilakukan oleh Tim Penilai dari Inspektorat Jenderal, Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Peneliti Utama Badan Litbang Perhubungan yang menghasilkan 5 (lima) besar pada masing-masing kategori yang diraih oleh peserta lomba sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Daftar Pemenang Lomba Kreatifitas Pegawai Badan Litbang Perhubungan

NO	NAMA FINALIS	JUDUL MAKALAH	UNIT KERJA	NILAI	PERING-KAT
KATEGORI PENELITI MADYA					
1	Herawati, ST., M. SC., M. ENG	Pengembangan *Alert Healthy System* Di Simpul Transportasi	Puslitbang Transportasi Antarmoda	85.75	I
2	Drs. I Ketut Mudana.	Peningkatan Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Selama *Work from Home* Pada Masa Pandemi *COVID-19* Dan Menyongsong Tatanan Kebiasaan Baru Yang Sehat, Produktif Dan Aman	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	83	II
3	Subaryata, S.E.	*Work from Home* Kreatif Dalam Mendukung Hadirnya Badan Kebijakan Transportasi	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	80	III
4	Nunuj Nurdjanah, S.Si., MT.	Strategi Tetap Produktif Dan Sehat Selama *Work Form Home*	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	73	IV
5	Dwi Widiyanti	Menyongsong Tatanan Kebiasaan Baru Yang Aman, Sehat, Dan Produktif	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	67,5	V

NO	NAMA FINALIS	JUDUL MAKALAH	UNIT KERJA	NILAI	PERING-KAT
Kategori Peneliti Pertama dan Peneliti Muda					
1	Reslyana Dwitasari dan Hasriwan Putra	"Pasar Bergerak Di Saat Pandemi *COVID-19*"	Puslitbang Transportasi Antarmoda	78.85	I
2	Sujarwanto, S. Ap., M.A.	Peningkatan Kinerja Badan Litbang Perhubungan Selama Work from Home Masa Pandemi COVID-19 Dan Menyonsong Tatanan Kebiasaan Baru Yang Sehat, Produktif dan Aman	Puslitbang Transportasi Laut Sungai Danau dan Penyebarangan	78.75	II
3	Listifadah	*Work from Home*, Solusi Untuk Keselamatan Dan Produktivitas Kerja di Masa Pandemi	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	78.55	III
4	Ichda Maulidya	Peningkatan Kinerja Badan Litbang Perhubungan Selama *Work from Home* Pada Masa Pandemi COVID-19 Dan Menyongsong Tatanan Kebiasaan Baru Yang Sehat, Produktif, dan Aman	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	78,15	IV
5	Wilmar Jonris Siahaan, SE., M.M.	Peningkatan Kinerja Badan Litbang Perhubungan Selama *Work from Home* Pada Masa Pandemi *COVID-19* dan Menyongsong Tatanan Kebiasaan Baru Yang Sehat, Produktif, dan Aman	Puslitbang Transportasi Laut Sungai Danau dan Penyebarangan	78,15	V
Kategori Pejabat Pengawas					
1	Dedes Kusumawati	Adaptasi Dampak *COVID-19* Terhadap Transformasi Strategi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)	Puslitbang Transportasi Udara	85.75	I
2	Ratih Libania	Tatanan Kehidupan Baru, Kenapa Tidak?	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	82.25	II
3	Teguh Himawan	Peningkatan Kinerja Badan Litbang Perhubungan Selama *Work from Home* Pada Masa Pandemi *COVID-19* dan Menyongsong Tatanan Kebiasaan Baru Yang Sehat, Produktif, dan Aman	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	81	III
4	Intan Novianingsih	"Transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Pada Tatanan *New Normal* Dengan *Adaptive Governance Approach*"	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	80	IV

NO	NAMA FINALIS	JUDUL MAKALAH	UNIT KERJA	NILAI	PERING-KAT
5	Tito Yusmar, ST., M.T., M.Sc.	*The Quintencess Of WorkfFrom Home*	Puslitbang Transportasi Udara	79	V
Kategori Pelaksana dan PPNPN					
1	Tangguh Witjaksono	Peningkatan Kinerja Badan Litbang Perhubungan Selama *Work from Home* (WFH) Pada Masa Pandemi COVID-19 dan Menyongsong Tatanan Kebiasaan Baru Yang Sehat, Produktif, dan Aman	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	70.00	I
2	Anita Sanda	*Stay Creative Be Innovative at Home*	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	69.75	II
3	Nuraini Wulandari	*Be Productive with Work At Home*	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	68.75	III
4	Edelina Freiska, S. Sos.	Lomba Pegawai Balitbanghub	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	68,75	IV
5	Ananda Aulia	*New Normal* dan Tips WFH	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	68,00	V

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

Peningkatan kompetensi SDM peneliti melalui pelatihan teknis sangat membantu pelaksanaan kegiatan penelitian. Beberapa yang diselenggarakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 34 Daftar Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020

NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	WAKTU PELAKSANAAN
1	Bimtek Perencanaan dan Analisis Kebijakan dengan Pendekatan *System Dynamic Modelling*	15	22 s.d. 24 Januari 2020
2	Pelatihan Metodologi Penelitian	25	29 s.d. 31 Januari 2020
3	TOEFL *Preparation*	20	17 s.d. 19, 24 Februari, dan 2 Maret 2020
4	Public Speaking	15	24 s.d. 25 Pebruari 2020
5	Diklat *Inhouse System Dynamic* Tahap 2 (*Intermediate* - Lanjutan)	15	4 s.d. 6 Maret 2020
6	Pelatihan Infografis	25	23 s.d. 24 Juni 2020
7	Pelatihan Vissim	8	23 s.d. 25 Juni 2020
8	*Training Hazard Identification and Risk Assessment* (HIRA)	10	23 s.d. 25 Juni 2020

NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	WAKTU PELAKSANAAN
9	*Aviation Fundamental*	2	06 s.d. 10 Juli 2020
10	*Safety Management*	2	13 s.d. 17 Juli 2020
11	Pelatihan dan Uji Coba Learning Pemanfaatan *Big Data Google Traffic* API Dalam Evaluasi Kinerja Infrastruktur Transportasi	23	24-25 Juli 2020
12	Pelatihan Bunga Rampai	20	27 – 29 Juli 2020
13	Diklat Dasar-Dasar Marine Inspector Periode	18	28-30 September 2020
14	Diklat Manajemen Operator dan Badan Usaha Pelabuhan	6	22 – 24 Oktober 2020
15	Bimtek Manajemen Risiko	78	13-14 November 2020 dan 16-17 November 2020

TALENT PROFILLING

Talent profiling di lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 bekerja sama dengan Tim Unit Pengembangan Kualitas Manusia, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran profil, bakat, dan potensi dari masing-masing pegawai Badan Litbang Perhubungan. *Talent profiling* diperuntukkan bagi para Peneliti jenjang Pertama sampai dengan Madya serta para Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Badan Litbang Perhubungan yang telah dilaksanakan pada:

I. *Talent profiling* Peneliti Badan Litbang Perhubungan dilaksanakan pada Selasa s.d Rabu/ 20 s.d 21 Oktober 2020 dan diikuti oleh 54 peserta;
II. *Talent Profilling* Pejabat Administrasi dan Pengawas Badan Litbang Perhubungan dilaksanakan pada Selasa s.d Rabu/ 03 s.d 04 November 2020 dan diikuti oleh 44 peserta.

ASSESMENT JABATAN

Assessment Jabatan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pemetaan kompetensi dan identifikasi potensi pegawai guna pengisian jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Perhubungan serta memotret kompetensi dan identifikasi potensi pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jabatan Pejabat Administrasi dan Pengawas Badan Litbang Perhubungan dilaksanakan pada 09 s.d. 11 Desember 2020 dan diikuti oleh 52 peserta yang terbagi atas 20 peserta untuk Assessment Jabatan Pejabat Administrasi dan 32 peserta untuk *Assessment* Jabatan Pejabat Pengawas.

LOMBA KEBERSIHAN RUANG KERJA

Dasar pelaksanaan kegiatan penilaian Lomba kebersihan Ruangan Antar Unit Eselon II di lingkungan Badan Litbang Perhubungan adalah Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderla kementerian Perhubungan Nomor: UM.204/I/14-Phb-2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020. Objek yang dinilai adalah ruang kerja Unit Eselon II di lingkungan Badan Litbang Perhubungan dengan pemenang sebagai berikut:

Tabel 3. 35 Pememang Kebersihan Ruang Kerja di Lingkungan Badan litbang Perhubungan

	UNIT KERJA	PERINGKAT
a	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	I
b	Puslitbang Transportasi Udara	II
c	Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	III
d	Puslitbang Transportasi Antarmoda	IV
e	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	V

Gambar 3. 32 Penilaian Lomba Kebersihan di Ruang Kerja dan Ruang Rapat Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

LOMBA *COVER* LAGU "INDONESIA PUSAKA"

Pelaksanaan kegiatan Penilaian Lomba *Cover* lagu "Indonesia Pusaka" ciptaan Ismail Marzuki diikuti oleh Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan dalam rangka peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020. Pemenangnya adalah Setbadan Litbang Perhubungan.

Gambar 3. 33 Pemenang *Cover* Lagu "Indonesia Pusaka"

KEGIATAN BERSAMA PERAWATAN DAN PERAPIHAN GEDUNG KANTOR

Salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-75 Kemerdekaan RI, Badan Litbang Perhubungan melaksanakan Kegiatan Bersama Perawatan dan Perapihan Gedung Kantor. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk membantu kehidupan social dan ekonomi dengan mengajak para pekerja dan masyarakat yang berada di lingkungan Gedung Kantor Kementerian perhubuungan Merdeka Timur untuk berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Gambar 3. 34 Kegiatan Bersama Perawatan dan Perapihan Gedung kantor

SOSIALISASI BAHAYA COVID-19 DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Badan Litbang Perhubungan telah melakukan sosialisasi terkait bahaya dan pencegahan serta cara memutus mata rantai COVID-19 kepada masyarakat pengguna transportasi umum si stasiun, pinggir jalan, dan di terminal. Selain itu disosialisasikan pula perihal Adaptasi Kebiasaan Baru di masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu Memakai masker, Mencuci Tangan dengan sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Membatasi Mobilisasi dan Interaksi.

Gambar 3. 35 Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Masa Pandemi COVID-19

SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DAN *RAPID TEST*

Rapid test menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi virus Covid-19 dalam tubuh manusia. *Rapid test antibody* adalah metode pemeriksaan cepat dengan menggunakan alat *catridge* untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Tes ini dijalankan dalam rangka menyaring pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP) maupun orang tanpa gejala (OTG) dengan mengambil sampel darah dari kapiler (jari) atau dari vena. Selain pemeriksaan *rapid test antibody*, terdapat pemeriksaaan *rapid test* yang tingkat akurasinya lebih tinggi yaitu *rapid test antigen*.

Rapid test antigen untuk *coronavirus* dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses *swab*. Pemeriksaan *rapid test* hanya merupakan *screening* awal. Selanjutnya, hasil pemeriksaannya harus tetap dikonfirmasi melalui pemeriksaan *PCR test*.

Berdasarkan arahan pimpinan dalam Nota Dinas Sekretaris Badan Litbang Perhubungan Nomor: UM.207/18/20-BLT-2020 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan serta menindaklanjuti surat Menteri Pendahayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/96/M.KT.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan *Rapid Test* Secara Berkala bagi pegawai ASN dan Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja, maka dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan *Rapid Test* seluruh pegawai di lingkungan Badan Litbang Perhubungan.

Gambar 3. 36 Pelaksanaan Sosialisasi dan *Rapid Test* di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, 5 November 2020

PENYEMPROTAN DISINFEKTAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 3 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan Terkait Virus Corona (COVID-19) dan terdapat pegawai Bagian Perencanaan dan Kerjasama yang positif terpapar COVID-19, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan telah melaksanakan Kegiatan Penyemprotan Disinfektan di Bagian Perencanaan dan Kerjasama.

Perkembangan virus corona di Indonesia semakin meningkat, dan DKI Jakarta menyumbang kenaikan kasus COVID-19 tertinggi. Meningkatnya kasus COVID-19 disebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang masih rendah. Oleh sebab itu, penerapan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari keramaian, dan membatasi mobilisasi dan interaksi harus selalu di terapkan dimanapun berada.

Penyemprotan disinfektan ini merupakan penyemprotan kedua puluh lima yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Gambar 3. 37 Penyemprotan Disinfektan Bagian Perencanaan dan Kerjasama Setbadan

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK TRANSFORMASI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN MENJADI BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI (BKT)

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh organisasi yang responsif, adaptif dan inovatif. Kebijakan Pemerintah sekarang yang mengintegrasikan semua Badan Litbang di Kementerian dan Lembaga menuntut Badan Litbang Perhubungan bertransformasi. Untuk dapat menjawab berbagai isu strategis serta mengantisipasi tuntutan yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar suatu organisasi melakukan penataan dan evaluasi secara internal. Usulan penataan organisasi dalam hal ini harus memiliki dasar yang jelas dan memuat analisis berbagai aspek yang dibutuhkan. Pedoman pelaksanaan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Naskah Akademik bagi transformasi Badan Litbang menuju Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan disusun melalui kajian yang memperhatikan pembelajaran dari praktek birokrasi yang ada maupun kaidah keilmuan dalam pengembangan organisasi yang efektif. Transformasi menuju BKT telah pula memperhatikan arahan dari RPJMN 2020-2024, khususnya berkaitan dengan prinsip kerangka kelembagaan, antara lain: (1) Sejalan dengan kebijakan Pembangunan nasional, (2) Sejalan dengan peraturan perundangan, (3) Mendukung *outcome* pembangunan, serta (4) Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis pembangunan.

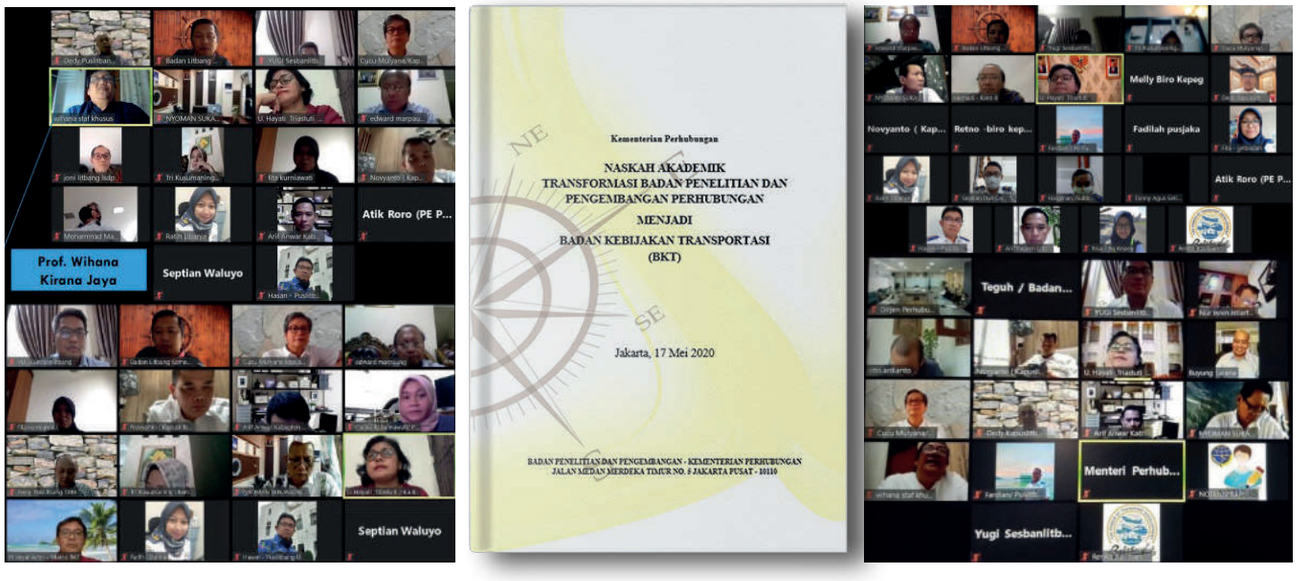

Gambar 3. 38 Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik Transformasi Badan Litbang Perhubungan Menjadi Badan Kebijakan Transportasi (BKT)

Untuk mewujudkan kebijakan transportasi dalam mendukung pembangunan inklusif diperlukan penguatan kelembagaan dan kapasitas analisis serta kebijakan transportasi secara holistik dan terintegrasi melalui pembentukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Peran Strategis Badan Kebijakan Transportasi (BKT) dalam mewujudkan kebijakan transportasi dalam mendukung pembangunan inklusif adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan bagi peningkatan kinerja dan nilai tambah publik dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan secara terintegrasi
b) Analisis dan rekomendasi multi - perspektif bagi peningkatan konektivitas dan efektivitas bagi pembangunan berbasis THIS (tematik, holistik, integratif, spasial)
c) Pengembangan strategik - integratif dalam pembangunan perhubungan (kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka evaluasi)
d) Penciptaan Nilai Tambah Publik yang Optimal dalam Pembangunan Sektor Perhubungan
e) Sebagai *Knowledge Hub*

Melalui peran tersebut Kontribusi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) adalah sebagai berikut:

a) *Government think-tank*, yaitu memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan perhubungan (*decision support system)*, dan penugasan khusus dari Pimpinan;
b) Analisis dan pengembangan kebijakan arah pengembangan strategis dalam pembangunan perhubungan yang bersifat holistik-integratif (*cross-cutting issues*);
c) Analisis dan rekomendasi multi-perspektif bagi peningkatan konektivitas dan efektivitas transportasi bagi pembangunan berbasis THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial);
d) Rekomendasi pengembangan bagi peningkatan kinerja dan nilai tambah publik dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan secara terintegrasi.

Adapun usulan konsep Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

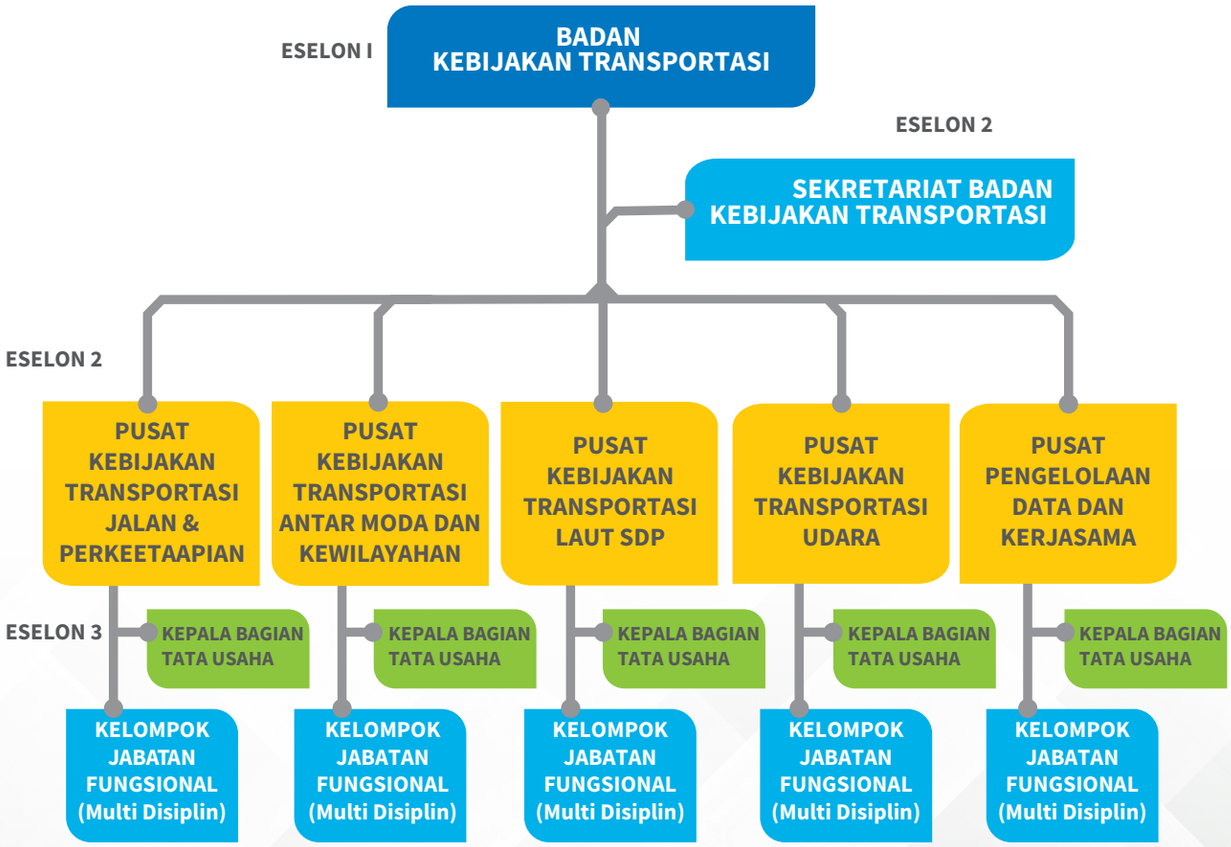

Gambar 3. 39 Konsep Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi

Dapat dilihat pada gambar diatas Struktur Organisasi Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari jajaran eselon II yang terdiri dari (1) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi; (2) Pusat Kebijakan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian; (3) Pusat Kebijakan Transportasi Antar Moda dan Kewilayahan; (4) Kebijakan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dan (5) Pusat Pengelolaan Data dan Kerjasama. Pada Pusat Kebijakan dibantu satu Eselon III yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam mendukukung pencapaian Kinerja Kelembagaan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) telah disusun Kerangka Kerja Logis Badan Kebijakan Transportasi, dapat dihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 36 Kerangka Kerja Logis Badan Kebijakan Transportasi

Kinerja		Lingkup Peran dan Fungsi
Impact		Keberhasilan pembangunan sektor perhubungan secara inklusif, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi yang meningkatkan kemandirian dan mensejahterakan masyarakat
Outcome	*Long-term*	a. Mendorong pembangunan ekonomi, antara lain dalam : efek jaringan, efek produktivitas, efek kinerja, efek ketersediaan, serta efek pasar; b. Sebagai pengungkit kualitas sendi-sendi kehidupan masyarakat, antara lain dalam : peningkatan mobilitas dan dinamika kehidupan yang produktif;
	Intermediate	a. Terbangunnya harmonisasi kebijakan lintas sektor dan bidang, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; b. Terbentuknya prasyarat dasar kelembagaan menuju iklim kondusif bagi pembangunan sektor perhubungan, konektivitas, dan transportasi perkotaan
	Initial (short-term)	Penetapan dan atau pemanfaatan Draft Kebijakan dan Rekomendasi sebagai landasan hukum maupun landasan operasional dalam pembangunan sektor perhubungan
Output		a. Rekomendasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan bagi Pimpinan Kementerian dan Pimpinan Pemerintahan; b. Draft Kebijakan Transportasi pada tingkat makro, meso dan mikro; Laporan status (dan perkembangan) pelaksanaan kebijakan transportasi;
Kegiatan/Aktivitas		a. Perumusan kebijakan b. Koordinasi dan kolaborasi dalam evaluasi, pengembangan dan perumusan kebijakan c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan

PENYUSUNAN *MASTERPLAN* SISTEM TRANSPORTASI IBU KOTA NEGARA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

Presiden Republik Indonesia secara resmi telah mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu Kementerian Perhubungan, sebagai lembaga pembantu Presiden yang menyelenggarakan urusan di bidang transportasi, menyusun gagasan sistem transportasi IKN. Gagasan tersebut terbagi menjadi 2 konsep besar, yaitu:

a. Konektivitas utama menuju IKN;
b. Konektivitas wilayah perkotaan dalam IKN.

Kementerian Perhubungan juga telah mencanangkan tema besar sistem transportasi IKN yaitu *Smart City* dan *Smart Mobility* yang berbasis *eco-friendly transportation system*.

Penyusunan konektivitas utama disusun dengan kriteria sebagai berikut:

a. Moda transportasi yang telah ada dipertimbangkan, termasuk perencanaan konektivitas transportasi yang telah disusun sebelumnya;
b. Simpul transportasi antarmoda terintegrasi, disesuaikan dengan tata guna lahan dan jenis modanya;
c. Durasi perjalanan dari bandara ke lokasi pusat pemerintahan ditetapkan maksimal 30 menit dengan menggunakan *express line* atau *express ways*;
d. Angkutan perairan beroperasi ditetapkan dengan kecepatan maksimal 12 knot;
e. Sumber tenaga penggerak moda transportasi umum diharuskan menggunakan listrik;
f. Manajemen lalu lintas moda transportasi mengimplementasikanZITS) atau Sistem Transportasi Cerdas.

Dalam konteks wilayah perkotaan, pembangunan IKN baru harus dijadikan momentum untuk membangun kota yang sehat, efisien, produktif, dan berprinsip *"less mobility, move freely and less travel time"*. Sejalan dengan perencanaan yang disusun oleh Bappenas maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)— dalam hal ini Direktoran Jenderal (Ditjen) Cipta Karya— Kementerian Perhubungan mengusung konsep *Urban Transport* dalam pengembangan transportasi perkotaan IKN, yang mengandung aspek *smart*, *integrated*, dan *sustainable*.

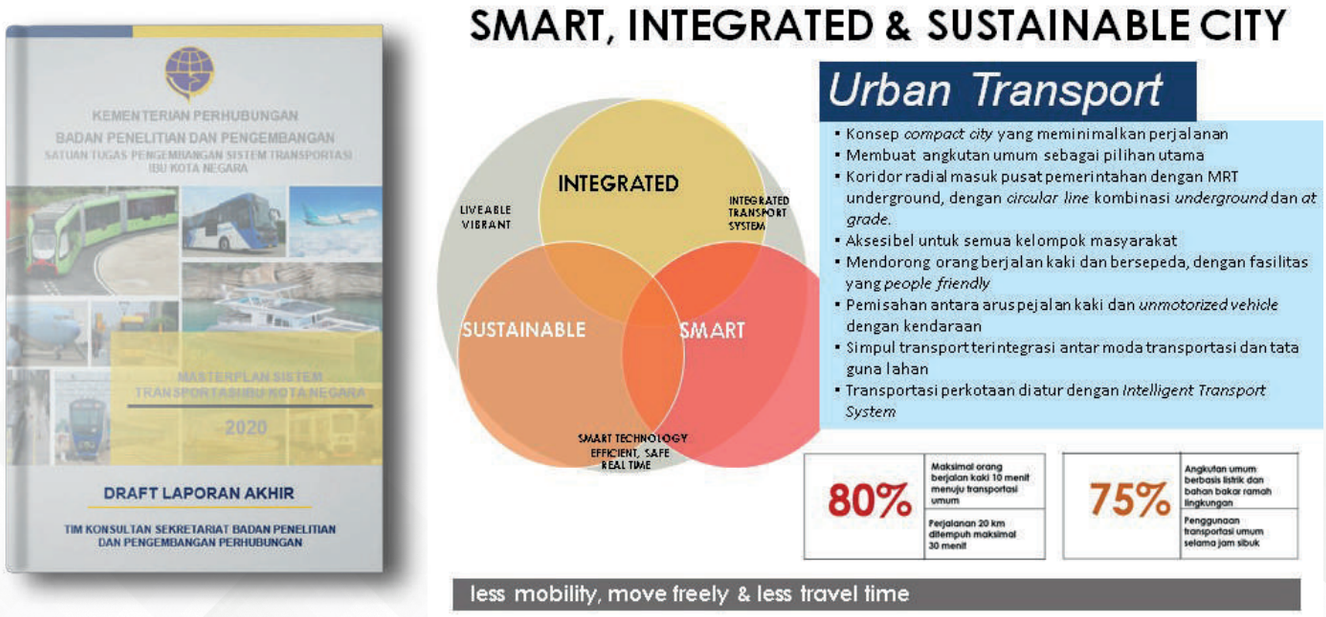

Sumber: Kemenhub, 2020

Gambar 3. 40 Konsep Urban Transport pada Kawasan IKN

Penelitian ini menghasilkan pengembangan perencanaan transportasi untuk IKN yang terpadu mencakup: (1) transportasi darat, (2) transportasi udara, (3) transportasi laut dan (4) transportasi kereta api. Selain itu menghasilkan tahapan perencanaan mencakup: (1) kriteria desain, (2) pengembangan *basic design* serta (3) perencanaan *masterplan*.

PENYUSUNAN *ROADMAP* KERJA SAMA PENELITIAN DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

Kolaborasi dan kerja sama merupakan salah satu faktor pengungkit yang berperan dalam mewujudkan pencapaian target Badan Litbang Perhubungan dalam mendukung pencapaian target Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saat ini desain kerja sama yang dilakukan masih bersifat insidentil, sehingga dibutuhkan *roadmap* kerja sama yang bersifat komprehensif dan imparsial sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama di Badan Litbang Perhubungan tahun 2020-2024. Penyusunan *Roadmap* Kerjasama di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan diawali dengan identifikasi peraturan-peraturan dan kajian-kajian terkait kerjasama di bidang transportasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun *output* yang ditekankan dalam penyusunan *Roadmap* ini adalah berupa matriks kerjasama untuk tahun 2020-2024.

Gambar 3. 41 Laporan Akhir Penyusunan *Roadmap* Kerja Sama di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020-2024

Mengacu pada perspektif konsep *quadruple helix* perlu dilakukan identifikasi rencana penelitian yang memerlukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan yaitu perguruan tinggi (akademisi), industri/ bisnis dan masyarakat. Berikut ini rencana identifikasi Kerjasama penelitian-penelitian di lingkungan Litbang Kementrian Perhubungan.

Tabel 3. 37 Rencana Identifikasi Kerjasama Penelitian di Lingkungan Balitbanghub

No	Kelompok Penelitian	Pemerintah	Perguruan Tinggi	Industri/ Bisnis	Masyarakat
1	Kebijakan Transportasi. Dalam kelompok ini riset-riset yang dilakukan terkait dengan berbagai issu yang akan memberikan rekomendasi atau kertas kebijakan tentang misalnya, kebijakan pengembangan transportasi antar moda, kebijakan keselamatan penerbangan, dan kebijakan transportasi logistik. Selain itu dapat pula mencakup penelitian tentang pola perilaku masyarakat pengguna alat transportasi.	Internal Kementrian Perhubungan (Kerjasama penelitian antar litbang di lingkungan Kementrian Perhubungan); Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementrian Dalam Negeri; Kementrian Perindustrian; Bappenas dan kementrian lain yang relevan dengan tema kajian.	Peneliti dan/ atau Pusat- Pusat Penelitian pada rumpun Sains, Teknologi dan Sosial Humaniora. Kerjasama juga dapat dilakukan dengan pusat riset pada Perguruan Tinggi di Luar negeri	Industri otomotif dan Gaikindo, Pengusaha Galangan Kapal; Industri Logistik dan sebagainya.	Masyarakat Transportasi Indonesia, Komunitas Pengguna Kereta Api Indonesia, Organda, Iperindo.
2	Kebijakan Aspek Fiskal pada Industri Transportasi. Fokus penelitian ini meliputi antara lain perumusan (*pricing*) PNBP, evaluasi kebijakan pungutan negara yang mempengaruhi industri transportasi seperti pajak pusat dan daerah dan retribusi daerah serta riset tentang subsidi terkait industri transportasi	Internal Kementrian Perhubungan (Kerjasama penelitian antar litbang di lingkungan Kementrian Perhubungan) Kementrian Keuang: Dirjen Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Dalam Negeri dan lain-lain.	Peneliti/ Pusat kajian pada bidang ekonomi, fiskal dan sosial humaniora.	Industri otomotif dan Gaikindo, Pengusaha Galangan Kapal; Industri Logistik dan sebagainya.	Industri otomotif dan Gaikindo, Pengusaha Galangan Kapal; Industri Logistik dan sebagainya.

No	Kelompok Penelitian	Pemerintah	Perguruan Tinggi	Industri/ Bisnis	Masyarakat
3	Aspek Lingkungan pada Sektor Transportasi. Fokus dari kelompok ini adalah penelitian tentang issue pengendalian dampak negatif (eksternalitas negative) sektor transportasi terhadap lingkungan seperti polusi, pemanasan global dan lain lain.	Internal Kementrian Perhubungan (Kerjasama penelitian antar litbang di lingkungan Kementrian Perhubungan) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Dalam negeri dan lain-lain.	Peneliti/ Pusat kajian pada bidang ekonomi, fiskal dan sosial humaniora.	Industri otomotif dan Gaikindo, Pengusaha Galangan Kapal; Industri Logistik dan sebagainya	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

Tabel 3. 38 Rencana Topik Kerja Sama Penelitan di Lingkungan Balitbanghub

TOPIK UTAMA	SUB TOPIK
Desain Jalan Darat Multifungsi dan Berkelanjutan	Konsep *Transit Oriented Development* (TOD)
	Penyiapan Jalur Sepeda dan *Bike Sharing*
Desain Rel Kereta Api Multifungsi dan Berkelanjutan	*High Speed Railway*
	Desain dan Konstruksi Prasarana Kereta Api
	Desain Lokomotif dan Gerbong
	Teknologi Persinyalan
Desain Pelabuhan Multifungsi dan Berkelanjutan	Konsep Jaringan pelayaran / penyeberangan
	Konsep Jaringan Tol laut Timur-Barat
	Konsep *Short Sea Shipping*
	Optimisasi ukuran kapal optimum untuk rute pelayaran
Desain Bandar Udara Multifungsi dan Berkelanjutan	Pengembangan sistem *Hub and Spoke* dalam jaringan Transportasi Udara
	Pengembangan konsep Kawasan Aerotropolis
Material Infrastruktur yang ramah lingkungan, hemat energi, dan berkelanjutan.	Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dalam Konsep Desain
Metode Konstruksi yang Cepat dan Efisien	*Long Live Pavement*
Jalan yang Bekeselamatan	Desain jalan dan rambu untuk meningkatkan keselamatan
	Pengembangan teknologi untuk mengurangi fatalitas kecelakaan
	Konsep *urban mobility planning*

TOPIK UTAMA	SUB TOPIK
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan (sustainable design)	Konsep gender equality and Inclusive Design
	Konsep Park and Ride
	Konsep Desain Urban Street Ramah Lingkungan
Resiliensi Infrastruktur Transportasi	Pengembangan arsitektur sistem transportasi cerdas
Sistem yang Berkeselamatan	konsep dan operasional terminal barang perkotaan sebagai urban distribution centre
	proyeksi *demand* dan perhitungan moda angkutan barang
	Joint-operation operator angkutan barang
Pelaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan	Pengaturan kecepatan / speed limit
	Perilaku pengemudi yang berbahaya
Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan	Pengembangan SOP Keselamatan Jalan, Penerbangan, Kereta Api
	Pengembangan alat ukur pengaruh kebijakan transportasi terhadap kesehatan masyarakat
	Pengaruh transportasi terhadap akses kesehatan kelompok masyarakat tertentu
Intelligent Transport System	Kajian pengembangan sistem informasi logistik (e-logistik)
	Pengembangan prinsip transisi teknologi konvensional ke teknologi automated, untuk setiap moda dan sistem transportasi secara keseluruhan
	Teknologi Big Data
	Analisis kebutuhan infrastruktur ICT untuk mendukung operasi kendaraan otonom
	pengoperasian CAT dengan menggunakan pendekatan data mining, data analytics, model bisnis inovatif dan visualisasi.
Kendaraan yang Berkeselamatan	Regulasi dan pengaturan operasional angkutan barang
	Potensi untuk pengembangan berbagai *interconnected service* untuk *future mobility*
Kendaraan otonom (AV)	Dampak AV terhadap kondisi sosial ekonomi
	Keberterimaan masyarakat dan sosial terhadap AV
Kendaraan Listrik (EV)	Eksplorasi kemungkinan penggabungan penggunaan energi listrik, fuel cell dan bahan bakar terbarukan
	Desain interface antara penumpang dan armada kendaraan listrik otonom
	Pengelolaan Limbah dari Baterai EV

TOPIK UTAMA	SUB TOPIK
Transportasi Rendah Karbon dan Ramah Lingkungan	Pengembangan kendaraan barang biofuel
	Pengembangan teknologi ban vulkanisir untuk menekan biaya logistik angkutan barang
	Penggunaan advanced biofuels, bahan bakar fosil yang dicampur dengan bahan bakar terbarukan dan bahan bakar murni terbarukan secara efisien
	Penyesuaian karakteristik mesin dengan jenis bahan bakar baru yang digunakan
	Dampak AV terhadap konsumsi energi, pencemaran udara dan pemanasan global
Mobility as a Service (MaaS)	Identifikasi *stakeholder* MaaS dan pengembangan model bisnis
	Mobility as *a Service* dan pengaruhnya pada bisnis operator transportasi
	Regulasi Transportasi *Online*
	Integrasi transportasi *online* dalam jaringan transportasi publik

EVALUASI KEMANFAATAN USULAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN TRANSPORTASI

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. KM. 186 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pada Bab II Rencana Kerja dan Anggaran, butir 2.3 Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, huruf d. Evaluasi Kemanfaatan, mengamanatkan bahwa rincian program/kegiatan hasil pagu indikatif kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan untuk dilakukan evaluasi kemanfaatan terhadap kriteria kegiatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk kegiatan belanja modal maupun belanja barang yang bernilai > Rp. 20 miliar;
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal untuk kegiatan belanja modal maupun belanja barang yang bernilai >Rp. 10 miliar.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan juga melakukan evaluasi usulan kajian atau studi di Kementerian Perhubungan untuk menghindari duplikasi kegiatan dengan mempertimbangkan Rencana Prioritas Riset Nasional.

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi kemanfaatan dibantu oleh tenaga ahli atau akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), PT. SMI (Kemenkeu) yang berpengalaman dengan kegiatan atau proyek dan kajian/studi yang akan dilakukan penilaian.

Kegiatan Evaluasi kemanfaatan dilakukan terhadap kegiatan pembangunan di sektor transportasi dan dibagi menjadi Kegiatan Konstruksi, Konsultan, Barang, dan Jasa Lainnya. Selain itu penilaian evaluasi kemanfaatan juga dilakukan terhadap kajian/studi. Penilaian evaluasi kemanfaatan dilakukan dengan menggunakan format penilaian terhadap kegiatan/proyek dan studi berdasarkan Prasyarat kelengkapan dokumen dan penilaian Aspek Makro, Messo, dan Mikro dengan melihat pada parameter dan pembobotan nilai.

1. Aspek Makro

   Aspek makro menilai kegiatan berdasarkan kesesuaian program pembangunan nasional, dengan parameter bahwa proyek atau kegiatan tersebut sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan agenda pembangunan. Indikator yang digunakan diantaranya kesesuaian kegiatan dengan visi dan misi presiden, kesesuaian kegiatan dengan target sasaran kebijakan strategis nasional yang ditetapkan dalam RPJMN, dan kegiatan tersebut termasuk ke dalam daftar atau proyek strategis nasional.

2. Aspek Messo

   Aspek messo menilai kegiatan berdasarkan kesesuaian program pembangunan sektor transportasi, dengan parameter bahwa proyek atau kegiatan tersebut sudah sesuai dengan Renstra Kementerian Perhubungan, kesesuaian dengan tujuan pembangunan sektor pembangunan tahun 2020-2024, kesesuaian dengan fokus utama Kementerian Perhubungan, dan kesesuaian kegiatan tersebut dengan agenda prioritas Kementerian Perhubungan.

Gambar 3. 42 Buku Panduan Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi TA. 2021 di Lingkungan Kemhub

3. Aspek Mikro

   Aspek mikro menilai kegiatan berdasarkan kesiapan implementasi pekerjaan, dengan parameter bahwa semua dokumen kegiatan masih sesuai/relevan dengan kondisi saat ini, ketersediaan dokumen yang memenuhi standar untuk dievaluasi dan memiliki kevalidan data, serta memiliki dokumen perencanaan yang siap tender.

Hasil Penilaian Evaluasi kemanfaatan Kegiatan/ Proyek Pembangunan dan Kajian/Studi di Sektor Transportasi, antara lain:

1. **Inspektorat Jenderal**

   Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 tidak memiliki kegiatan pembangunan sektor transportasi yang bernilai Rp. 10 Milyar atau lebih sehingga tidak dilakukan penilaian evaluasi kemanfaatan.

2. **Direktorat Jenderal Perhubungan Darat**

   Terdapat 53 usulan kegiatan yang bernilai lebih dari 10 Milyar namun setelah Pagu Indikatif dan Klarifikasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang akan dilakukan evaluasi kemanfaatan oleh Badan Litbang Perhubungan sebanyak 48 kegiatan yg terdiri dari 30 Kegiatan Konstruksi, 7 Kegiatan barang, dan 9 Kegiatan Jasa Lainnya dengan hasil penilaian cukup baik. Adapun hasil dari evaluasi terhadap adanya duplikasi menunjukkan bahwa 68 (enam puluh delapan) judul studi tidak ditemukan unsur duplikasi studi terhadap studi yang terdahulu atau yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

3. **Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

   Terdapat 1 (satu) kegiatan konstruksi yaitu Pembangunan Jalur Emplasement dan Stasiun KA Bandara Raden Inten II. Namun, tidak dilakukan penilaian dikarenakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diinformasikan bangunan terminal Bandara Raden Inten II yang semula dapat terhubung dengan Sky Bridge ke rencana Stasiun akan dipindahkan ke arah Jalan Tol sehingga Direktorat Jenderal Perkeretapian meniadakan kegiatan dimaksud pada Tahun Anggaran 2021. Sedangkan, penilaian evaluasi kemanfaatan kajian/studi tidak dilakukan dikarenakan tidak ada kajian/studi Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam Evaluasi Kemanfaatan ini.

4. **Direktorat Jenderal Perhubungan**

   Terdapat 23 (dua puluh tiga) usulan kegiatan Konstruksi Hasil Penilaian Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Konstruksi pada Direktorat Jenderal perhubungan Laut sudah memenuhi aspek makro, messo, dan mikro dengan hasil penilaian parameter dan indikator yang cukup baik. Namun terdapat beberapa catatan yaitu Terdapat 4 (empat) kegiatan konstruksi yaitu kegiatan pengembangan pelabuhan merencanakan reklamasi dalam penguasaan lahan dan tidak memerlukan akses jalan. Selain itu Berdasarkan kerawanan wilayah daerah dan permintaan dari Kesyahbandaran dan KSOP/ Kanpel/UPP/Pangkalan PLP untuk Kapal Negara (kapal patrol) yang sangat mendesak dibutuhkan, disamping untuk penempatan kapal di UPT yang belum memiliki kapal juga untuk menggantikan kapal- kapal yang sudah tua (umur > 25 tahun) dan boros bahan bakar. Namun kelengkapan dokumen terkait ketersediaan lahan masih proses pelepasan adat. Penilaian evaluasi kemanfaatan kajian/studi tidak dilakukan dikarenakan tidak ada kajian/studi Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam Evaluasi Kemanfaatan ini.

5. **Direktorat Jenderal Perhubungan Udara**

   Terdapat 27 usulan kegiatan. Namun setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi data dukung bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maka kegiatan yang dapat dilakukan penilaian evaluasi kemanfaatan sebanyak 4 Kegiatan Konstruksi dengan hasil penilaian cukup baik.

Sedangkan penilaian evaluasi kemanfaatan untuk kegiatan kajian/studi Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) sebanyak 76 studi dengan hasil penilaian bahwa terdapat 2 studi yang diindikasi terjadi duplikasi dengan Studi Puslitbang Transportasi Udara pada tahun 2019.

6. **Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)**

   Hanya terdapat 1 (satu) usulan kegiatan Jasa Lainnya (*Buy the Service*) yaitu "Subsidi Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek" yang dapat dilanjutkan untuk dilakukan penilaian evaluasi kemanfaatan dengan hasil penilaian cukup baik. Sedangkan Evaluasi kemanfaatan untuk kegiatan studi yang diusulkan oleh BPTJ sebanyak 50 (lima puluh) studi.

7. **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP)**

   Terdiri dari 5 Kegiatan Konstruksi dan 3 Kegiatan Barang dengan hasil penilaian cukup baik. Penilaian evaluasi kemanfaatan kajian/studi tidak dilakukan dikarenakan tidak ada kajian/studi Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan oleh BPSDMP dalam Evaluasi Kemanfaatan.

8. **Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**

   Penilaian evaluasi kemanfaatan untuk kegiatan studi yang diusulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebanyak 51 studi dengan hasil penilaian cukup baik dan tidak ditemukan unsur duplikasi, namun masih perlu dilakukan pemantapan TOR dan RAB.

ANALISIS DAN EVALUASI PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA IDUL FITRI TAHUN 2020 (1441 H) DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19

Salah satu penelitian Badan Litbang pada masa Pandemi COVID-19 adalah *Survey* Prediksi Mudik Lebaran Tahun 2020 yang hasilnya menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan larangan mudik melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

A. Periode Pengendalian Transportasi

1. Periode Pertama (P1)

   Sebelum ada larangan mudik (1 – 23 April 2020, atau pemberlakuan PSBB dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019);

2. Periode Kedua (P2)

   Awal diberlakukan larangan mudik (24 April – 6 Mei 2020, diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019);

3. Periode Ketiga (P3)

   Diberlakukan perjalanan orang dengan pengecualian (7 Mei – 7 Juni 2020, sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 No. SE 04 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan SE 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE 4 Tahun 2020).

Gambar 3. 43 Perpanjangan Masa berlaku PM 25/2020 melalui KM 116/2020 dan Pengendalian Transportasi dengan kriteria Khusus SE Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 No. SE 04 Tahun 2020

B. Analisis dan Evaluasi

1. Analisis dan Evaluasi Pengendalian Lalu Lintas

   Sehubungan dengan adanya larangan mudik dan pembatasan kendaraan yang akan balik ke Jakarta, terdapat jumlah kendaraan yang diputar balik pada 7 (tujuh) wilayah Polda yang dipantau, selama 24 April s.d. 24 Mei 2020 sebanyak 78.455 kendaraan dan pada 25 Mei s.d. 6 Juni 2020 sebanyak 77.448 kendaraan. Total kendaraan yang diputar balik pada periode 24 April s.d. 6 Juni 2020 sebanyak 156.774 kendaraan (Data Polri s/d 6 Juni 2020). Korlantas Polri menyiapkan skema penyekatan kendaraan untuk periode tanggal 24 April 2020 sampai dengan 7 Mei 2020, petugas kepolisian mengedepankan tindakan persuasif dan pelanggar akan diarahkan untuk berputar arah. Kemudian, pada 7 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020, pelanggar diminta putar arah dan juga diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

   Peraturan tersebut tidak berlaku bagi angkutan logistik, obat, mobil jenazah, dan ambulans. Pihak kepolisian telah menyiapkan total 2.739 pos keseluruhan dengan 212 pos adalah pos penyekatan untuk arus mudik dan balik. Dari lokasi penyekatan di 7 Polda untuk arus mudik terdapat 18 titik di Polda DKI Jakarta, 17 titik di Polda Jawa Barat, 6 Titik di Polda banten, 5 Titik di Polda Jawa tengah, 3 Titik di Polda Yogyakarta dan 9 titik di Polda Jawa Timur. Sedangkan untuk arus balik terdapat 146 titik penyekatan yang diperluas dan di perbanyak menjadi 18 titik di Polda DKI Jakarta, 20 titik di Polda Jawa Barat, 15 Titik di Polda banten, 16 Titik di Polda Jawa tengah, 32 titik di Polda Jawa Timur dan tambahan 45 titik di Polda Lampung. Sementara Polda Yogyakarta tidak melakukan penyekatan arus balik. Secara keseluruhan operasi ketupat 2020 dengan fungsi dan tujuan mengendalikan arus mudik dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 cukup efektif.

2. Analisis dan Evaluasi Jumlah Penumpang dan Volume Barang Angkutan Umum

   Simpul angkutan umum penumpang yang dipantau selama pengendalian transportasi adalah 47 terminal, 4 pelabuhan penyeberangan, 9 stasiun, 51 pelabuhan laut, dan 50 bandar udara.

Tabel 3. 39 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Selama Masa Idul Fitri Tahun 2020 (1441 H)

NO	JENIS	Jumllah Penumpang (orang)		
		Periode1 1-23 April 2020 (24 hari)	Periode2 24 April - 6 Mei 2020 (13 hari)	Periode3 7 Mei - 7 Juni (32 hari)
1	**Angkutan Umum Jalan**			
	a. Penumpang (orang)	58.697	13.746	44.957
	b. Rata-rata (orang/hari)	2.552 (100%)	1.057 (-58,57%)	1.405 (-44,95%)
2	**Angkutan Penyebrangan**			
	a. Penumpang (orang)	27.608	1.086	23.453
	b. Rata-rata (orang/hari)	1.200 (100%)	545 (-54,59%)	733 (-38,94%)
3	**Angkutan Kereta Api**			
	a. Penumpang (orang)	276.934	6.3827	3.771
	b. Rata-rata (orang/hari)	12.041 (100%)	525 (-95,64)	118(-99,02)
	c. Barang (ton)	3.032.482	1.536.153	2.920.539
	d. Rata-rata (ton/hari)	131.847 (100%)	118.166 (-10,38%)	91.267 (-30,78)
4	**Angkutan Laut**			
	a. Penumpang (orang)	29.941	42.062	193.969
	b. Rata-rata (orang/hari)	1.302 (100%)	3.236 (148,55%)	6.062 (365,63%)
	c. Barang (ton)	5.770.017	8.507.053	22.054.359
	d. Rata-rata (ton/hari)	250.870 (100%)	654.389 (160,85%)	689.199 (174,75%)
5	**Angkutan Udara**			
	a. Penumpang (orang)	323.046	51.285	183.871
	b. Rata-rata (orang/hari)	40.393 (100%)	3.945 (-90,23%)	5.746 (-85,77%)
	c. Barang (ton)	30.389,37	13.257,72	40.981,85
	d. Rata-rata (ton/hari)	1.321,28 (100%)	1.013,82(-22,82%)	1.280,68 (-3,07%)

Sumber: Siasati (9 Juni 2020, 09.41 WIB), PT. ASDP (Persero), dan Ditjen Perkeretaapian

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan secara singkat terkait analisis dan evaluasi jumlah penumpang angkutan umum terkait pengendalian transportasi umum selama masa Idul Fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 sebagai berikut:

a. Angkutan Umum Jalan

   Secara keseluruhan evaluasi angkutan umum selama periode pengendalian sejak diberlakukannya PM 25/2020 kemudian SE/04 dan perpanjangan pengendalian s/d 7 Juni 20202 melalui KM 116, pengendalian transportasi pada angkutan umum jalan berjalan efektif, yang diindikasikan dengan terjadinya penurunan rata-rata jumlah penumpang pada periode 2 sebesar 58,57% dan periode 3 sebesar 44,95% (dibandingkan dengan periode 1). Hal tersebut disebabkan karena pada tanggal 24 April 2020, beberapa pelayanan bus antar kota berhenti beroperasi di 25 terminal yang menerapkan PSBB dari total 47 terminal yang dipantau.

b. Angkutan Penyeberangan

Secara keseluruhan pengendalian dengan PM 25/2020, dilanjutkan dengan SE 04/2020 dan perpanjangan pengendalian SE 05/2020 dan KM 116/2020 dinilai mampu menekan pergerakan orang dengan angkutan umum penyeberangan secara efektif dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Rata-rata jumlah penumpang pada periode 2 turun 54,59% dan periode 3 turun 38,94% (dibandingkan dengan periode 1). Meskipun pelabuhan penyeberangan yang dipantau bukan merupakan wilayah PSBB dan operasional pelabuhan penyeberangan tetap berjalan seperti biasa, namun rata-rata jumlah penumpang dapat dikendalikan sampai dengan masa pengendalian transportasi berakhir. Hal tersebut dapat disebabkan karena angkutan penyeberangan sangat erat hubungannya dengan angkutan jalan dimana penumpang sebagian besar menggunakan kendaraan untuk naik kapal penyeberangan.

c. Angkutan Kereta Api

Pengendalian transportasi pada angkutan kereta api berjalan efektif, yang diindikasikan dengan terjadinya penurunan rata-rata jumlah penumpang pada periode 2 sebesar 95,64% dan periode 3 sebesar 99,02% (dibandingkan dengan periode 1). Hal tersebut disebabkan karena sejak pemberlakuan PM 25/2020 operasi kereta api diberhentikan dan mulai dioperasikan kembali pada tanggal 12 Mei 2020 setelah adanya SE 4/2020 dengan layanan Kereta Luar Biasa (KLB).

d. Angkutan Laut

Dimasa pengendalian, total seluruh penumpang angkutan laut pada periode keseluruhan yaitu H-53 s/d H+7 Sebesar 265.972 penumpang. Jumlah penumpang pada periode 2 (P2) naik dari 29.941 penumpang menjadi 42.062 penumpang dan pada periode 3 naik cukup signifikan menjadi 193.969 penumpang (dibandingkan dengan periode 1). Jumlah penumpang angkutan laut tidak terlalu terpengaruh dengan adanya permberlakuan PM 25/2020 dan SE 4/2020 karena hampir semua Pelabuhan tetap melayani penumpang dan sebagian besar tidak menerapkan PSBB karena wilayahnya belum termasuk masuk zona merah s/d pergerakan orang menggunakan moda ini tetap meningkat. Secara keseluruhan pengendalian angkutan tidak begitu berpengaruh terhadap angkutan umum laut.

e. Angkutan Udara

Pengendalian transportasi pada angkutan udara domestik berjalan efektif, yang diindikasikan dengan terjadinya penurunan rata-rata jumlah penumpang pada periode 2 dari rata-rata sebesar 39.283 orang/hari menjadi 3.550 orang perhari atau rat-rata penurunan sebesar 90,96%. Sedangkan pada periode 3 terjadi penurunan rata-rata sebesar 86,46% (dibandingkan dengan periode 1). Hal tersebut disebabkan karena adanya pelarangan operasional perjalanan dalam negeri baik transportasi berjadwal maupun charter dari 24 April s.d. 1 Juni 2020. Secara keseluruhan pengendalian ini sangat efektif menurunkan pergerakan penumpang, walaupun terdapat kenaikan setelah masa perpanjangan pengendalian tetapi masih dalam batas pengendalian dan dinilai masih sangat efektif.

f. Angkutan Barang

1) Angkutan Kereta Api

Untuk muatan angkutan barang dengan angkutan kereta api, total muatan barang

angkutan kereta api mencapai 7.489.175 ton selama periode H-53 (1 April 2020) s/d H+13 (7 Juni 2020). Pada periode sebelum diberlakukannya PM 25/2020, Jumlah muatan angkutan barang udara keseluruhan mencapai 3.032.482 ton dengan rata-rata mencapai 131.847 ton/hari kemudian mengalami penurunan sampai dengan 1.536.153 pada periode kedua (P1) dengan rata-rata 118.166 ton/hari nya turun 10,38 % jika dibandingkan dengan P1 dan semakin naik pada periode ketiga (P3) dengan muatan barang mencapai 2.920.539 ton dengan rata rata 91.267 ton/hari. Jika dibanding kan dengan P1 maka rata-rata masih terdapat penurunan sebesar 30,78 %. Muatan barang angkutan kereta api merupakan muatan kedua terbesar setelah angkutan laut. Jika dilihat dari data siasati 2020, angkutan barang kereta api cenderung tutun dibandingkan dengan periode pertama P1.

2) Angkutan Laut

Untuk muatan angkutan barang dengan angkutan laut sama seperti angkutan barang lainnya mempunyai tren menaik dengan tidak adanya pembatasan pada angkutan barang laut. Total muatan barang angkutan laut mencapai 36.331.429 ton selama periode H-53 (1 April 2020) s/d H+13 (7 Juni 2020). Pada periode sebelum diberlakukannya PM 25/2020. Jumlah muatan angkutan barang mencapai 5.770.017 ton dengan rata-rata mencapai 250.870 ton/hari, kemudian mengalami kenaikan mencapai 8.507.053 ton pada periode kedua (P1) dengan rata-rata 654.389 ton/hari nya atau ada kenaikan sebesar 155,07% dibandingkan P1. Untuk periode ketiga (P3) secara muat barang naik mencapai 22.054.359 ton dengan rata rata 689.199 ton/hari atau jika dibandingkan dengan P1 masih meningkat mencapai 168,64%. Muatan barang angkutan laut merupakan yang tertinggi dibandingkan muatan barang angkutan lainnya. Hal ini dikarenakan selain kapal penumpang yang di operasikan sebagai pembawa barang logistik, kapal kargo juga tidak dibatasi.

3) Angkutan Udara

Untuk muatan angkutan barang dengan angkutan udara sedikit berbeda trend nya dengan angkutan barang laut. Total muatan barang angkutan udara baik domestik maupun internasional mencapai 84.629 ton selama periode H-53 (1 April 2020) s/d H+13 (7 Juni 2020). Pada periode sebelum diberlakukannya PM 25/2020, Jumlah muatan angkutan barang udara keseluruhan mencapai 30.389 ton dengan rata-rata mencapai 1.321 ton/hari kemudian mengalami penurunan sampai dengan 13.258 ton pada periode kedua (P1) dengan rata-rata 1.020 ton/hari nya turun 22,82 % jika dibandingkan dengan P1 dan semakin naik pada periode ketiga (P3) dengan muatan barang mencapai 40.982 ton dengan rata rata 1.281 ton/hari. Jika dibanding kan dengan P1 maka rata-rata masih terdapat penurunan sebesar 3,07 %. Muatan barang angkutan udara merupakan yang terendah dibandingkan muatan barang angkutan lainnya. Jika dilihat dari data siasati 2020, angkutan udara cenderung stabil dengan fluktuasi yang masih terkendali.

3. **Hubungan Pergerakan Orang Dalam Transportasi dan Penyebaran COVID-19**

   Pandemi COVID-19 telah mengubah mobilitas penduduk, yaitu dalam bentuk pembatasan perjalanan. Mobilitas penduduk dipaksa berhenti atau sangat dibatasi karena pergerakan orang merupakan faktor penyebab utama dalam penyebaran COVID-19. Banyak negara yang mengalami pandemi memberlakukan penutupan sementara (lockdown), sedangkan Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

   Penghentian gerakan secara global ini belum pernah terjadi sebelumnya. Implikasi terhadap mobilitas penduduk adalah terjadi perubahan pola mobilitas penduduk selama pandemi COVID-19. Pada awalnya, virus menyebar melalui orang-orang yang melakukan perjalanan internasional secara reguler, kemudian berkembang menjadi penularan di tingkal lokal (local transmission). Ini membuktikan bahwa mobilitas penduduk merupakan faktor penting dalam penyebaran COVID-19.

   Dari beberapa data penelitian awal dan analisis awal berbagai sumber tentang hubungan mobilitas orang dengan penyeberan Covid -19 dapat di simpulkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk larangan mudik dengan pengendalian transportasi PM 25/2020 adalah sangat tepat untuk mencegah penyebaran Covid -19. Dampak dari mudik ini adalah orang yang terkonfirmasi positif akan bertambah banyak seiring dengan arus mobilitas di kota tujuan dan meningkatnya jumlah sampel yang diperiksa oleh laboratorium pemeriksa Covid -19 seluruh Indonesia. Intevensi pengendalian transportasi sesuai PM 25/2020 sempat menunjukkan penurunan jumlah dari pasien positif, pasien sembuh dan pasien meninggal sejak tanggal 1 April sampai dengan 7 Juni 2020 dengan melihat data penurunan jumlah angkutan umum secara keseluruhan pergerakan hanya 1,8 juta penumpang.

   Dari fakta yang ada, indikasi yang bisa ditarik dalam kaitan dengan pergerakan manusia dan penyebaran COVID-19 untuk sementara memang belum bisa disimpulkan terlalu jauh, meskipun secara sepintas fakta ini mengindikasikan hal-hal yang menggembirakan dari upaya-upaya Kementerian Perhubungan dalam menekan laju penyebaran COVID-19

ANALISA DAN EVALUASI PENGENDALIAN ANGKUTAN NATARU TAHUN 2020/2021

Masa Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana saat ini Indonesia dan Dunia International sedang menghadapi wabah COVID-19. Korban terkonfirmasi positif COVID-19 masih saja terus bertambah dari waktu ke waktu, bahkan dibeberapa negara telah terjadi gelombang ke-2 wabah ini, sehingga memberlakukan kembali protokol kesehatan ketat serta juga ada yang memberlakukan lock- down. Meskipun demikian, seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Indonesia dalam merayakan Natal dan Tahun Baru bersama dengan keluarga dan sanak saudara, ada yang melakukan dengan keluarga dengan tetap tinggal dirumah saja, tetapi juga ada yang melakukan perjalanan mudik ke daerah asal mereka.

Oleh karenanya, jumlah pemudik yang melakukan perjalanan dengan berbagai moda transportasi di Indonesia cenderung meningkat pada saat Natal dan Tahun Baru 2020-2021, meskipun berada pada situasi Pandemi COVID- 19.

Gambar 3. 44 *Monitoring* Penyelenggaraan Angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19

Gambar 3. 45 Laporan Anev Pengendalian Angkutan Nataru Tahun 2020/2021

Kesimpulan yang dihasilkan dari analaisa dan evaluasi penegndalain angkutan Nataru Tahun 2020/2021 yaitu:

1. Direkomendasikan adanya SANKSI pada penerapan protokol kesehatan dalam bertransportasi, agar tidak terjadi upaya dari oknum masyarakat yang mencoba-coba melakukan pelanggaran terhadap protokol Kesehatan yang diterapkan secara ketat dalam penyelenggaraan transportasi pada masa Nataru mendatang;
2. Direkomendasikan pada penyelenggaraan angkutan Nataru ataupun Lebaran mendatang, dilakukan syarat wajib *rapid test* yang dilaksanakan pada setiap calon

penumpang dari keseluruhan moda transportasi, sehingga jaminan transportasi berkeselamatan dan berkesehatan dapat dicapai dengan baik;

3. Terkait dengan prediksi survei Pra Nataru oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, yang secara umum telah mampu memprediksi pucak mudik dan balik yang relatif tepat, sehingga terdapat pola antisipasi yang mesti disiapkan, maka direkomendasikan kegiatan survei Pra Nataru maupun Pra Lebaran agar dilakukan secara terus menerus, dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sampel studi sehingga estimasinya lebih akurat;
4. Walaupun realisasi data pergerakan dengan berbagai angkutan pada masa Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 turun sebesar -61,40%, maka direkomendasikan pada setiap pemangku kepentingan tetap mempersiapkan penyelenggaraan angkutan Nataru ke depan dengan kualitas layanan yang lebih baik lagi, terutama penggunaan IT untuk mendukung layanan pada setiap moda transportas;
5. Moda angkutan kereta api dan penyeberangan merupakan moda transportasi yang paling sensitif terhadap penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi dan antisipasi terhadap ke-2 moda tersebut pada rencana pennyelenggaraan Nataru maupun Lebaran yang akan datang;
6. Terkait keberadaan kendaraan angkutan barang diruas jalan tol yang masih relatif tinggi pada masa pemberlakukan pembatasan operasional angkutan barang, maka direkomendasikan dilakukan peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi bagi kendaraan yang melanggar ketentuan pembatasan operasional angkutan barang tersebut;
7. Walaupun kinerja pengendalian kecelakaan lalu lintas pada masa angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 sudah cukup baik dengan adanya penurunan kejadian kecelakaan lalu lintas, tetapi direkomendasikan untuk dilakukan peningkatan sarana dan prasarana jalur angkutan Nataru yang lebih baik dan tetap dilakukan sosialisasi dengan masif tentang keselamatan berlalu lintas baik sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan angkutan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021;
8. Direkomendasikan terdapat studi lanjutan untuk melakukan Kajian Detail tentang Pengaruh Pergerakan Orang dengan tingkat penyebaran COVID-19.

ACARA SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian pada tahun 2020 diserahterimakan oleh maisng-masing Kapuslitbang Transportasi di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan kepada Para *Stakeholder* baik secara langsung maupun secara virtual dengan terlebih dahulu mengirimkan hasil penelitian kepada *Stakeholder* terkait.

Gambar 3. 46 Penyerahan Hasil Penelitian di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Kondisi perkembangan pagu anggaran Badan Litbang Perhubungan selama kurun waktu enam tahun terakhir. sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 40 Perkembangan Pagu Anggaran Badan Litbang Perhubungan 2015-2020

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	228.259.100.000	176.406.427.000	116.194.498.000	143.830.906.000	144.334.726.000	157.347.081.193
Realisasi	167.659.025.429	156.196.689.150	97.137.904.761	131.259.025.838	143.502.285.892	155.490.975.066
Sisa Anggaran	60.600.074.571	20.209.737.850	19.137.904.761	12.571.880.162	832.440.108	1.856.101.934
Daya Serap	73.45%	88.54%	83.6%	91.26%	99.42%	98,82%

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Litbang Perhubungan. 2020

Berdasarkan data perkembangan pagu anggaran Badan Litbang Perhubungan selama tiga tahun terakhir, terlihat pagu anggaran cenderung mengalami penurunan.

Penurunan pagu paling tinggi terjadi di Tahun 2016 sebesar 29% dibandingkan Tahun 2015 bersamaan dengan berkurangnya jumlah peneliti sebesar 20%. Selanjutnya pagu anggaran Tahun 2017. yaitu Rp.116.194.498.000.00 kembali berkurang sebesar 34% dibandingkan pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp.176.406.427.000.00. Akan tetapi pada Tahun 2018. pagu anggaran mengalami kenaikan sebesar 24% dengan nominal sebesar Rp.143.830.906.000.00. Tahun 2019 pagu anggaran sedikit mengalami kenaikan dengan nominal sebesar Rp 144.334.726.000.00. Pada Tahun 2020, setelah adanya optimalisasi pagu anggaran Badan Litbang Perhubungan sebesar Rp 157.347.077.000,00. Perkembangan pagu anggaran tersebut digambarkan pada gambar di bawah ini:

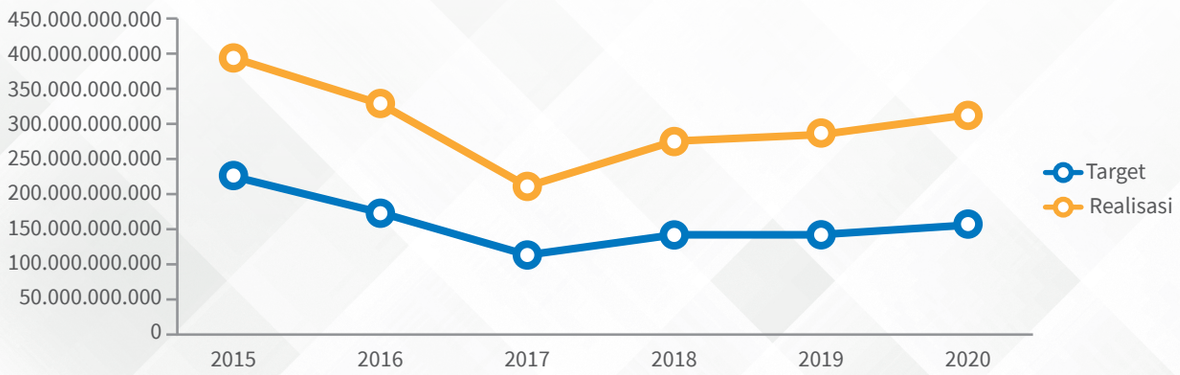

Gambar 3. 47 Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2015 – 2020

Adapun perkembangan daya serap anggaran Badan Litbang Perhubungan terhadap pagu revisi selama kurun waktu lima tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

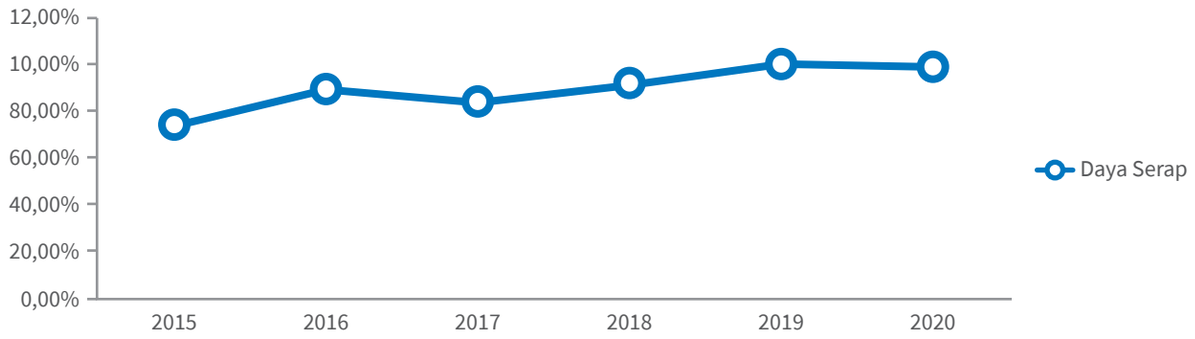

Gambar 3. 48 Perkembangan Daya Serap Tahun 2015 – 2020

Terdapat (lima) langkah yang dilakukan Badan Litbang Perhubungan dalam rangka percepatan realisasi anggaran yaitu:

1. Melakukan optmalisasi anggaran;
2. Membentuk Tim *Monitoring* dan Evaluasi untuk mengakselerasi;
3. Mengawal ketat rencana penarikan dana sesuai jadwal;
4. Melakukan rapat evaluasi anggaran secara berkala;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi proses administrasi pembayaran.

ALOKASI TOTAL ANGGARAN TAHUN 2020

Anggaran Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2020 berdasarkan pagu awal adalah sebesar Rp 206.644.647.000,00, dengan rencana daya serap akhir tahun sebesar 99,43%. Sepanjang Tahun 2020, terdapat dua kali revisi anggaran Badan Litbang Perhubungan yaitu:

a. Pada bulan April 2020, sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Perhubungan Nomor KU.001/3/5 Phb 2020 tentang Perubahan APBN di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2020, terdapat efisiensi sebesar Rp 42.963.903.000,00 untuk Belanja Barang dan Belanja Modal sehingga Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 berdasarkan pagu revisi sebesar Rp 163.660.744.000,00;
b. Pada bulan September 2020, menindaklanjuti Surat Menteri Perhubungan Nomor KU.002/17/24 Phb 2020 tentang Penyampaian Usulan Revisi Anggaran dalam rangka Optimalisasi Kinerja Anggaran Kemenhub Tahun 2020, dilakukan Revisi Anggaran sebesar Rp 6.313.667.000,00 dari Belanja Pegawai, belanja Barang, dan Belanja Modal sehingga Anggaran Tahun 2020 berdasarkan pagu revisi kedua sebesar Rp 157.347.077.000,00.

Berikut ini data perubahan komposisi anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020:

DIPA AWAL

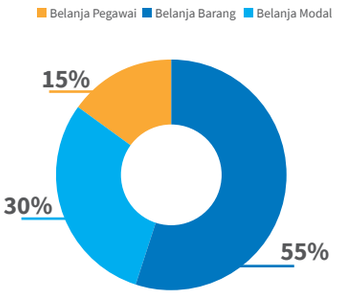

Jenis Belanja	Alokasi (Rp)
Belanja Pegawai	30.753.477.000
Belanja Barang	114.711.472.000
Belanja Modal	61.179.698.000
Total Pagu	**206.644.647.000**

REVISI DIPA (Pemotongan1)

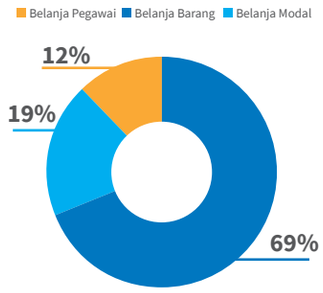

Jenis Belanja	Alokasi (Rp)
Belanja Pegawai	30.753.477.000
Belanja Barang	113.837.069.000
Belanja Modal	19.070.198.000
Total Pagu	**163.660.744.000**

Pada bulan April 2020, terdapat pemotongan anggaran sebesar 42.983.903.000,00 untuk Belanja Barang dan Belanja Modal, berdampak pada pengurangan 1 kegiatan penelitian Kapal LCC di Puslitbang Transportasi LSDP

REVISI DIPA (Pemotongan2)

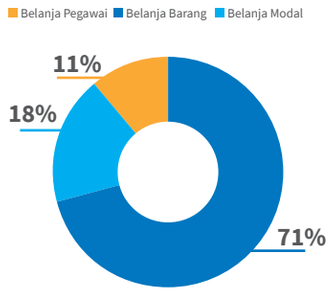

Jenis Belanja	Alokasi (Rp)
Belanja Pegawai	28.108.891.000
Belanja Barang	111.044.949.000
Belanja Modal	18.193.237.000
Total Pagu	**157.347.077.000**

Pada bulan September 2020, terdapat pemotongan anggaran sebesar 6.313.667.000 pada anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Tidak berdampak pada pengurangan jumlah kegiatan penelitian

Gambar 3. 49 Perubahan Komposisi Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020

Secara rinci pagu anggaran Badan Litbang Perhubungan berdasarkan jenis belanja tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 41 Pagu Anggaran Perjenis Belanja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	28.108.891.000
Belanja Barang	111.044.949.000
Belanja Modal	18.193.237.000
Total	**157.347.077.000**

Secara rinci komposisi pagu anggaran tahun 2020 per Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Pagu Anggaran

Pagu anggaran pada Tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 157.347.077.000,00. Komposisi pagu anggaran berdasarkan jenis kegiatan dan belanja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 42 Pagu Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020

NO	PROGRAM KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya	54.858.322.000	54.286.203.925	98,96
2.	Litbang Transportsi Antarmoda	25.165.421.000	24.966.986.002	99,21
3.	Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	22.212.565.000	21.848.384.525	98,36
4.	Litbang Transportasi Laut. Sungai Danau dan Penyeberangan	31.015.011.000	30.539.120.505	98,47
5.	Litbang Transportasi Udara	24.095.758.000	23.850.280.109	98,98
	TOTAL	157.347.077.000	155.490.975.066	98,82

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Litbang Perhubungan. 2020

ANALISIS DANA YANG TIDAK TERSERAP TAHUN 2020

Capaian daya serap anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 tercatat sebesar 98,82% atau Rp 155.490.975.066,00. Sisa anggaran yang tidak terserap dari pagu akhir adalah sebesar Rp. 1.856.101.934,00 (1,18%). Nilai persentase daya serap tersebut menunjukkan secara keseluruhan penyerapan anggaran sudah sangat baik. Adapun *output* secara fisik yang dihasilkan rata-rata sebesar 100% untuk semua kegiatan.

Realisasi daya serap Badan Litbang Perhubungan tahun 2020 per-jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 43 Capaian Daya Serap Per-Jenis Belanja Tahun 2020

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
Belanja Pegawai	28.108.891.000	26.931.951.693	95,81
Belanja Barang	111.044.949.000	110.376.817.072	99,40
Belanja Modal	18.193.237.000	18.182.206.301	99,94
Total	157.347.077.000	155.490.975.066	98,82

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Badan Litbang Perhubungan. 2020

Kurang optimalnya realisasi serapan anggaran Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2020 berdasarkan data capaian realisasi anggaran per-jenis belanja. anggaran tidak terserap paling besar berasal dari Belanja Pegawai. yaitu sebesar 4,19% atau Rp 1.176.939.307,00 dari pagu sebesar Rp 28.108.891.000,00. Faktor penyebab tidak terserapnya anggaran Belanja Pegawai tersebut dikarenakan kelebihan gaji. tunjangan kinerja. dan tunjangan peneliti karena adanya mutasi pegawai dan tunjangan kinerja pada Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 tidak dibayarkan akibat adanya pandemi COVID-19.

Belanja Barang yang terserap dengan baik sebesar 99,40% dari pagu sebesar Rp 111.044.949.000,00 dikarenakan anggaran dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Adapun sisa anggaran Belanja Barang. yaitu 0,60% berasal dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja barang operasional, dan belanja barang non-operasional.

Begitu pula dengan Belanja Modal terserap baik dengan daya serap sebesar 99,94% atau terserap sebesar Rp 18.182.206.301,00 dari pagu Rp 18.193.237.000.00. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengadaan sarana dan prasarana dapat direalisasikan sesuai dengan rencana setelah revisi anggaran.

Berdasarkan data capaian daya serap per-program kegiatan Badan Litbang Perhubungan (tingkat Eselon II). Realisasi tertinggi untuk Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda sebesar 99,21% dan terendah pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian sebesar 98,36%. Data rinci capaian daya serap kegiatan Badan Litbang Perhubungan berdasarkan program kegiatan disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 3. 44 Capaian Daya Serap Per-Program Kegiatan Tahun 2020

NO	PROGRAM KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya	54.858.322.000	54.286.203.925	98,96
2.	Litbang Transportsi Antarmoda	25.165.421.000	24.966.986.002	99,21
3.	Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	22.212.565.000	21.848.384.525	98,36
4.	Litbang Transportasi Laut. Sungai Danau dan Penyeberangan	31.015.011.000	30.539.120.505	98,47
5.	Litbang Transportasi Udara	24.095.758.000	23.850.280.109	98,98
	TOTAL	**157.347.077.000**	**155.490.975.066**	**98,82**

Sumber: Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Litbang Perhubungan. 2020

Secara lengkap perkembangan pelaksanaan anggaran Badan Litbang Perhubungan termasuk realisasi dan penyerapannya berdasarkan program/kegiatan dan jenis belanja disajikan pada **Lampiran 2** Matriks Laporan Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020.

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2020:

1) Komitmen Bersama Pimpinan dan Seluruh Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan untuk menyelesaikan penugasan dalam mencapai target kinerja anggaran;

2) Melakukan optmalisasi anggaran;
3) Membentuk Tim *Monitoring* dan Evaluasi untuk mengakselerasi yaitu:
   (a) *Project Management Unit* (PMU) sebagai salah satu upaya meningkatkan Sistem Pengendalian Intern untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program kegiatan Badan Litbang Perhubungan melalui prinsip pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.76 Tahun 2020 tanggal 08 Juli 2020; dan
   (b) *Tim Quality Assurance* (QA) dalam rangka untuk menambah nilai manfaat kegiatan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.68 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020.
4) Mengawal ketat rencana penarikan dana sesuai jadwal;
5) Melakukan rapat evaluasi anggaran secara berkala;
6) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi proses administrasi pembayaran.

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN BERDASARKAN IKP TAHUN 2020

Anggaran Badan Litbang Perhubungan pada tahun 2020 dalam mendukung ketercapaian IKP Badan Litbang Perhubungan. secara rinci dijelaskan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3. 45 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP Tahun 2020

	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (IKP)	TARGET (%)	REALISASI KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)	
						JUMLAH	%	JUMLAH	%
SP.1. Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset di Bidang Perhubungan									
	INITIAL OUTCOME								
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	75	100	133,33	25.614.135.000	25.541.124.245	99,71	73.010.755	0,29
IKP 1	***INTERMEDIATE OUTCOME***								
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	35	50	142,86	992.833.000	991.727.256	99,89	1.105.744	0,11

	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (IKP)	TARGET (%)	REALISASI KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)	
						JUMLAH	%	JUMLAH	%
	INITIAL OUTCOME								
IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	75	100	133,33	9.223.335.600	9.173.379.880	99,46	49.955.720	0,54
	INTERMEDIATE OUTCOME								
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	30	32,56	108,53	-	-	-	-	-
	INITIAL OUTCOME								
IKP 3	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	75	100	133,33	4.696.226.400	4.644.632.793	98,90	51.593.607	1,10
	INTERMEDIATE OUTCOME								
	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	30	43,75	145,83	724.723.000	723.603.344	99,85	1.119.656	0,15

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (IKP)		TARGET (%)	REALISASI KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)		SISA ANGGARAN (Rp)	
						JUMLAH	%	JUMLAH	%
SP.2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi									
IKP 4	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi	80	100	125	115.995.578.000	114.316.261.878	98,55	1.679.316.122	1,45
SP.3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
IKP 5	Indeks RB Kementerian Perhubungan	78	masih menunggu penilaian dari Kemenpan-RB		100.246.000	100.246.670	100	330	0,0003

SP.1. Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

IKP 1

INITIALOUTCOME

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

25.614.135.000	99,71%
25.541.124.245	

INTERMEDIATEOUTCOME

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)

992.833.000	99,89%
991.727.256	

IKP 2

INITIALOUTCOME

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan

9.223.335.600	99,46%
9.173.379.880	

INTERMEDIATEOUTCOME

Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan

-	-
-	

IKP 3

INITIALOUTCOME

Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya

4.696.226.400	98,90%
4.644.632.793	

INTERMEDIATEOUTCOME

Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)

724.723.000	99,85%
723.603.344	

SP.2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi

IKP 4

Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi

115.995.578.000	98,55%
114.316.261.878	

SP.3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

IKP 5

Indeks RB Kementerian Perhubungan

100.246.000	100%
100.246.670	

Pagu	**Rp. 157.347.077.000**
Realisasi	**Rp. 155.490.975.066**

98,82%

● Pagu ● Realisasi

BAB 4
PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertangggungjawaban tertulis Unit Eselon I Badan Litbang Perhubungan kepada Menteri Perhubungan atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi. misi. tujuan. dan sasaran Kementerian Perhubungan dan sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Badan Litbang Perhubungan.

PENCAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020

1. Laporan Kinerja Tahun 2020 menggambarkan kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2020 dengan capaian pada tiga sasaran strategis dan lima indikator kinerja program melampaui target sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja beserta revisinya Tahun 2020.
2. Pencapaian kinerja rata-rata Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 untuk lima Indikator Kinerja Program (IKP). yaitu sebesar 131,75%. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TA. 2020
SP1	Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	1					**131,75 %**
		INITIAL OUTCOME					
		Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	75	100	133,33	
		INTERMEDIATE OUTCOME					
		Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	%	35	50	142,86	
		2					
		INITIAL OUTCOME					
		Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis Yang Membutuhkan Penyelesaian Secara Cepat di Bidang Perhubungan	%	75	100	133,33	
		INTERMEDIATE OUTCOME					
		Tingkat Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis Yang Membutuhkan Penyelesaian Secara Cepat di Bidang Perhubungan	%	30	32,56	108,53	

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		SATUAN	TARGET PK	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TA. 2020
			INITIAL OUTCOME					
			Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan/standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	%	75	100	133,33	
		3	***INTERMEDIATE OUTCOME***					
			Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	%	30	43,75	145,83	
SP2	Meningkatnya kualitas tata kelola Balitbanghub dalam penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi	4	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan transportasi	%	80	100	125	
SP3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	5	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	Menunggu Hasil Penilaian dari Kemenpan-RB	Menunggu Hasil Penilaian dari Kemenpan-RB	

3. Pagu Anggaran Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 sebesar Rp 157.347.077.000,00. Capaian daya serap angaran Badan Litbang Perhubungan tahun 2020 tercatat sebesar 98,82% atau Rp 155.490.975.066,00.

PENCAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2019

Capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 bila dibandingkan capaian kinerja di Tahun 2019 dengan dua indikator kinerja yang sama mengalami peningkatan dari 110,80% pada tahun 2019 menjadi 138,84% pada tahun 2020. Rata-rata capaian kinerja ini meningkat bila dibandingkan dengan dua IKP yang sama pada tahun 2019 dengan rata-rata capaian kinerja dari dua IKP di tahun 2019 sebesar 124,82%.

PENCAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2015–2020

1. Capaian kinerja Badan Litbang Perhubungan tahun 2020 dengan tiga sasaran strategis dan lima indikator kinerja program berdasarkan dokumen renstra tahun 2020-2024. Karena adanya perubahan indikator kinerja program sepanjang tahun 2015 – 2020 maka dari lima IKP tersebut, hanya IKP 1 yang dapat dibandingkan dari tahun 2015 – 2020, sedangkan untuk IKP 2 hanya bisa dibandingkan dari tahun 2017 – 2020.
2. Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun 2015-2020 dibandingkan dengan Tahun Awal Renstra 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2 Pencapaian Kinerja Badan Litbang Perhubungan Tahun 2015-2020

NO	TAHUN	SATUAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG PERHUBUNGAN
1	2015	%	114.76
2	2016		113.2
3	2017		112.36
4	2018		118.11
5	2019		110.8
6	2020		131,75

PRESTASI BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020

Beberapa prestasi Badan Litbang Perhubungan di Tahun 2020, antara lain:

1. Pada tanggal 21 Desember 2020, terdapat 14 (empat belas) unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meraih predikat “Wilayah Bebas dari Korupsi” dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemepan-RB), salah satunya adalah Sekretariat Badan Litbang Perhubungan;
2. Badan Litbang Perhubungan dianugerahi sertifikasi manajemen ISO 9001:2015 yang diserahkan oleh Badan Sertifikasi TÜV NORD Indonesia dan NQA Indonesia pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 dilakukan Reviu oleh kedua Badan sertifikasi tersebut dan menghasilkan rekomendasi bahwa ISO 9001:2015 dapat dilanjutkan;
3. Kepala Badan Litbang Perhubungan sebagai salah satu Pembicara pada Webinar *“Towards a Low Carbon Transport in Indonesia: A Technological Perspective”* pada tanggal 10

Desember 2020. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara Indonesia *Energy Transition Dialogue* (IETD) 2020.

4. Badan Litbang Perhubungan telah berhasil menyelenggarakan International Seminar dengan tema *"Regulations and Challenges in Drone Operation"* pada tanggal 17 Desember 2020 dan pada tanggal 21 Desember 2020 dengan tema *Integrated City Plannning and Sustainable Transport Development in the New Capital City Indonesia: Planning for Technology Impelementation of Autonomous Electric Vehicle for the New Capital City;*
5. Pada Semester I Tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan memperoleh penghargaan peringkat ke-1 tingkat Eselon 1. Selain itu, Sekretariat Badan Litbang Perhubungan memeroleh penghargaan perigkat ke-2 diikuti Pusat Litbang Transportasi Antarmoda pada peringkat ke-2, dan Pusat Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan pada peringkat ke-3 di tingkat Eselon 2 dalam Kepatuhan Pelaporan Kinerja melalui Aplikasi *e-performance* di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Pada Semester II Tahun 2020, Badan Litbang Perhubungan memperoleh penghargaan peringkat ke-3 tingkat Eselon 1.

   Di tingkat Eselon II, Puslitbang Transportasi Antarmoda peringkat ke-2 dan Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian pada peringkat ke-3 dalam Kepatuhan Pelaporan Kinerja melalui Aplikasi *e-performance* di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
6. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Penelitian dan Pengembangan bidang Transportasi pada Tahun 2020 dengan dikemas dalam bentuk Dialog Indonesia: Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2020 di Jakarta dibuka oleh Menteri Perhubungan dengan tema "Pembangunan Infrastruktur untuk Konektivitas Ibu Kota Negara Baru". Dialog bertujuan untuk mengkoordinasikan rencana dan usulan penelitian dari sub sektor dan pemerintah daerah, dengan berlandaskan pada isu-isu strategis dan rencana induk penelitian. Selain itu, bertujuan pula untuk menghimpun berbagai data dan informasi dari Stkeholders terkait guna memperkaya kajian pengembangan transportasi Ibu Kota Negara dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam rangka pembangunan Kawasan di Ibu Kota Negara baru.
7. Pelaksanaan kegiatan Temu Karya Penelitian Tahun 2020 yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi peneliti Badan Litbang Perhubungan sehingga menghasilkan penelitian yang produktif dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan *stakeholders* terkait, Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas hasil penelitian Badan Litbang Perhubungan sebagai bahan rekomendasi kebijakan transportasi.

SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka perbaikan untuk meningkatkan nilai laporan kinerja agar memenuhi kriteria (nilai A) Badan Litbang Perhubungan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

PERENCANAAN KINERJA

Beberapa upaya perbaikan dan catatan untuk peningkatan perencanaan kinerja Badan Litbang Perhubungan meliputi:

1. Penyusunan Renstra Badan Litbang Perhubungan 2020-2024 dengan indikator kinerja yang disusun berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* dari Badan Litbang Perhubungan dan telah ditetapkan dalam SK Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor SK 145 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Litbang Perhubungan Thaun 2020-2024 dan SK 144 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan;
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari tingkat Eselon II sampai dengan Eselon IV;

3. Dalam setiap perencanaan kegiatan dan anggaran harus memperhatikan dan memastikan perencanaan kegiatan telah mengacu pada kebijakan dan isu strategis sesuai arahan Menteri Perhubungan atau kegiatan prioritas nasional serta jelas pemanfaatannya, Dalam penetapan prioritas kegiatan penelitian dibutuhkan keterlibatan dan komitmen para pengelola kegiatan dan penanggung jawab anggaran. Demikian pula dengan perencanaan anggaran harus berangkat dari hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya;
4. Berbagai agenda prioritas pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang disusun berdasarkan kebutuhan serta meliputi kebutuhan anggarannya perlu dipetakan dalam bentuk kegiatan dengan skala prioritas.

PENGUKURAN KINERJA

Beberapa upaya yang dilakukan Badan Litbang Perhubungan untuk meningkatkan pengukuran kinerja, antara lain:

1. Pada September 2019, IKU telah direviu berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* dari Badan Litbang Perhubungan sesuai dengan rekomendasi Kemenpan-RB atas evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dan masih diimplementasikan pada tahun 2020 dengan ditetapkannya Indikator kinerja Program yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor SK 144 Tahun 2020;
2. Melakukan *monitoring* capaian kinerja dalam format rencana aksi atas pencapaian perjanjian kinerja per-bulan dan evaluasi program berisikan evaluasi capaian kinerja dan kegiatan per-triwulan. *Monitoring* capaian telah dimanfaatkan menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (*progress*) kinerja;
3. Selain secara tertulis melalui Rencana Aksi dan Evaluasi Program, optimalisasi pemantauan capaian kinerja dilakukan melalui aplikasi *e-Performance, SMART* DJA Kemenkeu dan *e-Monev* PP 39 Bappenas.

PELAPORAN KINERJA

Beberapa upaya yang dilakukan Badan Litbang Perhubungan untuk meningkatkan pelaporan kinerja, yaitu dengan melakukan penyusunan laporan kinerja yang telah menguraikan pencapaian hasil dan evaluasi serta analisis untuk pencapaian kinerja *outcome*, yaitu dalam bentuk analisis keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja.

EVALUASI KINERJA

Beberapa upaya perbaikan untuk peningkatan evaluasi kinerja Badan Litbang Perhubungan meliputi:

1. Pada rapat evaluasi capaian kinerja per-triwulan perlu melibatkan para penanggung jawab kegiatan sehingga dapat terpantau capaian pelaksanaan kegiatan serta diketahui kendala dan bagaimana upaya mengatasinya;
2. Evaluasi kinerja dilakukan secara menyeluruh dari tingkat Eselon I sampai dengan Eselon IV melalui penyusunan laporan rencana aksi telah dilengkapi oleh kolom tindak lanjut dan telah menjadi dasar alternatif perbaikan.

CAPAIAN KINERJA

Beberapa catatan upaya dan perbaikan di tahun mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja, antara lain:

1. Penyusunan indikator Badan Litbang Perhubungan tahun 2020 telah disusun dengan berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* dari Badan Litbang Perhubungan serta memenuhi kriteria *Spesific, Measureable, Achievable, Relevant, Time Bound* (*SMART*) dengan mengacu pada realisasi capaian tahun 2019, Hal ini yang berdampak positif pada semua indiaktor dapat tercapai sesuai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan;
2. Optimalisasi kerja sama penelitian perlu ditingkatkan dengan membangun kerja sama yang baru atau memperbaharui kerja sama yang sudah ada melalui implementasi kegiatan penelitian bersama sehingga kemanfaatan penelitian kerja sama yang telah dilakukan selama ini menjadi jauh lebih optimal.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KINERJA KEGIATAN DAN KINERJA ANGGARAN PEKINERJA KEGIATAN DAN KINERJA ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020

KINERJA KEGIATAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020							KINERJA ANGGARAN BALITBANGHUB TAHUN 2020				
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		TARGET PK	JUMLAH PENELITIAN	REAL-ISASI 2020	PERSEN-TASE REAL-ISASI 2020	CAPAIAN KINERJA PK	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
							(Rp,-)	(Rp,-)	(%)	(Rp,-)	(%)
SP.1. Optimalnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset di Bidang Perhubungan											
INITIAL OUTCOME											
IKP 1	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	75%	44	44	100,00%	133,33%	25.614.135.000	25.541.124.245	99,71	73.010.755	0,29
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda		7	7	100,00%		5.369.504.000	5.339.422.353	99,44	30.081.647	0,56
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian		19	19	100,00%		6.660.914.000	6.647.964.960	99,81	12.949.040	0,19
3	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penye-berangan		10	10	100,00%		6.128.304.000	6.112.888.132	99,75	15.415.868	0,25
4	Puslitbang Transportasi Udara		8	8	100,00%		7.455.413.000	7.440.848.800	99,80	14.564.200	0,20
INTERMEDIATE OUTCOME											
IKP 1	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	35%	22	11	50,00%	142,86%	992.833.000	991.727.256	99,89	1.105.744	0,11
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda		1	1	100,00%		32.875.000	32.840.500	99,90	34.500	0,10
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian		6	3	50,00%		500.000.000	499.990.000	100,00	10.000	0,00

KINERJA KEGIATAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020							KINERJA ANGGARAN BALITBANGHUB TAHUN 2020				
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		TARGET PK	JUMLAH PENELITIAN	REAL-ISASI 2020	PERSEN-TASE REAL-ISASI 2020	CAPAIAN KINERJA PK	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
							(Rp,-)	(Rp,-)	(%)	(Rp,-)	(%)
3	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penye-berangan		8	4	50,00%		225.633.000	224.662.005	99,57	970.995	0,43
4	Puslitbang Transportasi Udara		7	3	42,86%		234.325.000	234.234.751	99,96	90.249	0,04
INITIAL OUTCOME											
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda		23	23	100,00%		2.371.934.000	2.357.182.500	99,38	14.751.500	0,62
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian		19	19	100,00%		950.000.000	922.300.555	97,08	27.699.445	2,92
3	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penye-berangan		24	24	100,00%		3.351.660.600	3.350.453.390	99,96	1.207.210	0,04
4	Puslitbang Transportasi Udara		20	20	100,00%		2.549.741.000	2.543.443.435	99,75	6.297.565	0,25
INTERMEDIATE OUTCOME											
IKP 2	Tingkat Kemanfaatan Re-komendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubun-gan	30%	86	28	32,56%	108,53%					
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda		23	7	30,43%						
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian		19	6	31,58%						
3	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penye-berangan		24	8	33,33%						
4	Puslitbang Transportasi Udara		20	7	35,00%						

KINERJA KEGIATAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020							KINERJA ANGGARAN BALITBANGHUB TAHUN 2020				
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		TARGET PK	JUMLAH PENELITIAN	REAL-ISASI 2020	PERSEN-TASE REAL-ISASI 2020	CAPAIAN KINERJA PK	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
							(Rp,-)	(Rp,-)	(%)	(Rp,-)	(%)
INITIAL OUTCOME											
IKP 3	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelem-bagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / stan-darisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	75%	33	33	100,00%	133,33%	4.696.226.400	4.644.632.793	98,90	51.593.607	1,10
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda		4	4	100,00%		2.157.556.000	2.151.843.373	99,74	5.712.627	0,26
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian		5	5	100,00%		210.265.000	170.059.412	80,88	40.205.588	19,12
3	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penye-berangan		22	22	100,00%		2.081.958.400	2.076.283.008	99,73	5.675.392	0,27
4	Puslitbang Transportasi Udara		2	2	100,00%		246.447.000	246.447.000	100,00	0	0,00
INTERMEDIATE OUTCOME											
IKP 3	Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelem-bagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / stan-darisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	30%	16	7	43,75%	145,83%	724.723.000	723.603.344	99,85	1.119.656	0,15
1	Puslitbang Transportasi Antarmoda		6	2	33,33%		32.875.000	32.840.500	99,90	34.500	0,10
2	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian		3	1	33,33%		231.890.000	231.866.088	99,99	23.912	0,01

KINERJA KEGIATAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020							KINERJA ANGGARAN BALITBANGHUB TAHUN 2020				
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)		TARGET PK	JUMLAH PENELITIAN	REAL-ISASI 2020	PERSEN-TASE REAL-ISASI 2020	CAPAIAN KINERJA PK	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
							(Rp,-)	(Rp,-)	(%)	(Rp,-)	(%)
3	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penye-berangan		5	2	40,00%		225.633.000	224.662.005	99,57	970.995	0,43
4	Puslitbang Transportasi Udara		2	2	100,00%		234.325.000	234.234.751	99,96	90.249	0,04
SP.2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balitbanghub dalam Penyelenggaraan Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi											
IKP 4	Tingkat ketersediaan dukungan penyelenggaraan penunjang teknis riset dan rekomendasi kebijakan trans-portasi	80%	365	365	100%	125%	115.995.578.000	114.316.261.878	98,55	1.679.316.122	1,45
1	Setbadan Litbang Perhubun-gan		154	154	100%		54.758.076.000	54.185.958.255	98,96	572.117.745	1,04
2	Puslitbang Transportasi Antarmoda		52	52	100%		15.200.677.000	15.052.856.776	99,03	147.820.224	0,97
3	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian		47	47	100%		13.659.496.000	13.376.203.510	97,93	283.292.490	2,07
4	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penye-berangan		55	55	100%		19.001.822.000	18.550.171.965	97,62	451.650.035	2,38
5	Puslitbang Transportasi Udara		57	57	100%		13.375.507.000	13.151.071.372	98,32	224.435.628	1,68
SP.3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik											
IKP 5	Indeks RB Kementerian Per-hubungan	78	Menunggu Hasil Penilaian dari Kemenpan-RB 100.246.000				100.246.000	100.245.670	100,00	330	0,00
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						**131,75%**	**157.347.077.000**	**155.490.975.066**	**98,82%**	**1.856.101.934**	**1,18%**

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI REALISASI DAYA SERAP PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	UNIT ESELON II	PAGU ANGGARAN TRIWULAN I (Rp)	TRIWULAN I		PAGU ANGGARAN TW, II (Rp)	TRIWULAN II		PAGU ANGGARAN TW, III - IV (Rp)	TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			REALISASI (Rp)	KINERJA (%)		REALISASI (Rp)	KINERJA (%)		REALISASI (Rp)	KINERJA (%)	REALISASI (Rp)	KINERJA (%)
1	SEKRETARIAT BADAN LITBANG	57.604.911.000	10.788.366.525	18,73	57.604.911.000	17.606.468.846	30,56	54.858.322.000	32.976.214.234	60,11	54.286.203.925	98,96
2	PUSLITBANG TRANSPORTASI ANTARMODA	25.847.942.000	2,066,704,506	8,00	25.847.942.000	4.596.104.231	17,78	25.165.421.000	14.871.805.865	59,97	24.966.986.002	99,21
3	PUSLITBANG TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETA-APIAN	23.257.544.000	2.799.277.588	12,04	23.257.544.000	5.280.823.455	22,71	22.212.565.000	13.223.441.284	59,53	21.848.384.525	98,36
4	PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT SDP	75.028.014.000	3006143568	4,01	32.044.111.000	5.677.874.475	17,72	31.015.011.000	15.969.596.449	51,49	30.539.120.505	98,47
5	PUSLITBANG TRANSPORTASI UDARA	24.906.236.000	2.302.622.964	9,25	24.906.236.000	4.267.319.266	17,17	24.095.758.000	14.113.378.335	58,57	23.850.280.109	98,98
BADAN LITBANG PERHUBUNGAN		**206.644.6470.000**	**21,913,115,151**	**10,14**	**163.660.744.000**	**37.437.590.273**	**22,88**	**157.347.077.000**	**91.154.436.167**	**57,93**	**155.490.975.066**	**98,82**

A. Triwulan I (Periode: Januari s/d Maret 2020)

NO	PROGRAM KEGIATAN	JENIS BELANJA									TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI (RP)	TOTAL DAYA SERAP (%)
		PEGAWAI			BARANG			MODAL					
		PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)			
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	9.342.698.000	1.870.189.808	20,02	32.404.711.000	6.772.922.412	20,90	15.857.502.000	2.145.254.305	13,53	57.604.911.000	10.788.366.525	18,73
2	Puslitbang Transportasi Antarmoda	4.968.352.000	1.197.257.326	24.10	20.237.090.000	869.447.180	4,30	642.500.000	0	0,00	25.847.942.000	2.066.704.506	8,00
3	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	6.754.073.000	1.555.509.546	23,03	15.817.221.000	1.243.768.042	7,86	686.250.000	0	0,00	23.257.544.000	2.799.277.588	12,04
4	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	5.131.682.000	1.141.814.802	22.25	27.273.432.000	1.864.328.766	6.84	42.622.900.000	0	0,00	75.028.014.000	3.006.143.568	4,01
5	Puslitbang Transportasi Udara	4.556.672.000	848.743.218	18,63	18.979.018.000	1.453.879.746	7,66	1.370.546.000	0	0,00	24.906.236.000	2.302.622.964	9,25
	TOTAL	**30.753.477.000**	**6.613.514.700**	**21.50**	**114.711.472.000**	**12.204.346.146**	**10,64**	**61.179.698.000**	**2.145.254.305**	**3,51**	**206.644.6470.000**	**20.963.115.151**	**10,14**

B. Triwulan II (Periode: April s/d Juni 2020)

NO	PROGRAM KEGIATAN	JENIS BELANJA									TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI (RP)	TOTAL DAYA SERAP (%)
		PEGAWAI			BARANG			MODAL					
		PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)			
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	9.342.698.000	3.895.730.486	41,70%	32.404.711.000	10.522.388.645	32,47%	15.857.502.000	3.188.349.715	20,11%	57.604.911.000	17.606.468.846	30,56%
2	Puslitbang Transportasi Antarmoda	4.968.352.000	2.499.075.795	50,30%	20.237.090.000	2.097.028.436	10,36%	642.500.000	0	0%	25.847.942.000	4.596.104.231	17,78%
3	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	6.754.073.000	3.177.988.854	47,05%	15.817.221.000	2.102.834.601	13,29%	686.250.000	0	0%	23.257.544.000	5.280.823.455	22,71%
4	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	5.131.682.000	2.495.169.134	48,62%	26.399.029.000	3.182.705.341	12,06%	513.400.000	0	0%	75.028.014.000	5.677.874.475	17,72%
5	Puslitbang Transportasi Udara	4.556.672.000	2.052.631.547	45,05%	18.979.018.000	2.210.707.719	11,65%	1.370.546.000	12.980.000	0,95%	24.906.236.000	4.267.319.266	17,17%
	TOTAL	**30.753.477.000**	**14.120.595.816**	**45,92%**	**113.837.069.000**	**20.115.664.742**	**17,67%**	**19.070.198.000**	**3.201.329.715**		**163.660.744.000**	**37.437.590.273**	**22,88%**

C. Triwulan III (Periode: Juli s/d September 2020)

NO	PROGRAM KEGIATAN	JENIS BELANJA									TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI (RP)	TOTAL DAYA SERAP (%)
		PEGAWAI			BARANG			MODAL					
		PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)			
1	Dukungan Manaje-men dan Dukungan Teknis Lainnya	8.073.070.000	5.713.199.879	70,77	31.804.711.000	18.379.773.636	57,79	14.980.451.000	8.883.240.719	59,30	54.858.322.000	32.976.214.234	60,11
2	Puslitbang Transpor-tasi Antar-moda	4.775.662.000	3.726.454.713	78,03	19.747.259.000	10.528.961.152	53,32	642.500.000	616.390.000	95,94	25.165.421.000	14.871.805.865	59,97
3	Puslitbang Transpor-tasi Jalan dan Perk-eretaapian	6.103.660.000	4.780.791.755	78,33	15.422.655.000	7.765.517.229	50,35	686.250.000	677.132.300	98,67	22.212.565.000	13.223.441.284	59,53
4	Puslitbang Transpor-tasi Laut, Sungai, Danau dan Penye-berangan	5.131.682.000	3.944.927.943	76,87	25.369.929.000	11.546.101.507	45,51	513.400.000	478.566.999	93,22	31.015.011.000	15.969.596.449	51,49
5	Puslitbang Transpor-tasi Udara	4.024.817.000	3.047.202.210	76,38	18.700.395.000	9.834.128.725	52,59	1.370.546.000	1.205.047.400	87,92	24.095.758.000	14.113.378.335	58,57
	TOTAL	**28.108.891.000**	**21.239.576.500**	**75,56**	**111.044.949.000**	**58.054.482.249**	**52,28**	**18.193.237.000.**	**11.860.377.418**	**65,19**	**157.347.077.000**	**91.154.436.167**	**57,93**

D. Triwulan IV (Periode: Oktober s/d Desember 2020)

NO	PROGRAM KEGIATAN	JENIS BELANJA									TOTAL PAGU (RP)	TOTAL REALISASI (RP)	TOTAL DAYA SERAP (%)
		PEGAWAI			BARANG			MODAL					
		PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	DAYA SERAP (%)			
1	Dukungan Manaje-men dan Dukungan Teknis Lainnya	8.073.070.000	7.510.068.604	93,03	31.804.711.000	31.795.830.719	99,97	14.980.451.000	14.980.304.602	100	54.858.322.000	54.286.203.925	98,96
2	Puslitbang Transpor-tasi Antar-moda	4.775.662.000	4.720.352.388	98,84	19.747.259.000	19.604.361.614	99,28	642.500.000	642.272.000	99,96	25.165.421.000	24.966.986.002	99,21
3	Puslitbang Transpor-tasi Jalan dan Perk-eretaapian	6.103.660.000	6.055.527.087	99,21	15.422.655.000	15.115.725.138	98,01	686.250.000	677.132.300	98,67	22.212.565.000	21.848.384.525	98,36
4	Puslitbang Transpor-tasi Laut, Sungai, Danau dan Penye-berangan	5.131.682.000	4.780.193.970	93,15	25.369.929.000	25.245.561.536	99,51	513.400.000	513.364.999	99,99	31.015.011.000	30.539.120.505	98,47
5	Puslitbang Transpor-tasi Udara	4.024.817.000	3.865.809.644	96,05	18.700.395.000	18.615.338.065	99,55	1.370.546.000	1.369.132.400	99,90	24.095.758.000	23.850.280.109	98,98
	TOTAL	**28.108.891.000**	**26.931.951.693**	**95,81**	**111.044.949.000**	**110.376.817.072**	**99,40**	**18.193.237.000**	**18.182.206.301**	**99,94**	**157.347.077.000**	**155.490.975.066**	**98,82**

LAMPIRAN 3

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
Puslitbang Transportasi Antarmoda					
1	Sistem dan Prosedur *Contingency Plan* Sektor Transportasi Dalam Penanganan Bencana	Kontraktual	Kebijakan		3
2	Optimalisasi Pemanfaatan Simpul Transportasi guna Mendukung Distribusi Logistik	Kontraktual	Kebijakan		5
3	Standardisasi Desain dan Kinerja Integrasi Simpul Transportasi	Swakelola Tipe 2	Standarisasi di tingkat menteri/Dirjen	UGM	1
4	Pengembangan Sistem Transportasi Cerdas (Intelligent Transport System) Indonesia	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UPJ	2
5	Efektivitas Pengendalian Transportasi Sesuai Dengan PM No 18 Tahun 2020, PM No 25 Tahun 2020, dan SE No 4 Tahun 2020 Terhadap Angkutan Logistik	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	3
6	Dampak Efektivitas PSBB Transportasi Dalam Mencegah Meluasnya Penyebaran COVID-19 dan Analisis Ketahanan Bisnis Angkutan Barang/Industri Jasa Logistik	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	3
7	Dampak Adanya Pandemi dan Kebijakan PSBB Terhadap Resiliensi Kinerja dan Keberlangsungan Angkutan Barang/Jasa	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UI	5
8	Model dan Strategi *Recovery* Industri Jasa Logistik Pasca Pandemi Covid19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UGM	5
9	Pola Pergerakan Orang dan Barang di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan Daerah Penyangga Dalam Mendukung Integrasi Transportasi	Swakelola Tipe1	Kebijakan		7
10	Pengembangan Metode Verifikasi dan Konversi Hasil Pengolahan Data Spatial-Temporal Berbasis Seluler	Swakelola Tipe1	Kebijakan		1
11	Penyusunan Legalitas *Masterplan* Transportasi Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara	Swakelola Tipe1	Rancangan Per Menhub		1

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
12	Integrasi Transportasi Dlam Mendukung Pelayanan Penumpang di Propinsi Bali (Studi Kadus Terminal Mengwi Kabupaten Badung)	Swakelola Tipe1	Kebijakan		1
13	Peningkatan Konektivitas Antarmoda di Wakatobi	Swakelola Tipe1	Kebijakan		1
14	Evaluasi Integrasi Fasilitas Alih Moda Pada Simpul Transportasi di Perkotaan Yogyakarta	Swakelola Tipe1	Kebijakan		1
15	Integrasi Informasi Angkutan Barang (Studi Kasus: Jalan dan Pelabuhan)	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
16	Preferensi Masyarakat terhadap Pembangunan Fasilitas Transportasi di Wilayah IKN	Swakelola Tipe1	Kebijakan		7
17	Keterpaduan Pelayanan Transportasi Antarmoda di Kota Palembang	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
18	Peningkatan Efektivitas di Simpul Transportasi Dalam Mendukung Integrasi Transportasi Antarmoda di Kota Medan	Swakelola Tipe1	Kebijakan		1
19	Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra terhadap Efisiensi Biaya Logistik	Swakelola Tipe1	Kebijakan		5
20	Perbandingan Teknis dan Ekonomi Pemilihan Moda Transportasi di IKN	Swakelola Tipe1	Kebijakan		7
21	Analisis Biaya Transportasi terhadap Biaya Logistik Perikanan di Kota Kupang	Swakelola Tipe1	Kebijakan		5
22	Kesiapan Angkutan *Feeder* dalam Mendukung Transportasi di IKN	Swakelola Tipe1	Kebijakan		7
23	Sistem Informasi Transportasi di Kawasan Destinasi Wisata Morotai	Swakelola Tipe1	Kebijakan		4
24	*Supply Chain* Sektor Perikanan di NTT	Swakelola Tipe1	Kebijakan		5

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
25	Efektivitas Pengaturan *Shift* Jam Kerja Terhadap Pola Perjalanan Transportasi di Jabodetabek	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
26	Pola Perjalanan Masyarakat di Wilayah Jabodetabek Sebelum Pandemi, Periode PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
27	Kesiapan Konektivitas Antarmoda Dalam Menghadapi Adaptasi Baru yang Efektif dan Aman	Swakelola Tipe1	Kebijakan		1
28	Pengembangan Alert Healthy System di Simpul Transportasi (studi kasus Transjakarta)	Swakelola Tipe1	Kebijakan		1
29	Pemanfaatan Big Data Dalam Melakukan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas di Jalan Tol	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
30	Efektivitas SIKM, *Rapid Test*, dan *PCR Test* untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 terhadap Perusahaan Operator Transportasi Logistik	Swakelola Tipe1	Kebijakan		3
31	Peran Transportasi Dalam Pola Distribusi Sektor Perikanan di Kota Kupang	Swakelola Tipe1	Kebijakan		5
32	Prosedur dan Persyaratan Teknis Distribusi Logistik untuk Vaksin COVID-19 dari Bandara Menuju Rumah Sakit atau Puskesmas	Swakelola Tipe1	Kebijakan		5
33	Evaluasi Integrasi Transportasi Perkotaan Bandung	Swakelola Tipe1	Kebijakan		1
34	Evaluasi Integrasi Transportasi Perkotaan Medan	Swakelola Tipe1	Kebijakan		1
Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian					
1	Pengembangan Perangkat Lunak Integrasi Rencana Pola Operasi Kereta Api	Kontraktual	Kebijakan		2
2	Potensi Pemudik Angkutan Lebaran Tahun 2020	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
3	Kajian Efektivitas Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Jalan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	3
4	Kajian Pemodelan Pergerakan Orang dan Penyebaran Virus di Bidang Transportasi Jalan Selama Pandemi COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	3
5	Kajian Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ketahanan Bisnis Angkutan Jalan	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	8
6	Model dan Strategi Pemulihan Bisnis Angkutan Jalan Pasca Pandemi COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	8
7	Kajian Efektivitas Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UGM	2
8	Kajian Pemodelan Pergerakan Orang dan Penyebaran Virus Di Bidang Transportasi Perkeretaapian Selama COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UGM	2
9	Kajian Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ketahanan Bisnis Angkutan Perkeretaapian	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UGM	8
10	Model dan Strategi Pemulihan Bisnis Angkutan Perkeretaapian Pasca Pandemi COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UGM	8
11	Kajian Peran Transportasi Kereta Api untuk Mempercepat Distribusi Logistik Kemanusiaan Selama Masa Pandemi Covid 19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UGM	5
12	Kajian Antisipasi Terhadap Paradigma Baru di Bidang Perkeretaapian Selama dan Pasca Pandemi COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UGM	2
13	Kajian Kebijakan Lalulintas dan Penataan Kawasan Puncak	Swakelola Tipe 2	Peraturan Kepala BPTJ	ITB	1
14	Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal di Kawasan Perkotaan Bali Selatan	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	2
15	Kajian Kriteria Penyelenggaraan Kereta Api Ringan LRT Perkotaan di Indonesia	Swakelola Tipe 2	Standarisasi di Tingkat Menteri	UGM	8

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
16	Perencanaan Implementasi Teknologi Angkutan Umum Autonom Berbasis Energi Listrik di Wilayah IKN (Kajian Kebijakan dan Regulasi)	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	7
17	Studi Pengembangan Prototipe Alat Ukur Beban Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Penyusunan Desain)	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	3
18	Evaluasi Integrasi Jaringan Prasarana, Jaringan Pelayanan, Layanan Transportasi Perkotaan Pada Kota Yogyakarta, Kota Solo dan Perjalanan Antar Kota Yogyakarta - Solo	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UGM	2
19	Evaluasi Integrasi Jaringan Prasarana, Jaringan Pelayanan, dan Layanan Transportasi Perkotaan Surabaya	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITS	2
20	Kajian Biaya Jasa dan Kuota Ojek *Online*	Swakelola Tipe1	Peraturan Menteri		2
21	Kajian Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
22	Kajian Kelayakan Pengoperasian Bus AKAP Kelas Pelayanan Eksekutif Untuk Mendukung Pariwisata di Provinsi NTT	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
23	Kajian Efektivitas Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis *Buy The Service*	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
24	Kajian Efektifitas Penyelenggaraan UPPKB	Swakelola Tipe1	Kebijakan		8
25	Kajian Penentuan Potensi Lokasi Pusat Distribusi Dan Pola Distribusi Depo/ Garasi di Kawasan Industri	Swakelola Tipe1	Kebijakan		5
26	*Shifting* Penggunaan Angkutan Umum Ke Kendaraan Pribadi Pada Masa Pandemi COVID-19	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
27	Evaluasi Perilaku Pengemudi Bus dan Truk Untuk Mengurangi Kecelakaan Akibat Rem Blong	Swakelola Tipe1	Kebijakan		8
28	Efektivitas Pemasangan Marka Pengurangan Kecepatan di Ruas Jalan Tol (Studi Kasus di Tol Cipali)	Swakelola Tipe1	Kebijakan		3

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
29	Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan Jembatan ngujang jalan raya Ngantru nomor ruas 089	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
30	Kajian Pengembangan Aksesibilitas Bali Utara – Selatan	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	Universitas Udayana	1
31	Kajian Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Jalan Nasional Denpasar - Gilimanuk	Swakelola Tipe1	Kebijakan		3
32	Kajian Efektifitas Penyelenggaraan Terminal Tipe A	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
33	Kajian Kesiapan Operator Angkutan Barang Terhadap Penerapan Kebijakan Larangan *Over Dimension Over Load* (ODOL) Dalam Rangka Ketertiban Angkutan Barang Di Jalan	Swakelola Tipe1	Kebijakan		8
34	Kajian Pengembangan Transportasi Kawasan Strategis Pariwista Nasional di Borobudur	Swakelola Tipe1	Kebijakan		4
35	Evaluasi Penyelenggaraan Layanan LRT Perkotaan di Palembang dan Jakarta	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
36	Kajian Kebutuhan Tempat Parkir di Kawasan Industri Cikarang	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
37	Kajian Potensi Pemudik Angkutan Lebaran Tahun 2020 Berbasiskan *Online* Survei (SOL 1)	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
38	Persepsi Masyarakat Terhadap Angkutan Lebaran Tahun 2020 Saat Pandemi COVID-19 (SOL 2)	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
39	Pengaruh Penerapan PSBB Terhadap Keinginan Mudik 2020 (SOL 3)	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
40	Survei Phone Interview (Recall) Terhadap Pemudik Jabodetabek	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
41	Kajian Penggunaan KRL Commutter Jabodetabek Pada Saat Kondisi PSBB (SOL 4)	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
42	Kajian Pergerakan Orang Pada Libur Panjang Maulid Nabi Tahun 2020	Swakelola Tipe1	Kebijakan		3
43	Kajian Potensi Pergerakan Perjalanan Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021	Swakelola Tipe1	Kebijakan		3
Puslitbang Transportasi LSDP					
1	Desain Kapal Negara Patroli	Kontraktual	Standard Desain Kapal (Dirjen)	Konsultan	3
2	Penataan Manajemen Pengelolaan Kapal Negara	Kontraktual	Kebijakan	Konsultan	2
3	Desain Kapal Pelayaran Rakyat Dengan Baku Komposit dan Laminating	Kontraktual	Standard Desain Kapal (Dirjen)	Konsultan	3
4	Desain Kapal Penanggulangan Pencemaran Perairan Pelabuhan	Kontraktual	Standard Desain Kapal (Dirjen)	Konsultan	3
5	Potensi Pengembangan *Traffic Separation Schemen* (TSS) di Teluk Balikpapan	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	2
6	Potensi Pengoperasian *Wing in Ground* (Kapal Terbang Rendah Diatas Permukaan Air) untuk Menunjang Pariwisata	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	4
7	Potensi Pengoperasian Bus Tanah Air Indonesia untuk Keperintisan dan Pariwisata	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	6
8	Logistik Kemanusiaan Pada Moda Transportasi Laut, SDP	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITS	5
9	Resiliensi Operator Moda Transportasi Laut, SDP Akibat Pandemi COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITS	8
10	Kebijakan Stimulus Ekonomi Untuk Pemulihan Subsektor Transportasi Laut, SDP	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITS	8

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
11	Analisis Dan Evaluasi Dampak Pandemi COVID-19 Pada Subsektor Puslitbang Transportasi Laut, SDP	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITS	2
12	Efektifitas Pm Nomor 18 Tahun 2020 Dan Pm Nomor 25 Tahun 2020 Guna Menekan Penyebaran COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITS	2
13	Dampak Kebijakan PSBB Wilayah Jawa Pada Wilayah Di Luar Jawa Melalui Moda Transportasi Laut, SDP	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITS	2
14	Antisipasi Kapal Penumpang dan Barang di Pelabuhan Selama Masa Pandemi Covid - 19	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	2
15	Potensi Kapal Penyeberangan Kereta Api Ro-ro (Train Ro-ro) Selat Sunda	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	2
16	Penerapan Bahan Bakar yang Ramah Lingkungan Terhadap Mesin Kapal (B20)	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	3
17	Pengembangan Pelabuhan Umum untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Kawasan Ibu Kota Negara dengan Konsep *Smart City*, *Smart Mobility*	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	7
18	Kebutuhan Transportasi Laut dari Sulawesi Selatan untuk Mendukung Ibu Kota Negara	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	7
19	Kebutuhan Transportasi Laut, Sungai, dan Penyeberangan dalam Menunjang Konektivitas dan Aksesibilitas pada Pusat Pemukiman Ibu Kota Negara	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	7
20	Pengembangan Dermaga Apung (*Floating Berth*) di Ibu Kota Negara	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	7
21	Potensi Pembangunan Pelabuhan Khusus di Sarui Kabupaten Aceh Tomiang	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	2
22	Peningkatan Transportasi Air di Danau Rusa Kecamatan XIII Koto Kampar dalam Mendukung Pariwisata	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	4
23	*Conceptual Design Motorized Multipurpose Berge* untuk Menunjang Transportasi dan Pariwisata di Danau Toba	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	4

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
24	Kelayakan Peningkatan Pelabuhan Tanjung Silopo menjadi Pelabuhan Terbuka untuk Pelayaran Internasional	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	2
25	Tingkat Efektifitas Dan Efisiensi Pelayanan Kapal Penumpang untuk Trayek Nunukan-Tarakan (PP)	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	2
26	Evaluasi Penerapan Inaportnet di Pelabuhan Dumai	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	2
27	Potensi Pengembangan Kantor Kesyahbandaran Utama sebagai BLU	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	8
28	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam Mendukung Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Likupang	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	4
29	Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Laut dan Pantai di Natuna dalam Rangka Mendukung Peningkatan Pengawasan, Keselamatan, dan Keamanan Pelayaran	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	3
30	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Penyeberangan Sulawesi Tenggara (Buton)	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	2
31	Dampak dari Pandemi COVID-19 terhadap usaha Angkutan di Danau Toba dan Upaya resiliensi yang perlu dilakukan	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	8
32	Pemenuhan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam pelayanan angkutan laut penumpang di Pelabuhan Manado pada Masa Adaptasi Bebiasaan Baru	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	3
33	Pemenuhan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Pelayanan Bongkar Muat di Pelabuhan Kuala Tungkal pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	3
34	Kajian Efektifitas Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pencegahan COVID-19 dalam pelayanan angkutan penyeberangan pada lintas Tj. Siapi-api - Muntok	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	3
35	Efektifitas Pemenuhan Protokol Kesehatan dalam Pelayanan Kapal Penyeberangan Padang Bai- Lembar	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	3
36	Perilaku Pengguna jasa dalam pencegahan COVID-19 pada Pelayanan angkutan pada lintasan penyeberangan Merak - Bakauheni	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	2

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
37	Desain Jaringan dan Operasi Tol Laut Tahun 2021	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	1
38	Penanganan bongkar muat barang pada masa pandemi COVID-19 di Pelabuhan Talang Duku	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	2
39	Pemenuhan protokol kesehatan dalam kegiatan turun naik penumpang PELNI di Pelabuhan Batam	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	2
40	Analisis Kinerja TKBM pada masa pandemi COVID-19 di Pelabuhan Makassar	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	8
41	Pengembangan *short sea shipping* trayek pelabuhan Ciwandan - Panjang	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	1
42	Kebutuhan Pengoperasian kapal Ferry Roro untuk Rute Banyuwangi-Lembar	Swakelola Tipe1	Kebijakan	-	1
43	Pengembangan Pelabuhan Sokoi Dalam Mendukung Peningkatan Potensi di Kawasan	Swakelola Tipe1	Kebijakan	Univ. Riau	4
44	Pengembangan Rute Pelayanan Penyeberangan Ketapang (Banyuwangi) - Lembar (Lombok)	Swakelola Tipe1	Kebijakan	Univ. Udayana	1
45	Angkutan Penyeberangan untuk Mendukung *Feeder* Tol Laut di Nusa Tenggara Timur	Swakelola Tipe1	Kebijakan	Universitas Nusa Cendana	1
46	Pelayanan Penyeberangan untuk Mendukung *Feeder* Tol Laut di Maluku	Swakelola Tipe1	Kebijakan	Univ. Pattimura	1
47	*Demand Pull* dan *Supply Push* Untuk Pelabuhan Pangkal Balam	Swakelola Tipe1	Kebijakan	Univ. Sriwijaya	1
48	Kebutuhan Dukungan Pelayanan Angkutan Sungai Mamberemo	Swakelola Tipe1	Kebijakan	Univ. Cendrawasih	1
49	Rerouting Kapal-Kapal Penyeberangan di Bawah 5000 GT	Swakelola Tipe1	Kebijakan	Univ. Hasanuddin	1

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
50	Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan DAK Bidang Transportasi Laut	Swakelola Tipe1	Kebijakan	UI	8
51	Kriteria *Cluster* Wilayah Pelayanan Tol Laut	Swakelola Tipe1	Kebijakan	ITS	2
52	Kriteria Kawasan Pendukung Hinterland Pelabuhan	Swakelola Tipe1	Kebijakan	ITS	1
53	Antisipasi Penanggulangan Pembuangan Limbah Kapal di Laut	Swakelola Tipe1	Kebijakan	ITS	3
54	Migasi Bencana Hidrometrologi dan Tsunami Sektor Transportasi Laut, SDP	Swakelola Tipe1	Kebijakan	BPPT	3
55	Dukungan Distribusi Vaksin Pada Sektor Transportasi Laut, SDP	Swakelola Tipe1	Kebijakan	UI	1
56	Optimalisasi PNBP Pada Tuks dan Tersus	Swakelola Tipe 1	Kebijakan	ITS	8
Puslitbang Transportasi Udara					
1	Studi Kelayakan Pembuatan *Aerospace Park* di Indonesia	Kontraktual	Kebijakan		2
2	Penyusunan Mekanisme dan Metode Perhitungan Emisi Gas Buang dan Kebisingan di Bandar Udara Indonesia	Kontraktual	Kebijakan		2
3	Perancangan *Smart Airport* Untuk Pengoptimalan Operasional Bandar Udara Di Ibukota Negara	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	7
4	Harmonisasi ATFM dan A-CDM guna kelancaran layanan penerbangan di ruang udara dan bandara	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	AirNav	1
5	Studi Pengembangan Prototype Alat Pendeteksi *Foreign Object Debris* (FOD) di Bandar Udara	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UI	3

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
6	Pengembangan Purwarupa *Air Drone System Detector*	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	Unhan	3
7	Pengujian Kehandalan dan Pemanfaatan Lanjut Purwarupa Standing Water Detector	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITS	3
8	Pengembangan *Anti Bird Strike* yang Efektif untuk Bandara di Indonesia	Swakelola Tipe1	Kebijakan		3
9	Harmonisasi Waterbase *Airport* dan Kebutuhan Wisata Kepulauan	Swakelola Tipe1	Kebijakan		4
10	Manajemen Angkutan Udara di Ibu Kota Negara Baru	Swakelola Tipe1	Kebijakan		7
11	Manajemen Ruang Udara di atas Ibu Kota Negara Baru	Swakelola Tipe1	Kebijakan		7
12	Pengaruh Kondisi Meteorologi bagi Perencanaan Jalur Penerbangan	Swakelola Tipe1	Kebijakan		1
13	Kajian Standar Pemeriksaan Izin Masuk Penumpang ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara	Swakelola Tipe1	Kebijakan		3
14	Analisis Kecelakaan Pesawat Udara di Indonesia	Swakelola Tipe1	Kebijakan		3
15	Kesiapan Indonesia dalam Implementasi Pelatihan Berbasis Upset Prevention and *Recovery Training* (UPRT)	Swakelola Tipe1	Kebijakan		3
16	Kajian Awal Pemanfaatan Energi Hibrida di Bandar Udara	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
17	Pengaruh Implementasi *Continuous Climb Operation* (CCO) dan *Continuous Descent Operation* (CDO) terhadap Pengurangan Emisi CO2 Pesawat Udara	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2
18	COVID-19 *Outbreak* dan Dampaknya di Sektor Penerbangan	Swakelola Tipe1	Kebijakan		2

No.	Judul Penelitian	Mekanisme	Hasil Kajian dan Jenis Kemanfaatan	Mitra Kerjasama	Kelompok Penelitian (input kode 1 sd 8)
		Kontraktual/ Swakelola Tipe 2/Swakelola/ Swakelola Tipe1	a. Per-Menhub/Per-Dirjen b. Kebijakan c. Standarisasi di tingkat Menteri/Dirjen		
19	Pemodelan Pergerakan Transportasi Penumpang dan Barang dalam Merespon Pandemi COVID-19 di Indonesia	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	2
20	Pemodelan Potensi Dampak Ekonomi dari Pandemi COVID-19 pada Bisnis Penerbangan di Indonesia	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	2
21	Analisis Skenario Kebijakan Pemulihan Operator Industri Penerbangan dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 di Indonesia	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	2
22	Standar Kesehatan di Sarana dan Prasarana Transportasi Udara dalam Antisipasi Penyebaran Pandemi COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UI	2
23	Perubahan Perilaku Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Udara sebagai Respon terhadap Pandemi COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UI	2
24	Analisis Efektivitas Peraturan Sektor Penerbangan terhadap Kebijakan PSBB dan Mitigasi Resiko Penyebaran COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UI	2
25	Dampak COVID-19 terhadap Resiliensi Kinerja Sektor Penerbangan dan Sektor Lainnya	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UI	2
26	Model Strategi Pemulihan Bisnis Penerbangan Pasca Pandemi COVID-19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UI	2
27	Kesiapan Sarana Prasarana Transportasi dalam Mendukung Distribusi Vaksin COVID19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UI	5
28	Pelayanan Transportasi dalam Distribusi Logistik Vaksin COVID19	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UI	5
29	Pengembangan Rute Baru Penerbangan Perintis	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	UI	1
30	Mitigasi Dampak Lingkungan akibat Operasi Bandar Udara dan Pengaruh Lingkungan terhadap Operasi Bandar Udara Baru di Provinsi Bali	Swakelola Tipe 2	Kebijakan	ITB	2
	TOTAL				**163**

V

LAMPIRAN 4

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
INITIAL OUTCOME									
IKP 1 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Puslitbang Transportasi Antarmoda								
	Pelayanan Transportasi	1 Standardisasi Desain dan Kinerja Integrasi Simpul Transportasi	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	UGM Elviana R. Simobolon	Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perkeretaapian Dinas Perhubungan BUMN Penyedia Prasarana dan Sarana Transportasi	FGD	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/13-PTAM-2020	Standar Desain dan Kinerja Simpul Transportasi Antarmoda
	Pelayanan Transportasi	2 Pengembangan Sistem Transportasi Cerdas (Intelligent Transport *System*) Indonesia	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	UPJ Reslyana Dwitasari	Ditjen Perhubungan Darat ITS Indonesia	FGD	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/14-PTAM-2020	Rekomendasi kebijakan pengembangan ITS di Indonesia
	Sistem Transportasi IKN	3 Pola Pergerakan Orang dan Barang di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan Daerah Penyangga Dalam Mendukung Integrasi Transportasi	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	Hasriwan Putra	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Satgas IKN Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perkeretaapian	FGD	SURAT SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/15-PTAM-2020	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Transportasi di Wilayah IKN dan Daerah Penyangga

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	4 Pengembangan Metode Verifikasi dan Konversi Hasil Pengolahan Data Spatial-Temporal Berbasis Seluler	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	Herawati Basirpuli	Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perkeretaapian	FGD	SURAT SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/16-PTAM-2020	Pengembangan Big Data untuk perencanaan transportasi
	Pelayanan Transportasi	5 Sistem dan Prosedur *Contingency Plan* Sektor Transportasi Dalam Penanganan Bencana	Puslitbang Transportasi Antarmoda	KONTRAKTUAL	Konsultan Rita	BNPB Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perkeretaapian	FGD	SURAT SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/11-PTAM-2020	Rekomendasi kebijakan mitigasi bencana di bidang transportasi
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	6 Optimalisasi Pemanfaatan Simpul Transportasi guna Mendukung Distribusi Logistik	Puslitbang Transportasi Antarmoda	KONTRAKTUAL	Konsultan Win Akustia	Ditjen Perhubungan Darat Dinas Perhubungan	FGD	SURAT SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/12-PTAM-2020	Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Simpul Transportasi untuk Mendukung Efisiensi Distribusi Logistik
	Pelayanan Transportasi	7 Penyusunan Legalitas *Masterplan* Transportasi Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	Irawati Andriani	Dinas Perhubungan Sulawesi Utara	FGD	SURAT SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/17-PTAM-2020	Rancangan Permenhub dan Perpres
	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian								
	Pelayanan Transportasi	1 Pengembangan Perangkat Lunak Integrasi Rencana Pola Operasi Kereta Api	Puslitbang TJKA	Studi Kontraktual	Kontraktual	Ditjen Perkeretaapian	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perkeretaapian No. LT.204/1/3-BLTJ-KA-2020	Modernisasi GAPEKA dengan menggunakan Perangkat Lunak
	Pelayanan Transportasi	2 Perencanaan Implementasi Teknologi Angkutan Umum Autonom Berbasis Energi Listrik di Wilayah IKN	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	Mutharuddin	Menteri Perhubungan	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan pemilihan teknologi Angkutan Umum Autonom Berbasis Energi di Wilayah IKN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	3 Survei Potensi Pemudik Angkutan Lebaran	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	Budi Dwi Hartanto	Menteri Perhubungan	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan dalam rangka persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran 2020
	Pelayanan Transportasi	4 Studi Pengembangan Alat Ukur Beban Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	Arbie	Ditjen Perkeretaapian	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perkeretaapian No. LT.204/1/3-BLTJ-KA-2020	Memberikan rekomendasi Pengembangan Alat Ukur Beban Penggunaan Prasarana Perkeretaapian
	Pelayanan Transportasi	5 Kajian Efektivitas Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	UGM	Ditjen Perkeretaapian	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perkeretaapian No. LT.204/1/3-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian pada masa Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	6 Kajian Pemodelan Pergerakan Orang dan Penyebaran Virus Di Bidang Transportasi Perkeretaapian Selama COVID-19	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	UGM	Ditjen Perkeretaapian	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perkeretaapian No. LT.204/1/3-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian pada masa Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	7 Kajian Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ketahanan Bisnis Angkutan Perkeretaapian	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	UGM	Ditjen Perkeretaapian	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perkeretaapian No. LT.204/1/3-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian pada masa Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	8 Model dan Strategi Pemulihan Bisnis Angkutan Perkeretaapian Pasca Pandemi COVID-19	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	UGM	Ditjen Perkeretaapian	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perkeretaapian No. LT.204/1/3-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian pada masa Pandemi COVID-19

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	9	Kajian Peran Transportasi Kereta Api untuk Mempercepat Distribusi Logistik Kemanusiaan Selama Masa Pandemi Covid 19	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	UGM	Ditjen Perkeretaapian	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perkeretaapian No. LT.204/1/3-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian pada masa Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	10	Kajian Antisipasi Terhadap Paradigma Baru di Bidang Perkeretaapian Selama dan Pasca Pandemi COVID-19	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	UGM	Ditjen Perkeretaapian	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perkeretaapian No. LT.204/1/3-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi perkeretaapian pada masa Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	11	Kajian Efektivitas Penerapan Kebijakan Pengendalian Transportasi Jalan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	ITB	Ditjen Perhubungan Darat	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi jalan pada masa Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	12	Kajian Pemodelan Pergerakan Orang dan Penyebaran Virus di Bidang Transportasi Jalan Selama Pandemi COVID-19	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	ITB	Ditjen Perhubungan Darat	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi jalan pada masa Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	13	Kajian Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ketahanan Bisnis Angkutan Jalan	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	ITB	Ditjen Perhubungan Darat	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi jalan pada masa Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	14	Model dan Strategi Pemulihan Bisnis Angkutan Jalan Pasca Pandemi COVID-19	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	ITB	Ditjen Perhubungan Darat	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi jalan pada masa Pandemi COVID-19

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	15 Kajian Kebijakan Lalulintas dan Penataan Kawasan Puncak (ITB)	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	ITB	Ditjen Perhubungan Darat	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris BPTJ No. LT.204/1/5-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan dalam rangka mengatasi kemacetan di wilayah Puncak
	Pelayanan Transportasi	16 Evaluasi Integrasi Jaringan Prasarana, Jaringan Pelayanan, Layanan Transportasi Perkotaan Pada Kota Yogyakarta, Kota Solo dan Perjalanan Antar Kota Yogyakarta - Solo	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	UGM	Ditjen Hubdat dan Ditjen Perkeretaapian	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Menteri Perhubungan No. : UM.006/15/16-BLT-2020	Rekomendasi kebijakan terhadap transportasi perkotaan di Kota Yogyakarta, Kota Solo, dan Antara Kota Yogyakarta-Solo
	Pelayanan Transportasi	17 Evaluasi Integrasi Jaringan Prasarana, Jaringan Pelayanan, dan Layanan Transportasi Perkotaan Surabaya	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	ITS	Ditjen Hubdat dan Ditjen Perkeretaapian	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Menteri Perhubungan No. : UM.006/15/16-BLT-2020	Rekomendasi kebijakan terhadap transportasi perkotaan Surabaya
	Pelayanan Transportasi	18 Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal di Kawasan Perkotaan Bali Selatan	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	ITB	Ditjen Hubdat	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi angkutan umum yang layak digunakan sebagai angkutan massal di Kawasan Perkotaan Bali Selatan
	Pelayanan Transportasi	19 Kajian Kriteria Penyelenggaraan kereta api ringan (LRT) perkotaan di Indonesia	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	UGM	Ditjen Perkeretaapian	FGD	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perkeretaapian No. LT.204/1/3-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kriteria penyelenggaraan kereta api ringan (LRT) perkotaan di Indonesia
	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan								
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1 Studi Desain Kapal Negara Patroli	Puslitbang Transportasi LSDP	Konstraktual	Drs. Edward Marpaung M.M	Ditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/1/22-BLTL-2020	Rekomendasi desain kapal negara khususnya kapal patroli

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	2	Penataan Manajemen Pengelolaan Kapal Negara	Puslitbang Transportasi LSDP	Konstraktual	Fardian Ishibi, S. T., M. T.	Ditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/1/23-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan penataan manajemen pengelolaan kapal negara
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	3	Desain Kapal Pelayaran Rakyat Dengan Baku Komposit dan Laminating	Puslitbang Transportasi LSDP	Konstraktual	Ir. Bambang Siswoyo, M. T	Ditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/1/24-BLTL-2020	Rekomendasi desain kapal dengan bahan baku komposit dan laminating
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	4	Desain Kapal Penanggulangan Pencemaran Perairan Pelabuhan	Puslitbang Transportasi LSDP	Konstraktual	Dr. Ir. Johny Malisan	Ditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/1/25-BLTL-2020	Rekomendasi desain kapal negara khususnya pencemaran pelabuhan
	Pelayanan Transportasi	5	Potensi Pengembangan *Traffic Separation Schemen* (TSS) di Teluk Balikpapan	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe II	Fardian Ishibi, S. T., M. T.	KSOP Balikpapan	BASTHP	LT.204/2/1-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan pengembangan TSS
	Pengembangan Transportasi di KSPN	6	Potensi pengoperasian *wing in ground* (kapal terbang rendah di atas permukaan air) untuk menunjang pariwisata	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe II	Drs. Dedy Arianto	Direktur Perkapalan dan Kepelautan	BASTHP	LT.204/2/2-BLTL-2020	Rekomendasi potensi WIG untuk menunjang pariwisata
	Pengembangan Transportasi di 3TP	7	Potensi Pengoperasian Bus Tanah Air Indonesia untuk Keperintisan dan Pariwisata	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe II	PIC: Dr. Paulus Raga	Direktur Transportasi SDP	BASTHP	LT.204/2/3-BLTL-2020	Rekomendasi potensi Bus Air Ampibi untuk menunjang pariwisata
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	8	Studi Logistik Kemanusiaan Pada Moda Transportasi Laut, SDP	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe II	Kerjasama ITS (Koordinator : Pak Bambang/ Pak Kamarul)	Ditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/2/4-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	9	Studi Resiliensi Operator Moda Transportasi Laut, SDP Akibat Pandemi COVID-19	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe II	Kerjasama ITS (Koordinator : Pak Bambang/ Pak Kamarul)	Ditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/2/5-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	10	Studi Kebijakan Stimulus Ekonomi Untuk Pemulihan Subsektor Transportasi Laut, SDP	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe II	Kerjasama ITS (Koordinator : Pak Bambang/ Pak Kamarul)	Ditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/2/6-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Puslitbang Transportasi Udara									
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	1	Studi Kelayakan Pembuatan Aerosoace Park Di Indonesia	Puslitbang Transportasi Udara	Konsultansi	Konsultan / Lita Yarlina	DKUPPU dan DBU	FGD, BASTH	KU.003/10/4-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan *Aerospace Park* di Indonesia
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	2	Studi Penyusunan Mekanisme Dan Metode Perhitungan Emisi Gas Buang	Puslitbang Transportasi Udara	Konsultansi	Konsultan / Yati Nurhayati	DKUPPU dan DBU	FGD, BASTH	KU.003/10/5-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan mekanisme dan metode perhitungan emisi gas buang di Indonesia
	Pelayanan Transportasi	3	Harmonisasi ATFM dengan A-CDM guna Kelancaran Layanan Penerbangan di Ruang Udara dan Bandar Udara	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	Dina Yuliana	Direktorat Navigasi dan Airnav	FGD, BASTH	KU.003/9/19-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan terhadap harmonisasi ATFM dan ACDM dalam mendukung kelancaran pelayanan penerbangan di Indonesia
	Sistem Transportasi IKN	4	Perancangan *Smart Airport* untuk Pengoptimalan Operasional Bandar Udara di Ibu Kota Negara Baru	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	Harry Yanto	Direktorat Bandar Udara (DBU)	FGD, BASTH	KU.003/9/20-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan *Smart Airport* terkait optimalisasi pelayanan transportasi udara di IKN
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	5	Pengembangan *Anti Bird Strike* yang Efektif untuk Bandar Udara di Indonesia	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	Minda Mora	Direktorat Bandar Udara (DBU)	FGD, BASTH	KU.003/9/21-BLTU-2020	Rekomndasi kebijakan mengenai solusi penanganan birtstrike di lingkungan bandar udara berdasarkan kharakteristi, ekologi dan pola pergerakan burung
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	6	Pengembangan Purwarupa Alat Pendeteksi *Foreign Object Debris* (FOD) di Sisi Udara Bandar Udara	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	UI / Ali Murtadho	Direktorat Bandar Udara (DBU)	FGD, BASTH	KU.003/9/22-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan tentang penggunaan dan pembuatan FOD di Bandar udara di Indonesia
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	7	Pengembangan Purwarupa *Air Drone System Detector*	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	Unhan / Tito Yusmar	DKUPPU	FGD, BASTH	KU.003/9/23-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan tentang penyusunan dan pengoperasian *Drone* di wilayah Indonesia

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	8 Pengujian Kehandalan dan Pemanfaatan Lanjut Purwarupa Standing Water Detector Detector	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	ITS / Arman Mardoko	Direktorat Bandar Udara (DBU)	FGD, BASTH	KU.003/9/24-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan terkait uji Kehandalan penggunaan purwarupa Standing Water Detector di bandar udara
INTERMEDIATE OUTCOME									
IKP 1 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan pada (t-2)	**Puslitbang Transportasi Antarmoda**								
	Konektivitas dan Aksesbilitas	1 Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah di Papua Dalam Rangka Mendukung Tol Laut	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	Listantari	Ditjen Perhubungan Laut Dinas Perhubungan	FGD, surat kepada Ditjen Perhubungan Laut	Surat kepada Ditjen Perhubungan Laut dan berdasarkan pemantauan pada tahun 2019 terdapat undangan dari Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM.003/6/11/DA-2019 persiapan kegiatan Menhub dalam Rakornas Tol Laut dan angkutan Perintis, Puslitbang Transportasi Antarmoda diminta menyiapkan bahan berdasarkan hasil studi yang telah dibuat tahun 2018. Selain itu pada Direktur Lalin dan Angkutan Laut meminta Kapuslitbang Transportasi Antarmoda mengisi acara dialog strategis pada tanggal 23 Maret 2019 di Yogyakarta berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2018 terkait aksesibilitas san konektivitas antarwilayah di Provinsi papua dalam Rangka Mendukung Tol Laut	telah disampaikan ke Ditjen Laut dan berdasarkan pemantauan pada tahun 2019 telah dimanfaatkan untuk memberikan masukan dan menjadi pembicara pada acara dialog strategis terkait tol laut pada tanggal 23 maret 2019 di Yogyakarta dan memaparkan studi yang telah dibuat Puslitbang TAM tahun 2018.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian									
	Pelayanan Transportasi	1	Studi Perencanaan Transit Oriented Development (TOD) Angkutan Perkeretaapian	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	Siti Nur Fadlilah A.	Ditjen Perkeretaapian	BASTHP	LT.106/3/6-BLTD-2018	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Ditjen Perkeretaapian menargetkan 13 stasiun LRT menjadi TOD dapat terealisasi pada tahun 2023
	Pelayanan Transportasi	2	*Background* Studi Reviu UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe II	Nunuj Nurdjanah	Ditjen Perhubungan Darat	BASTHP	LT.106/3/8-BLTD-2018	Tahun 2020, No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ sedang dibahas di DPR untuk direvisi dan diharapkan selesai pada tahun ini (Pada 18 Februari 2020, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar mengenai Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ))
	Konektivitas dan Aksesbilitas	3	Perencanaan dan Penataan Jalur Kereta Api Barang di Pulau Sumatera	Puslitbang TJKA	Kontraktual	Kontraktual	Ditjen Perkeretaapian	BASTHP	LT.106/3/7-BLTD-2018	Terdapat rencana pembangunan jalur ganda (*double track*) di wilayah Lahat - Tarahan, penambahan jalur sliding di Prabumulih - Kertapati, serta pembangunan jalur long cuty di Teginereng - Tarahan yang diarahkan melalui skema kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) - Renstra Kemenhub 2020-2024

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan									
	Pengembangan Transportasi di 3TP	1	Studi Tinjau Ulang Pengoperasian dan Jaringan Angkutan Laut Perintis dalam Rangka Menjaga Kontinuitas Kebutuhan Bahan Pokok dan Stabilitas Harga	Puslitbang Transportasi LSDP	Kontraktual	Paulus Raga	Ditjen Hubla	BASTHP	KU.003/2/5-BLTL-2018	Dibuktikan dengan SK Ditjenhubla No KP.815/ DJPL/2019. Memberi masukan efektivitas rute tsb lebih efektif. Salah satu rute yg diubah R-43.
	Pengembangan Transportasi di 3TP	2	Studi Pengembangan Trayek Tol Laut Tahun 2019	Puslitbang Transportasi LSDP	Kontraktual	Paulus Raga	Ditjen Hubla	BASTHP	KU.003/2/2-BLTL-2018	Dibuktikan dengan SK Ditjenhubla No. KP. 631/ DJPL/2019. Memberi masukan untuk efektivitas rute tol laut tahun 2018, dari 18 rute menjadi 20 rute di tahun 2019. Salah satu perbuhan rute yakni T-2 di 2018 menjadi T-3 di bangka belitung. Dan salah satu rute menuju tanjung batu dihilangkan.
	Pengembangan Transportasi di KSPN	3	Studi Desain Grand Danau Toba	Puslitbang Transportasi LSDP	Kontraktual	Pak Dedy A	Ditjen Hubla	BASTHP	KU.003/2/1-BLTL-2018	Terdapat beberapa rekomendasi penelitian yang dijalankan oleh Ditjen Perhubungan Darat, yaitu terkait pelaksanaan pembangunan dermaga

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	4 Studi Pemetaan/Sebaran Pelabuhan Laut dan Penyeberangan pada 7 Pulau Besar di Indonesia	Puslitbang Transportasi LSDP	Kontraktual	Pak Bambang Siswoyo	Ditjen Hubla	BAST	KU.003/2/16-BLTL-2018	Penelitian ini menjadi bahan masukan dalam penyusunan Buku Transportasi Multimoda dan referensi Mata Kuliah Perencanaan Transportasi Multimoda dan Angkutan Brang Pada Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Surat masuk permintaan informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan dan Informasi Hasil Peneliian (SIGAP SIHATI) di website Badan Litbang dari Bapak Muhammad Djaya Bakri dengan alamat email jayabakri@gmail.com pada tanggal 4 Desember 2020.
	Puslitbang Transportasi Udara								
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	1 Pengembangan Transshipment Kargo Udara Di Bandara Ngurah Rai Denpasar	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	ITB	DBU dan AP I Ngurah Ray	FGD, BASTHP	No. KU.003/1/23-BLTU-2018	Telah disiapkan lokasi untuk kesiapan bangunan pendukung yang diperlukan
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	2 Penelitian Pengembangan *Prototype* Peralatan Untuk Mengukur Ketinggian Genangan Air (*Standing Water*) Di Landas Pacu	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	ITS	DBU, BMKG	FGD, BASTHP	No. KU.003/1/15-BLTU-2018	Ditindak lanjutin dengan Uji Kehandalah di Bandara NYIA
	Pengembangan Transportasi di KSPN	3 Studi Potensi Untuk Ditetapkannya Lokasi Bandar Udara Perairan Dan Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Perairan (*Seaplane*) Di Indonesia	Puslitbang Transportasi Udara	Konsultansi	Konsultan	DBU, DKUPPU	FGD, BASTHP	No. KU.003/1/12-BLTU-2018	Sebagai bahan FGD Tahun 2019 di Pemerintah Provinsi Riau tentang Daerah wisata Senua

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
INITIAL OUTCOME									
IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	**Puslitbang Transportasi Antarmoda**								
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1 Efektivitas Pengaturan *Shift* Jam Kerja Terhadap Pola Perjalanan Transportasi di Jabodetabek	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Yuveline Aurora	Satgas Covid Kementerian Perhubungan	FGD, *Policy Brief*, Surat Laporan kepada Menteri Perhubungan	SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2020	- SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2020 - DIMANFAATKAN UNTUK ACUAN PENYUSUNAN SURAT EDARAN METERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 4 TAHUN 2020 TENTANG TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID 19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	2 Pola Perjalanan Masyarakat di Wilayah Jabodetabek Sebelum Pandemi, Periode PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Herawati Basirpuli	Satgas Covid Kementerian P erhubungan	FGD, *Policy Brief*, Surat Laporan kepada Menteri Perhubungan	SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2021	- SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2020 - DIMANFAATKAN UNTUK ACUAN PENYUSUNAN SURAT EDARAN METERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 4 TAHUN 2020 TENTANG TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID 19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	3 Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra terhadap Efisiensi Biaya Logistik	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Reslyana Dwitasari	BPTD Wilayah VI Bengkulu dan Lampung Dinas Bina Marga dan Kontruksi Provinsi Lampung	BASTHP, *POLICY BRIEF*	Telah dilakukan BASTHP dengan BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung pada tanggal 17 Juli 2020 , NOMOR : PL.108/1/1-PTAM-2020	Telah dimanfaatkan oleh BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung untuk Pengembangan Jalan Tol Pendukung Transportasi Logistik di Tol Trans Sumatera
	Pengembangan Transportasi di KSPN	4 Peningkatan Konektivitas Antarmoda di Wakatobi	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Win Akustia	Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi	BASTHP, *POLICY BRIEF*	Telah dilakukan BASTHP dengan Dinas Perhubungan Wakatobi tanggal 7 Desember , NOMOR : PL.108/1/3-PTAM-2020	Telah dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi untuk pengembangan integrasi moda menuju dari dan ke kawasan wisata

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	5	Evaluasi Integrasi Fasilitas Alih Moda Pada Simpul Transportasi di Perkotaan Yogyakarta	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Yessi Gusleni	Dinas Perhubungan DIY (Kepala Balai Terminal Jombor), BPTD Jateng dan DIY (Kepala Terminal Giwangan), Dit Prasarana Ditjen Perhubungan Darat	BASTHP, *POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/5-PTAM-2020	Rekomendasi Kebijakan pengembangan fasilitas alih moda pada simpul transportasi di Wilayah Perkotaan Yogyakarta
	Pelayanan Transportasi	6	Keterpaduan Pelayanan Transportasi Antarmoda di Kota Palembang	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Listantari	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretapiaan, Kepala Dinas Kota Palembang, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel	BASTHP, *POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/7-PTAM-2020	Rekomendasi kebijakan pengembangan rute angkutan lanjutan di Kota Palembang
	Pelayanan Transportasi	7	Peningkatan Efektivitas di Simpul Transportasi Dalam Mendukung Integrasi Transportasi Antarmoda di Kota Medan	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Rita	Dishub Prov. Sumut dan BPTD (BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara)	BASTHP, *POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/8-PTAM-2020	Rekomendasi Kebijakan pengembangan fasilitas alih moda pada simpul transportasi di Kota Medan
	Sistem Transportasi IKN	8	Perbandingan Teknis dan Ekonomi Pemilihan Moda Transportasi di IKN	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Hasriwan Putra	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Satgas IKN Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perkeretaapian	BASTHP, *POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/2/1-PTAM-2020	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sarana Transportasi di Wilayah IKN dan Daerah Penyangga
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	9	Analisis Biaya Transportasi terhadap Biaya Logistik Perikanan di Kota Kupang	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Yuveline Aurora	Dinas Perhubungan Kota Kupang	BASTHP, *POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/18-PTAM-2020	Rekomendasi kebijakan pengembangan transportasi logistik untuk komoditi perikanan di Kota Kupang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Sistem Transportasi IKN	10 Kesiapan Angkutan *Feeder* dalam Mendukung Transportasi di IKN	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Irawati Andriani	Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Balikpapan	BASTHP, *POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/9-PTAM-2020	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sarana Transportasi di Wilayah IKN dan Daerah Penyangga
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	11 *Supply Chain* Sektor Perikanan di NTT	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Irawati Andriani	Dinas Perhubungan Kota Kupang dan KKP	BASTHP, *POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/20-PTAM-2020	Rekomendasi kebijakan pengembangan transportasi logistik untuk komoditi perikanan di NTT
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	12 Kesiapan Konektivitas Antarmoda Dalam Menghadapi Adaptasi Baru yang Efektif dan Aman	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Elvianan R. Simbolon	Ditjen Perhubungan Darat, PT ASDP Cabang Merak dan BPTD Banten	BASTHP, *POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/21-PTAM-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi antarmoda dalam penanganan covid 19 pada masa tatanan kebiasaan baru
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	13 Efektivitas SIKM, *Rapid Test*, dan *PCR Test* untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 terhadap Perusahaan Operator Transportasi Logistik	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Yessi Gusleni	Satgas Covid Kementerian Perhubungan	BASTHP, *POLICY BRIEF*	SURAT KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN, SURAT SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/2-PTAM-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi antarmoda dan logistik dalam penanganan covid 19 pada masa tatanan kebiasaan baru
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	14 Prosedur dan Persyaratan Teknis Distribusi Logistik untuk Vaksin COVID-19 dari Bandara Menuju Rumah Sakit atau Puskesmas	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Herawati Basirpuli	Satgas Covid Kementerian Perhubungan	FGD, *POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN KEPADA BIOFARMA / DINKES PROVINSI	Rekomendasi kebijakan transportasi untuk mendukung distribusi vaksin

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Konektivitas dan Aksesbilitas	15	Integrasi Sistem Angkutan Umum Perkotaan untuk Meningkatkan Peran Perkeretaapian di kawasan Bandung Raya	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Yessi Gusleni	Dinas Perhubungan Kota Bandung Ditjen Perkeretaapian	WEBINAR. *POLICY BRIEF*	TELAH DIKIRIM SURAT KE MENHUB NOMOR:UM.006/14/9-BLT-2020 TENTANG LAPORAN PENUGASAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN INTEGRASI SISTEM ANGKUTAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN	SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2020
	Konektivitas dan Aksesbilitas	16	Integrasi Sistem Angkutan Umum Perkotaan untuk Meningkatkan Peran Perkeretaapian di kawasan Medan, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro)	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Listantari	Dinas Perhubungan Kota Medan Ditjen Perkeretaapian	WEBINAR, *POLICY BRIEF*	TELAH DIKIRIM SURAT KE MENHUB NOMOR:UM.006/14/9-BLT-2020 TENTANG LAPORAN PENUGASAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN INTEGRASI SISTEM ANGKUTAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN	SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2021
	Pengembangan Transportasi di KSPN	17	Sistem Informasi Transportasi di Kawasan Destinasi Wisata Morotai	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Maria Magdalena	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara	FGD, APLIKASI SISTEM INFORMASI	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN KEPADA DISHUB KAB. MOROTAI NOMOR: PL.108/1/19-PTAM-2020	Rekomendasi kebijakan pengembangan sistem informasi dikawasan destinasi wisata Morotai
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	18	Peran Transportasi dalam Pola Distribusi Sektor Perikanan di Kota Kupang	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Herma Juniati	Dinas Perhubungan Kota Kupang	BASTHP	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/24-PTAM-2020	Rekomendasi kebijakan pengembangan transportasi logistik untuk komoditi perikanan di Kota Kupang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Sistem Transportasi IKN	19	Preferensi Masyarakat terhadap Pembangunan Fasilitas Transportasi di Wilayah IKN	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Herma Juniati	PUPR Provinsi Kalimantan Timur	BASTHP, *POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/6-PTAM-2020	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Transportasi di Wilayah IKN dan Daerah Penyangga
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	20	Integrasi Informasi Angkutan Barang (Studi Kasus: Jembatan Timbang dan Pelabuhan)	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Herawati Basirpuli	BPTJ dan UPPKB BALONGGANDU	*POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/10-PTAM-2020	Rekomendasi kebijakan pengembangan sistem informasi untuk angkutan barang
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	21	Pengembangan Alert *Healthy System* di Simpul Transportasi (studi kasus Transjakarta)	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Herawati Basirpuli	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	*POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/22-PTAM-2020	Alat pendeteksi kesehatan pada simpul transportasi
	Konektivitas dan Aksesbilitas	22	Integrasi Transportasi Dlam Mendukung Pelayanan Penumpang di Propinsi Bali (Studi Kadus Terminal Mengwi Kabupaten Badung)	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Elvianan R. Simbolon	BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB	BASTHP, *POLICY BRIEF*	SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/4-PTAM-2020	Rekomendasi Kebijakan Intergrasi moda pada simpul transportasi
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	23	Pemanfaatan Big Data dalam Melakukan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas di Jalan Tol	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Herawati	BPTJ	BASTHP, *POLICY BRIEF*	TERIMA HASIL PENELITIAN NOMOR: PL.108/1/23-PTAM-2020	Rekomendasi kebijakan pengembangan transportasi logistik untuk komoditi perikanan di Kota Kupang
	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian									
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan Jembatan ngujang jalan raya Ngantru nomor ruas 089	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Hartono	Dinas Perhubungan Kab. Tulungangung	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat penyampaian Hasil Studi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung No. LT.204/1/1-BLTJ-KA-2021	Rekomendasi kebijakan MRLL pada kawasan Jembatan ngujang jalan raya Ngantru nomor ruas 089
	Pelayanan Transportasi	2	Kajian Kebutuhan Tempat Parkir di Kawasan Industri Cikarang	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Tetty Sulastry M.	Dinas Perhubungan Kab. Bekasi	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris BPTJ No. LT.204/1/5-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan kebutuhan tempat parkir di kawasan industri Cikarang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pengembangan Transportasi di KSPN	3	Kajian Kelayakan Pengoperasian Bus AKAP Kelas Pelayanan Eksekutif Untuk Mendukung Pariwisata di Provinsi NTT	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Fedrickson	Dinas Perhubungan Prov. NTT	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat penyampaian Hasil Studi kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. : LT.204/1/2-BLTJ-KA-2021	Rekomendasi kebijakan dalam Pengoperasian Bus AKAP Kelas Pelayanan Eksekutif Untuk Mendukung Pariwisata di Provinsi NTT
	Pelayanan Transportasi	4	Kajian Biaya Jasa dan Kuota Ojek *Online*	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Reni Puspitasari	Ditjen Hubdat	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan terkait biaya jasa dan kuota ojek *online*
	Pengembangan Transportasi di KSPN	5	Kajian Pengembangan Transportasi Kawasan Strategis Pariwista Nasional di Borobudur	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Reni Puspitasari	Dinas Perhubungan Prov. DIY	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan Pengembangan Transportasi Kawasan Strategis Pariwista Nasional di Borobudur
	Pelayanan Transportasi	6	Kajian Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Emi Septiana	Ditjen Hubdat	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	7	Kajian Keselamatan *Over Dimension Over Load* (ODOL) Dalam Rangka Ketertiban Angkutan Barang Di Jalan	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Abdul Muthalib	Ditjen Hubdat	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Ketua KNKT NO. LT.204/1/4-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan penertiban angkutan barang yang *Over Dimension Over Load* (ODOL) Di Jalan
	Pelayanan Transportasi	8	Kajian Penentuan Potensi Lokasi Pusat Distribusi Dan Pola Distribusi Depo/ Garasi di Kawasan Industri	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Dwi Widiyanti	Ditjen Hubdat	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris BPTJ No. LT.204/1/5-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan terkait Penentuan Potensi Lokasi Pusat Distribusi Dan Pola Distribusi Depo/ Garasi di Kawasan Industri

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	9	Kajian Efektivitas Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis *Buy The Service*	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Siti Nur Fadlilah A.	Ditjen Hubdat	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan penerapan sistem *Buy The Service* pada Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	10	Kajian Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Jalan Nasional Denpasar - Gilimanuk	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Ni Luh Wayan Rita K.	Dinas Perhubungan Prov. Bali	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Ketua KNKT NO. LT.204/1/4-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan keselamatan di ruas jalan Nasional Denpasar - Gilimanuk
	Pelayanan Transportasi	11	*Shifting* Penggunaan Angkutan Umum Ke Kendaraan Pribadi Pada Masa Pandemi COVID-19	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Fadjar Lestari	Ditjen Hubdat	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan dalam rangka antisipasi modal *shifting* dari angkutan umum ke angkutan pribadi
	Pelayanan Transportasi	12	Kajian Potensi Pemudik Angkutan Lebaran Tahun 2020 Berbasiskan *Online* Survei	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Listifadah	Menteri Perhubungan	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Digunakan sebagai bahan penyusunan PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
	Pelayanan Transportasi	13	Persepsi Masyarakat Terhadap Angkutan Lebaran Tahun 2020 Saat Pandemi COVID-19	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Nunuj Nurdjanah	Menteri Perhubungan	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	
	Pelayanan Transportasi	14	Survei Phone Interview (*Re-Call*) Terhadap Pemudik Jabodetabek	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Mutharuddin	Menteri Perhubungan	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	
	Pelayanan Transportasi	15	Pengaruh Penerapan PSBB terhadap Keinginan Mudik Lebaran 2020	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Herawati	Menteri Perhubungan	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	16 Kajian Penggunaan KRL Jabodetabek Pada Saat Kondisi PSBB	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Nunuj Nurdjanah	Menteri Perhubungan	Surat ke Menhub	SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2020	Digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembagian *shift* jam kerja di Jabodetabek
	Konektivitas dan Aksesbilitas	17 Kajian Pengembangan Aksesibilitas Bali Utara-Selatan	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Nunuj Nurdjanah	Dinas Perhubungan Prov. Bali	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan pengembangan aksesibilitas Bali Utara - Selatan dengan Angkutan Massal untuk Menghubungkan Bali Utara-Selatan
	Pelayanan Transportasi	18 Kajian Pergerakan Orang Pada Libur Panjang Maulid Nabi Tahun 2020	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Nunuj Nurdjanah	Menteri Perhubungan	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan dalam rangka MRLL pada libur panjang Maulid Nabi Tahun 2020
	Pelayanan Transportasi	19 Kajian Potensi Pergerakan Perjalanan Angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Nunuj Nurdjanah	Menteri Perhubungan	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan dalam rangka persiapan penyelenggaraan angkutan Nataru
	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan								
	Pelayanan Transportasi	1 Antisipasi Kapal Penumpang dan Barang di Pelabuhan Selama Masa Pandemi Covid - 19	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Drs. Dedy Arianto, Ms. Tr.	Ditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/2/10-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Sistem Transportasi IKN	2	Pengembangan Pelabuhan Umum untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Kawasan Ibu Kota Negara dengan Konsep *Smart City*, *Smart Mobility*	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Dr. Johny Malisan	KSOP Balikpapan	BASTHP	LT.204/2/13-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21
	Sistem Transportasi IKN	3	Kebutuhan Transportasi Laut dari Sulawesi Selatan untuk Mendukung Ibu Kota Negara	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Dr. Paulus Raga	Kepala KSOP Teluk Palu dan Kepala KSOP Balikpapan	BASTHP	LT.204/2/14-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Kebutuhan Transportasi Laut Untuk Mendukung Ibu Kota Negara
	Sistem Transportasi IKN	4	Kebutuhan Transportasi Laut, Sungai, dan Penyeberangan dalam Menunjang Konektivitas dan Aksesibilitas pada Pusat Pemukiman Ibu Kota Negara	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Erna Mei Lestari, S. E., M. Ak	KSOP Balikpapan	BASTHP	LT.204/2/15-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Kebutuhan Transportasi Laut Untuk Mendukung Ibu Kota Negara
	Sistem Transportasi IKN	5	Pengembangan Dermaga Apung (*Floating Berth*) di Ibu Kota Negara	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Teguh Pairunan, S. T., M.M	KSOP Balikpapan	BASTHP	LT.204/2/15-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Kebutuhan Transportasi Laut Untuk Mendukung Ibu Kota Negara
	Konektivitas dan Aksesbilitas	6	Kajian pengembangan *short sea shipping* trayek pelabuhan Ciwandan - Panjang	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Drs. Dedy Arianto, Ms. Tr.	Direktur Kepelabuhanan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/3/11-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan pengembangan *short sea shipping* trayek pelabuhan Ciwandan - Panjang
	Pelayanan Transportasi	7	Perilaku Pengguna jasa dalam pencegahan COVID-19 pada Pelayanan angkutan pada lintasan penyeberangan Merak - Bakauheni	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Feronika	BPTD Merak	BASTHP	LT.204/3/6-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	8	Kajian penanganan bongkar muat barang pada masa pandemi COVID-19 di Pelabuhan Talang Duku Jambi	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Wiwit Trisnawati	Kepala KSOP Jambi	BASTHP	LT.204/3/8-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21
	Pelayanan Transportasi	9	Kajian pemenuhan protokol kesehatan dalam kegiatan turun naik penumpang PELNI di Pelabuhan Batam	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Erna Mei Lestari	KSOP Khusus Batam	BASTHP	LT.204/3/9-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-22
	Konektivitas dan Aksesbilitas	10	Kajian Kebutuhan Armada Kapal Penyeberangan Ferry Ro-Ro Untuk Lintasan Penyeberangan Ketapang - Lembar	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Abdy Kurniawan	Direktur Kepelabuhanan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/3/12-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan Kebutuhan Armada Kapal Penyeberangan Ferry Ro-Ro Untuk Lintasan Penyeberangan Ketapang - Lembar
	Konektivitas dan Aksesbilitas	11	Studi Pengembangan Pelabuhan Sokoi Untuk Menunjang Potensi Kawasan	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Sujarwanto	BPTD Wilayah XII Prov Bali dan Prov NTB	BASTHP	LT.204/3/13-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Pengembangan Pelabuhan Sokoi Untuk Menunjang Potensi Kawasan
	Konektivitas dan Aksesbilitas	12	Pengembangan Rute Pelayanan Penyeberangan Ketapang (Banyuwangi) - Lembar (Lombok)	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Ketut S	BPTD Wilayah XII Prov Bali dan Prov NTB	BASTHP	LT.204/3/14-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Pengembangan Rute Pelayanan Penyeberangan Ketapang (Banyuwangi) - Lembar (Lombok)
	Konektivitas dan Aksesbilitas	13	Kajian Angkutan Penyeberangan untuk Mendukung *Feeder* Tol Laut di Nusa Tenggara Timur	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Feronika	KSOP NTT	BASTHP	LT.204/3/14-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Angkutan Penyeberangan untuk Mendukung *Feeder* Tol Laut di Nusa Tenggara Timur
	Konektivitas dan Aksesbilitas	14	Kajian Pelayanan Penyeberangan untuk Mendukung *Feeder* Tol Laut di Maluku	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Paulus Raga	Sekditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/3/15-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Pelayanan Penyeberangan untuk Mendukung *Feeder* Tol Laut di Maluku
	Konektivitas dan Aksesbilitas	15	Kajian *Demand Pull* dan *Supply Push* Untuk Pelabuhan Pangkal Balam	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Wilmar	KSOP Pangkal Balam	BASTHP	LT.204/3/16-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan *Demand Pull* dan *Supply Push* Untuk Pelabuhan Pangkal Balam

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Konektivitas dan Aksesbilitas	16	Kebutuhan Dukungan Pelayanan Angkutan Sungai Mamberemo	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Paulus Raga	Kepala Dinas Perhubungan Mamberemoraya dan KUPP Sarni	BASTHP	LT.204/3/17-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Kebutuhan Dukungan Pelayanan Angkutan Sungai Mamberemo
	Konektivitas dan Aksesbilitas	17	Rerouting Kapal-Kapal Penyeberangan di Bawah 5000 GT	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Abdi Kurniawan	GAPASDAP	BASTHP	LT.204/3/18-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Rerouting Kapal-Kapal Penyeberangan di Bawah 5000 GT
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	18	Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan DAK Bidang Transportasi Laut	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Dr. Imam Sonny	Sekditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/3/19-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan DAK Bidang Transportasi Laut
	Pelayanan Transportasi	19	Kajian Kriteria *Cluster* Wilayah Pelayanan Tol Laut	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Apri Yuliani	Sekditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/3/20-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Kriteria *Cluster* Wilayah Pelayanan Tol Laut
	Konektivitas dan Aksesbilitas	20	Kajian Kriteria Kawasan Pendukung Hinterland Pelabuhan	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Drs. Dedy Arianto, Ms. Tr.	Sekditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/3/21-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Kriteria Kawasan Pendukung Hinterland Pelabuhan
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	21	Kajian Antisipasi Penanggulangan Pembuangan Limbah Kapal di Laut	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Kamarul	Sekditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/3/22-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Antisipasi Penanggulangan Pembuangan Limbah Kapal di Laut
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	22	Kajian Migasi bencana Hidrometrologi dan Tsunami Sektor Transportasi Laut, SDP	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Dewi Indira	Sekditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/3/23-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Migasi bencana Hidrometrologi dan Tsunami Sektor Transportasi Laut, SDP
	Konektivitas dan Aksesbilitas	23	Kajian Dukungan Distribusi Vaksin Pada Sektor Transportasi Laut, SDP	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Dr. Imam Sonny	Sekditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/3/24-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Dukungan Distribusi Vaksin Pada Sektor Transportasi Laut, SDP
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	24	Kajian Optimalisasi PNBP Pada Tuks dan Tersus	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Edward Marpaung	Sekditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/3/25-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Optimalisasi PNBP Pada Tuks dan Tersus

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Puslitbang Transportasi Udara									
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1	Standar Kesehatan di Sarana dan Prasarana Transportasi Udara dalam Antisipasi Penyebaran Pandemi COVID-19	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	UI	DITANGUD dan DBU	PB, BASTHP	UM.006/2/1-BLTU-2020, KU.003/9/5-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan tentang Standar Sarana dan Prasarana Transportasi udara dalam menghadapi Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	2	Perubahan Perilaku Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Udara sebagai Respon terhadap Pandemi COVID-19	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	UI	DITANGUD	PB, BASTHP	UM.006/2/1-BLTU-2020 KU.003/9/6-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan tentang Standar Sarana dan Prasarana Transportasi udara dalam menghadapi Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	3	Pemodelan Pergerakan Transportasi Penumpang dan Barang dalam Merespon Pandemi COVID-19 di Indonesia	Puslitbang Transportasi Udara	Strategis	ITB	DITANGUD	PB, BASTPH	KU.003/9/2-BLTU-2020	Rekomendasi tentang permodelan pergerakan penumpang angkutan udara selama masa dan pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	4	Model Strategi Pemulihan Bisnis Penerbangan Pasca Pandemi COVID-19	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	UI	DITANGUD	PB, BASTHP	UM.006/2/1-BLTU-2020 KU.003/9/9-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan tentang pemulihan bisnis penerbangan pasca Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	5	Dampak COVID-19 terhadap Resiliensi Kinerja Sektor Penerbangan dan Sektor Lainnya	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	UI	Airline, DITANGUD,	PB, BASTHP	UM.006/2/1-BLTU-2020 KU.003/9/8-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan tentang peningkatan reliansi kinerja sektor penerbangan dan sektor lainnya selama masa/pasca Pandemi COVID-19
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	6	Kesiapan Sarana Prasarana Transportasi dalam Mendukung Distribusi Vaksin COVID19	Puslitbang Transportasi Udara	Studi Kecil (Kajian Strategis)	UI	DITANGUD dan DBU	PB, BASTHP	KU.003/9/25-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan tentang kesiaan sarana prasarana transportasi udara untuk mendukung distribusi Vaksin Coid-19 dalam menghadapi Pandemi COVID-19

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	7	Pelayanan Transportasi dalam Distribusi Logistik Vaksin COVID19	Puslitbang Transportasi Udara	Studi Kecil (Kajian Strategis)	UI	DITANGUD	PB, BASTHP	KU.003/10/1-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan tentang distribusi vaksin transportasi udara dalam menghadapi Pandemi COVID-19
	Pengembangan Transportasi di 3TP	8	Pengembangan Rute Baru Penerbangan Perintis	Puslitbang Transportasi Udara	Studi Kecil (Kajian Strategis)	UI	DITANGUD	PB, BASTHP	KU.003/10/2-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan tentang Rute perintis pada masa dan pasca pandemi COVID-19
	Pengembangan Transportasi di KSPN	9	Mitigasi Dampak Lingkungan akibat Operasi Bandar Udara dan Pengaruh Lingkungan terhadap Operasi Bandar Udara Baru di Provinsi Bali	Puslitbang Transportasi Udara	Studi Kecil (Kajian Strategis)	ITB	DBU	PB, BASTHP	KU.003/10/3-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan tentang mitigasi dampak lingkungan pembangunan Bandar Udara Baru di Provinsi Bali
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	10	Kajian Standar Pemeriksaan Izin Masuk Penumpang ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe I	Lita Yarlina	Dit Kampen	BASTHP	KU.003/9/10-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan daerah keamanan terbatas di bandar udara
	Pelayanan Transportasi	11	Pengaruh Kondisi Meteorologi bagi Perencanaan Jalur Penerbangan	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe I	Dina Yuliana	DNP	BASTHP	KU.003/9/11-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan mengenai informasi meteorologi penerbangan di Indonesia
	Sistem Transportasi IKN	12	Manajemen Angkutan Udara di Ibu Kota Negara Baru	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe I	Dina Yuliana	Dit Angud	BASTHP	KU.003/9/12-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan manajemen penerbangan di IKN
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	13	Kesiapan Indonesia dalam Implementasi Pelatihan Berbasis Upset Prevention and *Recovery Training* (UPRT)	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe I	Minda Mora	DKUPPU	BASTHP	KU.003/9/13-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan pelaksanaan UPRt di Indonesia
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	14	Analisis Kecelakaan Pesawat Udara di Indonesia	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe I	Susanti	DKUPPU	BASTHP	KU.003/9/14-BLTU-2020	Rekomendasi tentang analisis dan penyebab kecelakaan penerbangan di Indonesia

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Sistem Transportasi IKN	15 Manajemen Ruang Udara di atas Ibu Kota Negara Baru	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe I	Harry Yanto	DITNAVPEN	BASTHP	KU.003/9/15-BLTU-2020	Rekomendasi tentang Manajemen ruang udara di IKN
	Pelayanan Transportasi	16 Kajian Awal Pemanfaatan Energi Hibrida di Bandar Udara	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe I	Yati Nurhayati	DBU	BASTHP	KU.003/9/16-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan tentang penggunaan Energi hibrida di bandar udara diIndonesia
	Pengembangan Transportasi di KSPN	17 Harmonisasi Waterbase *Airport* dan Kebutuhan Wisata Kepulauan	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe I	Ali Murtadho	DBU	BASTHP	KU.003/9/17-BLTU-2020	Rekomendasi tentang water base *airport* untuk menunjang tujuan daerah wisata
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	18 Pengaruh Implementasi *Continuous Climb Operation* (CCO) dan *Continuous Descent Operation* (CDO) terhadap Pengurangan Emisi CO2 Pesawat Udara	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe I	Zulaicha	DKUPPU	BASTHP	KU.003/9/18-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan tentang pemakaian/penggunaan emisi gas buang di bandar udara
	Pelayanan Transportasi	19 COVID-19 *Outbreak* dan Dampaknya di Sektor Penerbangan	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe I	Lita Yarlina	DJU, Airline, AP I dan AP II	BASTHP	KU.003/9/1-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi pada saat pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	20 Pemodelan Potensi Dampak Ekonomi dari Pandemi COVID-19 pada Bisnis Penerbangan di Indonesia	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe I	Zulaicha	DJU, Airline, AP I dan AP II	BASTHP	KU.003/9/3-BLTU-2020	Rekomendasi mengenai kebijakan tentang permodelan untuk bisnis penerbangan dalam menghadapi masa dan pasca pandemi COVID-19

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
INTERMEDIATE OUTCOME									
IKP 2 Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan	**Puslitbang Transportasi Antarmoda**								
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1 Efektivitas Pengaturan *Shift* Jam Kerja Terhadap Pola Perjalanan Transportasi di Jabodetabek	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Yuveline Aurora	Satgas Covid Kementerian Perhubungan	FGD, *Policy Brief* Surat Laporan kepada Menteri Perhubungan	SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2020	- SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2020 - DIMANFAATKAN UNTUK ACUAN PENYUSUNAN SURAT EDARAN METERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 4 TAHUN 2020 TENTANG TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID 19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	2 Pola Perjalanan Masyarakat di Wilayah Jabodetabek Sebelum Pandemi, Periode PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Herawati Basirpuli	Satgas Covid Kementerian Perhubungan	FGD, Surat Laporan kepada Menteri Perhubungan	SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2021	- SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2020 - DIMANFAATKAN UNTUK ACUAN PENYUSUNAN SURAT EDARAN METERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 4 TAHUN 2020 TENTANG TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID 19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	3 Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra terhadap Efisiensi Biaya Logistik	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Reslyana Dwitasari	BPTD Wilayah VI Lampung	BASTHP	Telah dilakukan BASTHP dengan Dinas Perhubungan Wakatobi tanggal 7 Desember , NOMOR : PL.108/1/3-PTAM-2020	Dimanfaatkan oleh BPTD Wilayah VI Lampung untuk perencanaan dan pengembangan jalan tol Trans Sumatera untuk mendukung kelancaran arus logistikserta efisiensi biaya logistik
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	4 Efektivitas SIKM, *Rapid Test*, dan *PCR Test* untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 terhadap Perusahaan Operator Transportasi Logistik	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Yessi Gusleni	Satgas Covid Kementerian Perhubungan	*POLICY BRIEF*	SURAT LAPORAN KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN DAN SURAT SERAH TERIMA	Telah dilakukan pembahasan dengan gugus tugas covid 19 pada tanggal 19 Juli 2020 sebagai acuan dalam penerapan SIKM, *Rapid Test*,

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pengembangan Transportasi di KSPN	5 Peningkatan Konektivitas Antarmoda di Wakatobi	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Win Akustia	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara	BASTHP	SURAT SERAH TERIMA PEMANFAATAN STUDI KEPADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAKATOBI NOMOR PL.301/1/1-PTAM-2020	Dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi SulawesiTtennggara dalam pengembangan transportasi antarmoda menuju dari dan ke Kawasan Destinasi Wisata Wakatobi
	Pelayanan Transportasi	6 Integrasi Sistem Angkutan Umum Perkotaan untuk Meningkatkan Peran Perkeretaapian di kawasan Bandung Raya	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Yessi Gusleni	Dinas Perhubungan Kota Bandung Ditjen Perkeretaapian	WEBINAR. *POLICY BRIEF*	TELAH DIKIRIM SURAT KE MENHUB NOMOR:UM.006/14/9-BLT-2020 TENTANG LAPORAN PENUGASAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN INTEGRASI SISTEM ANGKUTAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN	SURAT KEPADA MENHUB NOMOR:UM.006/14/9-BLT-2020 TENTANG LAPORAN PENUGASAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN INTEGRASI SISTEM ANGKUTAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN DIMANFAATKAN DITJEN KERETA API UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRASI ANGKUTAN KERETA API DENGAN MODA ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH BANDUNG RAYA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	7 Integrasi Sistem Angkutan Umum Perkotaan untuk Meningkatkan Peran Perkeretaapian di kawasan Medan, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro)	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe I	Listantari	Dinas Perhubungan Kota Medan Ditjen Perkeretaapian	WEBINAR, *POLICY BRIEF*	TELAH DIKIRIM SURAT KE MENHUB NOMOR:UM.006/14/9-BLT-2020 TENTANG LAPORAN PENUGASAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN INTEGRASI SISTEM ANGKUTAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN	SURAT KEPADA MENHUB NOMOR:UM.006/14/9-BLT-2020 TENTANG LAPORAN PENUGASAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN INTEGRASI SISTEM ANGKUTAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN DIMANFAATKAN DITJEN KERETA API UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRASI ANGKUTAN KERETA API DENGAN MODA ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH MEBIDANGRO
	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian								
	Pelayanan Transportasi	1 Kajian Potensi Pemudik Angkutan Lebaran Tahun 2020 Berbasiskan *Online* Survei	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Listifadah	Menteri Perhubungan	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Digunakan sebagai bahan penyusunan PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
	Pelayanan Transportasi	2 Persepsi Masyarakat Terhadap Angkutan Lebaran Tahun 2020 Saat Pandemi COVID-19	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Nunuj Nurdjanah	Menteri Perhubungan	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	
	Pelayanan Transportasi	3 Survei Phone Interview (*Re-Call*) Terhadap Pemudik Jabodetabek	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Mutharuddin	Menteri Perhubungan	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	4	Pengaruh Penerapan PSBB terhadap Keinginan Mudik Lebaran 2020	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Herawati	Menteri Perhubungan	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	
	Pelayanan Transportasi	5	Kajian Penggunaan KRL Jabodetabek Pada Saat Kondisi PSBB	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Nunuj Nurdjanah	Menteri Perhubungan	Surat ke Menhub	SURAT KEPADA MENHUB NOMOR UM.006/6/11-BLT-2020 PERIHAL LAPORAN SURVEI *ONLINE* EFEKTIVITAS PENGATURAN *SHIFT* JAM KERJA TERHADAP POLA PERJALANAN TRANSPORTASI DI JABODETABEK, TANGGAL 2 JULI 2020	Digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembagian *shift* jam kerja di Jabodetabek
	Konektivitas dan Aksesbilitas	6	Kajian Pengembangan Aksesibilitas Bali Utara-Selatan	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Nunuj Nurdjanah	Dinas Perhubungan Prov. Bali	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan pengembangan aksesibilitas Bali Utara - Selatan
	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan									
	Pelayanan Transportasi	1	Antisipasi Kapal Penumpang dan Barang di Pelabuhan Selama Masa Pandemi Covid - 19	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Drs. Dedy Arianto, Ms. Tr.	Ditjen Perhubungan Laut	PB, Jurnal Laut	LT.204/2/10-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21
	Sistem Transportasi IKN	2	Pengembangan Pelabuhan Umum untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Kawasan Ibu Kota Negara dengan Konsep *Smart City*, *Smart Mobility*	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Dr. Johny Malisan	Ditjen Perhubungan Laut	PB, FGD	LT.204/2/13-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Kebutuhan Transportasi Laut Untuk Mendukung Ibu Kota Negara

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Sistem Transportasi IKN	3 Pengembangan Dermaga Apung (*Floating Berth*) di Ibu Kota Negara	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Teguh Pairunan, S. T., M.M	KSOP Balikpapan	PB, FGD	LT.204/2/15-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Kebutuhan Transportasi Laut Untuk Mendukung Ibu Kota Negara
	Konektivitas dan Aksesbilitas	4 Kajian pengembangan *short sea shipping* trayek pelabuhan Ciwandan - Panjang	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Dedy Arianto	Direktur Kepelabuhanan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	PB, FGD	LT.204/3/11-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan pengembangan *short sea shipping* trayek pelabuhan Ciwandan - Panjang
	Konektivitas dan Aksesbilitas	5 Kajian Angkutan Penyeberangan untuk Mendukung *Feeder* Tol Laut di Nusa Tenggara Timur	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Feronika	KSOP NTT	PB, FGD	LT.204/3/14-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Angkutan Penyeberangan untuk Mendukung *Feeder* Tol Laut di Nusa Tenggara Timur
	Konektivitas dan Aksesbilitas	6 Kajian Pelayanan Penyeberangan untuk Mendukung *Feeder* Tol Laut di Maluku	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Paulus Raga	Sekditjen Perhubungan Laut	PB, FGD	LT.204/3/15-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Pelayanan Penyeberangan untuk Mendukung *Feeder* Tol Laut di Maluku
	Konektivitas dan Aksesbilitas	7 Rerouting Kapal-Kapal Penyeberangan di Bawah 5000 GT	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Abdi Kurniawan	GAPASDAP	PB, FGD	LT.204/3/18-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Rerouting Kapal-Kapal Penyeberangan di Bawah 5000 GT
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	8 Kajian Optimalisasi PNBP Pada Tuks dan Tersus	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola Tipe 1	Edward Marpaung	Sekditjen Perhubungan Laut	PB, Jurnal Intl	LT.204/3/25-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Optimalisasi PNBP Pada Tuks dan Tersus
	Puslitbang Transportasi Udara								
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1 Standar Kesehatan di Sarana dan Prasarana Transportasi Udara dalam Antisipasi Penyebaran Pandemi COVID-19	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	UI	DITANGD dan DBU	PB, BASTHP	UM.006/2/1-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan tentang Standar Sarana dan Prasarana Transportasi udara dalam menghadapi Pandemi COVID-19

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	2	Perubahan Perilaku Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Udara sebagai Respon terhadap Pandemi COVID-19	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	UI	DITANGUD	PB, BASTHP	UM.006/2/1-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi Udara pada masa Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	3	Model Strategi Pemulihan Bisnis Penerbangan Pasca Pandemi COVID-19	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	UI	DITANGUD	PB, BASTHP	UM.006/2/1-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi Udara pada masa Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	4	Dampak COVID-19 terhadap Resiliensi Kinerja Sektor Penerbangan dan Sektor Lainnya	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	UI	Airline, DITANGUD,	PB, BASTHP	UM.006/2/1-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi Udara pada masa Pandemi COVID-19
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	5	Pelayanan Transportasi dalam Distribusi Logistik Vaksin COVID19	Puslitbang Transportasi Udara	Studi Kecil (Kajian Strategis)	UI	DITANGUD	PB, BASTHP	KU.003/10/1-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi Udara pada masa Pandemi COVID-19
	Pengembangan Transportasi di 3TP	6	Pengembangan Rute Baru Penerbangan Perintis	Puslitbang Transportasi Udara	Studi Kecil (Kajian Strategis)	UI	DITANGUD	PB, BASTHP	KU.003/10/2-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi udara pelayanan perintis di Indonesia
	Pengembangan Transportasi di KSPN	7	Mitigasi Dampak Lingkungan akibat Operasi Bandar Udara dan Pengaruh Lingkungan terhadap Operasi Bandar Udara Baru di Provinsi Bali	Puslitbang Transportasi Udara	Studi Kecil (Kajian Strategis)	ITB	DBU	PB, BASTHP	KU.003/10/3-BLTU-2020	Rekomendasi Kebijakan untuk Mitigasi dampak lingkungan pembangunan Bandar Udara Bali Baru

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
INITIAL OUTCOME									
IKP 3 Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya	**Puslitbang Transportasi Antarmoda**								
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	1 Efektivitas Pengendalian Transportasi Sesuai Dengan PM No 18 Tahun 2020, PM No 25 Tahun 2020, dan SE No 4 Tahun 2020 Terhadap Angkutan Logistik	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	ITB Yessi Gusleni	Satgas Covid Kementerian Perhubungan	*Webinar Series, Policy Brief*	Surat Kapuslitbang Transportasi Antarmoda atas nam Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor: UM 006/15/3-BLT-2020 tentang Penyampaian 4 Policy Brif kepada Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perhubungan Udara tanggal 23 Desember 2020	Dimanfaatkan untuk acuan pengendalian angkutan logistik pada masa pandemi covid 19 dan pada masa tatan kebiasaan baru
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	2 Dampak Efektivitas PSBB Transportasi Dalam Mencegah Meluasnya Penyebaran COVID-19 dan Analisa Ketahanan Bisnis Angkutan Barang/Industri Jasa Logistik	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	ITB Listantari	Satgas Covid Kementerian Perhubungan	*Webinar Series, Policy Brief*	Surat Kapuslitbang Transportasi Antarmoda atas nam Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor: UM 006/15/3-BLT-2020 tentang Penyampaian 4 Policy Brif kepada Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perhubungan Udara tanggal 23 Desember 2020	Dimanfaatkan untuk acuan pengendalian angkutan logistik pada masa pandemi covid 19 agar dapat meningkatkan ketahanan bisnis industri jasa logistik

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	3 Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Kinerja Perusahaan Angkutan Barang/Industri Jasa Logistik	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	UI Herma Juniati	Satgas Covid Kementerian Perhubungan	*Webinar Series, Policy Brief*	Surat Kapuslitbang Transportasi Antarmoda atas nam Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor: UM 006/15/3-BLT-2020 tentang Penyampaian 4 Policy Brif kepada Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perhubungan Udara tanggal 23 Desember 2020	Dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi terhadap peningkatan kinerja angkutan barang pada masa pandemi covid 19
	Pengembangan Transportasi Pendukung Logistik	4 Model dan Strategi *Recovery* Industri Jasa Logistik Pasca Pandemi Covid19	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	UGM Yuveline Aurora	Satgas Covid Kementerian Perhubungan	*Webinar Series, Policy Brief*	Surat Kapuslitbang Transportasi Antarmoda atas nam Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor: UM 006/15/3-BLT-2020 tentang Penyampaian 4 Policy Brif kepada Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perhubungan Udara tanggal 23 Desember 2020	Dimanfaatkan untuk memberikan rekomendasi untuk pengembangan model pemulihan industri jasa logistik yang terdampak dan terpapar pandemi covid 19
	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian								
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1 Efektifitas Pemasangan Marka Pengurang Kecepatan di Ruas Jalan Tol (Studi Kasus di Tol Cipali)	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Budi Dwi Hartanto	BPTJ	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Ketua KNKT NO. LT.204/1/4-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan efektifitas marka pengurang kecepatan di ruas jalan Tol

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	2 Evaluasi Perilaku Pengemudi Bus dan Truk Untuk Mengurangi Kecelakaan Akibat Rem Blong	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Budi Dwi Hartanto	Ditjen Hubdat	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Ketua KNKT NO. LT.204/1/4-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan peningkatan keselamatan bus dan truk
	Pelayanan Transportasi	3 Efektifitas Penyelenggaraan Terminal Tipe A	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Hartono	Ditjen Hubdat	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan optimalisasi penyelenggaraan terminal tipe A
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	4 Efektifitas Penyelenggaraan UPPKB	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Siti Rofiah Afriyanah	Ditjen Hubdat	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat No. LT.204/1/6-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan optimalisasi penyelenggaraan UPPKB
	Pelayanan Transportasi	5 Evaluasi penyelenggaraan layanan LRT Perkotaan di Palembang dan Jakarta	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Emi Septiana H.	Ditjen Perkeretaapian	Surat Penyampaian Hasil Studi	Surat Penyampaian Hasil Studi kepada Sekretaris Ditjen Perkeretaapian No. LT.204/1/3-BLTJ-KA-2020	Rekomendasi kebijakan optimalisasi layanan LRT Perkotaan di Palembang dan Jakarta
	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan								
	Pelayanan Transportasi	1 Studi Analisis Dan Evaluasi Dampak Pandemi COVID-19 Pada Subsektor Puslitbang Transportasi Laut, SDP	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe II	Kerjasama ITS (Koordinator : Pak Bambang/ Pak Kamarul)	Ditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/2/7-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21
	Pelayanan Transportasi	2 Studi Efektifitas Pm Nomor 18 Tahun 2020 Dan Pm Nomor 25 Tahun 2020 Guna Menekan Penyebaran COVID-19	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe II	Kerjasama ITS (Koordinator : Pak Bambang/ Pak Kamarul)	Ditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/2/8-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	3 Studi Dampak Kebijakan PSBB Wilayah Jawa Pada Wilayah Di Luar Jawa Melalui Moda Transportasi Laut, SDP	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe II	Kerjasama ITS (Koordinator : Pak Bambang/ Pak Kamarul)	Ditjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/2/9-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21
	Pelayanan Transportasi	4 Potensi Kapal Penyeberangan Kereta Api Ro-ro (Train Ro-ro) Selat Sunda	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Drs. Dedy Arianto, Ms. Tr.	Direktur Transportasi SDP, Ditjen Perhubungan Darat	BASTHP	LT.204/2/11-BLTL-2020	Rekomendasi potensi Kapal Penyeberangan Kereta Api Ro-ro (Train Ro-ro) Selat Sunda
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	5 Penerapan Bahan Bakar yang Ramah Lingkungan Terhadap Mesin Kapal (B20)	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Feronika Sekarpuri, S. Sos., Ms. Tr.	Distrik Navigasi Palembang	BASTHP	LT.204/2/12-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan Penerapan Bahan Bakar yang Ramah Lingkungan Terhadap Mesin Kapal (B20)
	Pelayanan Transportasi	6 Potensi Pembangunan Pelabuhan Khusus di Sarui Kabupaten Aceh Tomiang	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Drs. Sunarto, M. M	KSOP Aceh Tamiang	BASTHP	LT.204/2/16-BLTL-2020	Rekomendasi potensi Pembangunan Pelabuhan Khusus di Sarui Kabupaten Aceh Tomiang
	Pengembangan Transportasi di KSPN	7 Peningkatan Transportasi Air di Danau Rusa Kecamatan XIII Koto Kampar dalam Mendukung Pariwisata	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Drs. Syafril	BPTD wilayah Riau	BASTHP	LT.204/2/17-BLTL-2020	Rekomendasi peningkatan Transportasi Air di Danau Rusa Kecamatan XIII Koto Kampar dalam Mendukung Pariwisata
	Pengembangan Transportasi di KSPN	8 *Conceptual Design Motorized Multipurpose Berge* untuk Menunjang Transportasi dan Pariwisata di Danau Toba	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Abdy Kurniawan, S.T., M. Sc	Kadispar Kab. Samosir dan Kadishub Kab. Samosir	BASTHP	LT.204/2/18-BLTL-2020	Rekomendasi desain Motorized Multipurpose Berge untuk Menunjang Transportasi dan Pariwisata di Danau Toba
	Pelayanan Transportasi	9 Kelayakan Peningkatan Pelabuhan Tanjung Silopo menjadi Pelabuhan Terbuka untuk Pelayaran Internasional	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Ir. Bambang Siswoyo	KUPP Tanjung Silopo	BASTHP	LT.204/2/19-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan kelayakan Peningkatan Pelabuhan Tanjung Silopo menjadi Pelabuhan Terbuka untuk Pelayaran Internasional

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	10	Kajian Tingkat Efektifitas Dan Efisiensi Pelayanan Kapal Penumpang untuk Trayek Nunukan- Tarakan (Pp)	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Sujarwanto, SAP	Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara	BASTHP	LT.204/2/20-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan Efektifitas Dan Efisiensi Pelayanan Kapal Penumpang untuk Trayek Nunukan-Tarakan (Pp)
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	11	Potensi Pengembangan Kantor Kesyahbandaran Utama sebagai BLU	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Dr. Imam Sonny	Syahbandar Tanjung Priok	BASTHP	LT.204/2/22-BLTL-2020	Rekomendasi Potensi Pengembangan Kantor Kesyahbandaran Utama sebagai BLU
	Pengembangan Transportasi di KSPN	12	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam Mendukung Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Likupang	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Drs. Edward Marpaung	KUPP Likupang	BASTHP	LT.204/2/23-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam Mendukung Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Likupang
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	13	Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Laut dan Pantai di Natuna dalam Rangka Mendukung Peningkatan Pengawasan, Keselamatan, dan Keamanan Pelayaran	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Wilmar Jonris, S. E	PLP Natuna dan Dirjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/2/24-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Laut dan Pantai di Natuna dalam Rangka Mendukung Peningkatan Pengawasan, Keselamatan, dan Keamanan Pelayaran
	Pelayanan Transportasi	14	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Penyeberangan Sulawesi Tenggara (Buton)	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Wiwit Trisnawati, S.H	Sekditjen Perhubungan Darat	BASTHP	LT.204/2/25-BLTL-2020	Rekomendasi terkait kebijakan Kepuasan Masyarakat terhadap Kondisi Sarana dan Prasarana di Pelabuhan Penyeberangan Sulawesi Tenggara (Buton)
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	15	Kajian Pemenuhan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam pelayanan angkutan laut penumpang di Pelabuhan Manado pada masa adaptasi kebiasaan baru	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Wilmar J. Siahaan	KSOP Manado dan Dirjen Perhubungan Laut	BASTHP	LT.204/3/2-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi COVID-19

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	16 Kajian Pemenuhan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam pelayanan bongkar muat di Pelabuhan Kuala Tungkal pada masa adaptasi kebiasaan baru	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Dewi Indira	KSOP Jambi	BASTHP	LT.204/3/3-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-20
	Konektivitas dan Aksesbilitas	17 Kajian desain jaringan dan operasi Tol Laut Tahun 2021	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Paulus Raga	KUPP Luwuk dan KUPP Kolonedale	BASTHP	LT.204/3/7-BLTL-2020	Rekomendasi desain jaringan dan operasi tol laut
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	18 Analisis Kinerja TKBM pada masa pandemi COVID-19 di Pelabuhan Makassar	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Johny Malisan	OP Makassar	BASTHP	LT.204/3/10-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21
	Pelayanan Transportasi	19 Evaluasi Penerapan Inaportnet di Pelabuhan Dumai	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Kamarul Hidayat	KSOP Dumai	BASTHP	LT.204/2/21-BLTL-2020	rekomendasi terkait kebijakan evaluasi Penerapan Inaportnet di Pelabuhan Dumai
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Transportasi	20 Dampak dari Pandemi COVID-19 terhadap usaha Angkutan di Danau Toba dan Upaya resiliensi yang perlu dilakukan	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Edward Marpaung	BPTD Sumatera Utara	BASTHP	LT.204/3/1-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	21 Kajian Efektifitas Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pencegahan COVID-19 dalam pelayanan angkutan penyeberangan pada lintas Tj. Siapi-api - Muntok	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Sujarwanto	Kepala BPTD Provinsi Sumatera Selatan	BASTHP	LT.204/3/4-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	22 Kajian Efektifitas Pemenuhan Protokol Kesehatan dalam Pelayanan Kapal Penyeberangan Padang Bai-Lembar.	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Teguh Pairunan	BPTD Wilayah Bali	BASTHP	LT.204/3/5-BLTL-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi LSDP pada masa Pandemi Covid-21

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS		JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
								MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Puslitbang Transportasi Udara									
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1	Analisis Efektivitas Peraturan Sektor Penerbangan terhadap Kebijakan PSBB dan Mitigasi Resiko Penyebaran COVID-19	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	UI	DJU	PB, BASTHP	UM.006/2/1-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi Udara pada masa Pandemi COVID-19
	Pelayanan Transportasi	2	Analisis Skenario Kebijakan Pemulihan Operator Industri Penerbangan dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 di Indonesia	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	ITB	DJU	BASTHP	KU.003/9/4-BLTU-2020	Rekomendasi kebijakan transportasi udara pada masa Pandemi COVID-19
INTERMEDIATE OUTCOME										
IKP 3 Tingkat kemanfaatan hasil kajian evaluasi implementasi program, regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan dukungan kebijakan / standarisasi Iptek dan Sumber Daya Manusianya pada (t-2)	**Puslitbang Transportasi Antarmoda**									
	Pelayanan Transportasi	1	*Review* Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	Yessi Gusleni	Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perkeretaapian	FGD, Surat Laporan kepada Menteri Perhubungan	Surat Kabadan Litbang Perhubungan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan nomor surat UM.007/3/22-BLT-2018 tanggal 20 April 2018.	Hasil studi telah dimanfaatkan untuk pembahasan Rancangan Undang-undang Sistem Transportasi Nasional di tingkat tim pengarah secara *confidential* melalui surat Kabadan Litbang Perhubungan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan nomor surat UM.007/3/22-BLT-2018 tanggal 20 April 2018.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Pelayanan Transportasi	2 Evaluasi Metodologi Dan Uji Coba Survei Pergerakan Orang	Puslitbang Transportasi Antarmoda	Swakelola tipe II	Akhmad Rizal Arifudin	Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perkeretaapian Dinas Perhubungan *Stakeholder* terkait lainnya	Website ATTN	Surat permintaan data hasil survei ATTN dari berbagai pihak dan *stakeholder* terkait yang membutuhkan data ATTN seperti Surat dari Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR Nomor PA0107-WK/96	Data hasil *Survey* Asal Tujuan Transportasi untuk pergerakan orang telah dimanfaatkan, antara lain oleh: Pusat Pengembangan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR telah memanfaatkan data Matrik Asal Tujuan Wilayah Provinsi Papua untuk Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Kota Baru Jayapura, ILF Consulting Enginers, a.n. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan telah memanfaatkan Matrik Asal Tujuan Wilayah Lamongan, Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo untuk pengembangan jaringan perkeretaapian.
	Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian								
	Pelayanan Transportasi	1 Evaluasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 1439 H/2018 Bagi Pengguna Kendaraan Pribadi/Sewa	Puslitbang TJKA	Swakelola tipe I	Nunuj Nurdjanah	Ditjen Perhubungan Darat	BASTHP	LT.106/3/5-BLTD-2018	1. Himbauan pembatasan waktu istirahat di *Rest Area* pada masa Angkutan Lebaran dan Angkutan Nataru guna memberikan kesempatan pada pengendara lain untuk istirahat 2. Penyediaan *Variable Message Sign di Rest Area* sebagai informasi jumlah ketersediaan parkir
	Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan								

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	KELOMPOK ISU STRATEGIS	JUDUL PENELITIAN	SATUAN UNIT KERJA	KELOMPOK PENELITIAN (KAJIAN PERORANGAN/ SWAKELOLA/ KONTRAKTUAL)	NAMA PENELITI	*STAKEHOLDERS*	DISEMINASI (*INITIAL OUTCOME*)		TINDAK LANJUT (*INTERMEDIATE OUTCOME*)
							MEDIA DISEMINASI	SURAT KE MENHUB/ SUB SEKTOR/ *STAKEHOLDERS* (NOMOR SURAT DAN TANGGAL)	JENIS PEMANFAATAN
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1 Stabilitas dan Garis Muat Kapal yang Beroperasi di Danau Toba	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Abdi Kurniawan	Ditjen Hubla	BASTHP	KU.003/1/14-BLTL-2018	Telah dilaksanakan rekomendasi penelitian oleh pemerintah daerah untuk peningkatan keselamatan transportasi Di Danau Toba
	Pengembangan Transportasi di 3TP	2 Kajian Evaluasi Pelayanan Angkutan Laut Perintis	Puslitbang Transportasi LSDP	Swakelola tipe I	Paulus Raga	Ditjen Hubla	BASTHP	KU.003/1/25-BLTL-2018	Sebagai bahan referensi untukpeneliti(Bp Paulua Raga) sebagai pembicara dalam acara Rakernas Ditjen Perhubungan Laut terkait perintis dan tol laut di Bandung,Jogjakarta ,dan Surabaya
	Puslitbang Transportasi Udara								
	Pelayanan Transportasi	1 *Background Study* Tinjau Ulang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan	Puslitbang Transportasi Udara	Kontraktual	Konsultan	Ditjen Perhubungan Udara	BASTHP	KU.003/1/9-BLTU-2018	Rekomendasi masukan untuk revisi Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang diajukan dalam Omnibus law Tahun 2020
	Konektivitas dan Aksesbilitas	2 Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Udara Perintis Penumpang	Puslitbang Transportasi Udara	Swakelola tipe II	Sitti Subekti	DITANGUD	FGD, BASTHP	Nomer: KU.003/1/20-BLTU-2018	Dibuktikan dengan KP 270 Tahun 2019 tentang Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak 9BBM) Pesawat Udara Untuk Kegiatan Angkutan Udara Perintis Penumpang Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN 5

MATRIK PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PADA 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT MAKSIMAL	USULAN NILAI BADAN LITBANG 2020	KEGIATAN 2019-2020	RENCANA AKSI
1.	Area Manajemen Perubahan	Pemenuhan: 2.00 Reform: 3.00	Pemenuhan: 1.80 Reform: 2.75	1. Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 2. Usulan *Roadmap* Badan Litbang Perhubungan Tahun 2017 telah dilaporkan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi (Nomor surat KP.804/1/1-BLT-2017 tanggal 9 Mei 2017 perihal Penyampaian *Roadmap* Badan Litbang Perhubungan) 3. Usulan Qucickwins Badan Litbang Perhubungan melalui surat Sekretaris Badan Litbang Perhubungan Kepada Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Nomor: UM.006/2/22-BLT-2020 tanggal 12 Februari 2020 4. Usulan Agen Perubahan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 melalui surat Sekretaris Badan Litbang Perhubungan Nomor UM.006/23-BLT-2020 tanggal 12 Februari 2020 5. Penetapan Surat Edaran Kepala Badan Litbang Perhubununngan Nomor SE.05 Tahun 2019 tentang Program *Green Office* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan. Tanggal 30 Juli 2019 6. Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Litbang Perhubungan, melalui rapat staf intern yang dipimpin Kepala Badan Litbang Perhubungan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional, sosialisasi reformasi birokrasi, Pelaksanaan Apel pagi setiap hari baik secara langsung maupun menggunkan teknologi selama masa Pandemi COVID-19, kegiatan keagamaan, Pelaksanaan Rapid Tes COVID-19, Pembuatan dan pendistribusian buku saku kode etik pegawai, Penatapan kawasan tanpa rokok, Pembuatan Kantin Kejujuran, pemasangan banner program reformasibirokrasi, pemasangan spanduk, dan melui media sosial (IG dan twiter),	Memperkuat peran Agen Perubahan yang tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu membangun *social control* di antara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT MAKSIMAL	USULAN NILAI BADAN LITBANG 2020	KEGIATAN 2019-2020	RENCANA AKSI
2.	Deregulasi Kebiajakan	Pemenuhan: 1.00 Reform: 2.00	Pemenuhan: 0.50 Reform: 1.00	1. Evaluasi Regulasi di Bidang Angkutan Multimoda untuk mendukung penyelenggaraan angkutan multimoda (*review* PP 8 Tahun 2011 tentang angkutan multimoda dan PM 8 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda 2. *Review* UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. *Review* UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretapian 4. *Policy brief Review* Terhadap UU nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Naskah Akademis) 5. *policy brief Review* Pm18/2020 Dan Pm25/2020: Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 Dan Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah 6. Antisipasi Mudik Lebaran 2020 7. Surat Edaran Nomor: UM.006/A.95/DJKA/20 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Pada Sarana Dan Prasarana Perkeretaapian 8. Surat Edaran Nomor: SE 21 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Transportasi Laut Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) 9. Surat Edaran Nomor: SE.9/AJ.201/DRJD/2020 Tentang Petunjuk Operasional Transportasi Darat Untuk Pelaksananaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Pennaganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) 10. Surat Edaran Nomor: SE 32 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Transportasi Udara Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)	

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT MAKSIMAL	USULAN NILAI BADAN LITBANG 2020	KEGIATAN 2019-2020	RENCANA AKSI
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Pemenuhan: 2.00 Reform: 1.50	Pemenuhan: 2.00 Reform: 1.50	1. *Background Study* Revitalisasi Badan Litbang Perhubungan, dan disampain melaui Surat Kepala Badan Litbang Perhubungan Kepada Menteri Perhubungan Nomor:UM.007/3/20-BLT-2019 2. Penyampaian tugas pokok dan Fungsi Badan Litbang Melalui Surat Sekretaris Badan Litbang Perhubungan HK.006/1/1-BLT-2019 Tanggal 15 November 2019 3. Penyusunan *Roadmap* Penataan organisasi di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan, melalui surat sekretaris Badan Litbang perhubungan nomor: 901/1/1-BLT-2020 tahun 2019 4. Evaluasi organisasi perampingan eselonisasi di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan 5. Evaluasi Transformasi Badan Litbang Perhubungan menjadi Badan Kebijakan Transportasi (Proses)	1. Pengusulan Penataan Organisasi Badan Litbang Perhubungan 2. Transformasi Badan Litbang Perhubungan Menjadi Badan Kebujakan Transportasi (BKT)
4.	Penataan Tatalaksana	Pemenuhan: 1.00 Reform: 3.75	Pemenuhan: 0.95 Reform: 3.42	1. Telah disampaikan Perubahan Peta Proses Bisnis Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan melalui Surat Sekretrais Badan Litbang Perhubungan Kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor KP. 904/1/5-BLT-2019 tanggal 6 September 2019 perihal Penyampaian Revisi Peta proses Bisnis Badan Litbang Perhubungan 2. Penetapan 7 SOP Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019 sesuai dengan Peta Proses Bisnis 3. Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP. 63 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KP. 22 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pengelolaan Layanan Contact Center 151 Badan Litbang Perhubungan 5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KP. 25 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Layanan Contact Center 151 Badan Litbang Perhubungan 6. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan PPID tahun 2019; Laporan Pengelolaan *website* Badan Litbang Perhbungan tahun 2019; Laporan CC Tahun 2019	1. Pemenuhan SOP pada Peta Proses Bisnis 2. Evaluasi dan *Monitoring* SOP

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT MAKSIMAL	USULAN NILAI BADAN LITBANG 2020	KEGIATAN 2019-2020	RENCANA AKSI
6.	Penguatan Akuntabilitas	Pemenuhan: 2.50 Reform: 3.75	Pemenuhan: 2.50 Reform: 2.61	1. SK Tim Penyusun Renstra Balitbanghub 2020-2024 2. Konsep penyelarasan (*cascade*) sasaran dan indikator kinerja Balitbanghub 3. Dokumen konsep Renstra Balitbanghub 2020-2024 4. Reviu Renstra Balitbanghub 2015-2019 5. SK Tim Penyusun PK Balitbanghub 6. Paraf Relasi Persetujuan Pimpinan atas PK Balitbanghub 2020 7. Dokumen PK Eselon I s.d. IV Tahun 2020 8. Pelaksanaan *e-Performance* Tahun 2020 9. Laporan Kinerja 2020 10. SAKIP Badan Litbang 2020	Penetapan Pedoman Penilaian Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, terkait pada capaian perjanjian kinerja
7.	Penguatan Pengawasan	Pemenuhan: 2.20 Reform: 1.95	Pemenuhan: 1.96 Reform: 1.95	1. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020 (Surat Keputusan, Laporan bulanan, surat pernyataan, sosialisasi, public campaign) 2. Penyusuna kegiatan SPIP (menuju level 4) 3. Mendukung kegiatan *Whistle Blowing System* (sosialisasi, *Public campaign*) 4. Pelaksanaan Penanganaan Benturan Kepentingan (Sistem sosialisasi, Public campaign, *monitoring* dan Evaluasi/laporan berkala) 5. Pembangunan Zona Integritas Badan Litbang Perhubungan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) tahun 2019 6. Penyampaian LHKPN dan LHKASN 100%	*Monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System*, dan benturan kepentingan dan inplementasi UKI

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT MAKSIMAL	USULAN NILAI BADAN LITBANG 2020	KEGIATAN 2019-2020	RENCANA AKSI
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemenuhan: 2.50 Reform: 3.75	Pemenuhan: 2.32 Reform: 3.63	1. Standar Pelayanan Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Nomor UM.007/1/1-BLT-2019 tanggal 21 Mei 2019 2. Standar Pelayanan Publikasi Karya Tulis Ilmiah (KTI) Warta Penelitian Perhubungan melalui *Open Journal System* (OJS) Badan Litbang Perhubungan Nomor IP.103/1/1-BLT-2019 tanggal 21 Mei 2019 3. Sistem Manajemen ISO 9001:2015 Perpustakaan Badan Litbang Perhubungan dan Warta Penelitian Perhubungan. 4. Sistem Manajemen ISO 9001:2015 Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkerretaapian 5. Sistem Manajemen ISO 9001:2015 Puslitbang Transportasi Antarmoda 6. Sistem Manajemen ISO 9001:2015 Puslitbang Transportasi Udara 7. Sistem Manajemen ISO 9001:2015 Puslitbang Transportasi LDSP 8. SK Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.29 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Transhub Community 9. SK Kepala Badan Litbang Perhubungan tentang Pengajuan Jurnal Penelitian secara *online* melalui *Open Journal System* Nomor SK.61 Tahun 2019 10. SK Kepala Badan Litbang Perhubungan Nomor KP.22 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang pengaduan masyarakat @balitbanghub151 11. SK Contact Center 12. Media informasi meluli PPID, Media sosial Instagram, twiter, youtube @ balitbanghub151, knowledge sharing program 13. Media pengaduan melalui website (www.balitbanghub.dephub.go.id); media sosial instagram, twitter @balitbanghub151	
	TOTAL	**Pemenuhan: 14.60** **Reform: 21.70** **TOTAL:36.30**	**Pemenuhan: 13.36** **Reform: 18.95** **TOTAL: 32.21**		

LAMPIRAN 6

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO.5 TELP. : (021) 34832942 Website : www.litbangdanpustaka-dephub.go.id
JAKARTA 10110 FAX. : (021) 3440012 Email : puslitdrt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
NOMOR KP. 68 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *QUALITY ASSURANCE*
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk menambah nilai manfaat dari kegiatan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, maka dipandang perlu dibentuk Tim *Quality Assurance*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tentang Pembentukan Tim *Quality Assurance*.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 1 999 Noinor 75 dan Tambahan Leinbaran Negara Nomor 38J l);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 — 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubugnan Nomor KM 42 Tahun 2019 tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbang Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-022.11-0/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM *QUALITY ASSURANCE*.

PERTAMA : Membentuk Tim *Quality Assurance* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim *Quality Assurance* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020.

A. PENGARAH
1. Memberi pengarahan, saran dan informasi kepada Tim *Quality Assurance* sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan;
2. Mengadakan evaluasi secara bertahap atas pelaksanaan tugas Tim *Quality Assurance;*
3. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan kinerja Tim *Quality Assurance;* dan
4. Memantau pelaksanaan kinerja Tim *Quality Assurance*.

B. KETUA/ WAKIL KETUA PELAKSANA
1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi dalam menghimpun laporan dari Tim *Quality Assurance*;
2. Bertanggungjawab terhadap jadwal dan pelaksanaan kegiatan;
3. Bertanggungjawab terhadap manfaat kegiatan strategis; dan
4. Bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan perkembangan seluruh kegiatan.

C. SEKRETARIS

1. Membantu Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan tugas Tim *Quality Assurance*; dan
2. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan perencanaan dan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim *Quality Assurance*.

D. ANGGOTA

1. Menyusun rencana kerja Tim *Quality Assurance;*
2. Melaksanakan koordinasi antar Unit Kerja di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan;
3. Menginventarisir kegiatan yang berpotensi memiliki nilai tambah manfaat;
4. Memastikan kegiatan strategis memiliki maanfaat bagi pihak penerima;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
6. Mengusulkan penyempurnaan/perbaikan kegiatan yang dilaksanakan;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas; dan
8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua/Wakil Ketua Pelaksana.

E. SEKRETARIAT DAN PENUNJANG

1. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung tugas Tim *Quality Assurance*;
2. Melaksanakan kegiatan administrasi lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim *Quality Assurance* kepada Ketua/Wakil Ketua Pelaksana; dan
4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua/Wakil Ketua Pelaksana.

KETIGA : Masa Kerja Tim *Quality Assurance* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan selesai kegiatan – kegiatan yang dipantau.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2020

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610323 198811 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Badan Litbang Perhubungan;
2. Para Kepala Puslitbang Transportasi;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Nomor : KP.68 Tahun 2020
Tanggal : 22 Juli 2020

TIM *QUALITY ASSURANCE*
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

A. Pengarah : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

B. Pelaksana
1. Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian
2. Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi LSDP
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara
3. Sekretaris : Drs. Edward Marpaung, M.M.

C. Anggota :
1. Drs. Win Akustia;
2. Dra. Feronika Sekar Puriningsih, M. MTr.;
3. Lita Yarlina, S.E., M.MTr.;
4. Dina Yuliana, , S.SI., MT.:
5. Chairunnisa, S.Sos., M.A.;
6. Sri Hapsari Winahyu, S.E., M.T.;
7. Ari Widi, S. SiT., M.M.;
8. Tito Yusmar, S.T., M.T., M.Sc.;
9. Wilmar Jonris Siahaan, SE., MM.;
10. Dwi Heriwibowo;

D. Sekretariat dan Penunjang:
1. Gunawan;
2. Farida Susi;
3. Tangguh Wicaksono;
4. Tino Sugiyarto;
5. Anita Sanda Pusparini;
6. Osmi Alina;
7. Puji Iswatiningsih;
8. Rio Angga;
9. Khoirunisa Larasati;
10. Rizky Verry F;
11. Marliza Saharsah;
12. Yoga Cornia;

13. Eko Prasetyanto;
14. Rida Zakiyah;
15. Khusnul Khotimah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2020

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ir. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, M.Sc.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610323 198811 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Badan Litbang Perhubungan;
2. Para Kepala Puslitbang Transportasi;
3. Yang bersangkutan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 | Telp. : (021) 34833061, 34833065 Fax. : (021) 34833061, 34833065 | E-mail : balitbanghub@dephub.go.id Web-site : http://www.balitbanghub.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
Nomor: KP. 76 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PROJECT MANAJEMEN UNIT* UNTUK *PROJECT DELIVERY* DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemantauan Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan program kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan melalui prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik, perlu dibentuk *Project Manajemen Unit* untuk *Project Delivery* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim *Project Manajemen Unit* untuk *Project Delivery* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan tentang Pembentukan Tim *Project Manajemen Unit* untuk *Project Delivery* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 5494;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2011 Nomor 914)
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Litbang Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-022.11-0/2020.

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM *PROJECT MANAJEMEN UNIT* UNTUK *PROJECT DELIVERY* DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020.

PERTAMA : Membentuk Tim *Project Manajemen Unit* untuk *Project Delivery* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim *Project Manajemen Unit* untuk *Project Delivery* Di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020.

A. PENGARAH

1. Memberi pengarahan, saran dan informasi kepada Tim Project Manajemen Unit sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan;
2. Mengadakan evaluasi secara bertahap atas pelaksanaan tugas Tim *Project Manajemen Unit*;

B. PENANGGUNG JAWAB

1. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan *Project Manajemen Unit* untuk *Project Delivery* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020;
2. Memberikan bimbingan dan masukan kepada tim atas pelaksanaan *Project Manajemen Unit* untuk *Project Delivery* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020;
3. Memberikan saran dan masukan serta informasi umum yang diperlukan untuk kelancaran *Project Manajemen Unit* untuk *Project Delivery* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020.

C. TIM PELAKSANA

1. KETUA
   a. Memimpin pelaksanaan *Project Manajemen Unit* untuk *Project Delivery* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020;
   b. Memberikan bimbingan dan masukan kepada tim atas pelaksanaan *Project Manajemen Unit* untuk *Project Delivery* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020;

c. Memberikan saran dan masukan serta informasi umum yang diperlukan untuk kelancaran *Project Manajemen Unit* untuk *Project Delivery* di Lingkungan Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 ;
d. Bertanggungjawab terhadap laporan yang disampaikan.

2. SEKRETARIS
   a. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, dan ekspedisi;
   b. Melaksanakan kegiatan administrasi lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
   c. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan perencanaan dan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim *Project Manajemen Unit* kepada Ketua.

3. ANGGOTA
   a. Menyusun rencana kerja dan target pelaksanaan *Project Manajemen Unit*;
   b. Membuat implementation plan dan disbursement plan berdasarkan target dan sasaran kinerja yang ada di dalam *key performance index* Eselon I dan Eselon II berdasarkan target penyerapan;
   c. Mensinergikan dokmen-dokumen readynes kriteria untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Litbang Perhubungan;
   d. Menyusun laporan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
   e. Memberikan bantuan pelayanan administratif yang meliputi pengetikan laporan;
   f. Bertanggung jawab kepada Ketua *Project Manajemen Unit*.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penyerahan laporan hasil penelitian kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan ketentuan apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 JULI 2020

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610323 198811 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
5. Para Kapuslitbang Transportasi di Badan Litbang Perhubungan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Nomor : KP. 76 TAHUN 2020
Tanggal : 8 JULI 2020

SUSUNAN TIM *PROJECT MANAJEMEN UNIT* UNTUK *PROJECT DELIVERY* DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERHUBUNGAN TAHUN 2020

I. PENGARAH	:	Kepala Badan Litbang Perhubungan
II. PENANGGUNGJAWAB		
Ketua	:	Sekretaris Badan Litbang Perhubungan;
Anggota	:	1. Kapuslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
	:	2. Kapuslitbang Transportasi Udara
III.PELAKSANA		
Ketua	:	Kapuslitbang Transportasi LSDP
Wakil Ketua	:	Kapuslitbang Transportasi Antar Moda
Sekretaris	:	Ir. Mutharuddin, M.Si., M.M.Tr.
Wakil Sekretaris	:	Fardian Ishibi, S.T., M.M.Tr.
Anggota	:	1. Dra. Nurul Azizah ;
		2. Arif Anwar, S.T., M.Sc.
		3. Evi Mastam Kadang, S.T., M.M.
		4. Ferdian Danu Triantono, S.T., M.Sc.
		5. Akhmad Rizal Arifudin, S.Si., M.T.
		6. Agung Wicaksono, S.H.
		7. Yanril Hans Haigman, S.T.
		8. Arbie, S.T.
		9. Ali Murtadlo, S.T.
		10. Susanti, S. PSI.
		11. Dewi Indira Biasane, S.H., M.Si.
		12. Teguh Pairunan Putra, S.T.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 JULI 2020.

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN

UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19610323 198811 2 001

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN KINERJA
BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN TAHUN 2020

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka TimUR. No.5, RT.2/RW.1
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

(021) 34833060
balitbanghub151
@balitbanghub151
balitbanghub@dephub.go.id
balitbanghub.dephub.go.id
@balitbanghub151